



**PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN**



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)

KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR **12** TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang, Pemilihan Umum Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024;
 - b. bahwa agar pembangunan di Kabupaten Pasuruan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mensejahterakan masyarakat, maka perlu menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Daerah periode tahun 2024-2026;
 - c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, mengamanatkan kepada Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagai pedoman bagi pj. Bupati untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

- tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peratumn Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Renvcana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 11 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2027/2022);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Detail tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023;
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 150).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pasuruan;
4. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 3 (tiga) tahun;
5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah Daerah Tahun 2024 – 2026 yang akan digunakan oleh Pj. Bupati sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun;
7. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang

- disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang tugas fungsi dan kewenangannya telah ditetapkan dan diatur berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku;
 10. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANGDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah.
 11. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
 12. Sasaran adalah kondisi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
 13. Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.

Pasal 2

RPD memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 2024 – 2026.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) RPD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) digunakan oleh Pejabat Bupati sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang dituangkan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab	I	PENDAHULUAN
BAB	II	GAMBARAN UMUM
BAB	III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB	IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB	V	TUJUAN DAN SASARAN
BAB	VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS
BAB	VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB	VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB	IX	PENUTUP

Pasal 4

- (1) RPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berfungsi sebagai :
 - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
 - b. pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pasuruan; serta
 - c. acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD.
- (2) Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program sebagaimana dituangkan dalam RPD, dan menjabarkannya dalam Renstra PD Tahun 2024 – 2026;
- (3) RPD dapat juga menjadi acuan bagi masyarakat dan swasta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan perundangan;
- (4) RPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPD bersifat indikatif.
- (2) Perubahan terhadap target dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) setiap tahun pelaksanaan, disampaikan oleh kepala Bappelitbangda kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.
- (3) Termasuk dalam perubahan yang disampaikan pada Ayat (2) adalah proyek strategis kabupaten.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Ayat (3) dituangkan dalam RKPD Kabupaten Pasuruan, dengan terlebih dahulu dilakukan Telaah dan Evaluasi ketercapaian.

Pasal 6

- (1) Bupati menugaskan BAPPELITBANGDA menyusun, menganalisa dan merumuskan konsep perencanaan makro dari Proyek Strategis yang tertuang dalam RPD melalui pendekatan :
 - a. Perencanaan penganggaran berbasis program (money follow program) atau penganggaran berbasis kinerja;
 - b. Sinkronisasi dan optimalisasi hasil perencanaan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial;
 - c. Kerangka regulasi melalui sinergi proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional; serta
 - d. Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi melalui pengintegrasian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau swasta dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh masyarakat.
- (2) Konsep perencanaan makro sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan tahapan sinkronisasi dengan PD terkait sebagai pendukung, berdasarkan Renstra PD yang telah disusun dan ditetapkan.

- (3) Konsep perencanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tersebut dituangkan dalam matrik perencanaan pembangunan tahunan pada RKPD tahun berjalan.
- (4) Tata Cara, mekanisme penyusunan konsep perencanaan makro dari Proyek Strategis ini dalam RKPD sebagaimana dimaksud Ayat (3), diatur dalam Peraturan khusus tersendiri.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Paragraf 1

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten

Pasal 7

- (1) Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
 - b. konsistensi antara RPD dengan RPJPD dan RTRW Kabupaten Pasuruan;
 - c. konsistensi antara RKPD dengan RPD; dan
 - d. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (2) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi:
 - a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala Bappelitbangda bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Kepala PD bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026.

Paragraf 1

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten

Pasal 9

- (1) Kepala BAPPELITBANGDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf b secara berkala sesuai prosedur dan tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundangan.
- (2) Evaluasi Pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD.

- (3) Dalam hal evaluasi hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui kepala BAPPELITBANGDA menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala PD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui kepala BAPPELITBANGDA.

Pasal 10

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mencakup program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Paragraf 2

Evaluasi terhadap Hasil Rencana pembangunan Daerah

Pasal 11

- (1) Kepala BAPPELITBANGDA melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf c.
- (2) Evaluasi terhadap hasil RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPD.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun masa RPD dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 12

- (1) RPD dapat dilakukan perubahan, apabila :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting; atau
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan.

- (2) Perubahan RPD dapat dikecualikan tanpa pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi perubahan kebijakan Nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundangan yang lebih tinggi.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Dalam hal masa jabatan Bupati berakhir dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka dokumen perencanaan daerah untuk masa 1 (satu) tahun ke depan dapat mengacu pada program kegiatan subkegiatan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dan sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Maret 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 12

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	7
DAFTAR GRAFIK.....	11
DAFTAR GAMBAR.....	15
DAFTAR TABEL	17
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 DASAR HUKUM	I-2
1.3 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA	I-5
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-6
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	I-1
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis	II-2
2.1.1.3 Topografi.....	II-3
2.1.1.4 Geologi.....	II-4
2.1.1.5 Hidrologi	II-8
2.1.1.6 Klimatologi.....	II-12
2.1.1.7 Penggunaan Lahan.....	II-13
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-16
2.1.3 Wilayah Potensi Rawan Bencana	II-17
2.1.3.1 Potensi Kerawanan Bencana Alam.....	II-17
2.1.3.2 Potensi Kerawanan Bencana Non Alam	II-20
2.1.3.3 Kejadian Bencana	II-20
2.1.4 ASPEK DEMOGRAFI	II-21
2.1.4.1 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	II-21
2.1.4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk	II-23
2.1.4.3 Distribusi atau Persebaran Penduduk	II-23
2.1.4.4 Komposisi dan Populasi Masyarakat	II-24
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-26
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-27
2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	II-27
2.2.1.2 Laju Inflasi.....	II-30
2.2.1.2 Persentase Penduduk Miskin	II-31
2.2.1.3 Indeks Kesalehan Sosial.....	II-32
2.2.1.4 Indeks Ketimpangan Wilayah (Indeks Williamson)	II-33
2.2.1.5 Indeks Reformasi Birokrasi	II-34
2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	II-36
2.2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	II-37
2.2.1.8 Indeks Gini	II-38
2.2.1.9 Pendapatan Perkapita	II-40
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-40
2.2.2.1 Pendidikan.....	II-40
2.2.2.2 Kesehatan.....	II-42

2.2.2.3	Tenaga Kerja	II-43
2.2.2.4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-44
2.2.2.5	Pangan.....	II-45
2.2.2.6	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-46
2.3	ASPEK DAYA SAING.....	II-47
2.3.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-48
2.3.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita.....	II-48
2.3.1.2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita	II-49
2.3.1.3	Produktivitas Total Daerah.....	II-49
2.3.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-50
2.3.2.1	Sarana Prasarana Transportasi	II-50
2.3.2.2	Jaringan Listrik.....	II-51
2.3.2.3	Ketersediaan Air Baku.....	II-51
2.3.3	Fokus Iklim Berinvestasi	II-51
2.3.4	Fokus Sumber Daya Manusia	II-52
2.4	ASPEK PELAYANAN UMUM.....	II-52
2.4.1	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	II-52
2.4.1.1	Pendidikan.....	II-52
2.4.1.2	Kesehatan.....	II-55
2.4.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-60
2.4.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-63
2.4.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-65
2.4.1.6	Sosial.....	II-68
2.4.2	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	II-70
2.4.2.1	Tenaga Kerja	II-70
2.4.2.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-71
2.4.2.2	Pangan.....	II-72
2.4.2.4	Pertanahan	II-74
2.4.2.5	Lingkungan Hidup	II-74
2.4.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-76
2.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-77
2.4.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-78
2.4.2.9	Perhubungan	II-79
2.4.2.10	Komunikasi dan Informatika	II-81
2.4.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	II-82
2.4.2.12	Penanaman Modal.....	II-83
2.4.2.13	Kepemudaan dan Olahraga	II-84
2.4.2.14	Statistik	II-85
2.4.2.15	Persandian.....	II-85
2.4.2.16	Kebudayaan	II-86
2.4.2.17	Perpustakaan.....	II-86
2.4.2.18	Kearsipan.....	II-87
2.4.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	II-88
2.4.3.1	Kelautan dan Perikanan	II-88
2.4.3.2	Pariwisata	II-90
2.4.3.3	Pertanian	II-92
2.4.3.4	Perdagangan	II-100
2.4.3.5	Perindustrian	II-101

2.4.4	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-103
2.4.4.1	Perencanaan	II-103
2.4.4.2	Keuangan.....	II-103
2.4.4.3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	II-105
2.4.4.4	Penelitian dan Pengembangan.....	II-106
2.4.4.5	Pengawasan	II-106
2.4.4.6	Sekretariat Dewan.....	II-107
2.4.4.7	Sekretariat Daerah.....	II-108
2.5	Kerjasama Daerah.....	II-109
2.6	Realisasi Bantuan CSR (Corporate Social Responsibility)	II-110
2.7	BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah	II-110
2.8	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II-111
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH		III-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-1
3.1.1.1	Pendapatan Daerah.....	III-5
3.1.1.2	Belanja Daerah	III-8
3.1.1.3	Pembiayaan Daerah	III-11
3.1.2	Neraca Daerah	III-13
3.1.2.1	Aset	III-17
3.1.2.2	Kewajiban	III-17
3.1.2.3	Ekuitas Dana.....	III-18
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-20
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-20
3.2.1.1	Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja.....	III-20
3.2.1.2	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur.....	III-24
3.2.2	Analisis Pembiayaan	III-24
3.3	Kerangka Pendanaan	III-26
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja.....	III-26
3.3.1.1	Kebijakan Pendapatan Daerah	III-30
3.3.1.2	Kebijakan Belanja Daerah	III-31
3.3.1.3	Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-33
3.3.2	Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-34
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....		IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Pasuruan.....	IV-1
4.2	Isu Strategis.....	IV-7
4.2.1	Isu Strategis Internasional	IV-7
4.2.1.1	Sustainable Development Goals	IV-7
4.2.1.2	Pandemi Covid-19 dan Ancaman Resesi Ekonomi.....	IV-11
4.2.2	Isu Strategis Nasional	IV-21
4.2.2.1	Visi Indonesia 2045.....	IV-21
4.2.2.2	RPJMN 2020-2024	IV-25
4.2.2.3	Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya -Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan	IV-27
4.2.3	Isu Regional dan Daerah	IV-30

4.2.3.1	Isu Regional Provinsi Jawa Timur.....	IV-30
4.2.3.2	Isu Regional Kabupaten Pasuruan.....	IV-30
BAB V TUJUAN DAN SASARAN.....		V-1
5.1	Analisis Keselarasan antar Dokumen Perencanaan	V-1
5.1.1	Analisis Dokumen RPJPN Tahun 2005 – 2025.....	V-1
5.1.2	Analisis Dokumen RPJMN Tahun 2020 – 2024.....	V-1
5.1.3	Analisis Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024	V-2
5.1.4	Analisis Dokumen RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 – 2025	V-3
5.1.5	Analisis Dokumen RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029	V-6
5.2	Perumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah.....	V-8
5.2.1	TUJUAN 1: Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah	V-8
5.2.2	TUJUAN 2: Meningkatkan Kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.....	V-10
5.2.3	TUJUAN 3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi....	V-11
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS.....		VI-1
6.1	STRATEGI PEMBANGUNAN	VI-1
6.2	ARAH KEBIJAKAN	VI-4
6.3	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	VI-7
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....		VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH		VIII-1
8.1	Indikator Kinerja Utama.....	VIII-1
8.2	Indikator Kinerja Daerah.....	VIII-2
BAB IX PENUTUP		IX-1

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Jumlah Curah Hujan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 ..	II-13
Grafik 2.2	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-23
Grafik 2.3	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022	II-27
Grafik 2.4	Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022....	II-28
Grafik 2.5	Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022	II-29
Grafik 2.6	Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-30
Grafik 2.7	Laju Inflasi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II-31
Grafik 2.8	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022	II-32
Grafik 2.9	Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-33
Grafik 2.10	Indeks Kesenjangan Wilayah (Indeks Williamson) Tahun 2018-2022.....	II-34
Grafik 2.11	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-35
Grafik 2.12	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II-37
Grafik 2.13	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2018-2022...	II-37
Grafik 2.14	Indeks Gini Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II-39
Grafik 2.15	Pendapatan Perkapita Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022	II-40
Grafik 2.16	Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-41
Grafik 2.17	Harapan Sekolah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-41
Grafik 2.18	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-42
Grafik 2.19	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-43
Grafik 2.20	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-44
Grafik 2.21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-44
Grafik 2.22	Persentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2020	II-45
Grafik 2.23	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	II-45

Grafik 2.24	Angka Kecukupan Gizi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-46
Grafik 2.25	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2020.....	II-47
Grafik 2.26	Jumlah Atlit dan Pemuda Berprestasi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-47
Grafik 2.27	Indeks Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-54
Grafik 2.28	Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-54
Grafik 2.29	Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-55
Grafik 2.30	Indeks Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-57
Grafik 2.31	Prevalensi Stunting di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-58
Grafik 2.32	Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-58
Grafik 2.33	Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-59
Grafik 2.34	Indeks Ketahanan Air di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-61
Grafik 2.35	Indeks Aksesibilitas Wilayah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-62
Grafik 2.36	Panjang Jalan Mantap di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-63
Grafik 2.37	Indeks Permukiman Layak Huni di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022.....	II-65
Grafik 2.38	Persentase Pelanggaran PERDA dan Penurunan Pelanggaran PERDA di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022	II-67
Grafik 2.39	Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-67
Grafik 2.40	Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-68
Grafik 2.41	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat PMKS di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-69
Grafik 2.42	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022	II-69
Grafik 2.43	Persentase Pencari Kerja yang Lulus Uji Kompetensi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022	II-71
Grafik 2.44	Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-72
Grafik 2.45	Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022.....	II-73
Grafik 2.46	Rasio Ketersediaan Pangan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-73
Grafik 2.47	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-75

Grafik 2.48	Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022.....	II-77
Grafik 2.49	Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022.....	II-78
Grafik 2.50	Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Aktif di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-79
Grafik 2.51	Indeks Konektivitas Wilayah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-80
Grafik 2.52	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022.....	II-81
Grafik 2.53	Jumlah Omset Usaha Mikro dan Koperasi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022	II-82
Grafik 2.54	Nilai Investasi yang terealisasi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-84
Grafik 2.55	Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-87
Grafik 2.56	Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-88
Grafik 2.57	Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-89
Grafik 2.58	Produksi Garam di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-90
Grafik 2.59	Produktivitas Garam di Kabupaten Pasuruan 2018-2022.....	II-90
Grafik 2.60	PDRB Sub Sektor Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-93
Grafik 2.61	Produktivitas Hortikultura Tanaman Kentang dan Paprika di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022	II-95
Grafik 2.62	Produktivitas Hortikultura Buah Durian, Mangga dan Apel di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-96
Grafik 2.63	Produktivitas Hortikultura Bunga Sedap Malam dan Bunga Krisan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-97
Grafik 2.64	PDRB Sub Sektor Perkebunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-97
Grafik 2.65	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022	II-98
Grafik 2.66	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022	II-100
Grafik 2.67	Indeks Daya Beli di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022.....	II-101
Grafik 2.68	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022	II-102
Grafik 2.69	Nilai Produksi Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022	II-102
Grafik 2.70	Nilai SAKIP Perencanaan Tahun 2018-2022.....	II-103
Grafik 2.71	Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	

	Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2022	II-106
Grafik 2.72	Nilai SAKIP Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-108
Grafik 2.73	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-109
Grafik 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	III-5
Grafik 3.2	Proporsi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	III-6
Grafik 3.3	Proporsi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	III-7
Grafik 3.4	Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	III-7
Grafik 3.5	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022	III-8
Grafik 3.6	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	III-9
Grafik 3.7	Realisasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Dan Belanja Transfer Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	III-10
Grafik 3.8	Proporsi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Dan Belanja Transfer Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	III-11
Grafik 3.9	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	III-12
Grafik 3.10	Realisasi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	III-12
Grafik 3.11	Rincian Aset Kabupaten Pasuruan Tahun 2017-2020	III-17
Grafik 3.12	Kewajiban Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017-2020.....	III-18
Grafik 3.13	Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017-2021	III-19

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasuruan .	II-1
Tabel 2.2	Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibu Kota Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun	II-4
Tabel 2.3	Sungai di Kabupaten Pasuruan	II-9
Tabel 2.4	Jumlah Sumber Air dan Debit yang dapat dimanfaatkan di Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015	II-10
Tabel 2.5	Suhu Udara dan Kelembaban Udara di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022	II-12
Tabel 2.6	Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2013	II-13
Tabel 2.7	Persebaran Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan ...	II-15
Tabel 2.8	Kejadian Kebakaran di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022	II-20
Tabel 2.9	Kejadian Bencana di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022....	II-20
Tabel 2.10	Jumlah dan Struktur Umur Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022	II-21
Tabel 2.11	Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022 (Jiwa/Km ²)	II-22
Tabel 2.12	Persebaran Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022	II-23
Tabel 2.13	Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022	II-24
Tabel 2.14	Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022	II-25
Tabel 2.15	Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022	II-26
Tabel 2.16	Komposisi Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022	II-26
Tabel 2.17	Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022	II-31
Tabel 2.18	Rincian Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasuruan Tahun 2022	II-35
Tabel 2.19	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022	II-36
Tabel 2.20	Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022	II-43
Tabel 2.21	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022	II-48
Tabel 2.22	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022	II-49
Tabel 2.23	Produktivitas Total Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022	II-49
Tabel 2.24	Angka Kriminalitas di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018- 2022	II-51
Tabel 2.25	Rasio Lulusan S1/S2/S3 dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022	II-52

Tabel	2.26	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2018-2022	II-53
Tabel	2.27	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2018-2022.....	II-56
Tabel	2.28	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2022.....	II-60
Tabel	2.29	Standar Pelayanan Minimal Bidang Jalan di Indonesia	II-62
Tabel	2.30	Kondisi Jalan di Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-63
Tabel	2.31	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum Tahun 2018-2022	II-64
Tabel	2.32	Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2022	II-66
Tabel	2.33	Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2018-2022	II-68
Tabel	2.34	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018-2022..	II-70
Tabel	2.35	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2022	II-71
Tabel	2.36	Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2018-2022	II-72
Tabel	2.37	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2018-2022....	II-74
Tabel	2.38	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022.....	II-74
Tabel	2.39	Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2022.....	II-76
Tabel	2.40	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2022	II-77
Tabel	2.41	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2022.....	II-79
Tabel	2.42	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2018-2022.....	II-80
Tabel	2.43	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2022.....	II-81
Tabel	2.44	Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018-2022	II-82
Tabel	2.45	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2018-2022.....	II-83
Tabel	2.46	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018-2022.....	II-84
Tabel	2.47	Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2018-2022.....	II-85
Tabel	2.48	Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2018-2022	II-85
Tabel	2.49	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2018-2022...	II-86
Tabel	2.50	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2018-2022.....	II-86
Tabel	2.51	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2018-2022.....	II-87
Tabel	2.52	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022.....	II-88
Tabel	2.53	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2019-2022.....	II-91
Tabel	2.54	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2018-2022.....	II-92
Tabel	2.55	Produktivitas Tanaman Pangan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-93

Tabel 2.56	Produktivitas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	II-98
Tabel 2.57	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2018-2022.....	II-100
Tabel 2.58	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2018-2022.....	II-101
Tabel 2.59	Capaian Kinerja Unsur Perencanaan Tahun 2018-2022..	II-103
Tabel 2.60	Capaian Kinerja Unsur Keuangan Tahun 2018-2022	II-103
Tabel 2.61	Capaian Kinerja Unsur Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018-2022.....	II-105
Tabel 2.62	Capaian Kinerja Unsur Penelitian dan Pengembangan Tahun 2018-2022.....	II-106
Tabel 2.63	Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Tahun 2018-2022...	II-107
Tabel 2.64	Capaian Kinerja Unsur Sekretariat Dewan Tahun 2018-2022.....	II-107
Tabel 2.65	Capaian Kinerja Unsur Sekretariat Daerah Tahun 2018-2022.....	II-108
Tabel 2.66	Realisasi Bantuan CSR di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022.....	II-110
Tabel 2.67	Kinerja Pelayanan PDAM “Giri Nawa Tirta” Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2022.....	II-110
Tabel 2.68	Capaian Indikator Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022	II-112
Tabel 2.69	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022	II-123
Tabel 2.70	Realisasi Indikator Kinerja Kunci <i>Outcome</i> Urusan Perangkat Daerah Tahun 2018-2022	II-131
Tabel 3.1	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018 s/d Tahun 2022 Kabupaten Pasuruan.....	III-2
Tabel 3.2	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017-2020	III-14
Tabel 3.3	Analisa Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017-2022.....	III-19
Tabel 3.4	Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2022.....	III-22
Tabel 3.5	Analisa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022	III-24
Tabel 3.6	Surplus (Defisit Riil) Anggaran Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	III-25
Tabel 3.7	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.....	III-25
Tabel 3.8	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024 s/d Tahun 2026 Kabupaten Pasuruan	III-27
Tabel 3.9	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan ...	III-34
Tabel 4.1	Permasalahan Pembangunan.....	IV-1
Tabel 4.2	Proyeksi Pertumbuhan Beberapa Negara	IV-17

Tabel 5.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.....	V-2
Tabel 5.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026	V-14
Tabel 6.1	Strategi Pembangunan.....	VI-2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	VI-5
Tabel 6.3	Program Prioritas Pembangunan Daerah	VI-8
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah.....	VII-3
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.....	VIII-1
Tabel 8.2	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.....	VIII-3
Tabel 8.3	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026	VIII-29
Tabel 8.4	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026	VIII-35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-6
Gambar 1.2	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah	I-6
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Pasuruan	II-1
Gambar 2.2	Kondisi Topografi Wilayah Kabupaten Pasuruan	II-5
Gambar 2.3	Kondisi Jenis Tanah di Wilayah Kabupaten Pasuruan	II-6
Gambar 2.4	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pasuruan	II-14
Gambar 2.5	Peta Kondisi Kerawanan terhadap Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Pasuruan	II-18
Gambar 2.6	Peta Ancaman Kekeringan Kabupaten Pasuruan	II-19
Gambar 2.7	Peta Sebaran Pendapatan Perkapita Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022	II-39
Gambar 4.1	Tujuh Belas Sustainable Development Goals	IV-8
Gambar 4.2	Keterkaitan 4 Pilar dengan 17 Tujuan Sustainable Development Goals	IV-10
Gambar 4.3	Tren Harga Minyak Mentah	IV-12
Gambar 4.4	Perkembangan Covid-19 dan Vaksinasi di Indonesia	IV-13
Gambar 4.5	Jumlah Kasus COVID-19 harian berdasarkan Benua, 29 November 2021	IV-14
Gambar 4.6	Tingkat vaksinasi COVID-19 per 21 Nov 2021	IV-14
Gambar 4.7	Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara	IV-16
Gambar 4.8	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	IV-19
Gambar 4.9	Visi dan Misi RPJMN 2020-2024	IV-26
Gambar 4.10	Target Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju	IV-26
Gambar 4.11	Peta Kawasan prioritas Gerbangkertasusila	IV-28
Gambar 4.12	Peta Lokasi Program di Kawasan Prioritas Gerbangkertasusila	IV-29
Gambar 5.1	Keselarasn Penetapan Tujuan 1 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024-2026 dengan Misi pada RPJPD Kabupaten Pasuruan 2025-2025	V-9
Gambar 5.2	Keselarasn (<i>cascading</i>) Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Pasuruan 2024-2025 beserta indikator kinerja	V-10
Gambar 5.3	Keselarasn Penetapan Tujuan 2 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024-2026 dengan Misi pada RPJPD Kabupaten Pasuruan 2025-2025	V-11
Gambar 5.4	Keselarasn (<i>cascading</i>) Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Pasuruan 2024-2025 beserta indikator kinerja	V-11
Gambar 5.5	Keselarasn Penetapan Tujuan 3 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024-2026 dengan Misi pada RPJPD Kabupaten Pasuruan 2025-2025	V-12

Gambar 5.6 Keselarasan (cascading) Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Pasuruan 2024-2025 beserta indikator kinerja V-13

Gambar 6.1 Arah Kebijakan Tahunan Rencana Pembangunan Daerah..... VI-6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pelaksanaan pembangunan daerah harus mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang terdiri dari dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD), dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan dokumen perencanaan pembangunan tahunan (RKPD). Dimana dokumen RPJPD disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, sedangkan dokumen RPJMD disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala daerah terpilih sebagai acuan atau pedoman pelaksanaan pembangunan daerah dalam masa jabatannya.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2023 Pemerintah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, maka bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Kepala daerahnya berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diinstruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 – 2026.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5847 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Pasuruan Provinsi Jawa Timur, masa jabatan Bupati Pasuruan berakhir pada tanggal 5 September 2023. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan berdasarkan Instruksi Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 menyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ini akan digunakan oleh Pj. Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD, yang lebih lanjut akan

menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA – PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 disusun dengan memperhatikan : (1) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024; (2) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pasuruan sampai dengan Tahun 2025; (3) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023; (4) RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024; (5) Isu-isu strategis yang berkembang baik tingkat regional, nasional maupun global; (6) Kebijakan nasional; dan (7) Regulasi yang berlaku.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026, adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

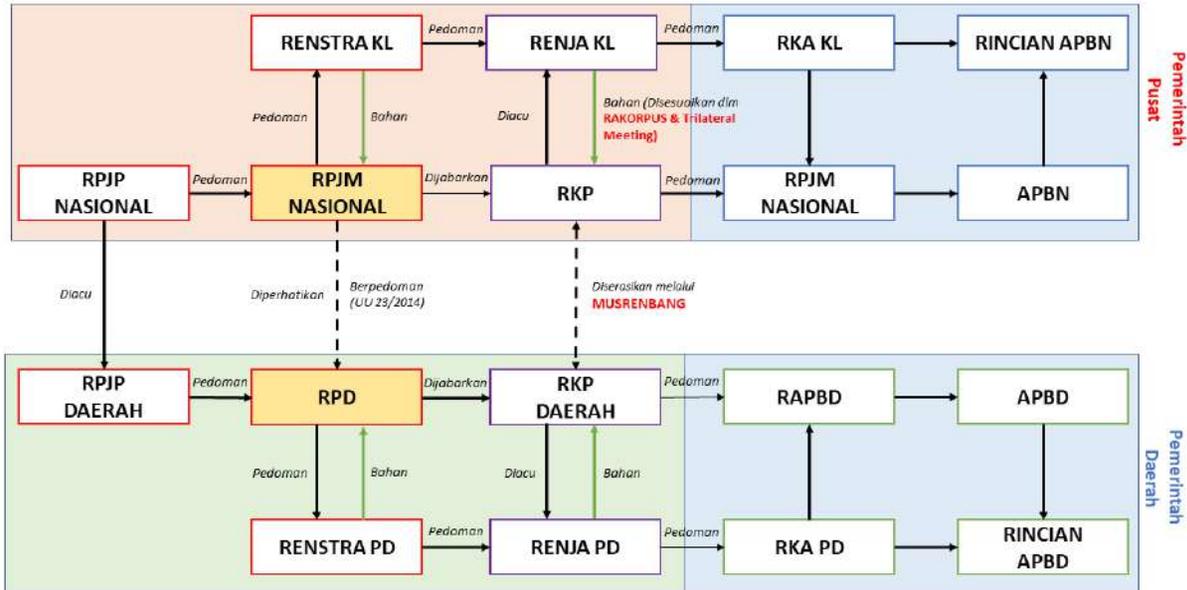
- Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 15) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 - 16) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 - 17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 - 18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2, Seri D);
 - 19) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 2);

- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12).

1.3 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA

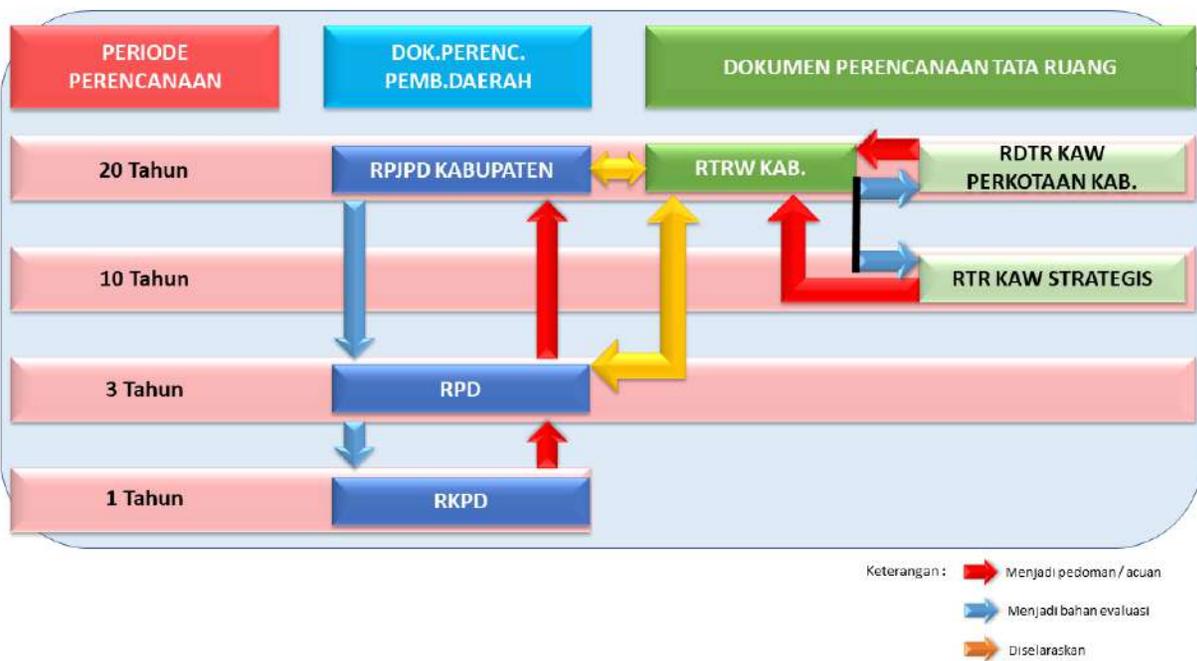
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementrian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga. Sebagai upaya mewujudkan perencanaan nasional tersebut, maka dibutuhkan perencanaan pembangunan tingkat daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan RPD Tahun 2024 – 2026 harus berpedoman pada RPJMN Tahun 2020 - 2024, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2029 – 2024, RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 – 2025 dan RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029. Hal ini dimaksudkan agar RPD yang disusun tidak bertentangan dan selaras dengan perencanaan yang sudah disusun dan diundangkan. Keterkaitan antara dokumen RPJPD Kabupaten Pasuruan dengan dokumen RPD Kabupaten Pasuruan, serta ketekaitannya dengan dokumen perencanaan pembangunan provinsi dan nasional, agar tercapai sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada tahap yang lebih operasional RPD akan diacu dan dipedomani pada penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKPD) yang akan menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD beserta rinciannya (RKA-SKPD). Keterkaitan antar dokumen perencanaan dimaksud sebagaimana dalam gambar 1.1.



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2018



Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 adalah untuk memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha/swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 adalah :

1. Memberikan penjabaran visi misi RPJPD Kabupaten Pasuruan ke dalam perencanaan strategis, yaitu penjabaran ke dalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan untuk digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan dan pembangunan daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
2. Menyediakan pedoman bagi Perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2024 – 2026, agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPD;
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan (RKPD) berupa program beserta target dan pagu indikatifnya, sebagai bahan penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD; dan
4. Menyediakan instrument sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 sebagaimana Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RPD dan mengapa RPD harus disusun.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan uraian singkat tentang dasar hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan RPD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Menjelaskan tentang kedudukan dan hubungan dokumen RPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RPD bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota

1.5. Sistematika Penulisan

Menjelaskan secara ringkas sistematika penyusunan RPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap babnya.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Menjelaskan secara singkat tentang potensi maupun permasalahan terkait kondisi geografi dan demografi Kabupaten Pasuruan.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan secara singkat tentang capaian kinerja pemerintah daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pengangguran, ketenaga kerjaan, ekonomi, kemiskinan dan lain-lain.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan secara singkat tentang potensi daya saing yang dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan baik dari segi SDM, SDA maupun infrastruktur yang dapat digunakan sebagai modal pembangunan.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan secara singkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam memberikan pelayanan dan menyediakan sarana prasarana dasar bagi masyarakat, serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi.

2.5. Aspek Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Menjelaskan secara singkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam memenuhi target pelayanan minimal yang harus disediakan dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, beserta permasalahan dan tantangan yang dihadapi.

BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Memberikan diskripsi kinerja keuangan daerah atau realisasi APBD pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dan proyeksi keuangan daerah tahun 2024 – 2026.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Memuat analisa permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis baik pada tataran global, nasional, regional/provinsi, maupun lokal kabupaten.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Memuat pernyataan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah tahun 2024 – 2026, serta cascading kinerja mulai dari tujuan, sasaran sampai dengan outcome dan indikator kinerja serta target kinerja masing-masing indikator.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Memuat strategi pembangunan yang direncanakan pada tahun 2024 – 2026, strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran berupa arah kebijakan dan program prioritas daerah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang kerangka pendanaan seluruh program Perangkat Daerah tahun 2024 – 2026, dan daftar program Perangkat Daerah tahun 2024 – 2026 dalam rangka mencapai kinerja pembangunan daerah.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat penetapan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 atau Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2024 – 2026 atau indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB IX PENUTUP

Bagian ini menguraikan gambaran umum penyusunan RPD yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPD.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Pasuruan merupakan Kabupaten terluas ke-12 (dua belas) di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 1.474,02 Km². Ibu kota atau pusat pemerintahan Kabupaten Pasuruan berada di Kecamatan Bangil. Secara administrasi, batas wilayah Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan dan Selat Madura
- Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Malang
- Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu



Secara administrasi, jumlah kecamatan di Kabupaten Pasuruan sebanyak 24 kecamatan yang terbagi menjadi 24 Kelurahan dan 341 Desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Lumbang sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Pohjentrek.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Pasuruan
 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

Tabel 2.1
Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasuruan

No	Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
			Desa	Kelurahan		
1	Purwodadi	Desa Purwodadi	13	-	102,46	6,95
2	Tutar	Desa Wonorejo	12	-	86,30	5,85
3	Puspo	Desa Puspo	7	-	58,35	3,96
4	Lumbang	Desa Cukurguling	12	-	125,55	8,52
5	Pasrepan	Desa Pasrepan	17	-	89,95	6,10
6	Kejayan	Kel. Kejayan	24	1	79,15	5,37
7	Wonorejo	Desa Wonorejo	15	-	47,30	3,21
8	Purwosari	Kel. Purwosari	14	1	59,87	4,06
9	Sukorejo	Desa Glagahsari	19	-	58,18	3,95

No	Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km2)	Persentase (%)
			Desa	Kelurahan		
10	Prigen	Kel. Prigen	9	-	121,90	8,27
11	Pandaan	Kel. Petungsari	14	4	43,27	2,94
12	Gempol	Desa Karangrejo	15	-	64,92	4,40
13	Beji	Desa Beji	12	2	39,90	2,71
14	Bangil	Kel. Kolursari	4	11	44,60	3,03
15	Rembang	Desa Rembang	17	-	42,52	2,88
16	Kraton	Desa Kraton	25	-	50,75	3,44
17	Pohjentrek	Desa Susukan Rejo	11	3	11,88	0,81
18	Gondang Wetan	Kel. Gondangwetan	19	1	26,25	1,78
19	Winongan	Desa winongan Lor	18	-	45,97	3,12
20	Grati	Kel. Gratitunon	14	1	50,78	3,45
21	Nguling	Desa Nguling	15	-	42,60	2,89
22	Lekok	Desa Tambaklekok	11	-	46,57	3,16
23	Rejoso	Desa Rejoso Lor	16	-	37,00	2,51
24	Tosari	Desa Tosari	8	-	98,00	6,65
Kabupaten Pasuruan		Kecamatan Bangil	341	24	1.474,02	1 474,02

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2022, Badan Pertanahan Nasional, 2022 dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Pasuruan terletak pada koordinat 7°32'34" - 7°57'20" Lintang Selatan dan 112°33'55" - 113°05'37" Bujur Timur. Kabupaten Pasuruan terletak pada delta jalur ekonomi Surabaya - Jember / Banyuwangi / Bali, Surabaya - Malang dan Malang - Jember/Banyuwangi/Bali sehingga sangat strategis dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Selain itu terdapat beberapa jalur jalan tol yang melintas di jalur Kabupaten Pasuruan yang membuatnya menjadi pilihan para investor baik dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan pembangunan industri di Kabupaten Pasuruan.

Kondisi wilayah Kabupaten Pasuruan terdiri dari daerah pegunungan berbukit dan daerah dataran rendah yang secara rinci dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Bagian selatan, terdiri dari pegunungan dan perbukitan dengan ketinggian permukaan tanah antara 186 meter sampai 2.700 meter yang membentang mulai dari wilayah Kecamatan Tukur, Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Prigen;
2. Bagian tengah, terdiri dari dataran rendah yang berbukit dengan ketinggian permukaan antara 6 meter sampai 91 meter dan pada umumnya relatif subur;
3. Bagian utara, terdiri dari dataran rendah pantai yang tanahnya kurang subur dengan ketinggian permukaan tanah 2 meter sampai 8 meter. Daerah

ini membentang dari timur yakni wilayah Kecamatan Nguling ke arah barat, yakni Kecamatan Lekok, Rejoso, Kraton dan Bangil.

2.1.1.3 Topografi

Wilayah Kabupaten Pasuruan terbagi menjadi beberapa klasifikasi wilayah berdasarkan tingkat kemiringan lahan. Berikut adalah tingkat kemiringan lahan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Kondisi kelerengan wilayah Kabupaten Pasuruan terbagi dalam tipologi kelerengan sebagai berikut :

1. Kelerengan >1.000 meter DPL, berada di Kecamatan Tosari, Kecamatan Tukur dan sebagian Kecamatan Prigen (pengunungan Prigen);
2. Kelerengan 501 – 1.000 meter DPL, berada di Kecamatan Puspo, sebagian Kecamatan Tosari, Kecamatan Tukur, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Pasrepan dan Kecamatan Lumbang;
3. Kelerengan 101 – 500 meter DPL, berada di Kecamatan Lumbang;
4. Kelerengan 26 – 100 meter DPL, berada di sebagian Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Grati, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Rembang, Kecamatan Beji dan Kecamatan Gempol;
5. Kelerengan 0 – 25 meter DPL, berada di bagian utara tepatnya di wilayah kawasan pesisir yang paling dominan, di antaranya Kecamatan Nguling, Kecamatan Grati, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lekok, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Kraton, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bangil, Kecamatan Beji dan Kecamatan Gempol.

Kabupaten Pasuruan memiliki ketinggian antara 0-3313 mdpl yang dirinci per wilayah administrasi kecamatan. Dataran rendah terdapat di bagian utara, tepatnya di Pesisir Selat Madura, dengan ketinggian 0-290 mdpl. Kawasan tersebut memiliki ancaman bencana banjir. Dataran tinggi berada pada bagian tenggara (Kawasan Gunung Bromo) dan bagian barat daya (Kawasan Gunung Welirang). Meninjau dari kawasan pegunungan di Kabupaten Pasuruan, menunjukkan adanya kelerengan yang terjal atau curam. Area-area di Kabupaten Pasuruan dengan kelerengan curam tersebut memiliki potensi bencana longsor.

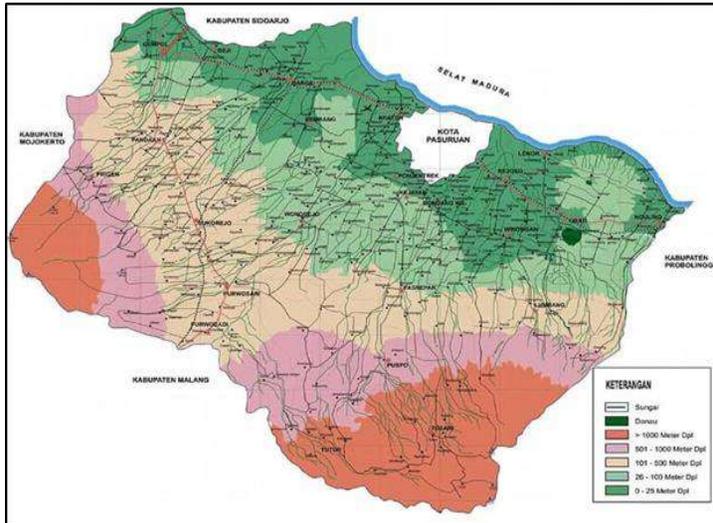
Tabel 2.2
Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibu Kota Menurut Kecamatan
di Kabupaten Pasuruan

Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibu Kota
Purwodadi	500-1.000	26,5
Tutur	>1.000	46,5
Puspo	500-1.000	40,5
Lumbang	100-500	37,5
Pasrepan	100-500	30
Kejayan	25-100	20
Wonorejo	25-100	20
Purwosari	100-500	23
Sukorejo	100-500	16,5
Prigen	>1.000	19
Pandaan	100-500	11,5
Gempol	0-25	11,5
Beji	0-25	3
Bangil	0-25	0
Rembang	25-100	7
Kraton	0-25	10,5
Pohjentrek	0-25	18,5
Gondang Wetan	0-25	21
Winongan	0-25	28,5
Grati	25-100	29
Nguling	0-25	37
Lekok	25-100	31,5
Rejoso	0-25	22,5
Tosari	>1.000	53
Purwodadi	500-1.000	26,5
Tutur	>1.000	46,5
Puspo	500-1.000	40,5
Lumbang	100-500	37,5

Sumber : Badan Pertanahan Nasional, 2022 dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

2.1.1.4 Geologi

Jenis geologi di Wilayah Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu : batuan permukaan, batuan sedimen dan batuan gunung api. Dengan banyaknya jenis batuan yang ada, menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan merupakan daerah yang cukup kaya. Dilihat dari struktur geologi, Kabupaten Pasuruan terbagi atas dua kelompok besar yaitu gunung api kuartir muda (*young quarternary*) seluas 52,43% dan kuartir tua (*old quarternary*) seluas 34,95%.



Gambar 2.2 Kondisi Topografi Wilayah Kabupaten Pasuruan
 Sumber: RTRW Kabupaten Pasuruan, 2010

Kondisi geologi wilayah Kabupaten Pasuruan terdiri dari 13 (tiga belas) satuan batuan yaitu Satuan Alluvium (Qa), Satuan Tuff Rabano (Qvtr), Satuan batuan gunung api kuarter atas penanggungan (Qvn), Satuan batuan gunung api arjuno welirang (Qvaw), Satuan batuan gunung api

(Qpvtr). Secara garis besar jenis batuan yang ada di Kabupaten Pasuruan dikelompokkan ke dalam:

1. Endapan Permukaan

a. Batuan Alluvium:

1. Terdiri dari bahan kerakal, kerikil, pasir, lempung dan lumpur;
2. Terdiri dari endapan sungai dan endapan pantai. Endapan sungai terhampar di sepanjang daerah aliran Sungai Rejoso sedangkan endapan pantai terhampar disepanjang pantai Selat Madura, sebagian besar berupa pasir kasar-halus dan lepas. Wilayah setempat banyak tercampur pecahan cangkang cangkang, moluska atau kerang-kerangan dan koral.

b. Batuan Sedimen

➤ Formasi Kabuh:

1. Terdiri dari bahan batu pasir tufan, batu lempung tufan, batu pasir gampingan, konglomerat, lempung dan tuf vulkan;
2. Sebarannya tidak luas, terdapat di sekitar Desa Raci dan di Beji.

➤ Formasi Jombang:

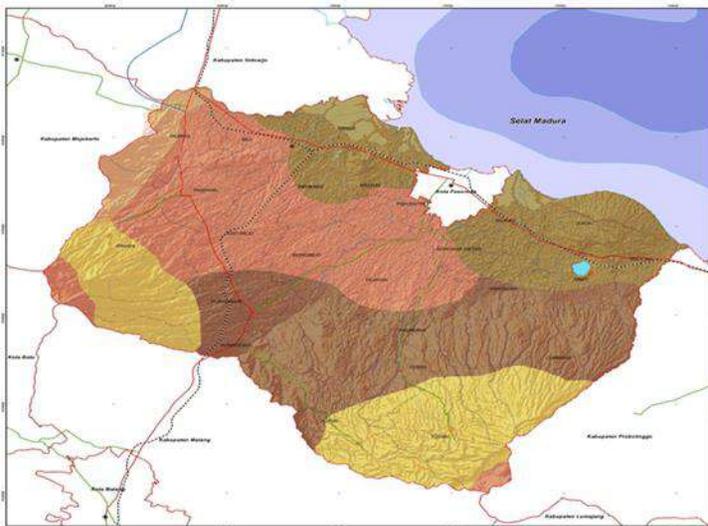
1. Terdiri dari bahan breksi, batu pasir tufan, batu lempung tufan, lempung, batu gamping dan tufan;
2. Sebarannya terdapat di sekitar Raci, sebelah selatan Bangil, Beji dan Gondangwetan.

➤ Formasi Welang:

1. Terdiri dari bahan batu pasir tufan, batu pasir, lempung, konglomerat dan tuf vulkan;
2. Sebarannya tidak luas di Sungai Welang.

2. Batuan Gunung Api

- a. Batuan Gunung Api Quarter Bawah (Gendis). Terdiri dari bahan breksi gunung api, tuf breksi, lava, tuf dan aglomerat.
- b. Batuan Gunung Api Quarter Tengah (Ringgit). Terdiri dari batuan gunung api ringgit dan batuan gunung api tengger tua.
- c. Batuan Gunung Api Arjuna – Welirang. Terdiri dari breksi gunung api, lava, breksi tufan dan tuf.
- d. Batuan Gunung Api Tengger. Terdiri dari tuf pasiran, tuf batu apung, tuf abu dan aglomerat.
- e. Tuf Rabano. Terdiri dari tuf pasiran, tuf batu apung, breksituf dan tuf halus.
- f. Batuan Gunung Api Kuarter Atas Penanggungan. Terdiri dari breksi gunung api, lava tuf, breksi tufan, aglomerat dan lahar.
- g. Batuan Gunung Api Bromo:
 - 1) Terdiri dari breksi gunung api, lava, tuf, tuf breksi dan lahar;
 - 2) Batuan ini merupakan endapan hasil kegiatan erupsi dari kelompok Gunung Bromo. Pusat erupsinya berpindah-pindah yang saling berdekatan, antara lain pada Gunung Bromo I (+2392 meter), Gunung Bromo II (+ 2339 m) dan Gunung Batok (+ 2440 m). Gunung Bromo dianggap sebagai salah satu gunung api yang masih aktif.
- h. Pasir Gunung Api Tengger:
 - 1) Terdiri dari pasir gunung api, bom gunung api dan batu apung;
 - 2) Pasir gunung api ini merupakan endapan piroklastika muda yang terendapkan dalam kawah tengger, berbentuk tapal kuda yang mengelilingi kelompok Gunung Bromo.



Gambar 2.3 Kondisi Jenis Tanah di Wilayah Kabupaten Pasuruan

Sumber: RTRW Kabupaten Pasuruan, 2010

Keberagaman jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Pasuruan karena dipengaruhi oleh faktor litologi dan strukturnya, yaitu mencakup: alluvial, regosol, andosol, grumosol, mediteran dan latosol. Jenis tanah di Kabupaten Pasuruan secara garis besar dikelompokkan dalam 6 (enam) kelompok besar yaitu :

1. Alluvial

a. Bahan Induk : alluvial dari aneka macam asal;

b. Sifat dan Corak

Warna: kelabu, Tekstur: liat, Keasaman: aneka, Zat organik: kadar lemah, Kejenuhan: sedang hingga tinggi, Permeabilitas: rendah, Kepekaan erosi: tinggi tetapi karena daerahnya datar tidak sampai lanjut tingkatnya;

c. Pemakaian: padi sawah, palawija dan perikanan.

2. Regosol

a. Bahan induk : alluvial dari aneka macam asal;

b. Sifat dan Corak

Warna: kelabu hingga kuning, Tekstur: pasir, Kadar liat: <40%, Keasaman: aneka, Zat organik: kadar rendah, Kejenuhan: aneka, Permeabilitas: tinggi, Kepekaan erosi: tinggi;

c. Pemakaian: padi sawah, palawija, tebu dan sayuran

3. Andosol

a. Bahan induk : abu dan tuf vulkan;

b. Sifat dan Corak

Warna: hitam hingga kuning, Tekstur: lempung hingga debu dan liat menurun, Keasaman: agak masam hingga netral, Zat organik: lemah, Kejenuhan: basa, Permeabilitas: sedang, Kepekaan erosi: besar;

c. Pemakaian: sayuran, bunga-bunga, teh, kopi dan hutan pinus.

4. Grumusol

a. Bahan induk : merjel, liat, tuf vulkan;

b. Sifat dan Corak

Warna: kelabu hingga hitam, Tekstur: liat makin ke bawah makin meningkat, Keasaman: sedikit asam hingga alkalin, Zat organik: kadar rendah, Kejenuhan: basa tinggi, Permeabilitas: rendah, Kepekaan erosi: besar;

c. Pemakaian: padi sawah, jagung, kedelai, tebu, kapas dan hutan jati.

5. Mediteran

a. Bahan induk : batu kapur keras, batuan sedimen dan tuf vulkan basa;

b. Sifat dan Corak

Warna: kuning hingga merah, Tekstur: lempung liat, Keasaman: agak masam hingga netral, Zat organik: rendah, Kejenuhan: basa tinggi, Permeabilitas: sedang, Kepekaan erosi: besar hingga sedang;

c. Pemakaian: padi sawah, tegalan dan rumput ternak.

6. Latosol

- a. Bahan induk : tuf vulkan, bahan vulkan;
- b. Sifat dan Corak

Warna: merah hingga kuning, Tekstur: liat tetap dari atas hingga ke bawah, Keasaman: masam hingga agak masam, Zat organik: kadar rendah hingga agak sedang di lapisan atas dan menurun ke bawah, Kejenuhan: basa rendah hingga sedang, Permeabilitas: tinggi, Kepekaan erosi: kecil;

- c. Pemakaian: padi sawah, jagung, umbian, kelapa, coklat, cengkeh, kopi maupun hutan tropika.

2.1.1.5 Hidrologi

Kabupaten Pasuruan memiliki 7 (tujuh) sungai yang mengalir, yaitu Sungai Lawean, Sungai Rejoso, Sungai Gembong, Sungai Welang, Sungai Masangan, Sungai Kedunglarangan dan Sungai Petrung. Sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Pasuruan dan bermuara di Selat Madura yaitu:

- Sungai Laweyan : bermuara di Desa Penunggul - Kecamatan Nguling
- Sungai Rejoso : bermuara di wilayah Kecamatan Rejoso
- Sungai Gembong : bermuara di wilayah Kota Pasuruan
- Sungai Welang : bermuara di Desa Pulokerto – Kecamatan Kraton
- Sungai Masangan : bermuara di Desa Raci – Kecamatan Bangil
- Sungai Kedung Larangan : bermuara di Desa Kalianyar – Kecamatan Bangil

Umumnya, penduduk Kabupaten Pasuruan memanfaatkan aliran sungai untuk irigasi teknis lahan pertanian. Selain dapat memberi manfaat bagi penduduk setempat, hampir seluruh sungai tersebut berpotensi menjadi penyebab bencana banjir. Banjir luapan sungai di Kabupaten Pasuruan disebabkan oleh rusaknya hutan, pendangkalan sungai, tingginya curah hujan, perubahan tata ruang, dan lain sebagainya.

Kabupaten Pasuruan mempunyai potensi air cukup besar baik berupa air permukaan maupun air tanah, oleh karena itu disamping sistem aliran sungai di Kabupaten Pasuruan terdapat juga danau atau waduk alami cukup besar dan sejumlah mata air. Untuk potensi air tanah akan digambarkan melalui kondisi hidrogeologi. Kondisi hidrologi Wilayah Kabupaten Pasuruan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Air Permukaan

Di wilayah Kabupaten Pasuruan mengalir enam sungai besar yang bermuara di Selat Madura, yaitu Sungai Lawean, Sungai Rejoso, Sungai Gembong, Sungai Welang, Sungai Masangan dan Sungai Kedunglarangan. Oleh karena itu tingkat pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian cukup memadai. Selain potensi sungai di atas, terdapat danau dan sejumlah mata air. Potensi tersebut agak terganggu dengan perubahan iklim yang ekstrem sehingga hujan lebih banyak dimungkinkan menjadi *run off* dibandingkan menjadi *recharge* potensi air permukaan dan infiltrasi untuk air tanah dangkal dan dalam.

Terdapat 15 (lima belas) sungai yang melintasi Kabupaten Pasuruan yang secara umum sungai-sungai tersebut merupakan sungai yang tidak terlalu panjang, di bagian hulunya memiliki kemiringan dasar sungai yang terjadi, dan ada beberapa sungai yang merupakan sungai musiman sehingga pada musim kemarau debit air tidak teratur. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Sungai di Kabupaten Pasuruan

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit (m ³ /detik)
1	Sungai Kambeng	7,22	-	-	-	-
2	Sungai Kedunglarangan	13,99	31	17	4,8	0,5 - 71,65
3	Sungai Masangan	5,95	-	-	-	-
4	Sungai Raci	6,87	-	-	-	-
5	Sungai Gerongan	6,22	-	-	-	-
6	Sungai Pilang	9,82	-	-	-	-
7	Sungai Welang	40,09	29	23	4,53	0,95 - 95,15
8	Sungai Gembong	8,57	17	13	2,42	0,38 - 137
9	Sungai Petung	14,34	15	12	4,88	0,75 - 73,43
10	Sungai Rejoso	15,72	25	18	4	10,40 - 27,19
11	Sungai Lawean	30,71	11	7		
12	Sungai Kramat	13,61	26	13	5,35	0,70 - 5,75
13	Sungai Pakelan	45,60	16,03	9	1,68	0,74 - 35,52
14	Sungai Rondoningo	24,16	11,6	8,5	1,47	0,30 - 3,34
15	Sungai Pancarglagas	16,06	13	11	2,54	0,42 - 12,08

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2015 dan P-RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023

2. Danau

Danau yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan, merupakan sumber mata air dan terletak di Kecamatan Grati, dikenal dengan nama Ranugrati yang mempunyai volume efektif sebesar 5013 m³ dan volume maksimum sebesar 5217 m³, serta mampu mengeluarkan debit maksimum 980 l/det dan debit minimum 463 l/det. Dari sejumlah sumber air yang ada di Kabupaten Pasuruan yang terbesar adalah Sumber Air Umbulan di Kecamatan Winongan dengan debit maximumnya 4000an l/det, kemudian Sumber Mata Air Banyu Biru yang terletak di Kecamatan Winongan dengan debit maximumnya 225 l/det.

3. Sumber Air

Di Wilayah Kabupaten Pasuruan terdapat banyak sumber air yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan antara lain Kecamatan Prigen, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Purwosari dan Kecamatan Purwodadi. Sumber air terbanyak berada di Kecamatan Prigen sejumlah 59 sumber air dengan debit minimum 510 liter/detik dan maksimum 955,01 liter/detik. Sebaran sumber air di wilayah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Jumlah Sumber Air dan Debit yang dapat dimanfaatkan di Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Sumber	Debit Total	
			Minimum (l/det)	Maksimum (l/det)
1	Prigen	59	510,00	955,01
2	Pandaan	10	305,00	401,01
3	Gempol	12	169,80	275,01
4	Beji	22	205,00	371,01
5	Bangil	3	105,00	130,01
6	Rembang	14	479,00	687,01
7	Sukorejo	13	136,00	295,01
8	Purwosari	24	358,00	684,01
9	Purwodadi	29	211,00	417,01
10	Kraton	1	15,00	30,01
11	Tutur	7	46,00	181,01
	Jumlah	194	2.539,80	4.426,11

Sumber: Dokumen Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Pasuruan, 2015

4. Air Tanah

Secara umum air tanah di wilayah Kabupaten Pasuruan ini mengalir dari daerah imbuh di daerah puncak dan tubuh Gunung (G.) Arjuno dan G. Welirang, serta G. Bromo ke daerah luahnya, yaitu daerah dataran Gempol-Bangil-Pasuruan-Rejoso. Besarnya aliran air tanah dari daerah imbuh di daerah Pegunungan Arjuno-Welirang dan Pegunungan Bromo-Tengger tersebut ke

daerah luasya di daerah dataran Gempol-Bangil-Pasuruan-Rejoso sangat dipengaruhi oleh jenis batuan yang dilaluinya, serta penyebaran akuifernya. Oleh karena itu penyebaran air tanah tidaklah merata di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan, di mana keterdapatan serta potensinya akan sangat tergantung pada sifat lapisan akuifernya. Sedangkan sifat akuifer tersebut akan ditentukan oleh parameter dari akuifernya, yang antara lain menyangkut kapasitas jenis dan keterusannya.

Wilayah Kabupaten Pasuruan berdasarkan kuantitasnya (besarnya aliran air tanah) dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu Besar (debit > 10 liter/detik), Sedang (debit : 210 liter/detik), dan Kecil (debit < 2 liter/detik). Sedangkan menurut kualitas air tanahnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES /SK /VI I/ 2002 (Tabel 9) termasuk kategori baik.

a. Wilayah Potensi Air Tanah Tinggi

Wilayah potensi air tanah tinggi ini menempati hampir seluruh daerah dataran tinggi, yaitu meliputi seluruh wilayah Kec Wonorejo, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondang Wetan, dan Kecamatan Winongan, serta sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Prigen, dan Kecamatan Grati.

b. Wilayah Potensi Air Tanah Sedang

Wilayah potensi air tanah sedang ini meliputi daerah dataran aluvium pantai dan kaki gunung api, yaitu meliputi hampir seluruh wilayah Kecamatan Bangil, Kecamatan Kraton, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lekok, dan Kecamatan Nguling, serta sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Prigen, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Rembang, dan Kecamatan Grati.

c. Wilayah Potensi Air Tanah Rendah

Wilayah potensi air tanah rendah ini mempunyai penyebaran hampir seluruh daerah tubuh dan puncak gunung api Arjuno-Welirang serta daerah perbukitan bergelombang yang ditutupi oleh batuan sedimen padu F. Jombang dan F. Kabuh, yaitu meliputi hampir seluruh wilayah Kecamatan Tukur, Kecamatan Tosari, Kecamatan Puspo dan Kecamatan Lumbang, serta sebagian wilayah Kecamatan Beji, Kecamatan Rembang,

Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Pasrepan.

2.1.1.6 Klimatologi

Wilayah Kabupaten Pasuruan pada umumnya beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh tiupan angin Muson. Angin Muson ini mempengaruhi pola iklim dan mengakibatkan terjadinya musim hujan (angin Muson Timur) dan musim kemarau (angin Muson Barat). Rata-rata suhu udara tertinggi terjadi pada Bulan Mei dan terendah pada Bulan Juli. Sedangkan rata-rata kelembaban udara tertinggi pada bulan Januari dan terendah terjadi pada bulan September.

Tabel 2.5
Suhu Udara dan Kelembaban Udara di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

Bulan	Suhu Udara (°C)			Kelembaban Udara (%)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	17,2	21,3	25,4	73,0	94,0	98,0
Februari	17,1	21,4	25,7	74,0	92,0	99,0
Maret	17,5	21,9	26,3	62,0	91,0	98,0
April	17,0	21,8	26,6	62,0	90,0	98,0
Mei	18,2	22,4	26,6	59,5	90,0	98,0
Juni	17,1	21,9	26,7	59,0	88,0	98,0
Juli	16,3	21,1	25,9	53,6	86,0	97,9
Agustus	16,0	21,4	26,8	51,3	84,0	98,0
September	17,1	22,3	27,5	45,0	80,0	94,0
Oktober	17,8	21,8	25,8	62,8	91,0	99,0
November	18,2	21,8	25,4	66,4	93,0	99,0
Desember	16,9	21,5	26,1	60,8	91,0	98,1

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka, 2023

Musim hujan biasanya terjadi mulai Bulan November sampai dengan Bulan Mei, sedangkan musim kemarau biasanya mulai Bulan Juni sampai dengan Bulan Oktober. Data curah hujan sepanjang tahun 2022 di Kabupaten Pasuruan berdasarkan Data BMKG Stasiun Geofisika Pasuruan sebagaimana pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.1 Jumlah Curah Hujan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka, 2022

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa curah hujan paling tinggi terjadi pada Bulan Januari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada Bulan Juli. Rata-rata curah hujan per bulan Kabupaten Pasuruan adalah 11,6 mm.

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan proses panjang pembangunan yang berpengaruh terhadap kerentanan suatu wilayah. Persebaran penggunaan lahan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa luas guna lahan terbesar di Kabupaten Pasuruan adalah sawah irigasi, dengan total luasan 389.073.550,587 m². Luas lahan terbangun adalah 15.261.758,771 m² (11,19%) dari luas total Kabupaten Pasuruan. Hutan dan semak belukar yang menjadi variabel nilai kerentanan masing masing memiliki luas 176.485.297,965 m² dan 40.232.080,775 m². Luas hutan sangat berpengaruh pada tingkat resiko bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor, karena rusaknya hutan dapat meningkat resiko bencana pada tiga jenis bencana tersebut.

Tabel 2.6
Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2013

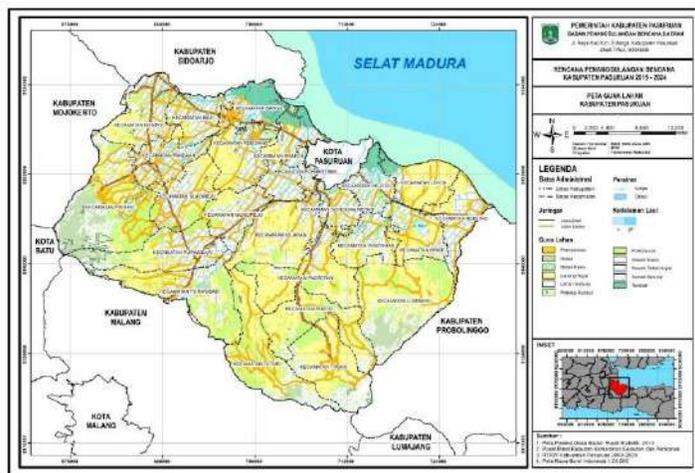
No	Uraian Penggunaan Lahan	Luas Lahan (m ²)	(%)
1	Aneka Industri	14.765.996,387	0,994%
2	Industri Kecil	344.680,139	0,023%
3	Jasa dan Permukiman	151.082.038,245	10,169%
4	Peternakan Unggas	306.630,756	0,021%
5	Tambak	25.195.544,215	1,696%
6	Sawah Irigasi	389.073.550,587	26,187%
7	Sawah Tadah Hujan	22.819.534,847	1,536%
8	Buah-Buahan	87.986,002	0,006%
9	Kebun Campuran	48.162.199,470	3,242%
10	Perkebunan (Sudah Menghasilkan)	41.673.344,380	2,805%
11	Tegalan/Ladang	535.637.977,722	36,051%

No	Uraian Penggunaan Lahan	Luas Lahan (m ²)	(%)
12	Hutan Sejenis	176.485.297,965	11,878%
13	Padang Rumput	10.501.461,735	0,707%
14	Semak	40.232.080,775	2,708%
15	Kolam Air Tawar	15.667,390	0,001%
16	Lapangan Olahraga	3.198.786,977	0,215%
17	Tanah Kosong Sudah Diperuntukan	483.204,616	0,033%
18	Tanah kosong/tanah terbuka	18.181.668,571	1,224%
19	Sungai	3.225.073,791	0,217%
20	Danau/Situ/Telaga	1.888.426,623	0,127%
21	Jalan Aspal	1.197.233,686	0,081%
22	Kuburan/Pemakaman	1.201.168,810	0,081%

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, Hasil Digitasi dan Analisa, 2013

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Persentase luasan penggunaan lahan terhadap luasan keseluruhan wilayah Kabupaten Pasuruan yang terbesar yaitu tegalan/ladang (sekitar 36,1%), sawah irigasi (sekitar 26,2%), dan hutan (sekitar 1,9%), jasa dan permukiman penduduk (sekitar 10,2%);
- Luasan penggunaan lahan untuk Industri secara umum (terhadap keseluruhan luasan wilayah Kabupaten Pasuruan) adalah relatif kecil yaitu sekitar kurang dari 1%;
- Luasan penggunaan lahan untuk hutan (bukan penetapan kawasan) adalah sekitar 11,9%;



Gambar 2.4 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pasuruan

Sumber: Badan Pertanahan Nasional, 2017

Potensi (kasar) untuk pembangunan terhadap lahan-lahan tidak potensial (diluar budidaya pertanian dan lindung) masih relatif cukup besar ke depan (yaitu meliputi penggunaan lahan berupa padang rumput, semak, dan tanah kosong) adalah sekitar 69.398.415,697 m² atau 6.939,84 ha atau 4,7%.

Tabel 2.7
Persebaran Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan

Nama Kecamatan/ Penggunaan Lahan	Purwodadi	Tutur	Puspo	Lumbang
Padang Rumput	78,25	18,38	8,43	3,03
Semak Belukar	640,17	1.572,10	1.436,09	2.847,90
Permukiman	884,50	610,85	276,23	236,80
Sawah Irigasi	686,69	0	0	1,12
Sawah Tadah Hujan	885,89	0	0,68	16,87
Ladang/Tegal	2.831,85	4.105,22	3.769,23	5.233,57
Perkebunan	2.415,67	2.301,80	1.644,27	2.522,45
Air Tawar	0,27	0	0	0,33
Hutan	240,51	422,92	54,04	1.413,03
Nama Kecamatan/ Penggunaan Lahan	Pasrepan	Kejayan	Wonorejo	Purwosari
Padang Rumput	3,17	14,30	5,03	304,09
Semak Belukar	578,13	230,02	0	604,44
Permukiman	553,83	773,23	608,56	968,61
Sawah Irigasi	727,50	2.048,90	2543,94	2.257,34
Sawah Tadah Hujan	217,98	471,31	162,28	1.066,08
Ladang/Tegal	5.030,84	4.030,64	693,33	1.268,77
Perkebunan	1.230,34	426,74	349,59	1.065,99
Air Tawar	0	0	0	
Hutan	0	0	0	360,66
Nama Kecamatan/ Penggunaan Lahan	Sukorejo	Prigen	Pandaan	Gempol
Padang Rumput	81,02	1.155,44	18,51	105,93
Semak Belukar	29,22	0	1,88	90,35
Permukiman	844,52	3.956,80	821,13	1.167,19
Sawah Irigasi	2.662,80	1.306,03	3.147,84	2.751,17
Sawah Tadah Hujan	0	25,29	0	8,52
Ladang/Tegal	1.429,96	2.004,58	302,87	1.331,39
Perkebunan	763,38	0	61,46	431,67
Air Tawar	0	3,49	4,36	41,67
Hutan	0	2.453,39	0	0
Lahan Terbuka	0	1,02	0	0
Padang Pasir	0	0	0	121,37
Nama Kecamatan/ Penggunaan Lahan	Beji	Bangil	Rembang	Kraton
Padang Rumput	24,44	107,85	541,49	143,08
Semak Belukar	29,59		5,94	
Permukiman	658,24	491,51	562,71	636,54
Sawah Irigasi	2823,36	1.378,19	2.130,96	3.117,82
Sawah Tadah Hujan	0	0	0	0
Ladang/Tegal	294,23	91,69	2.412,23	600,43

Perkebunan	65,50	22.,56	60,84	86,60
Air Tawar	19,01	28,48	4,56	33,81
Hutan	0	0	0	0
Lahan Terbuka	0	0	0	0
Padang Pasir	0	0	0	0
Hutan Rawa	0	151,56	0	0
Tambak	0	2.047,03	0	812,89
Nama Kecamatan/ Penggunaan Lahan	Pohjentrek	Gondang Wetan	Winongan	Grati
Padang Rumput	0	6,52	4,89	
Semak Belukar	0	0,21	358,80	101,41
Permukiman	0	446,19	369,41	664,53
Sawah Irigasi	1.015,73	1.926,53	1.813,36	1.672,27
Sawah Tadah Hujan			82,98	163,53
Ladang/Tegal	0,36	0	1286,76	1.675,14
Perkebunan	45,01	319,29	375,25	198,08
Air Tawar	3,08	0	0,15	0
Hutan	0	0	0	0
Lahan Terbuka	0	0	0	0
Padang Pasir	0	0	0	0
Hutan Rawa	0	0	0	0
Tambak	0	0	0	0
Nama Kecamatan/ Penggunaan Lahan	Nguling	Lekok	Rejoso	Tosari
Padang Rumput	10,15	31,38	15,53	63,72
Semak Belukar	5,39	24,67	0	2.371,48
Permukiman	603,13	488,59	380,54	105,72
Sawah Irigasi	1.676,37	440,48	2.262,94	0
Sawah Tadah Hujan	1.171,71	18,65	0	0,09
Ladang/Tegal	1.025,11	3.245,32		4.380,63
Perkebunan	11,53	8,15	257,16	950,95
Air Tawar	1,13	5,26	20,96	0
Hutan	0	0	0	0
Lahan Terbuka	0	0	0	12,33
Padang Pasir	0	0	0	0
Hutan Rawa	3,79	18,91	7,59	0
Tambak	24,52	483,14	571,22	0
Danau	0	2,66	0	0,29
Padang Pasir	0	0	0	275,01

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia 1:25.000

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, Kabupaten Pasuruan masuk dalam salah satu Prioritas Nasional Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS). Gunung Bromo

merupakan salah satu destinasi utama yang mampu menarik kunjungan Wisatawan Nusantara maupun Internasional. Selanjutnya Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 tahun 2019, tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, yang menjadi regulasi dalam rangka percepatan Pembangunan Berbasis Kawasan di Tingkat Regional Jawa Timur.

Dalam rangka mendukung Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS) sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) khususnya di Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga mengembangkan sektor lainnya yang menunjang Sektor Pariwisata. Salah satunya adalah Sektor Pertanian dan Perikanan dengan membentuk Kawasan Agropolitan. Kawasan Agropolitan meliputi Kecamatan Tukur, Tosari, Puspo, Lumbang, Prigen, Purwodadi, Purwosari, Sukorejo, Rembang dan Wonorejo. Tujuan dibentuknya Kawasan Agropolitan adalah untuk mendukung Wisata Bromo Tengger Semeru sehingga Wisatawan tidak hanya berkunjung ke Gunung Bromo tetapi juga Kawasan Agropolitan ini. Potensi Unggulan dari Kawasan Agropolitan ini antara lain adalah Apel, Durian, Bunga Krisan, Bunga Edelweis, Kentang, Kopi, Paprika, Susu, Bunga Sedap Malam dan Mangga Putar.

Kondisi eksiting dan rencana pengembangan kawasan Prioritas Pariwisata Kabupaten Pasuruan antara lain:

1. Penguatan Wisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (proyek KSPN) Peningkatan Fasilitas BTS (Pengembangan Wisata Halal Pemandian Alam Banyubiru) di desa Desa Sumberejo, Kecamatan Winongan;
2. Penataan dan Pengembangan Kawasan Agropolitan (Kawasan Agropolitan Tukur – Tosari) yaitu Pusat Pengembangan Perbenihan Kentang Tosari di Desa Ngadiwono Kecamatan Tosari dan Kebun Dinas Tukur (Rencana Rest Area) di Desa Wonosari, Kecamatan Tukur;
3. Penataan dan Pengembangan wisata Edukasi Peternakan Purwosari dan Penataan Kawasan Pusat Pelayanan Peternakan (UPA) di Desa Sumberejo, Kecamatan Purwosari.

2.1.3 Wilayah Potensi Rawan Bencana

2.1.3.1 Potensi Kerawanan Bencana Alam

Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya tidak terlepas dari kondisi geofisik wilayah Kabupaten Pasuruan. Keberadaan gunung berapi, adanya dataran rendah dan kondisi dataran tinggi yang mulai

terdegradasi menjadikan Kabupaten Pasuruan memiliki beberapa potensi bencana alam yaitu:

1. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi

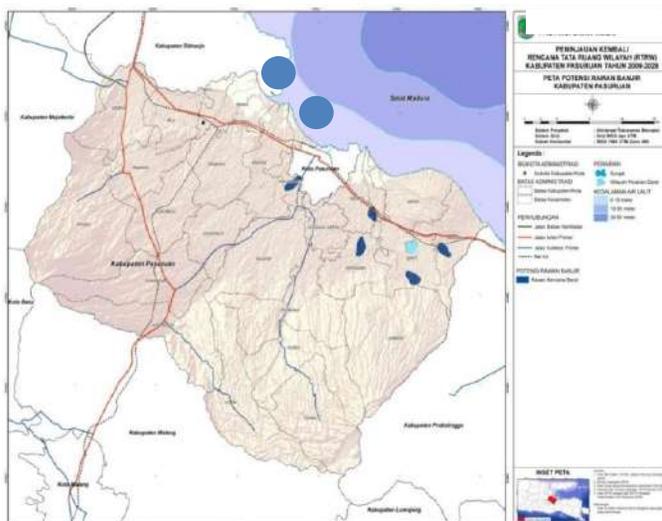
Yaitu kawasan Gunung Bromo seluas 1.320 ha dan daerah waspada seluas 751 ha yang berada di Desa Ngadirejo, Mororejo, Wonokitri dan Desa Kedawung di Kecamatan Tosari dan Gunung Welirang, sedangkan kawasan rawan bencana gunung berapi di Gunung Welirang seluas 1.368 Ha dan waspada seluas 809 Ha yang meliputi sebagian dari Desa Lumbangrejo dan Kelurahan Pecalukan di Kecamatan Prigen, Desa Cendono, Desa Sumberejo dan Desa Tambaksari di Kecamatan Purwosari.

2. Kawasan Rawan Longsor/Kerawanan Gerakan Tanah

Potensi kawasan longsor di Kabupaten Pasuruan teridentifikasi seluas 37.626,4 ha, yaitu di wilayah dengan kelerengan > 40%. Wilayah tersebut berada di Kecamatan Tukur, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang dan Kecamatan Prigen.

3. Kawasan Rawan Banjir

Potensi kawasan rawan banjir teridentifikasi seluas 11.948,15 ha, berada di Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bangil, Kecamatan Kraton, Kecamatan Grati, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Winongan.



Gambar 2.5 Peta Kondisi Kerawanan terhadap Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Pasuruan
Sumber: BPBD Kabupaten Pasuruan, 2017

Wilayah tersebut merupakan daerah hilir yang dipengaruhi adanya daerah aliran sungai. Kondisi banjir ini disebabkan adanya hujan di hulu sungai cukup tinggi sehingga mengakibatkan air meluap. Beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling merupakan daerah rawan banjir yang biasanya disebabkan adanya rob.

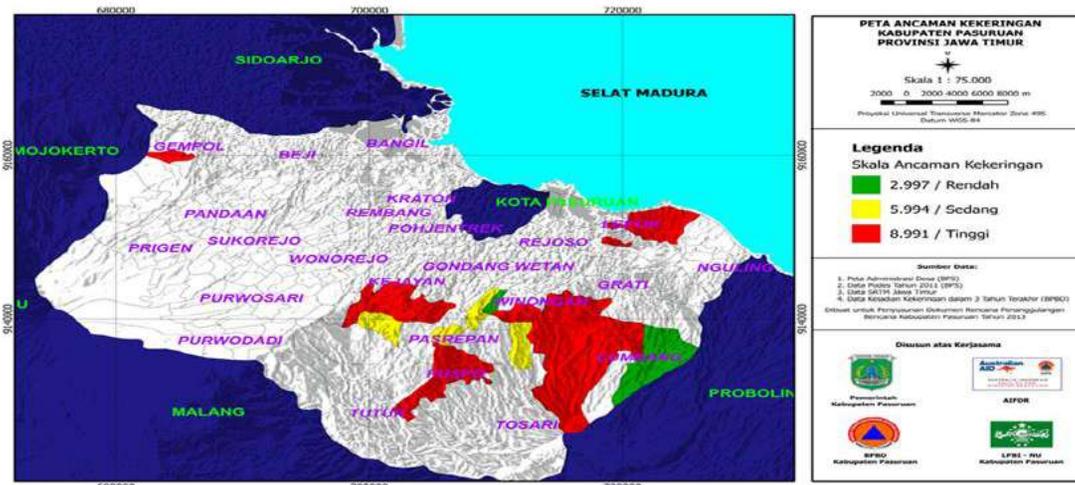
4. Kawasan Rawan Bahaya Angin Puyuh/Puting Beliung

Berpotensi di Kecamatan Gempol, Pandaan dan Sukorejo serta kemungkinan beberapa kecamatan lain mengingat terjadinya anomali iklim pada beberapa tahun terakhir.

5. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan

Berpotensi terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Pasuruan yang merupakan kawasan hutan dan semak belukar diantaranya beberapa yang merupakan Kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi pengelolanya adalah Perhutani, Kawasan Cagar Alam (CA) Gunung Baung, Cagar Alam Gunung Abang, Taman Wisata Alam Tretes, Kawasan Hutan/Pegunungan di R. Soeryo, Kawasan Pegunungan Arjuna Welirang dan Penanggungan (Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen dan Kecamatan Gempol).

6. Kekeringan



Gambar 2.6 Peta Ancaman Kekeringan Kabupaten Pasuruan

Sumber: Hasil Pemetaan Ancaman, 2013

Ancaman kekeringan yang terjadi di Kabupaten Pasuruan terbagi atas 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- Ancaman kekeringan tinggi, berpotensi terjadi di beberapa desa berikut ini: Kecamatan Lumbang (Desa Kronto, Desa Pancur, Desa Karang Asem, Desa Cukurguling, Desa Lumbang, Desa Bulukandang, Desa Karangjati dan Desa Watulumbang), Kecamatan Kejayan (Desa Ambal-Ambil, Desa Klangrong, Desa Oro-Oro Pule, Desa Lorokan, Desa Kedungpengaron dan Desa Benerwojo), Kecamatan Lekok (Desa Pasinan, Desa Wates, Desa Semedusari dan Desa Branang), Kecamatan Winongan (Desa Kedungrejo, Desa Umbulan, Desa Jeladri, Desa Sumberejo dan Desa Sruwi), Kecamatan Puspo (Desa Palangsari, Desa Puspo dan Desa Jimbaran), Kecamatan Gempol (Desa Bulusari), Kecamatan Grati (Desa Karanglo);
- Ancaman kekeringan sedang terjadi di Kecamatan Pasrepan (Desa Sapulante, Desa Mangguan, Desa Petung, Desa Sibon, Desa Lemahbang dan Desa Tambakrejo);

- c. Ancaman kekeringan rendah terjadi di Kecamatan Lumbang (Desa Banjarimbo dan Desa Welulang) dan Kecamatan Winongan (Desa Minggir).

2.1.3.2 Potensi Kerawanan Bencana Non Alam

Selain potensi bencana alam, di Kabupaten Pasuruan juga terdapat potensi bencana non alam, yaitu kejadian kebakaran baik di area permukiman maupun area industri. Kejadian kebakaran di Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Kejadian Kebakaran di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

No.	Kejadian Kebakaran	
	Kecamatan	Jumlah Kejadian
1	Sukorejo	2
2	Gempol	17
3	Kejayan	3
4	Beji	18
5	Purwosari	5
6	Kraton	15
7	Nguling	1
8	Bangil	31
9	Gondangwetan	1
10	Grati	2
11	Pandaan	7
12	Rembang	12
13	Wonorejo	1
14	Pohjentrek	4
15	Prigen	1
	Jumlah	120

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan, 2022

2.1.3.3 Kejadian Bencana

Rekapitulasi kejadian bencana di Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.9
Kejadian Bencana di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

No	Kecamatan	Banjir Genangan	Banjir Bandang	Banjir ROB	Tanah Longsor	Angin Kencang	Pohon Tumbang	Kekeringan	Total
1	Bangil	11	0	0	0	0	11	0	22
2	Beji	12	0	0	0	0	4	0	16
3	Gempol	8	0	0	1	1	9	0	19
4	Gondangwetan	9	0	0	0	2	2	0	13
5	Grati	14	0	0	2	2	2	0	20
6	Kejayan	1	0	0	1	2	6	0	10
7	Kraton	16	0	4	0	3	5	0	28
8	Lekok	1	0	1	0	2	0	1	5
9	Lumbang	0	0	0	2	1	1	1	5
10	Nguling	5	1	1	0	3	5	0	15
11	Pandaan	0	0	0	2	1	5	0	8
12	Pasrepan	1	0	0	3	2	1	1	8
13	Pohjentrek	4	1	0	0	1	1	0	7
14	Prigen	0	0	0	1	0	2	0	3

No	Kecamatan	Banjir Genangan	Banjir Bandang	Banjir ROB	Tanah Longsor	Angin Kencang	Pohon Tumbang	Kekeringan	Total
15	Purwodadi	0	0	0	4	3	2	0	9
16	Purwosari	1	0	0	0	1	1	0	3
17	Puspo	0	0	0	19	2	0	0	21
18	Rejoso	13	0	0	0	3	5	0	21
19	Rembang	0	0	0	0	1	3	0	4
20	Sukorejo	0	0	0	0	3	1	0	4
21	Tosari	0	0	0	55	0	0	0	55
22	Tutur	0	0	0	11	1	1	0	13
23	Winongan	10	0	0	0	2	3	1	16
24	Wonorejo	0	0	0	0	6	1	0	7
TOTAL		106	2	6	101	42	71	4	332

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2022

2.1.4 Aspek Demografi

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Kondisi penduduk tidak hanya diperhatikan pada aspek kuantitas namun juga aspek kualitas. Jumlah penduduk yang besar tanpa didukung dengan kualitas akan menimbulkan permasalahan dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan.

Sebagaimana ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri (Surat Nomor 050/4014/Bangda Tanggal 16 Agustus 2018 Perihal Penggunaan Data Kependudukan dalam Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah), bahwa untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), diharuskan menggunakan data kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.1.4.1 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Selama kurun waktu lima tahun (2018–2022) jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan mengalami tren kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan 0,53% setiap tahun. *Sex Ratio* di Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2020 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

Tabel 2.10
Jumlah dan Struktur Umur Penduduk di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.582.357	1.574.215	1.585.340	1.605.037	1.616.190
	➤ Laki-Laki	792.449	788.438	794.899	801.798	806.034
	➤ Perempuan	789.908	785.777	790.441	803.239	810.156
2	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	1.073	1.068	1.076	1.089	1.096
3	Sex Ratio (L/P) (%)	100,32	100,32	100,56	99,82	99,49
4	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur					

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	➤ 0 - 14 tahun (%)	20,30	20,34	21,33	22,30	23,21
	➤ 15 – 64 tahun (%)	72,62	72,54	71,74	70,79	69,94
	➤ Di atas 65 tahun (%)	7,08	7,12	6,94	6,92	6,85

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2019, 2020, 2021, 2022

Kepadatan Penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah administrasi (kabupaten/kota). Tingkat kepadatan penduduk ini sangat berhubungan erat dengan daya dukung dan daya tampung wilayah. Berdasarkan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2022, Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pandaan sedangkan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Tosari.

Tabel 2.11
Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2018-2022 (Jiwa/Km²)

No	Kecamatan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Purwodadi	669	664	670	682	690
2	Tutur	609	604	611	624	632
3	Puspo	461	456	463	474	476
4	Lumbang	279	275	278	280	282
5	Pasrepan	565	561	565	576	583
6	Kejayan	814	809	817	830	837
7	Wonorejo	1.243	1.235	1.243	1.266	1.279
8	Purwosari	1.393	1.380	1.393	1.411	1.427
9	Sukorejo	1.487	1.479	1.487	1.502	1.508
10	Prigen	710	705	710	719	723
11	Pandaan	2.515	2.504	2.515	2.563	2.577
12	Gempol	1.964	1.951	1.964	1.989	1.994
13	Beji	2.145	2.128	2.145	2.196	2.217
14	Bangil	1.887	1.878	1.887	1.878	1.881
15	Rembang	1.536	1.528	1.536	1.571	1.588
16	Kraton	1.704	1.698	1.704	1.707	1.720
17	Pohjentrek	2.572	2.536	2.574	2.611	2.621
18	Gondang Wetan	2.112	2.104	2.126	2.145	2.163
19	Winongan	978	973	980	982	983
20	Grati	1.57	1.565	1.573	1.568	1.579
21	Nguling	1.445	1.439	1.443	1.460	1.466
22	Lekok	1.608	1.602	1.613	1.642	1.656
23	Rejoso	1.266	1.257	1.268	1.284	1.298
24	Tosari	192	189	190	190	188
	Total	1.073	1.068	1.076	1.089	1.090

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2022 Diolah

2.1.4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Perkembangan laju pertumbuhan penduduk



Grafik 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2022

di Kabupaten Pasuruan cenderung menunjukkan tren penurunan selama tahun 2018 sampai dengan 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa Program Pengendalian Penduduk sudah berhasil menurunkan jumlah penduduk di Kabupaten Pasuruan.

2.1.4.3 Distribusi atau Persebaran Penduduk

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Secara administratif penduduk Kabupaten Pasuruan tersebar di 24 Kecamatan, dimana jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Gempol dan yang terendah adalah Kecamatan Tosari.

Tabel 2.12 Persebaran Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022

No	Kecamatan	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Purwodadi	68.075	68.624	69.838	70.675
2	Tutur	52.119	52.753	53.829	54.524
3	Puspo	26.608	27.003	27.680	27.778
4	Lumbang	34.562	34.957	35.140	35.405
5	Pasrepan	50.497	50.847	51.796	52.435
6	Kejayan	64.039	64.653	65.656	66.228
7	Wonorejo	58.424	58.774	59.899	60.499
8	Purwosari	82.630	83.417	84.474	85.446

No	Kecamatan	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
9	Sukorejo	86.030	86.494	87.384	87.711
10	Prigen	85.995	86.506	87.654	88.086
11	Pandaan	108.346	108.836	110.886	111.488
12	Gempol	126.658	127.477	129.132	129.451
13	Beji	84.889	85.585	87.602	88.460
14	Bangil	83.753	84.159	83.767	83.873
15	Rembang	64.942	65.292	66.771	67.530
16	Kraton	86.178	86.502	86.636	87.287
17	Pohjentrek	30.124	30.574	31.021	31.139
18	Gondang Wetan	55.224	55.805	56.297	56.771
19	Winongan	44.711	45.069	45.162	45.204
20	Grati	79.463	79.890	79.627	80.164
21	Nguling	61.312	61.453	62.187	62.468
22	Lekok	74.592	75.111	76.483	77.126
23	Rejoso	46.507	46.908	47.503	48.009
24	Tosari	18.537	18.651	18.613	18.433
	Total	1.574.215	1.585.340	1.605.037	1.616.190

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2020, 2021, 2022

2.1.4.4 Komposisi dan Populasi Masyarakat

2.1.4.4.1 Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan pada tahun 2019 dan terus mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai 2022. Sedangkan bukan angkatan kerja selalu mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai 2021. Penduduk usia 15 tahun ke atas juga mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai 2022. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan pada tahun 2019, akan tetapi pada tahun 2020 sampai 2022 terus mengalami kenaikan. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan dikarenakan adanya pandemi covid-19 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 akibat situasi pandemi covid-19 yang terus membaik.

Tabel 2.13
Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

No	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Angkatan Kerja	Orang	864.530	861.085	868.795	893.726	916.175
	➤ Bekerja	Orang	811.710	814.432	814.614	839.861	862.062
	➤ Pengangguran	Orang	52.820	46.653	54.181	53.865	54.113
2	Bukan Angkatan Kerja	Orang	377.863	393.387	415.115	401.053	389.023
	➤ Sekolah	Orang	-	83.821	78.845	80.310	70.415

No	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
	➤ Mengurus Rumah Tangga	Orang	-	257.346	269.789	247.535	258.013
	➤ Lainnya	Orang	-	52.220	66.481	73.208	60.595
3	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	Orang	1.242.393	1.254.472	1.283.910	1.294.779	1.305.198
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,59	68,64	67,67	69,03	70,19
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,11	5,41	6,24	6,03	5,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

Tabel 2.14
Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2019-2022

No	Pekerjaan	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Belum/Tidak Bekerja	413.281	362.718	366.672	378.282
2	Mengurus Rumah Tangga	244.538	224.028	230.025	238.608
3	Pelajar/Mahasiswa	280.598	248.897	235.356	224.234
4	PNS/TNI/Polri/Pensiunan	21.641	17.287	16.834	16.664
5	Petani/Peternak/Nelayan	262.573	194.169	189.977	189.391
6	Buruh Tani/Ternak/Nelayan	25.307	20.639	20.114	20.111
7	Perdagangan/Industri/Konstruksi/Transportasi	2.426	1.893	1.862	1.814
8	Buruh Harian Lepas	12.548	8.968	8.948	9.122
9	Karyawan Swasta/BUMN/BUMD/Honorier	390.686	346.074	351.171	357.574
10	Guru/Dosen	12.544	11.611	11.896	12.306
11	Pembantu Rumah Tangga	1.044	700	638	622
12	Tukang Batu/Kayu	2.501	2.227	2.149	2.184
13	Pedagang/Wirawasta	195.278	157.962	157.972	159.497
14	Kepala/Perangkat Desa	1.337	1.184	1.186	1.152
15	Lainnya	10.579	1.398	7.123	4.629

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2020, 2021, 2022, Diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa komposisi penduduk di Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2022 jika dilihat dari pekerjaan, paling banyak bekerja sebagai Karyawan Swasta/BUMN/BUMD/Honorier. Hal tersebut dikarenakan banyaknya perusahaan di Kabupaten Pasuruan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Sedangkan jenis pekerjaan yang paling sedikit dilakukan oleh Penduduk di Kabupaten Pasuruan adalah Pembantu Rumah Tangga.

2.1.4.4.2 Pendidikan

Komposisi penduduk di Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2022 jika dilihat dari pendidikan, paling banyak yang masih Tamat SD/ sederajat sedangkan yang paling sedikit adalah S2/S3. Jika dilihat dari pertumbuhan dari tahun 2019 sampai 2022, persentase Tamat SD/Sederajat dan Tamat

SLTP/Sederajat mengalami penurunan sedangkan pada Tamat SLTA/Sederajat, D1/D2/D3, D4/S1 dan S2/S3 mengalami peningkatan.

Tabel 2.15
Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2019-2022

No	Pendidikan	2019		2020		2021		2022	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	Tidak/belum sekolah	289.063	18,36	291.829	18,41	324.914	20,28	341.313	21,12
2	Belum tamat SD/sederajat	289.466	18,39	285.313	18,00	244.233	15,25	235.317	14,56
3	Tamat SD/sederajat	504.776	32,07	508.829	32,10	505.584	31,56	501.397	31,02
4	Tamat SLTP/sederajat	216.279	13,74	217.236	13,70	217.145	13,55	216.089	13,37
5	Tamat SLTA/sederajat	231.676	14,72	238.060	15,02	260.185	16,24	269.151	16,65
6	D1/D2/D3	8.843	0,56	9.028	0,57	9.614	0,60	9.871	0,61
7	D4/S1	32.524	2,07	33.457	2,11	38.552	2,41	41.085	2,54
8	S2/S3	1.588	0,10	1.588	0,10	1.825	0,11	1.967	0,12
	Total	1.574.215	100,00	1.585.340	100,00	1.602.052	100,00	1.616.190	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2020, 2021, 2022, Diolah

2.1.4.4.3 Agama

Komposisi penduduk di Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2022 jika dilihat dari pemeluk agama, sebagian besar menganut agama islam sedangkan yang paling sedikit menganut agama Konghuchu.

Tabel 2.16
Komposisi Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2019-2022

No	Agama	2019		2020		2021		2022	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	Islam	1.548.800	98,386	1.560.134	98,410	1.580.238	98,455	1.591.629	98,48
2	Kristen	7.022	0,446	7.100	0,448	6.974	0,435	6.883	0,43
3	Katholik	2.542	0,161	2.494	0,157	2.430	0,151	2.402	0,15
4	Hindu	15.419	0,979	15.185	0,958	14.991	0,934	14.891	0,92
5	Budha	408	0,026	404	0,025	367	0,023	351	0,02
6	Konghuchu	16	0,001	13	0,001	11	0,001	11	0,00
7	Kepercayaan	8	0,001	10	0,001	26	0,002	23	0,00
	Total	1.574.215	100	1.585.340	100	1.605.037	100	1.616.190	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2020, 2021, 2022, Diolah

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

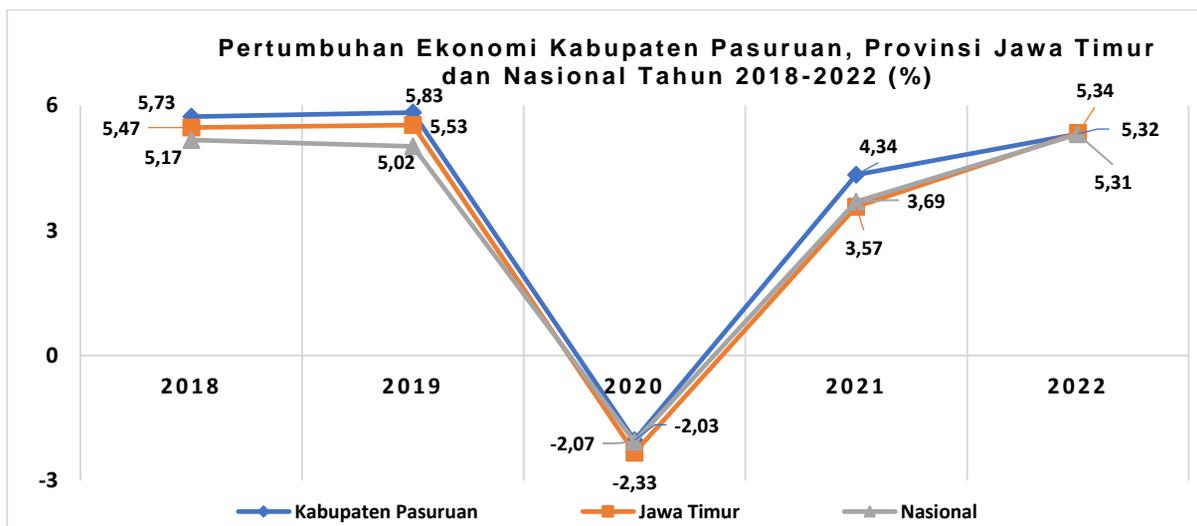
Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan

pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Pasuruan.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. PDRB merupakan indikator ekonomi makro suatu daerah, yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Adapun nilai perbandingan pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:



Grafik 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

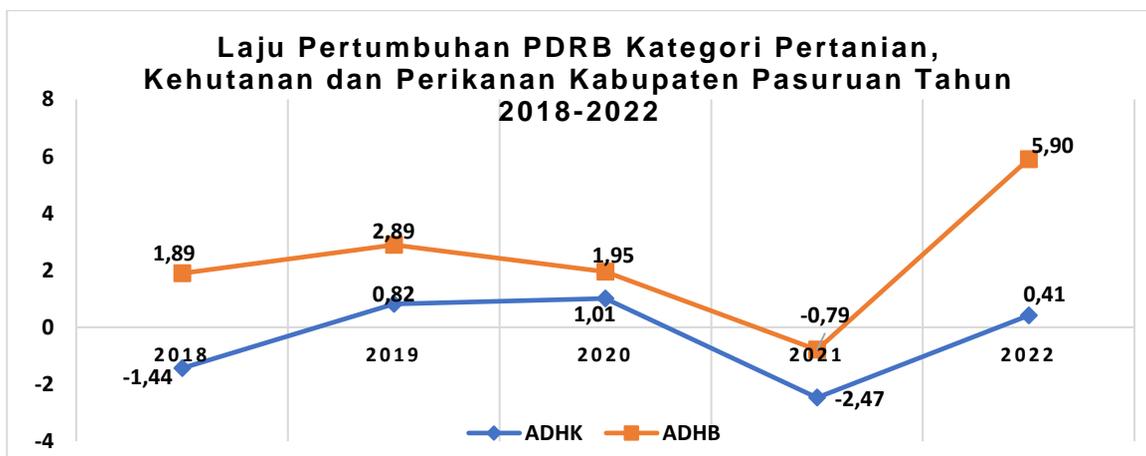
Selama lima tahun terakhir (2018-2022), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional. Namun jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, hanya pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan berada di bawah Provinsi Jawa Timur dengan selisih yang sangat sedikit yaitu 0,01%. Apabila dilihat dari pertumbuhan tahunan, dalam periode 2018-2019 dan 2020-2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan. Akan tetapi pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan dan bahkan seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi di wilayah Indonesia mengalami penurunan karena terjadinya Pandemi *covid-19*. Namun *shock* perekonomian tersebut dapat di atasi sehingga pada tahun 2021 dan 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan kembali mengalami peningkatan.

2.2.1.1.1 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan secara ekonomi karena PDRB menggambarkan nilai output yang dihasilkan oleh seluruh sector produksi dalam suatu provinsi atau kabupaten/kota. Ada dua macam PDRB, yaitu PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) atau sering disebut pula sebagai PDRB nominal dan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2010 atau biasa disebut sebagai PDRB riil. Perubahan PDRB nominal atau PDRB ADHB dapat digunakan untuk menganalisis ada/tidaknya perubahan sektor ekonomi sedangkan PDRB riil atau PDRB ADHK digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi karena dengan harga konstan, maka perubahan PDRB ADHK merefleksikan pertumbuhan kuantitas produksi. Ada 3 (tiga) kategori PDRB yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagai indikator sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (2) Industri Pengolahan, dan (3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

2.2.1.1.1.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala lapangan usaha yang didapatkan dari alam dan merupakan benda maupun barang hidup (biologis) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau dijual kepada orang lain. Lapangan usaha ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.



Grafik 2.4 Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

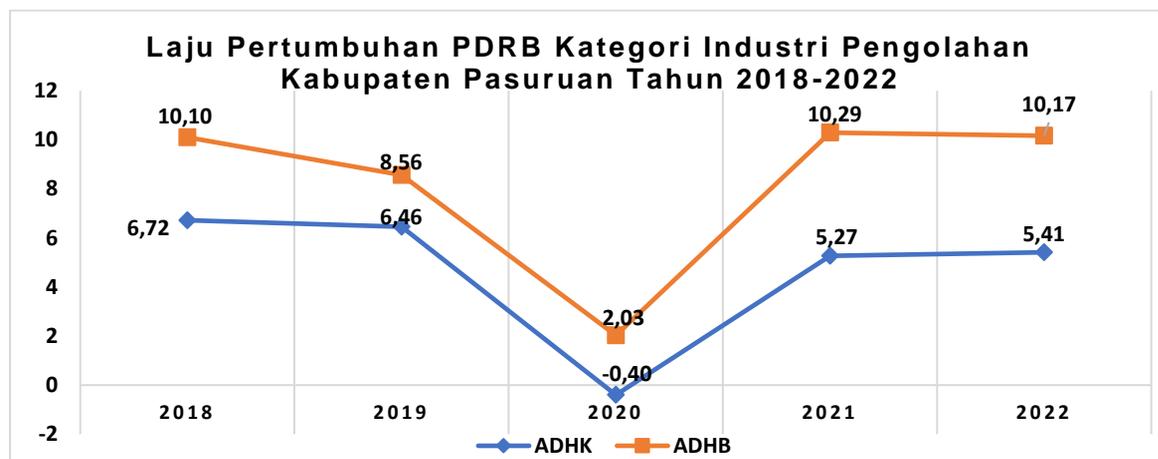
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan selama kurun waktu 2018-2022 cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,33% setiap tahunnya. Sedangkan Laju Pertumbuhan PDRB ADHB menurut lapangan

usaha pertanian, kehutanan dan perikanan cenderung mengalami peningkatan selama periode tahun 2018-2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,37% setiap tahunnya.

2.2.1.1.1.2 Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.



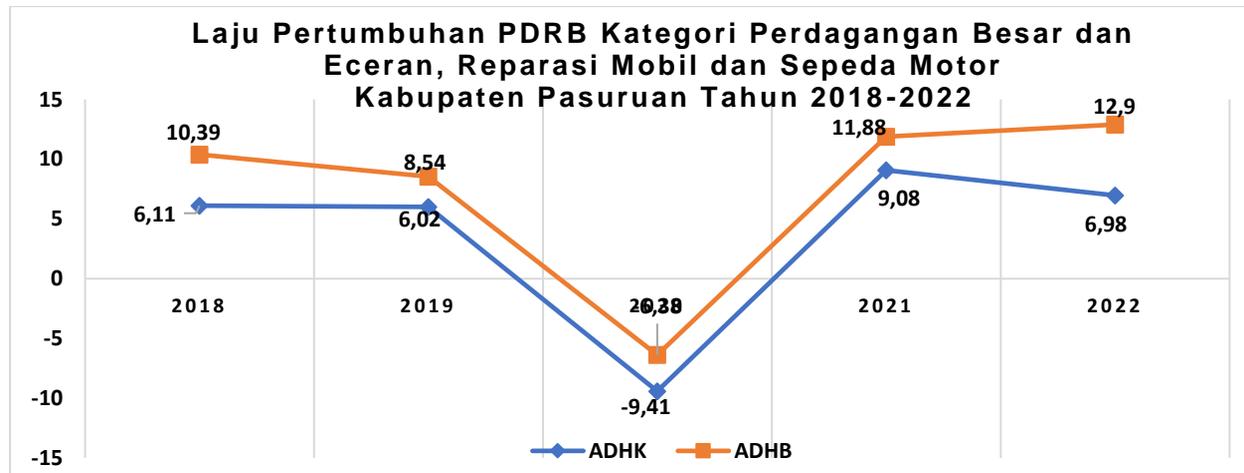
Grafik 2.5 Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha industri pengolahan selama kurun waktu 2018-2022 cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,69% setiap tahunnya. Sedangkan pada Laju Pertumbuhan PDRB ADHB menurut lapangan usaha industri pengolahan mengalami peningkatan selama periode tahun 2018-2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,23% setiap tahunnya.

2.2.1.1.1.3 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut mulai dari penjualan secara grosir maupun eceran. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.



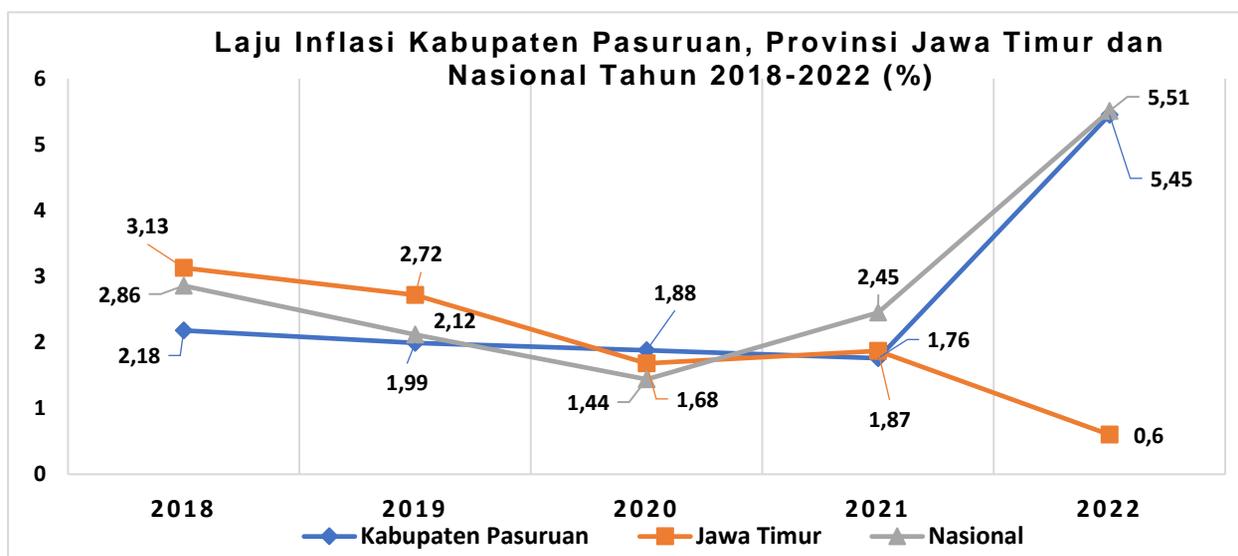
Grafik 2.6 Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor selama kurun waktu 2018-2022 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,76% setiap tahunnya. Sedangkan pada Laju Pertumbuhan PDRB ADHB menurut lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor juga mengalami peningkatan selama periode tahun 2018-2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,47% setiap tahunnya.

2.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga dan yang terjadi secara terus menerus. Kenaikan satu atau dua barang dan jasa tidak dapat disebut sebagai inflasi, terkecuali bila kenaikan itu meluas yang mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Inflasi akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat, karena inflasi akan menurunkan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat mengindikasikan bahwa kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa menurun. Selama periode tahun 2018-2021, laju inflasi Kabupaten Pasuruan menggunakan data laju inflasi dari Kabupaten Probolinggo karena memiliki jarak yang dekat dengan Kabupaten Pasuruan.



Grafik 2.7 Laju Inflasi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Inflasi Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada inflasi Kabupaten Probolinggo pada kurun waktu 2018-2022 terus mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, 2019 dan 2021, inflasi Kabupaten Pasuruan lebih rendah dibandingkan dengan Inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional, namun pada tahun 2020, inflasi Kabupaten Pasuruan lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pada tahun 2022, inflasi di Kabupaten Pasuruan lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Timur tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan Nasional.

2.2.1.2 Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin adalah adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Untuk mengukur kemiskinan, digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

**Tabel 2.17
Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2018-2022**

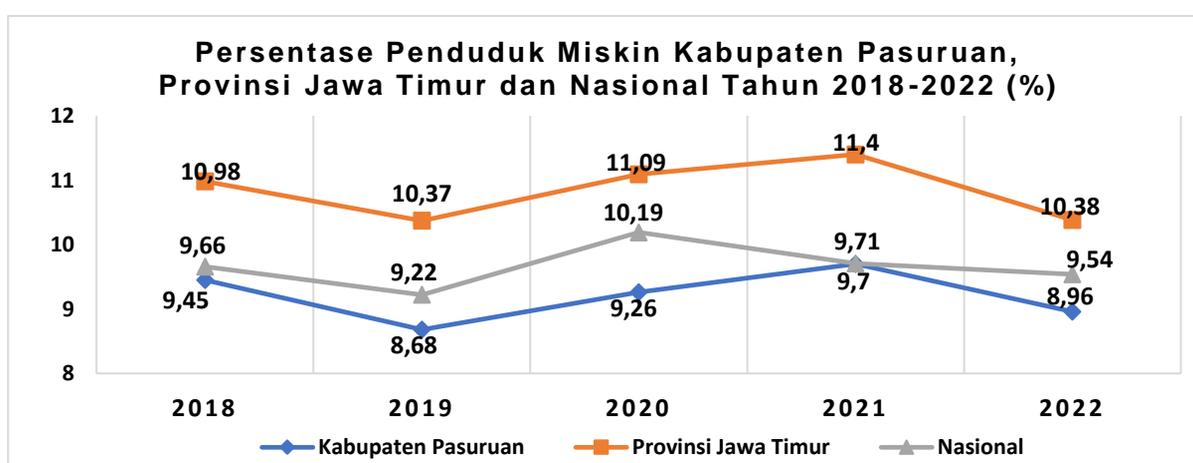
Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuk Jiwa)	152,48	141,09	151,43	159,78	148,62
Persentase Penduduk Miskin (%)	9,45	8,68	9,26	9,7	8,96

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	331.057	335.653	355.299	368.686	394.016
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,5	1,56	1,15	1,17	1,29
Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,37	0,43	0,23	0,24	0,29

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan perkembangan persentase penduduk miskin di Jawa Timur, selama tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung mengalami penurunan. Penurunan penduduk miskin memberi arti bahwa pengurangan penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita lebih rendah dari garis kemiskinan sedangkan peningkatan penduduk miskin memberi arti bahwa peningkatan penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita lebih rendah dari garis kemiskinan.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, capaian Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasuruan tidak lebih besar meskipun mengalami tren kenaikan. Akan tetapi pada tahun 2022, capaian Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan dan sudah mencapai target yang telah ditentukan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Berbagai upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengurangi kemiskinan ekstrim diantaranya menurunkan beban pengeluaran melalui perlindungan sosial dan meningkatkan pendapatan melalui produktivitas dan inklusi keuangan. Adapun perbandingan Persentase Penduduk Miskin antara Kabupaten Pasuruan dan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada grafik berikut:



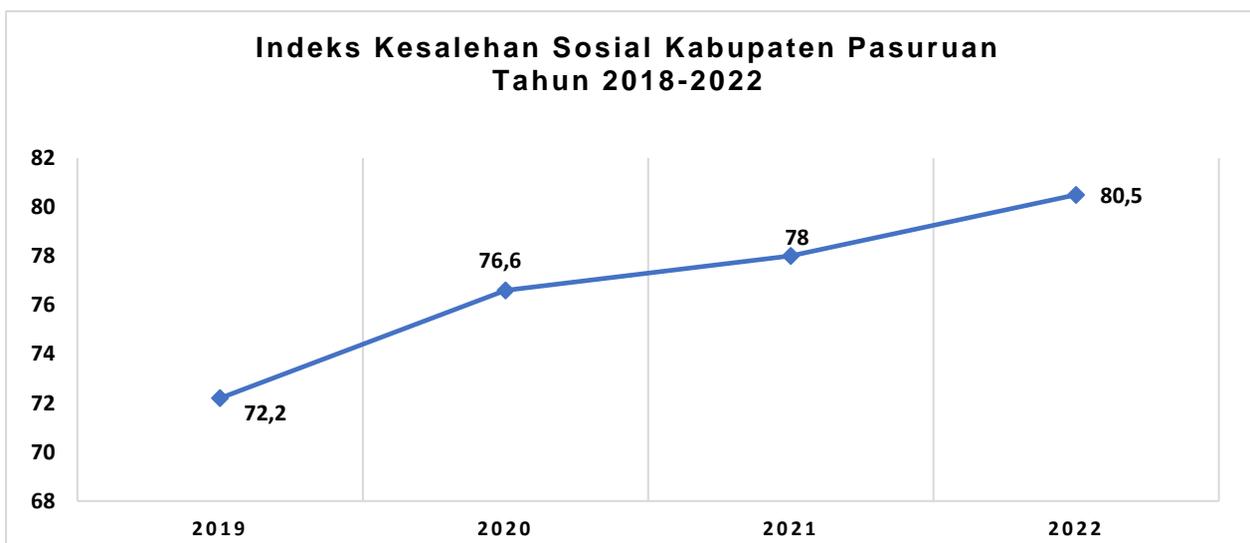
Grafik 2.8 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

2.2.1.3 Indeks Kesalehan Sosial

Indeks Kesalehan Sosial (IKS) masyarakat Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan sepanjang tahun 2019-2022. Skor IKS pada tahun

2020 mengalami kenaikan sebesar 4,4 dari tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2021, skor IKS juga mengalami kenaikan sebesar 1,4. Pada survey yang dilakukan di tahun 2022, skor IKS masyarakat Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan sebesar 2,5 dari skor tahun 2021. Skor yang diperoleh ini menunjukkan bahwa IKS Kabupaten Pasuruan tahun 2022 tergolong pada kategori baik dan telah melebihi target yang ditentukan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023. Dalam rangka mempertahankan capaian IKS masyarakat Kabupaten Pasuruan, Pemerintah perlu bersinergi dengan stakeholder lain untuk melakukan berbagai langkah strategis dalam peningkatan kesalehan sosial, agar nilai-nilai agama dapat memberi kontribusi positif bagi pembangunan sesuai yang diharapkan.



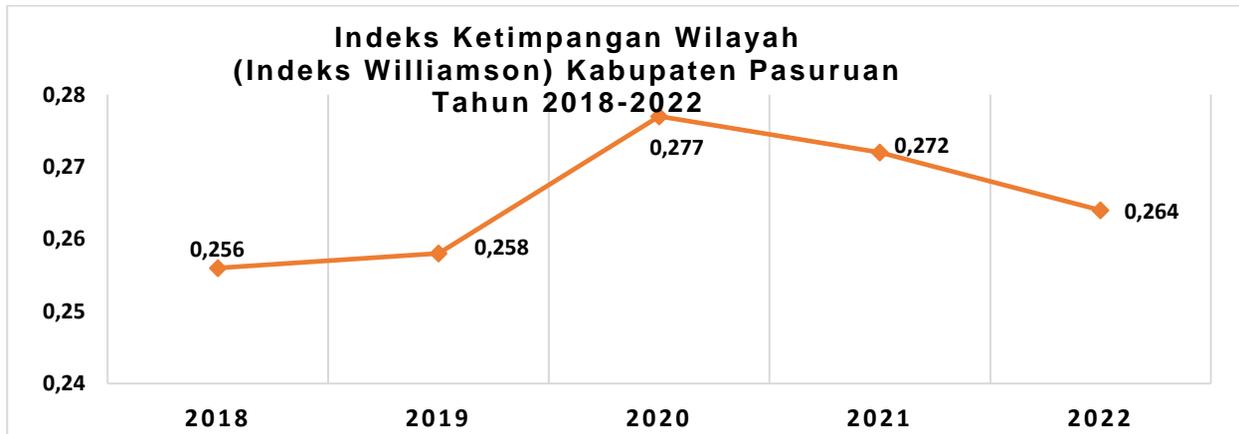
Grafik 2.9 Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Kajian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2022, Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan bekerjasama dengan LPPM Universitas Brawijaya Malang

2.2.1.4 Indeks Ketimpangan Wilayah (Indeks Williamson)

Indeks Williamson merupakan satu instrumen dalam pengukuran pembangunan wilayah di suatu daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih tinggi. Dengan kata lain, Indeks Williamson secara garis besar mengukur seberapa kesenjangan yang ada pada suatu pembangunan pada suatu wilayah. Indeks Williamson di Kabupaten Pasuruan selama periode tahun 2018 sampai dengan 2022 cenderung mengalami kenaikan meskipun capaian di tahun 2022 sudah mencapai target yang ditentukan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Pada tahun 2022, Indeks Williamson masih berkategori rendah yang berarti bahwa tingkat kesenjangan antar wilayah di kabupaten pasuruan masuk dalam kategori rendah. Angka ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan pada tahun 2021 dan tahun 2020. Pada tahun 2020 dan 2021, Indeks Williamson

mengalami kenaikan dikarenakan adanya Pandemi covid-19 yang menyebabkan beberapa unit-unit ekonomi tidak dapat beraktivitas secara optimal sehingga terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan banyak yang mengalami kerugian.



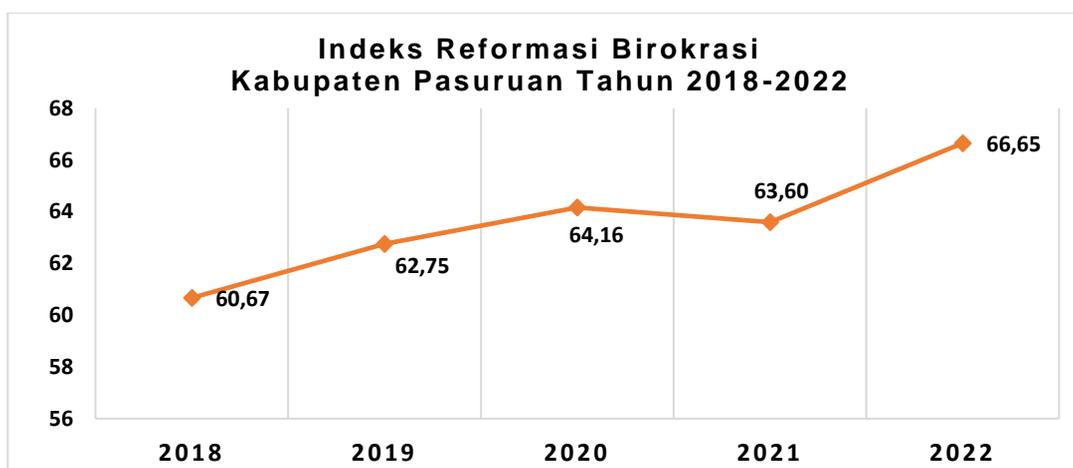
Grafik 2.10 Indeks Kesenjangan Wilayah (Indeks Williamson) Tahun 2018-2022

Sumber: Kajian Indeks Kesenjangan Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022, Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan bekerjasama dengan LPPM Universitas Brawijaya Malang

Penyebab kesenjangan wilayah di Kabupaten Pasuruan dikarenakan 5 (lima) faktor yang terdiri dari beberapa variabel antara lain: **Faktor pertama** terdiri dari 8 (delapan) variabel yaitu inovasi, informasi pasar, jaringan pemasaran, dukungan pemerintah, kemitraan dengan pihak lain, skill, akses informasi dan penggunaan teknologi modern. Faktor pertama diberi nama faktor produksi dan pemasaran. **Faktor kedua** terdiri dari 7 (tujuh) variabel yaitu akses menuju sarana pendidikan, akses menuju sarana kesehatan, akses air bersih, kondisi jalan, akses pasar, akses birokrasi, dan akses air bersih. Faktor kedua diberi nama faktor aksesibilitas. **Faktor ketiga** terdiri dari 3 (tiga) variabel yaitu keterisolasian geografis, potensi alam desa/kelurahan, serta jenis guna lahan. Faktor ketiga diberi nama faktor demografi. **Faktor keempat** terdiri dari 4 (empat) variabel yaitu kondisi non fisik pendidikan, kondisi non fisik Pendidikan, kondisi fisik kesehatan dan kondisi fisik pendidikan. Faktor keempat diberi nama faktor fasilitas sosial. **Faktor kelima** terdiri dari 3 (tiga) variabel yaitu keterisolasian geografis, potensi lahan dan jenis guna lahan. Faktor 5 diberi nama faktor sumberdaya alam.

2.2.1.5 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.



Grafik 2.11 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022
 Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2022

Tabel 2.18
Rincian Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	10,39	10,62
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,52	6,29
	III. Reform	30,00	16,67	16,70
	Total Komponen Pengungkit	60,00	31,58	33,61
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,07	8,41
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,55	9,45
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,37	8,96
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,03	6,22
	Total Komponen Hasil	40,00	32,02	33,04
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	63,60	66,65

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2022

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasuruan selama kurun waktu 2018-2022 cenderung mengalami kenaikan. Peningkatan tersebut dikarenakan berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit dan komponen hasil.

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

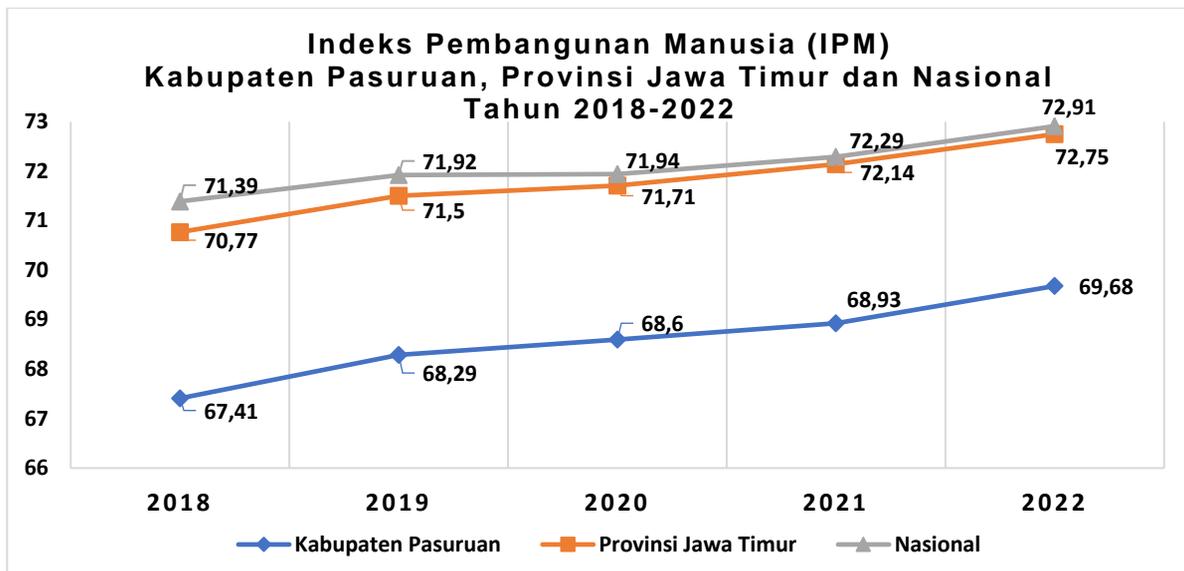
IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Besaran IPM Kabupaten Pasuruan didukung atas pencapaian komponen IPM di dalamnya, yaitu harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Kondisi capaian masing-masing komponen IPM Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
IPM Kab Pasuruan	67,41	68,29	68,60	68,93	69,68
Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,01	70,17	70,23	70,25	70,55
Angka Harapan Sekolah (Tahun)	12,30	12,31	12,41	12,58	12,76
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,83	7,11	7,40	7,41	7,42
Pengeluaran Per Kapita (Ribuan Rupiah)	9.933	10.381	10.164	10.297	10.726

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

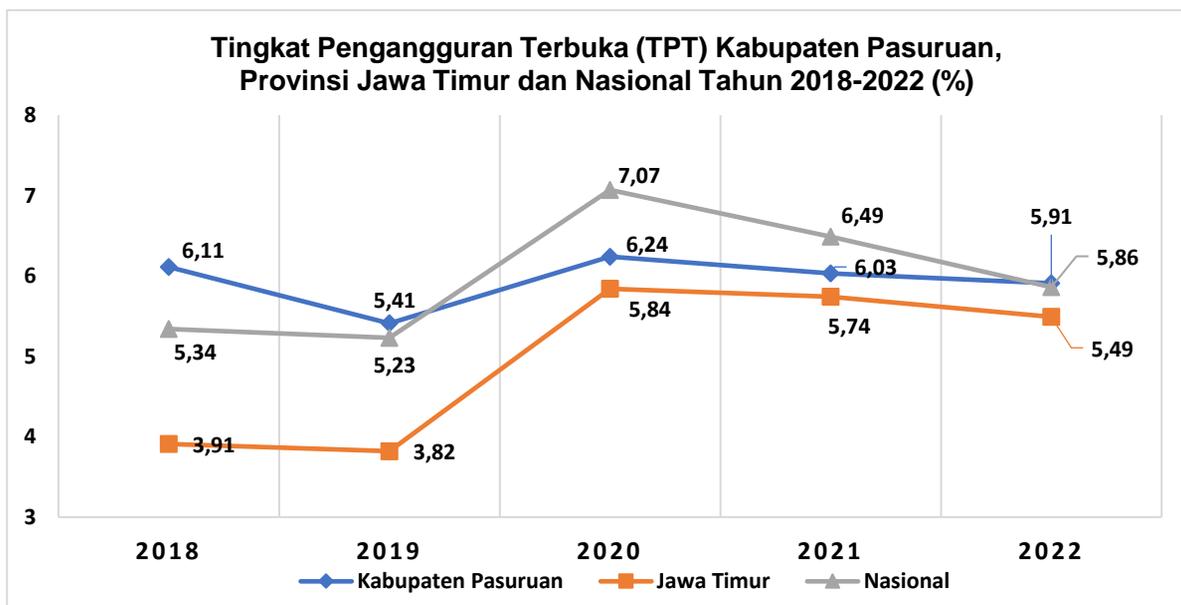
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,83% per tahun. Pada tahun 2018 nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasuruan terus meningkat hingga tahun 2022. Dalam kurun waktu tahun 2018-2022, nilai IPM Kabupaten Pasuruan lebih rendah apabila dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Jawa Timur dan Nasional meskipun pada tahun 2022 sudah mencapai target yang telah ditentukan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Nilai IPM di Kabupaten Pasuruan masuk kategori sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$).



Grafik 2.12 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022
 Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

2.2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnya pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dihitung berdasarkan jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja. Adapun TPT Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2.13 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2018-2022
 Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

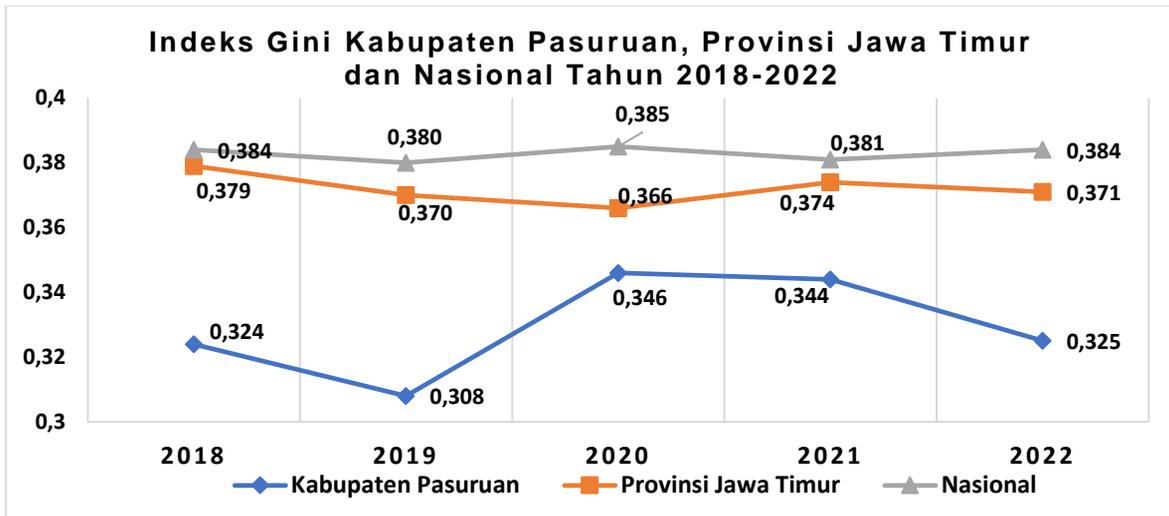
Selama tahun 2018-2022, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pasuruan menunjukkan perkembangan fluktuatif cenderung naik dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -0,37% per tahun. TPT di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020, TPT

mengalami kenaikan sebagai akibat dari masa pandemi covid-19 sehingga banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya yang menyebabkan tingkat pengangguran menjadi naik. Pada tahun 2020 dan 2021, TPT mengalami penurunan dikarenakan perekonomian sudah mulai pulih pasca pandemi covid-19.

Pada tahun 2018 dan 2019, TPT Kabupaten Pasuruan lebih tinggi dibandingkan dengan capaian TPT Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Namun pada tahun 2020 dan 2021, capaian TPT Kabupaten Pasuruan masih lebih baik atau lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Nasional tetapi lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Timur. TPT Kabupaten Pasuruan tahun 2022 sudah mencapai target yang ditentukan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 meskipun capaiannya lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

2.2.1.8 Indeks Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Secara umum, kesenjangan pendapatan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang diukur dengan menggunakan Gini Ratio mengalami sedikit tren kenaikan. Namun jika dibandingkan dengan kesenjangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Kabupaten Pasuruan memiliki kondisi kesenjangan yang lebih rendah, meskipun masih berada pada angka 0,325 yang mengindikasikan bahwa kesenjangan pendapatan di Kabupaten Pasuruan masih terklasifikasi dalam kondisi kesenjangan sedang (berdasarkan kriteria dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010). Selain itu, angka Gini Ratio yang fluktuatif juga menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan di Kabupaten Pasuruan cukup mudah dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi baik di lingkungan eksternal Kabupaten Pasuruan.



Grafik 2.14 Indeks Gini Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Sebaran pendapatan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Pasuruan dilakukan *clusterisasi*. *Clusterisasi* ini didasarkan pada data PDRB Perkapita Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 yang diolah berdasar standar deviasi. Hasil dari standar deviasi tersebut, akan nampak Kecamatan mana saja yang masuk dalam kategori pendapatan perkapita rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Pola *clusterisasi* pendapatan tersebut, akan nampak lebih jelas lagi jika digambarkan dalam bentuk peta, sehingga, sebaran pendapatan, keterikatan spasial (kewilayahan) dan sektor-sektor unggulan pendukung terbentuknya *cluster* pendapatan akan sangat tampak lebih jelas. Untuk itu, pola persebaran pendapatan perkapita kecamatan di Kabupaten Pasuruan jika dipetakan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



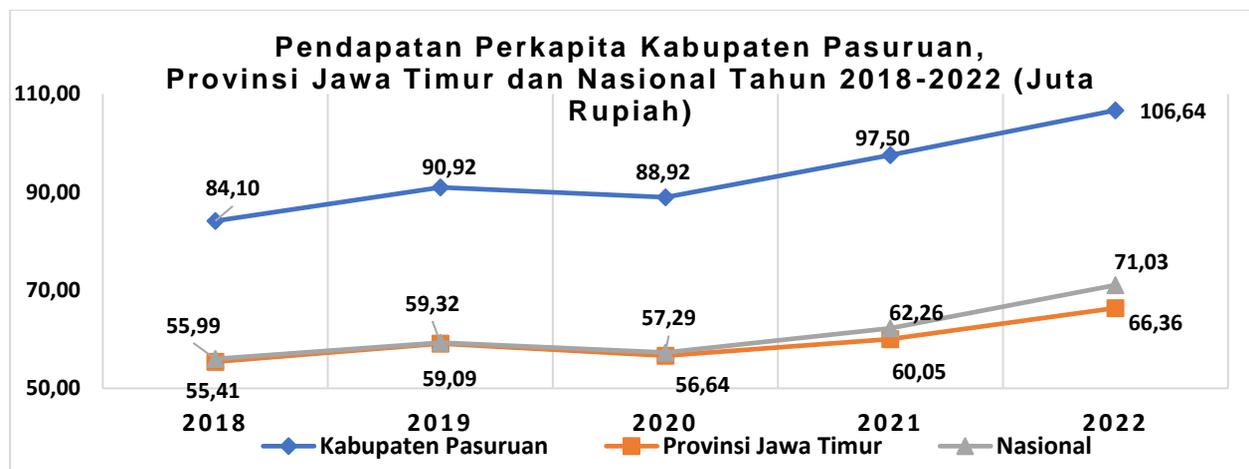
Gambar 2.7 Peta Sebaran Pendapatan Perkapita Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

Sumber: Kajian Indeks Kesenjangan Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022, Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan bekerjasama dengan LPPM Universitas Brawijaya Malang

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa masyarakat dengan pendapatan tertinggi hanya terdapat pada 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Gempol dan Kecamatan Pandaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya Perusahaan yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga masyarakatnya mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kecamatan lain dengan sedikit Perusahaan sehingga mempunyai tingkat penghasilan yang rendah.

2.2.1.9 Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah atau PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) perkapita adalah PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Selama kurun waktu 2018-2022, pendapatan perkapita Kabupaten Pasuruan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan perkapita Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pendapatan perkapita Kabupaten Pasuruan juga selalu mengalami peningkatan dari tahun 2018-2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,23%.



Grafik 2.15 Pendapatan Perkapita Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022

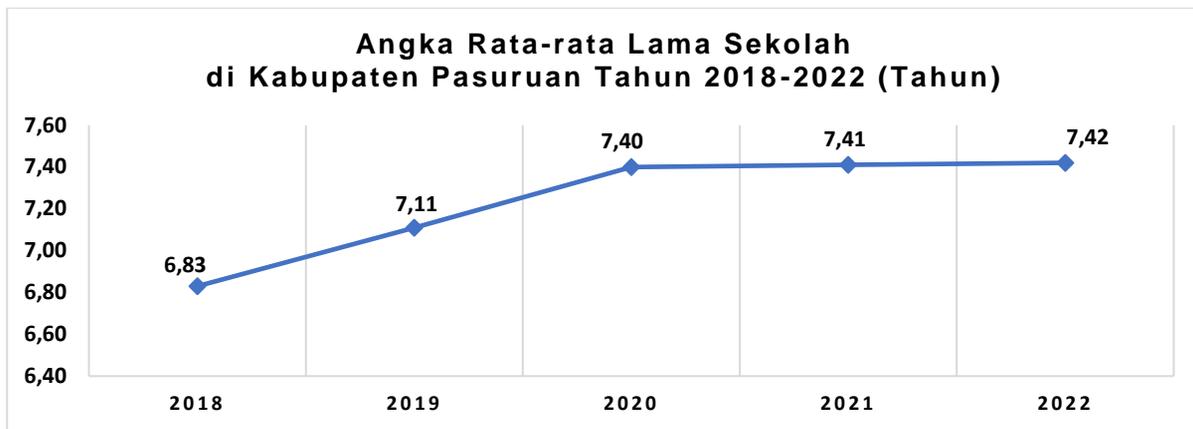
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Pendidikan

2.2.2.1.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah atau *mean years school* adalah rata-rata lama belajar siswa sampai lulus sekolah pada suatu jenjang pendidikan dan dinyatakan dalam tahun. Adapun capaian angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam grafik berikut:

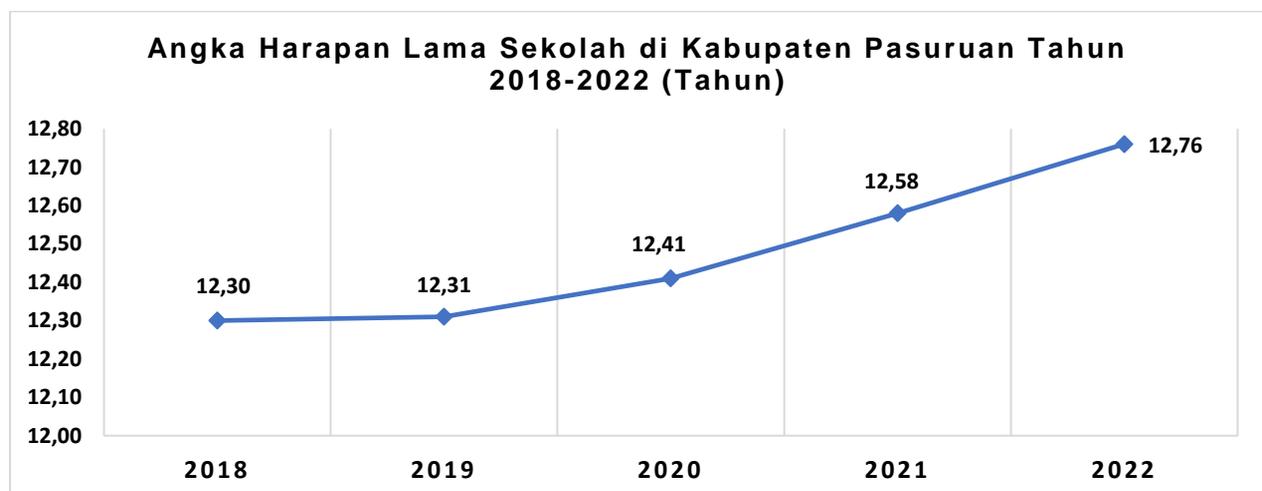


Grafik 2.16 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022
 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Selama periode lima tahun terakhir (2018-2022) angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pasuruan menunjukkan peningkatan meskipun tidak signifikan. Rata-rata penduduk Kabupaten Pasuruan usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah menempuh pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas I). Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan karena kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan.

2.2.2.1.2 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan diperoleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Adapun capaian Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:



Grafik 2.17 Harapan Sekolah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022
 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

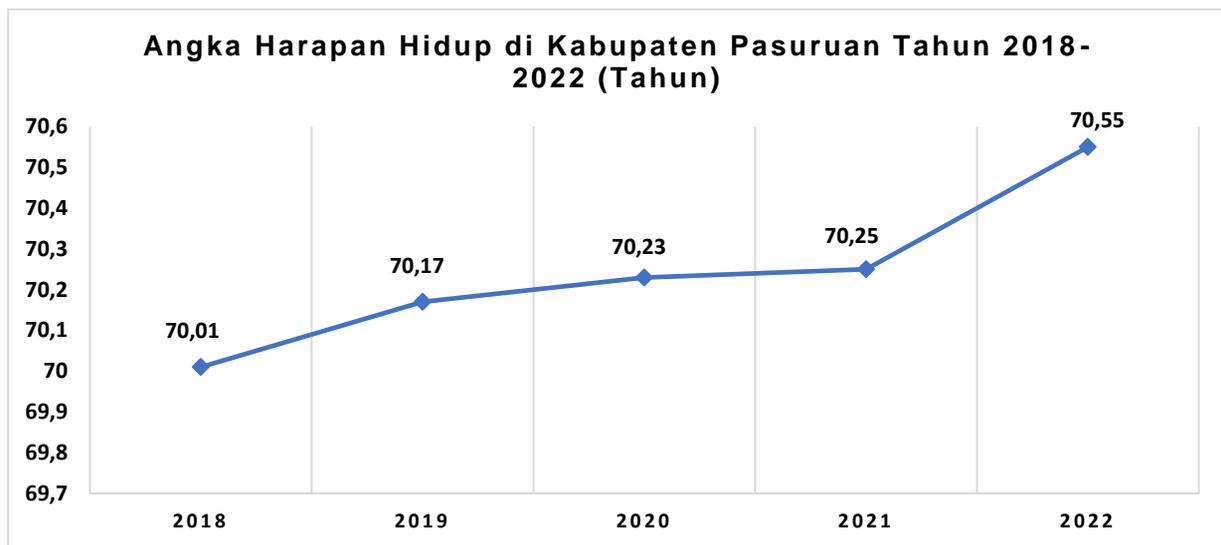
Selama periode 2018 hingga 2022, harapan lama sekolah di Kabupaten Pasuruan mengalami rata-rata peningkatan sebesar 0,92% per tahun.

Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2022, harapan lama sekolah di Kabupaten Pasuruan telah mencapai 12,76 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA/Sederajat.

2.2.2.2 Kesehatan

2.2.2.2.1 Angka Harapan Hidup (AHH)

Data AHH Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan.



Grafik 2.18 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pasuruan cenderung mengalami peningkatan selama periode lima tahun (2018-2022). Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022, rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 0,19% per tahun atau naik 0,13 tahun per tahunnya. Ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Kabupaten Pasuruan.

2.2.2.2.2 Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita dengan gizi buruk di Kabupaten Pasuruan selalu mengalami penurunan selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan telah mampu menekan kasus balita dengan gizi buruk walaupun tetap perlu upaya lebih baik lagi agar nilai cakupan balita dengan gizi buruk di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan yang signifikan dan berdampak pada penurunan angka prevalensi stunting.

Tabel 2.20
Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

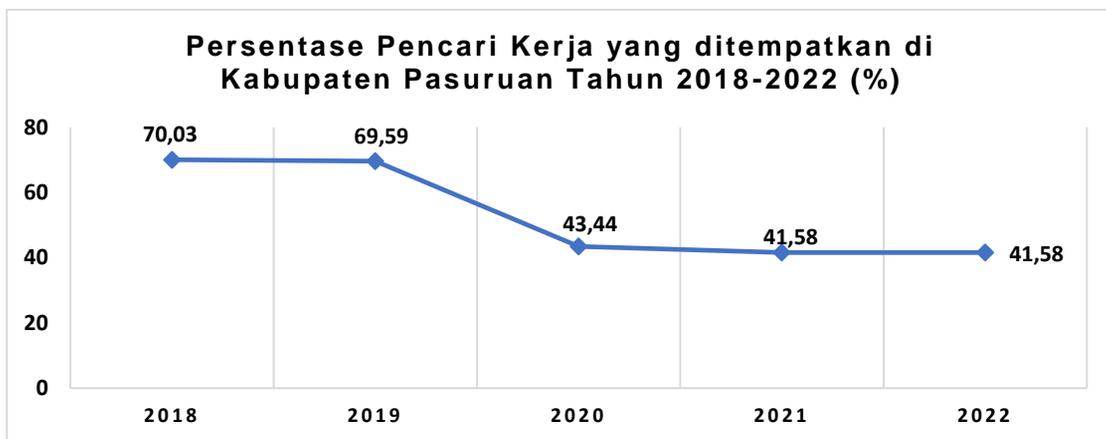
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Balita Gizi Buruk	41	40	34	31	30
Jumlah Balita	119.214	118.492	117.832	118.395	117.907
Persentase Balita Gizi Buruk	0,034	0,033	0,028	0,026	0,025

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2022

2.2.2.3 Tenaga Kerja

2.2.2.3.1 Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan

Persentase pencari kerja yang ditempatkan dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2021 mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2022, persentase Pencari Kerja yang ditempatkan tidak mengalami kenaikan dari tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan industri (tidak terjadi *link and match*) dan peralihan teknologi menuju industri revolusi 4.0 yang berimbas pada tergantikannya tenaga manusia oleh mesin industri.

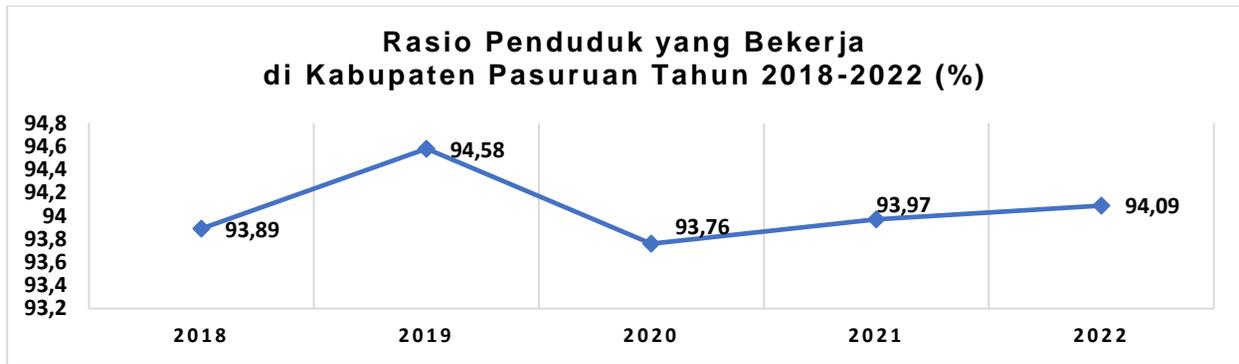


Grafik 2.19 Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, 2022

2.2.2.3.2 Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan jumlah angkatan.

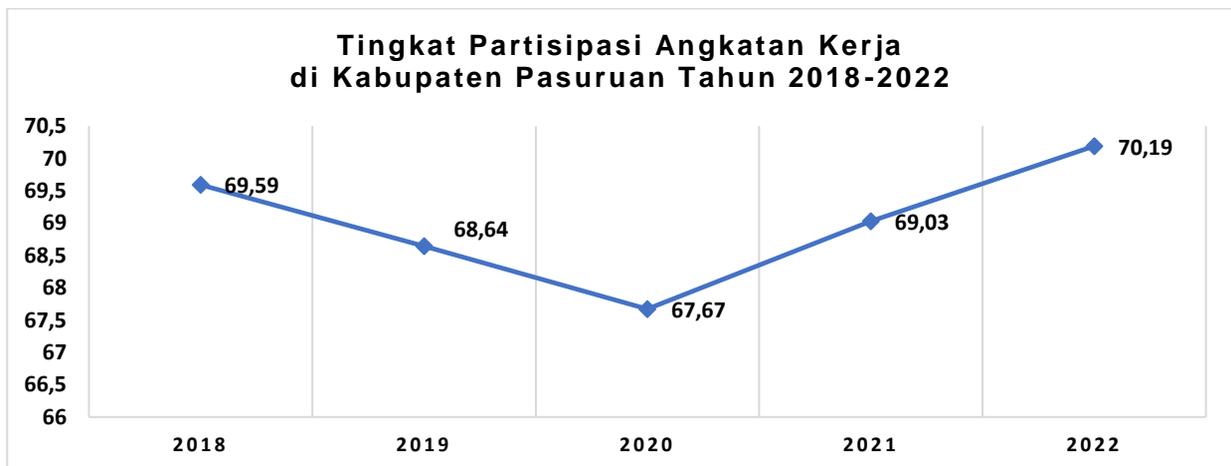


Grafik 2.20 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022
 Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, 2022, Diolah

Rasio penduduk yang bekerja selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2022 mengalami tren kenaikan, namun pada tahun 2020 menurun karena adanya pandemi *covid-19* yang mengakibatkan banyaknya lapangan usaha terutama di sektor perindustrian melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Selain itu pada sektor perdagangan juga banyak pedagang yang tidak berdagang karena adanya kebijakan pembatasan sosial. Namun pada tahun 2021 dan 2022, rasio penduduk yang bekerja kembali mengalami peningkatan seiring dengan mulai pulihnya kondisi perekonomian daerah.

2.2.2.3.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Data TPAK Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022 cenderung mengalami tren peningkatan.



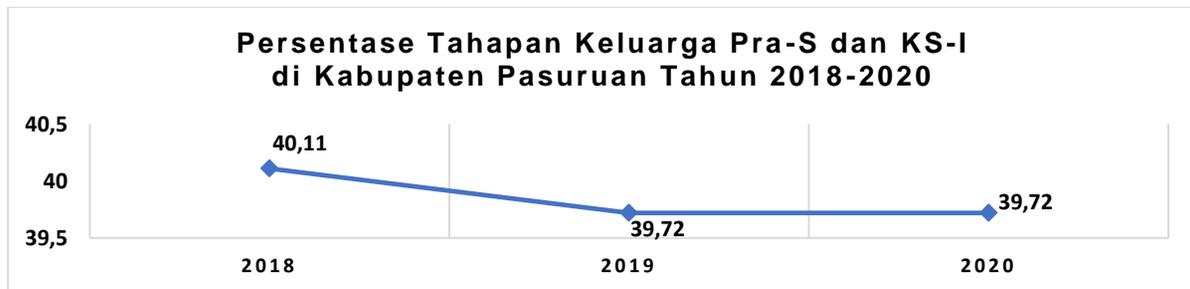
Grafik 2.21 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022
 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

2.2.2.4 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.2.2.4.1 Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan

keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Indeks Pembangunan Keluarga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Indikator Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Pasuruan baru dijalankan pada tahun 2021 sebagai pengganti indikator Persentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I yang dilaksanakan dari tahun 2018-2020. Persentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I di Kabupaten Pasuruan selama kurun waktu 2018-2020 mengalami tren penurunan.



Grafik 2.22 Persentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2020

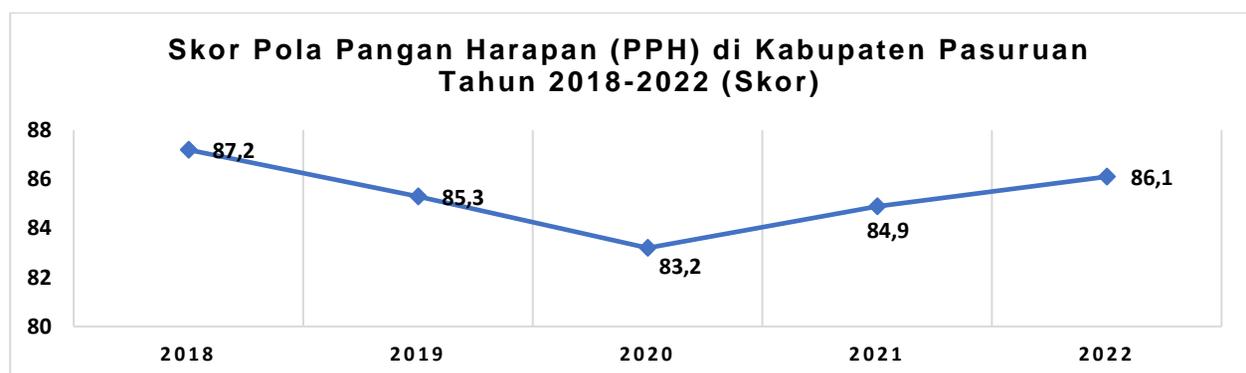
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020

Mulai tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan perhitungan Indeks Pembangunan Keluarga. Pada tahun 2022 Indeks Pembangunan Keluarga mencapai 55,21 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 55,15 sehingga status pembangunan keluarga di Kabupaten Pasuruan berkategori cukup baik (berkembang).

2.2.2.5 Pangan

2.2.2.5.1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan pangan yang benar-benar menjadi harapan baik di tingkat konsumsi maupun ketersediaan, serta dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan dan evaluasi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk. Adapun capaian angka skor pola pangan harapan di Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:



Grafik 2.23 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Pasuruan cenderung mengalami tren penurunan dari tahun 2018 sampai 2022. Akan tetapi pada periode tahun 2020 sampai 2022, capaian PPH mengalami peningkatan yang berarti konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Pasuruan semakin beragam dan bergizi seimbang setelah adanya Pandemi Covid-19 serta berada pada angka 86 (kategori baik) pada tahun 2021 dan 2022.

2.2.2.5.2 Angka Kecukupan Gizi (AKG)

Angka Kecukupan Gizi (AKG) merupakan suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.



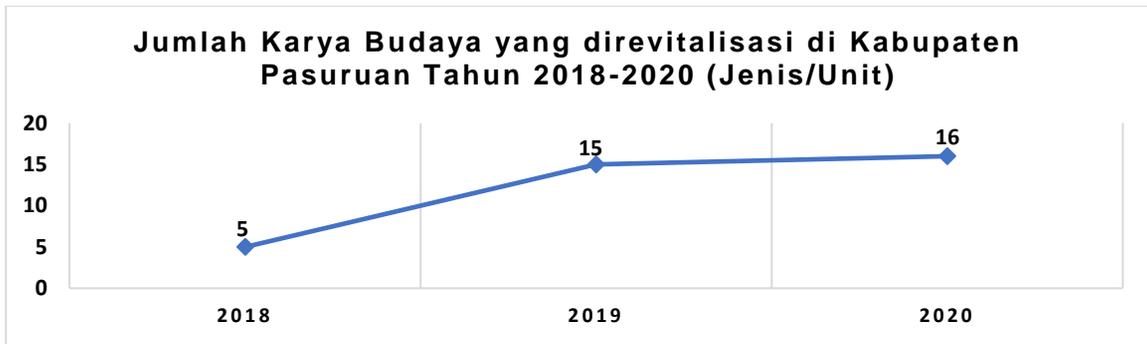
Grafik 2.24 Angka Kecukupan Gizi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kabupaten Pasuruan mengalami tren peningkatan selama tahun 2018-2022, akan tetapi pada tahun 2022 AKG mengalami penurunan dari tahun 2021.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1 Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi

Jumlah karya budaya yang direvitalisasi di Kabupaten Pasuruan mengalami tren kenaikan dari tahun 2018 sampai 2020. Hal tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dan temuan benda cagar budaya. Pada tahun 2021 indikator jumlah karya budaya yang direvitalisasi diganti menjadi 2 indikator yaitu persentase peningkatan pelestarian dan pengembangan Cagar Budaya dengan capaian 20% serta persentase peningkatan pengelolaan museum dengan capaian 20%. Kemudian pada tahun 2022 diganti lagi menjadi Nilai Pembangunan Kebudayaan dengan capaian 53,19%.

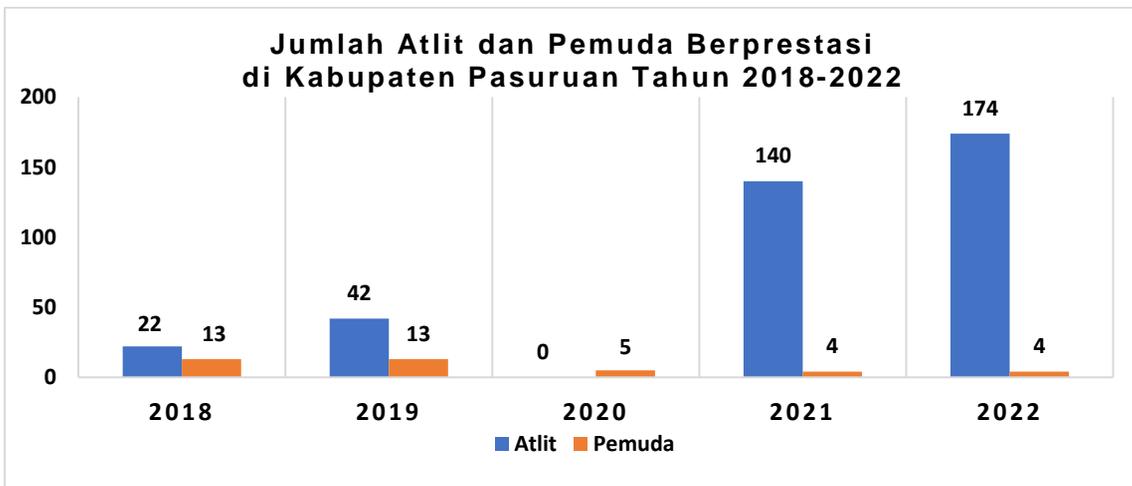


Grafik 2.25 Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2020

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2022

2.2.3.2 Jumlah Pemuda dan Atlet Berprestasi

Dapat diketahui bahwa jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Pasuruan tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan. Sedangkan jumlah pemuda berprestasi mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai 2022. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya sarana dan prasarana kepemudaan berupa Gedung balai pemuda sebagai *Base Camp* tempat berkumpulnya pemuda.



Grafik 2.26 Jumlah Atlet dan Pemuda Berprestasi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, 2022

2.3 ASPEK DAYA SAING

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan Ekonomi Daerah mempunyai beberapa indikator yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita, Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan) dan produktivitas total daerah. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

2.3.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman dan tembakau. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dan sebagainya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.21
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp/bln)	Rp/Bulan	919.843	964.049	1.014.043	967.469	1.007.239

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per kapita di Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 2018-2022 cenderung mengalami *tren* kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,80% per tahun. Pada tahun 2021 dikarenakan adanya pandemi *covid-19*, masyarakat mengurangi pengeluaran konsumsi rumah tangga sehingga terjadi penurunan sebesar 4,6% dari tahun 2020. Akan tetapi pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat yang semakin membaik.

2.3.1.2 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita adalah persentase jumlah pengeluaran konsumsi non pangan dibandingkan jumlah seluruh pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita baik yang makanan maupun yang non makanan. Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.22
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Pengeluaran Konsumsi non pangan perkapita (%)	%	43,56	46,57	47,82	43,29	43,01

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka, 2020, 2021, 2022

Selama kurun waktu 2018-2022, persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kabupaten Pasuruan cenderung mengalami *tren* penurunan dikarenakan masyarakat Kabupaten Pasuruan masih mengutamakan kebutuhan pangan sehingga pengeluaran konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Pasuruan lebih tinggi daripada pengeluaran non pangan.

2.3.1.3 Produktivitas Total Daerah

Pengukuran produktivitas kabupaten wajib dilakukan agar dapat diketahui pencapaian produktivitas sebagai muara dari keseluruhan proses pembangunan di setiap daerah. Produktivitas total daerah diukur dari jumlah Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Berlaku dibagi dengan Jumlah Angkatan Kerja. Produktivitas Total Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.23
Produktivitas Total Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Produktivitas total daerah (Rp. Juta/ angkatan kerja)	Rp. Juta/ Angkatan Kerja	157,16	169,46	167,59	175,89	188,45

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka, 2022 Diolah

Produktivitas total daerah di Kabupaten Pasuruan selama kurun waktu 2018-2022 terus mengalami peningkatan dikarenakan Produk Domestik Bruto

atas dasar Harga Berlaku mengalami rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi setiap tahunnya yaitu sebesar 6,24% dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerja sebesar 1,47%.

2.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur mempunyai beberapa indikator yaitu Sarana Prasarana Transportasi, Jaringan Listrik dan Ketersediaan Air Baku.

2.3.2.1 Sarana Prasarana Transportasi

Aspek daya saing daerah yang berkaitan dengan infrastruktur memiliki sasaran strategis membangun konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik, serta komunikasi dan informasi dalam rangka membuka akses daerah seluas-luasnya. Masukan/*input* yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing infrastruktur antara lain: (1) Ketersediaan infrastruktur transportasi untuk memperlancar arus barang, jasa, manusia dan menjadi penghubung yang efisien antara sumber bahan baku, pusat produksi dan pasar, (2) Ketersediaan listrik yang memadai dan menjadi insentif untuk membangun industri serta memperluas jangkauan pemasaran dan distribusi, (3) Ketersediaan sarana telekomunikasi untuk memudahkan arus informasi dengan lebih luas dan cepat.

Wilayah Kabupaten Pasuruan telah terhubung oleh jalan kabupaten sepanjang 2.315,89 km dan didukung juga oleh adanya pembangunan jalan lingkungan. Selain itu konektivitas/aksesibilitas di wilayah Kabupaten Pasuruan juga didukung oleh jalan nasional sepanjang 86,83 km dan jalan provinsi sepanjang 73,93 km. Guna mendukung aksesibilitas dan konektivitas di wilayah Jawa Timur, Pemerintah telah menetapkan proyek strategis pembangunan jalan tol yang melewati wilayah Kabupaten Pasuruan. Ruas jalan tol yang sudah selesai dibangun dan berfungsi adalah ruas Porong-Gempol, Gempol-Pandaan dan Gempol-Pasuruan, sedangkan yang masih dalam tahap penyelesaian adalah ruas Pandaan-Malang dan Pasuruan-Probolinggo.

Keberadaan jalan tol ini mendukung perkembangan wilayah, meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas orang, jasa dan barang. Selain pembangunan jalan tol, guna meningkatkan aksesibilitas dan memperlancar arus distribusi orang dan barang, Pemerintah juga berencana untuk membangun lintasan KA *double track* lintas Surabaya-Bangil-Malang-Blitar dan Surabaya-Bangil-Banyuwangi. Sehingga ke depannya stasiun kereta api Bangil bisa menjadi salah satu pusat angkutan barang maupun orang di wilayah Jawa Timur.

2.3.2.2 Jaringan Listrik

Saat ini energi listrik sudah menjadi kebutuhan utama baik individu maupun badan usaha. Pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di suatu wilayah.

2.3.2.3 Ketersediaan Air Baku

Pemenuhan kebutuhan air baku air minum di Kabupaten Pasuruan didapatkan dari mata air, air tanah dan sumur dangkal. Pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum dilakukan oleh masyarakat sendiri, SPAM perdesaan/HIPPAM dan PDAM, dimana pengembangan SPAM didukung oleh dana APBD Kabupaten, APBN maupun Hibah APBN/Pamsimas. Pengembangan sistem penyediaan air minum oleh PDAM seringkali terkendala pada ketersediaan sumber air baku karena sumber air yang ada juga dimanfaatkan untuk pengairan irigasi maupun pelayanan SPAM perdesaan.

Pada tahun 2017–2019 Pemerintah melakukan pembangunan proyek strategis SPAM Regional Umbulan yang menggunakan Mata Air Umbulan (yang terletak di Kecamatan Winongan-Kabupaten Pasuruan) sebagai sumber air bakunya. Dari proyek SPAM Regional Umbulan ini Pemerintah Kabupaten Pasuruan, melalui PDAM, mendapatkan jatah sebesar 410 l/dt yang akan digunakan untuk pengembangan pelayanan di Kecamatan Rejoso, Grati, Winongan, Pohjentrek, Kraton, Rembang, Bangil, Beji dan Gempol.

2.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator :

- 1) Angka kriminalitas;
- 2) Jumlah demonstrasi;
- 3) Lama proses perijinan;
- 4) Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah;
- 5) Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha; dan
- 6) Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

Tabel 2.24
Angka Kriminalitas di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	703	643	513	163	246
2	Jumlah penduduk	1.616.578	1.672.396	1.637.682	1.601.923	1.616.190
3	Angka kriminalitas (1/2)*10.000	4,35	3,84	3,13	1,02	1,52

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022, Diolah

Tabel di atas menunjukkan angka kasus kriminalitas pada setiap 10.000 penduduk. Angka kriminalitas di Kabupaten Pasuruan selama kurun waktu tahun 2018 sampai 2022 cenderung mengalami penurunan meskipun pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021.

2.3.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan dan rasio lulusan S1/S2/S3.

Tabel 2.25
Rasio Lulusan S1/S2/S3 dan Rasio Ketergantungan
di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,022	0,023	0,024	0,025	0,027
2.	Rasio Ketergantungan	38,59	39,33	40,24	41,61	42,98

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2022 Diolah

Rasio lulusan SI/S2/S3 dari tahun 2018 sampai 2022 selalu mengalami peningkatan yang menunjukkan jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Pasuruan selalu bertambah setiap tahunnya. Sedangkan rasio ketergantungan juga mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai 2022, yang berarti semakin tinggi pula jumlah penduduk usia produktif yang harus menanggung penduduk usia non produktif di Kabupaten Pasuruan.

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan:

2.4.1.1 Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan, pendidikan diarahkan pada perluasan dan pemerataan pendidikan.

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2018-2022

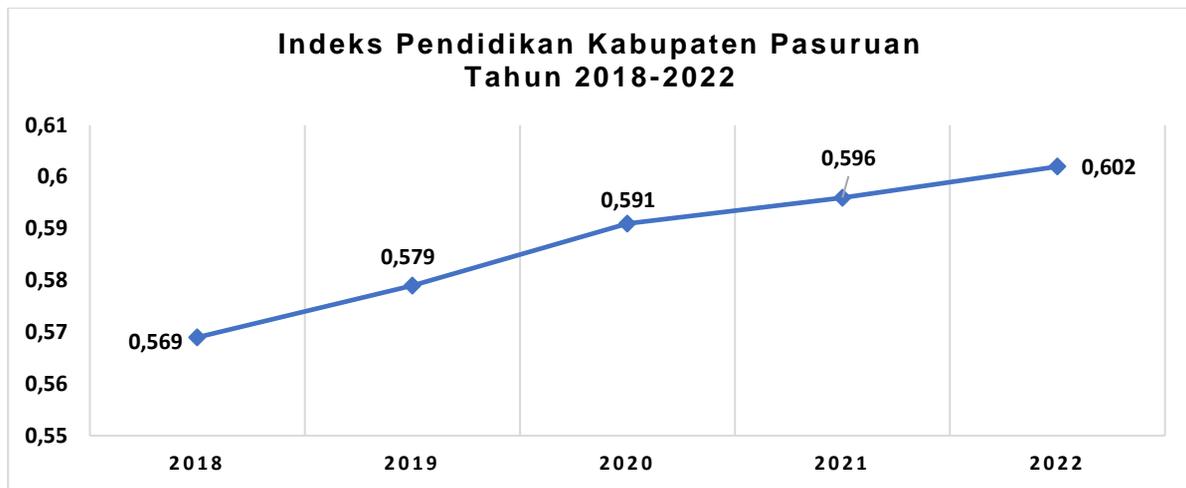
No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD*	%	-	32,45	106,85	52,37	114,79
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar*	%	-	100	85,52	73,17	97,60
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama*	%	-	62,28	65,52	47,50	92,26
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan*	%	-	88,77	2,3	1,41	3,85

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2022
Keterangan: *Indikator baru digunakan tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar dan usia 13 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama masih belum mencapai 100%. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus mengupayakan agar seluruh warga negara yang berusia 7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun dapat menempuh pendidikan dasar 9 tahun sehingga dapat meningkatkan kualitas pemerataan layanan dan mutu Pendidikan di Kabupaten Pasuruan.

2.4.1.1.1 Indeks Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Penduduk dengan pendidikan yang tinggi akan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi di wilayahnya, sebaliknya daerah dengan rata-rata pendidikan penduduknya yang rendah mempunyai produktivitas yang rendah pula. Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang variabelnya terdiri dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun Indeks Pendidikan Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

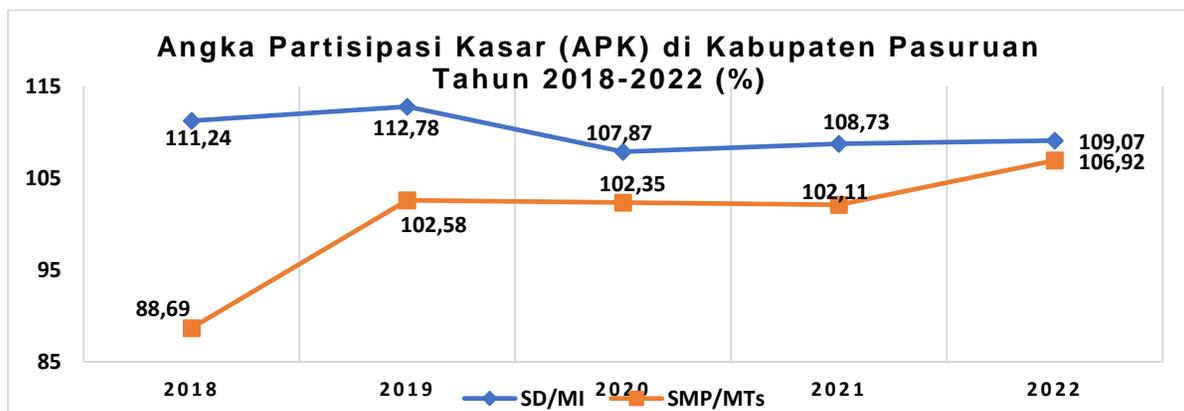


Grafik 2.27 Indeks Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022
 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian Indeks Pendidikan di Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2022 mengalami tren peningkatan yang disebabkan oleh meningkatnya Rata-rata Lama sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Peningkatan ini menggambarkan semakin membaiknya kualitas pendidikan di Kabupaten Pasuruan karena semakin tinggi nilai Indeks Pendidikan, maka semakin besar kontribusinya terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia.

2.4.1.1.2 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah murid penduduk yang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu yang dinyatakan dalam persentase. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

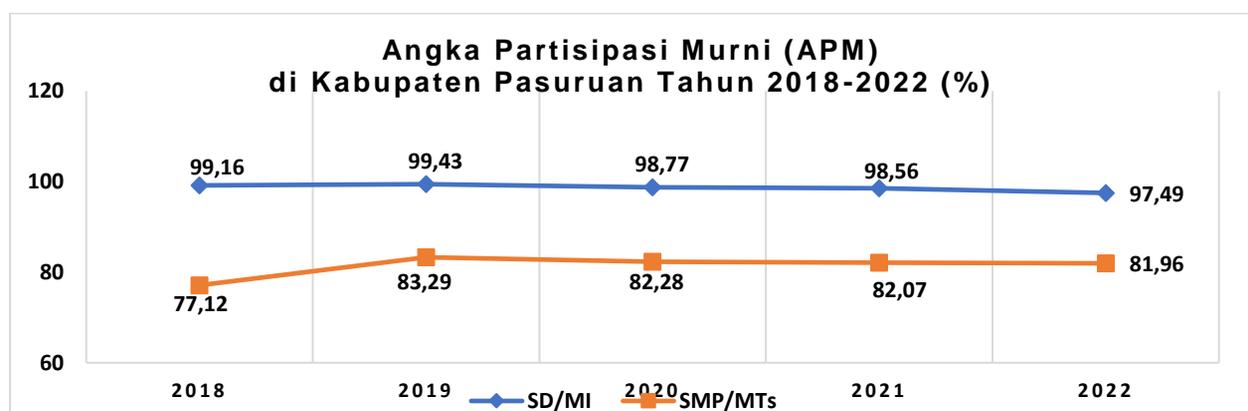


Grafik 2.28 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022
 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018-2022, perkembangan APK SD/MI menunjukkan tren penurunan sedangkan pada APK SMP/MTs menunjukkan tren peningkatan. Semakin tinggi APK SMP/MTs menunjukkan bahwa jumlah siswa atau siswi yang bersekolah pada jenjang SMP/MTs semakin banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia 13-15 tahun.

2.4.1.1.3 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan penduduk yang sedang sekolah dengan usia tertentu pada jenjang tertentu sesuai dengan jenjang peruntukannya. Sehingga dengan kata lain APM dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian usia dengan tingkat pendidikan yang dijalani oleh penduduk tersebut saat ini. APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan.



Grafik 2.29 Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa secara umum dalam rentang tahun 2018-2022, perkembangan APM pada jenjang SD/MI menunjukkan tren penurunan sedangkan APM pada jenjang SMP/MTs menunjukkan tren peningkatan meskipun pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengoptimalkan program wajib belajar 9 tahun agar seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan mendapatkan pendidikan yang baik.

2.4.1.2 Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu unsur kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dalam pemerataan pelayanan kesehatan sehingga masyarakat mampu mengakses dan memenuhi kebutuhan

kesehatan dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan. Maka, harus ada pembangunan kesehatan dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan, kesadaran, dan kemajuan hidup sehat bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan. Di sisi lain, adanya kualitas Sumber Daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam bidang kesehatan juga dapat memberikan kemajuan terhadap kesehatan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Dengan terjadinya kemajuan kesehatan, maka memberikan peningkatan pula terhadap derajat kesehatan di Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah bayi meninggal	Orang	135	134	105	129	77
2.	Jumlah bayi lahir hidup	Orang	25.152	25.118	23.702	24.195	22.812
3.	Jumlah ibu melahirkan yang mati	Orang	28	21	19	25	18
4.	Jumlah ibu melahirkan	Orang	25.152	25.118	24.887	23.967	22.812
5.	Jumlah balita gizi buruk	Orang	41	40	34	13	-
6.	Jumlah balita stunting	Orang	-	-	10.942**	12.719**	8.604**
7.	Jumlah balita yang diukur	Orang	-	-	50.872**	70.267**	79.408**
8.	Persentase Puskesmas dan RSUD terakreditasi madya	%	94	94	94	94	94
9.	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	82,08	82,73	82,75	84,26	85,88
10.	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk*	%	-	n/a	6,69	0,07	0,0696
11.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi*	%	-	100	100	100	88,89
12.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil*	%	-	95,09	93,54	100	102,63
13.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan*	%	-	95,51	98,60	100	100,23
14.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir*	%	-	105,47	98,25	100	103,15
15.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar*	%	-	90,63	86,46	97,81	100,50
16.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	%	-	75,4	99,94	99,54	100
17.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar*	%	-	100,01	77,72	87,26	100,07
18.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar*	%	-	112,64	99,90	100	94,24

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
19.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	%	-	100,69	68,77	77,79	90,16
20.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	%	-	104,45	92,81	107,23	109,13
21.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar*	%	-	100,07	101,17	98,18	103,55
22.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar*	%	-	100	92,10	62,05	102,65
23.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar*	%	-	106,69	94,52	119,75	100,62

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2022

Keterangan: *Indikator baru digunakan tahun 2019

**Data pada Bulan Agustus atau Bulan Timbang

2.4.1.2.3 Indeks Kesehatan

Pembangunan manusia dari sisi kesehatan dilihat dari besaran Indeks Kesehatan yang diperoleh dari hasil olah umur harapan hidup. Asumsinya, semakin sehat seseorang maka semakin panjang usia hidupnya. Indeks Kesehatan terkait pembangunan kesehatan di daerah karena penduduk yang sehat selalu didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan dinilai berhasil jika masyarakat mampu memanfaatkan atau menikmati fasilitas kesehatan tersebut.



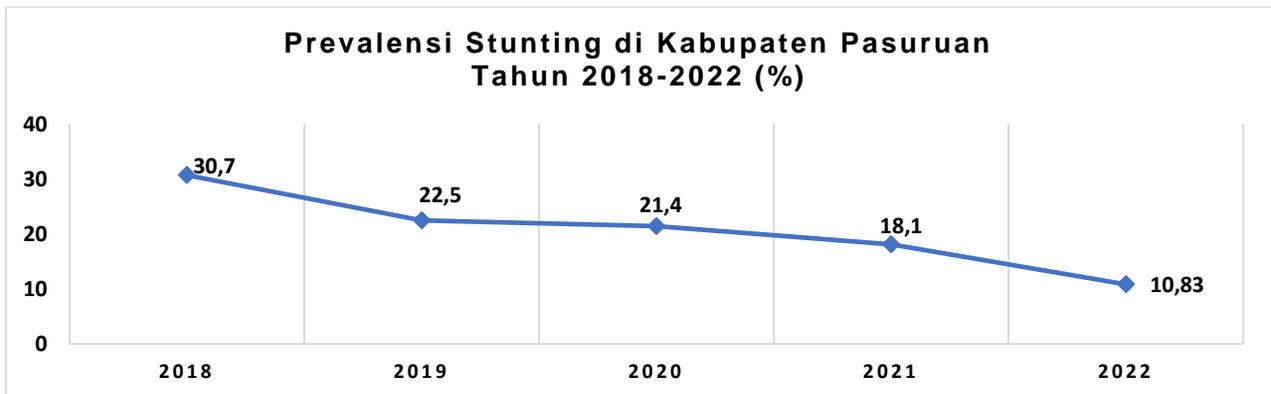
Grafik 2.30 Indeks Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa perkembangan capaian Indeks Kesehatan di Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2022 mengalami tren kenaikan. Peningkatan Indeks Kesehatan disebabkan oleh semakin meningkatnya Angka Harapan Hidup setiap tahun di Kabupaten Pasuruan.

2.4.1.2.4 Prevalensi Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) terjadi pada anak di bawah 5 tahun/balita. Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya di bawah ketinggian rata-rata penduduk acuan.



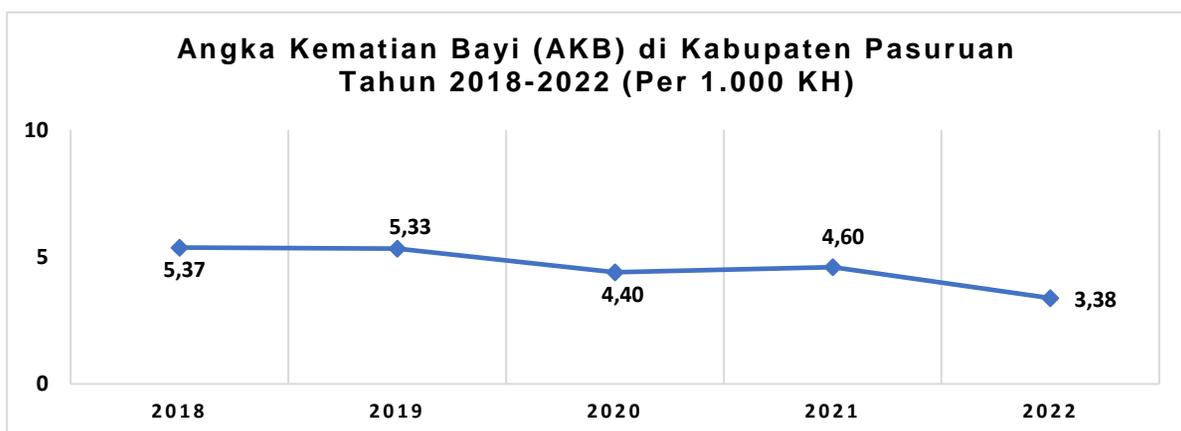
Grafik 2.31 Prevalensi Stunting di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2022

Prevalensi Stunting di Kabupaten Pasuruan telah menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam kurun waktu tahun 2018 sampai 2022. Dalam rangka menurunkan prevalensi stunting yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat sebesar 14% pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan Program Kasih Bersanding Mesra yaitu Keluarga Bersih Bersama Sadar Stunting Menuju Masyarakat Sejahtera.

2.4.1.2.3 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.



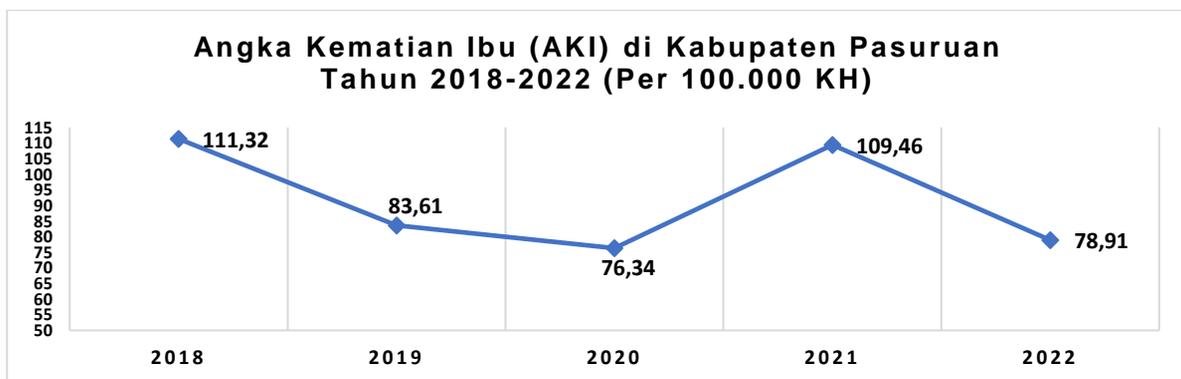
Grafik 2.32 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik di atas dapat diketahui AKB di Kabupaten Pasuruan mengalami tren penurunan selama kurun waktu 2018-2022. Penyebab kematian bayi adalah karena Asfiksia, Berat Badan Lahir Rendah, kelainan kongenital, Sepsis dan lain-lain. Kematian bayi terbanyak karena Asfiksia disebabkan karena mendapat penanganan Resusitasi yang kurang maksimal dan banyak ibu hamil yang terkonfirmasi *covid-19*. Disamping penyebab di atas, salah satu penyebab yang lainnya adalah Berat Badan lahir Rendah yang disebabkan karena ibu hamil mengalami KEK dan Anemia sehingga bayi mengalami hambatan tumbuh kembang sejak dalam kandungan.

2.4.1.2.4 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu melahirkan digunakan untuk mengetahui keselamatan ibu pada proses persalinan. Indikator ini diperoleh dengan perhitungan jumlah kematian ibu dalam satu tahun dibanding dengan jumlah kelahiran hidup dikalikan 100.000. Target Angka Kematian Ibu berdasarkan SDGs (*Suistenable Development Goals*) harus di bawah 70 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2030.



Grafik 2.33 Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2022

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pasuruan selama kurun waktu tahun 2018 sampai 2022 mengalami tren penurunan. Namun pada tahun 2021, AKI mengalami kenaikan yang sangat signifikan karena adanya Pandemi *Covid-19*. Penyebab kematian ibu selain karena terinfeksi *Covid-19* juga disebabkan oleh penyakit jantung, pendarahan, eklamsia dan penyakit lainnya. Kasus kematian ibu melahirkan sebagian besar terjadi di wilayah perkotaan yang masuk dalam kategori Zona Merah *Covid-19*, seperti Kecamatan Gempol, Pandaan, Beji dan beberapa wilayah lainnya.

Dalam rangka mencegah kematian ibu melahirkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan menghimbau kepada para perempuan yang sedang hamil agar memperhatikan asupan gizi yang dikonsumsi serta rajin melakukan

kontrol kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, polindes, rumah sakit, klinik, bidan praktek mandiri maupun dokter atau dokter spesialis.

2.4.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum adalah jenis pelayanan publik bidang pekerjaan umum yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Pentingnya penyelenggaraan urusan pekerjaan umum ini telah disadari oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan secara bertahap dengan Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase ketersediaan dan pemenuhan air baku*	%	52,37	52,37	52,58	55,05	-
2.	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	%	55,00	55,00	60,00	93,08	74,61
3.	Persentase Sawah Beririgasi yang Optimal*	%	-	-	-	-	36,06
4.	Prosentase Infrastruktur Wilayah yang terbangun/dikembangkan*	%	-	-	-	-	60,40
5.	Prosentase Kawasan Strategis yang di bangun dan/atau dikembangkan*	%	-	-	-	-	100,00
6.	Persentase Penataan Bangunan Gedung*	%	-	-	-	-	0,32
7.	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	%	-	80,55	85,79	87,08	86,72
8.	Persentase penduduk terlayani sanitasi	%	-	80,70	82,45	83,28	81,81
9.	Panjang jalan dalam kondisi mantap	%	1.760,08	1.841,13	1.881,13	1.962,19	1.849,93
10.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	-	71,47	72,10	72,85	73,43
11.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota*	%	-	-	-	87,08	86,72

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
12.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik*	%	-	-	-	83,28	81,81
13.	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	-	-	100	100	30,93
14.	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	-	79,50	81,23	84,73	79,88
15.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi*	%	-	-	-	-	35
16.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100

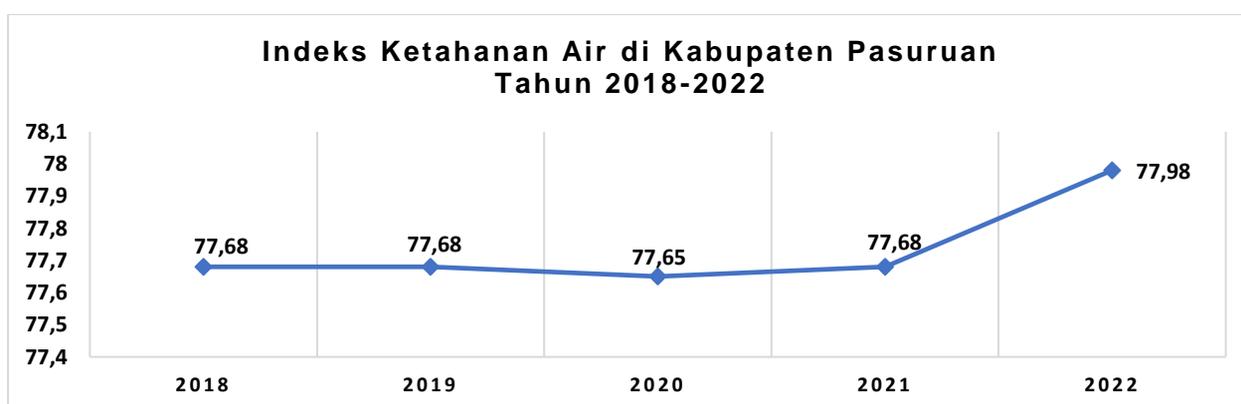
Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, dan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, 2022

Keterangan : *Indikator baru dikarenakan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dan tupoksinya

Selama periode tahun 2019 s/d 2022, persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum dan persentase penduduk yang terlayani sanitasi cenderung mengalami peningkatan. Akan tetapi persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum dan persentase penduduk yang terlayani sanitasi pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021.

2.4.1.3.1 Indeks Ketahanan Air

Indeks Ketahanan Air merupakan indikator tujuan dari Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Indikator ini diformulasikan dari perbandingan volume ketersediaan air baku dengan volume kebutuhan air baku. Volume ketersediaan air baku dihitung dari jumlah volume air tampungan, volume mata air termasuk air yang mengalir pada semua jaringan irigasi.



Grafik 2.34 Indeks Ketahanan Air di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

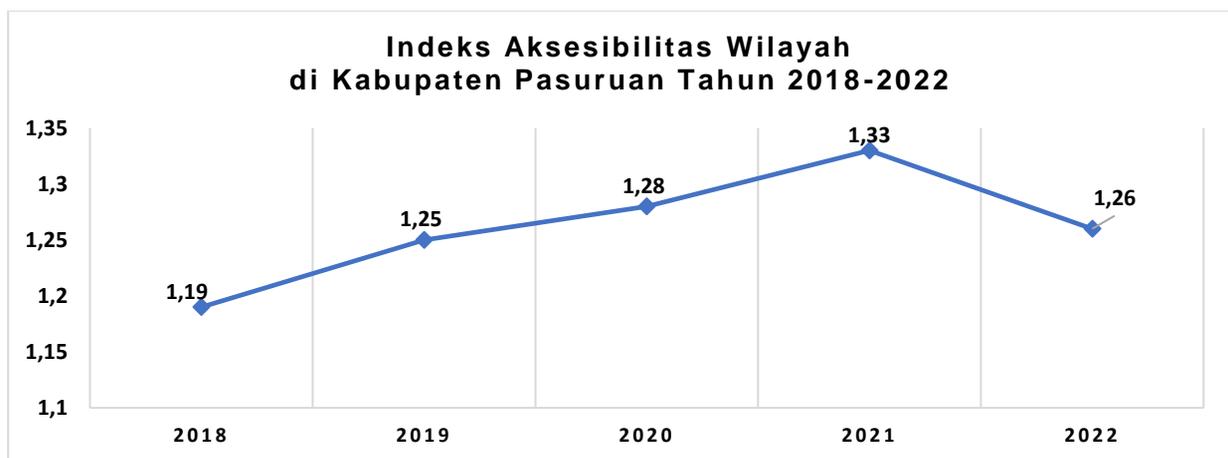
Sumber: Dinas SDA, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa capaian Indeks Ketahanan Air Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2022 mengalami tren peningkatan. Kondisi tersebut tentunya akan terus diperbaiki dengan cara menambah volume ketersediaan air terutama tampungan air, membangun embung-embung berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Kementerian

Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, serta memperbaiki kondisi mata air yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi.

2.4.1.3.2 Indeks Aksesibilitas Wilayah

Aksesibilitas wilayah adalah kemampuan atau keadaan suatu wilayah untuk dapat diakses oleh pihak luar baik secara langsung atau tidak langsung. Aksesibilitas tersebut terdiri dari prasarana (sistem jaringan jalan) yang dan beserta ketersediaan sarana untuk melakukan pergerakannya.



Grafik 2.35 Indeks Aksesibilitas Wilayah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi di Kabupaten Pasuruan, 2022

Tabel 2.29 Standar Pelayanan Minimal Bidang Jalan di Indonesia

No.	Kepadatan Penduduk/Jiwa	Indeks Aksesibilitas	Keterangan
1	Sangat Tinggi > 5.000	>5	Panjang jalan/luas (km/km ²)
2	Tinggi > 1.000	>1,5	
3	Sedang > 500	>0,5	
4	Rendah > 100	>0,5	

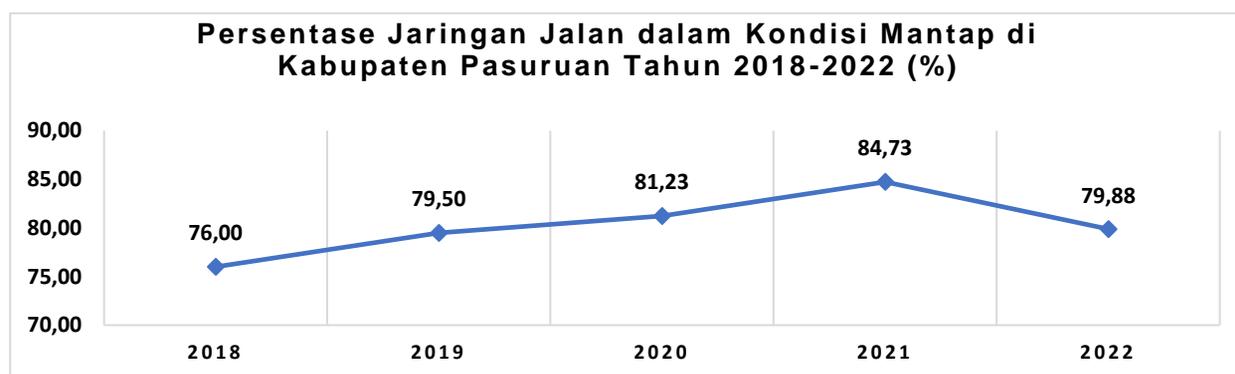
Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan, 2022

Nilai Indeks Aksesibilitas Wilayah di Kabupaten Pasuruan tergolong rendah karena kepadatan penduduknya tergolong tinggi (diatas 1.000 jiwa/km²), sehingga minimal Indeks Aksesibilitas Wilayah minimal sebesar 1,5. Formula perhitungan Indeks Aksesibilitas Wilayah adalah panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap dibagi luas wilayah Kabupaten Pasuruan.

2.4.1.3.3 Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap

Jalan mantap adalah kondisi jalan dalam kategori baik dan sedang. Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan

permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman.



Grafik 2.36 Panjang Jalan Mantap di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi di Kabupaten Pasuruan, 2022

Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Pasuruan dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami tren peningkatan setiap tahunnya dikarenakan dukungan dana untuk pemeliharaan dan peningkatan jalan yang cukup tinggi baik dari dana APBD, DAK maupun hibah Pusat. Akan tetapi pada tahun 2022 persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan bertambahnya volume kerusakan jaringan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan berat yang melebihi tonase kelas jalan, cuaca ekstrem dan umur rencana jalan.

Tabel 2.30 Kondisi Jalan di Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022

No.	Kondisi Jalan	Satuan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Baik	Km	1.236,650	1.276,650	1.308,240	1.252,111
2	Sedang	Km	604,480	604,480	653,950	597,821
3	Rusak	Km	278,880	235,780	204,780	260,909
4	Rusak Berat	Km	195,880	198,980	148,920	205,049

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan, 2022

2.4.1.3.4 Indeks Infrastruktur Wilayah

Indeks Infrastruktur wilayah dihitung dari rata-rata (Indeks Aksesibilitas + Indeks Infrastruktur SDA Cipta Karya + Indeks Infrastruktur Perhubungan + Indeks Kinerja Pengolahan Sampah). Perhitungan capaian Indeks Infrastruktur baru dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebesar 11,57.

2.4.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang dimaksud dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan, dan sistem pembiayaan, serta peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Berikut

merupakan indikator Kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pasuruan:

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2018-2022

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase ketersediaan sarana prasarana dasar permukiman*	%	-	72,46	78,39	78,69	-
2.	Persentase Rumah layak huni*	%	-	28,11	32,38	37,38	-
3.	Persentase Bangunan Gedung yang terstandarisasi SLF*	%	-	0,002	0,005	0,010	-
4.	Persentase Kawasan Kumuh yang ditangani secara tuntas*	%	-	3,64	7,67	13,70	14,75
5.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Ditangani*	%	-	28,11	32,38	37,38	44,67
6.	Persentase Penetapan Persetujuan Lokasi untuk Pembangunan Kepentingan Umum**	%	-	-	-	-	100
7.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100
8.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani*	%	-	3,64	7,67	13,70	14,75
10.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	7,38	7,01	6,50	6,08	5,55
11.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) *	%	-	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, 2022

Keterangan: *Indikator baru digunakan tahun 2019

**Indikator baru digunakan tahun 2022

2.4.1.4.3 Indeks Permukiman Layak Huni

Kriteria permukiman layak huni dan sehat tergantung dari adanya ketersediaan berbagai macam kelengkapan dan pelayanan tertentu. Berikut ini kebutuhan perlengkapan yang minimal harus tersedia di permukiman adalah (Samuel, 2009):

1. Ketersediaan prasarana air bersih yang dapat digunakan untuk air minum, mandi, mencuci, memasak perlu ada di setiap rumah;
2. Pembuangan kotoran dan air hujan, seperti penyediaan septictank dan sistem pembuangan air hujan yang baik agar tidak menggenang;
3. Penempatan-penempatan utilitas yang mudah untuk dicapai sehingga memudahkan untuk pemeriksaan ataupun pergantian;

4. Pembuangan sampah, seperti penyediaan berupa tempat penampungan sampah yang dapat ditutup dan dibersihkan, serta harus tersedia di setiap pekarangan rumah;
5. Tersedianya sarana pelayanan dasar masyarakat seperti sarana pendidikan, kesehatan yang tidak terlalu jauh dari tempat.



Grafik 2.37 Indeks Permukiman Layak Huni di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022
 Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, 2022

Berdasarkan SK Bupati Pasuruan Nomor 663/844/HK/424.013/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pasuruan, Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pasuruan meliputi sejumlah 80 kawasan di 8 kecamatan dengan total luas sebesar 543,75 hektar. Kawasan tersebut meliputi Kecamatan Rembang (10 Desa), Kecamatan Lekok (1 Desa), Kecamatan Nguling (1 Desa), Kecamatan Kraton (16 Desa), Kecamatan Pohjentrek (4 Desa), Kecamatan Beji (12 Desa), Kecamatan Purwosari (15 Desa) dan Kecamatan Beji (21 Desa).

2.4.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan harapan yang dikehendaki setiap pemerintah daerah maupun masyarakat. Keadaan masyarakat yang tentram, kondusif sesuai dengan pengertian dari trantibum itu sendiri. Penyelenggaraan trantibum sendiri merupakan penghargaan dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dapat melaksanakan segala kegiatan dengan tertib dan tentram. Menurut Undang-undang 23 tahun 2014 urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraannya di laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2022

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan**	%	90,39	91,24	92,13	-	-
2.	Prosentase gangguan trantibum yang diselesaikan**	%	100	100	100	-	-
3.	Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan***	%	-	-	-	93,15	101,19
4.	Persentase desa tangguh bencana berkategori utama	%	6,2	7,5	12,5	17,5	22,5
5.	Persentase korban bencana tertangani	%	100	100	100	100	100
6.	Persentase pemulihan sarana dan prasarana akibat dampak bencana	%	100	100	100	100	100
7.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan*	%	-	100	100	100	100
8.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan*	%	-	5,39	16,15	16,15	100
9.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana*	%	-	100	100	100	100
10.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*	%	-	100	100	100	100
11.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana*	%	-	100	100	100	100
12.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran*	%	-	60	100	100	97,38
13.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran*	%	-	100	95,24	100	100

Sumber: Dinas Satpol PP dan BPBD Kabupaten Pasuruan, 2022

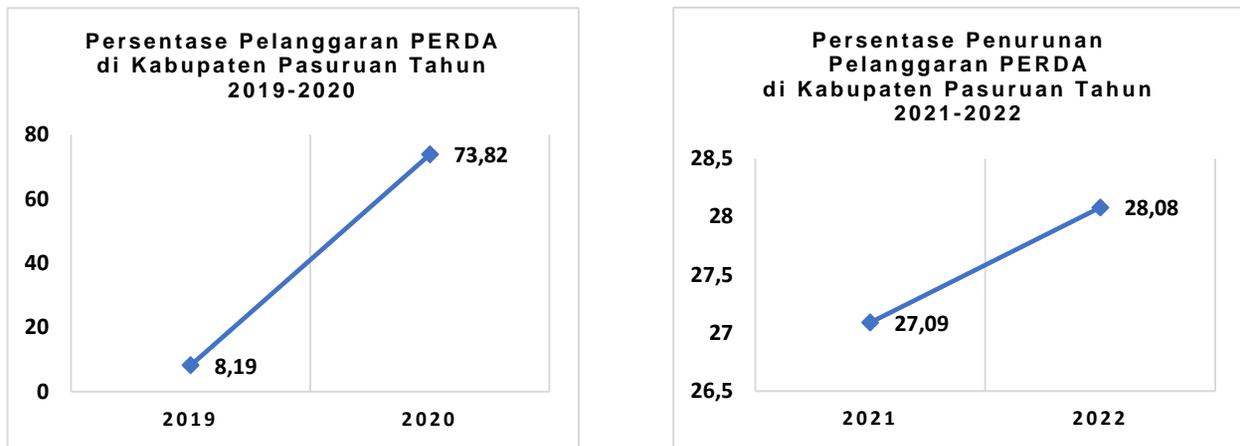
Keterangan: *Indikator baru digunakan tahun 2019

**Indikator digunakan sampai dengan tahun 2020

***Indikator baru digunakan tahun 2021

2.4.1.5.1 Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA

Capaian Persentase Pelanggaran PERDA pada tahun 2019 mengalami peningkatan sedangkan Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA yang baru dilaksanakan mulai tahun 2021 juga mengalami peningkatan pada tahun 2022.

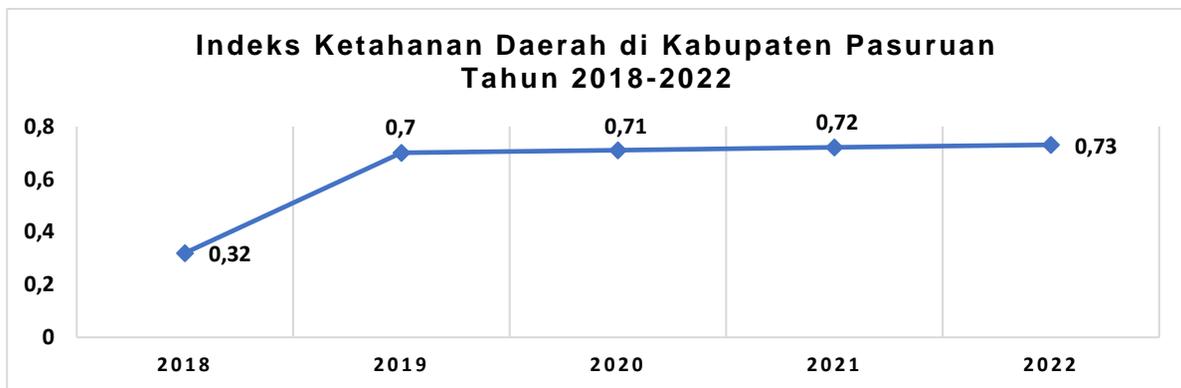


Grafik 2.38 Persentase Pelanggaran PERDA dan Penurunan Pelanggaran PERDA di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022

Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan, 2022

2.4.1.5.2 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui kapasitas daerah dalam menghadapi bencana di daerah. Adapun capaian Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:



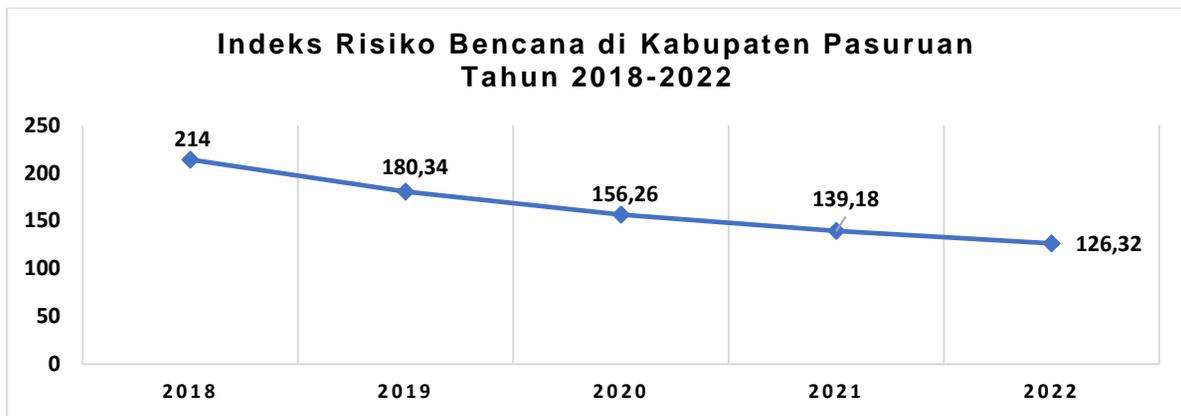
Grafik 2.39 Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022 mengalami tren peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah semakin tanggap dalam menghadapi bencana daerah yang ada di Kabupaten Pasuruan.

2.4.1.5.3 Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana adalah gabungan nilai indeks ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Hasil dari pengkajian resiko bencana digunakan sebagai dasar untuk upaya pengurangan resiko bencana melalui pengurangan aspek bahaya dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Nilai Indeks Risiko Bencana dikatakan rendah jika nilainya <13, nilai antara 13-144 masuk kategori sedang dan lebih dari 144 masuk kategori tinggi.



Grafik 2.40 Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2022

Nilai Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Pasuruan selalu mengalami penurunan disetiap tahunnya dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 masuk kategori sedang. Perkembangan jumlah desa tangguh bencana di Kabupaten Pasuruan tahun 2018 sebanyak 5 desa/kelurahan, tahun 2019 sebanyak 6 desa/kelurahan, tahun 2020 sebanyak 10 desa/kelurahan, tahun 2021 sebanyak 14 desa/kelurahan dan pada tahun 2022 sebanyak 18 desa/kelurahan.

2.4.1.6 Sosial

Sosial merupakan interaksi antar individu, atau kelompok yang menciptakan suatu pola sehingga terjadilah kegiatan yang bersifat umum dan menjadi ciri khas tersendiri. Dengan adanya proses sosial maka pasti akan tercipta suatu permasalahan pula yang menjadi tugas seluruh elemen khususnya pemerintah agar dapat tertangani. Sosial tidak hanya sekedar interaksi melainkan pula berhubungan atau berdampak pada ekonomi, stabilitas keamanan dan lain sebagainya. Maka, sosial bersifat sangat penting bagi suatu daerah untuk memajukan dan mensejahterakan daerah tersebut.

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pegemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)*	%	-	100	100	100	67,8
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten*	%	-	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, 2022

Keterangan: *Indikator baru digunakan tahun 2019

2.4.1.6.1 Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat (PMKS)



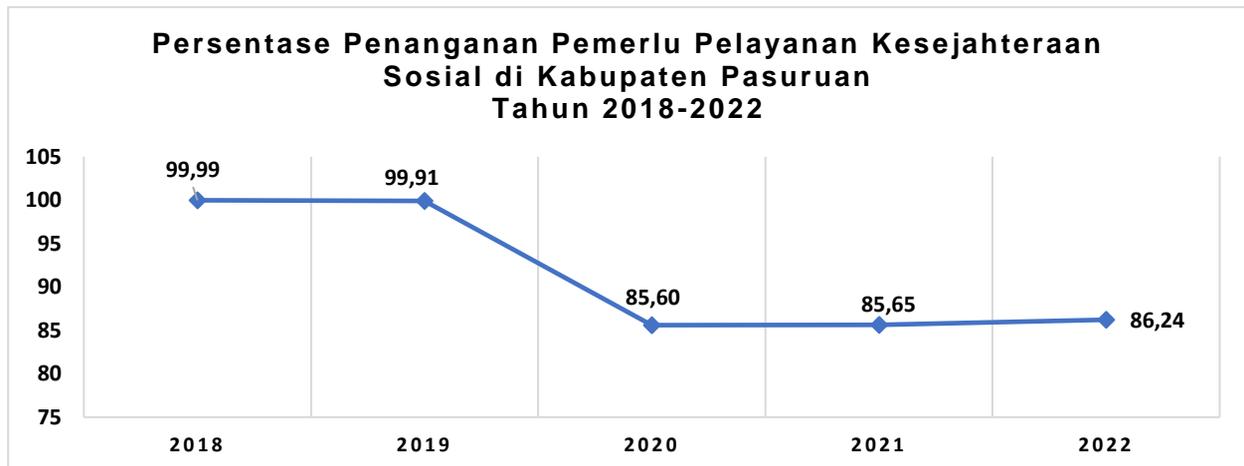
Grafik 2.41 Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat PMKS di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa persentase PMKS di Kabupaten Pasuruan selama tahun 2018-2022 mengalami tren penurunan. Akan tetapi pada tahun 2022 Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat (PMKS) kembali mengalami kenaikan dikarenakan adanya perubahan anggaran yang mengakibatkan pelaksanaan pelayanan Lanjut Usia Terlantar di luar panti kurang optimal.

2.4.1.6.2 Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan PMKS adalah dengan melakukan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.



Grafik 2.42 Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pasuruan selama kurun waktu 2018-2022 cenderung mengalami tren penurunan. Dalam rangka untuk meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, sejak tahun 2019 telah dibentuk Tim Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) yang

dikhususkan untuk penanganan PMKS pada kategori anak. Kedepannya untuk PKSAI, Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan kewenangan dan layanan sehingga mampu memberikan dampak positif bagi penurunan PMKS. Selain itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga mendapat stimulan sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) guna memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan permasalahan dalam penanganan PMKS.

2.4.2 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.4.2.1 Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Dalam menjalankan segala urusan pemerintah daerah dan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat maka sangat diperlukan serapan dan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Oleh karena itu, urusan ketenagakerjaan menjadi sangat penting dalam menjalankan proses pemerintahan.

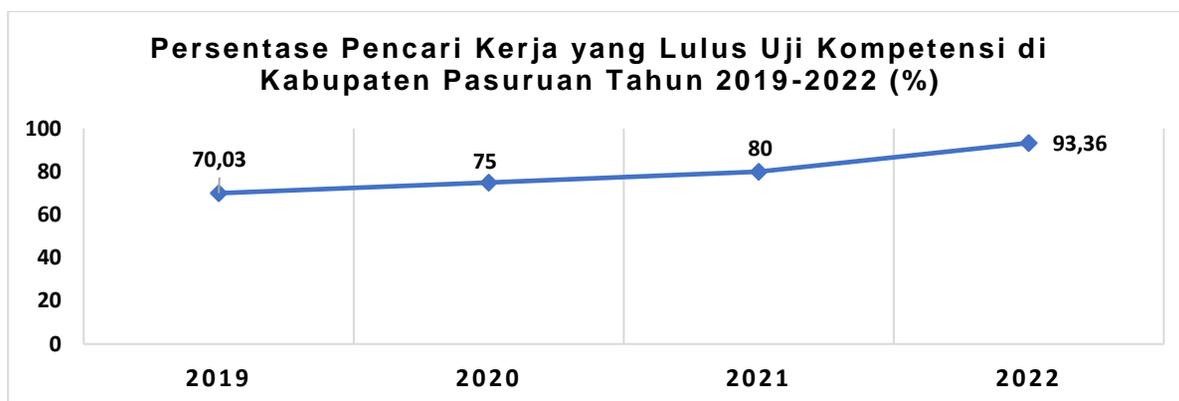
Tabel 2.34
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Penanganan kasus hubungan industrial yang diselesaikan/anjuran	%	75	75	80	80	94
2.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	60,50	60,50	41,38	68,75	70,55
3.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	52,6	70,03	75	80	93,36
4.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	120.866.200	120.242.100	126.856.300	126.627.800	128.152.480
5.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	80	80	80	100	100
6.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	70,03	70,05	43,44	41,06	40,47

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, 2022

2.4.2.1.1 Persentase Pencari Kerja yang Lulus Uji Kompetensi

Secara berkala Pemerintah Daerah mengadakan pelatihan bagi tenaga kerja dengan jaminan kualitas dalam bentuk uji kompetensi bagi peserta. Dengan adanya sertifikat kompetensi maka tenaga kerja memiliki daya saing dan mempunyai kesempatan yang lebih besar mengisi lowongan kerja yang tersedia.



Grafik 2.43 Persentase Pencari Kerja yang Lulus Uji Kompetensi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, 2022

Capaian Pencari Kerja yang lulus ujian kompetensi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, ada 239 Peserta Pelatihan yang lulus uji kompetensi dari 256 Peserta Pelatihan.

2.4.2.1 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan terhadap perempuan dan perlindungan terhadap anak harus terus diperkuat. Hal ini dirasa perlu mengingat perempuan dan anak merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki fungsi penting untuk masa depan suatu daerah.

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2022

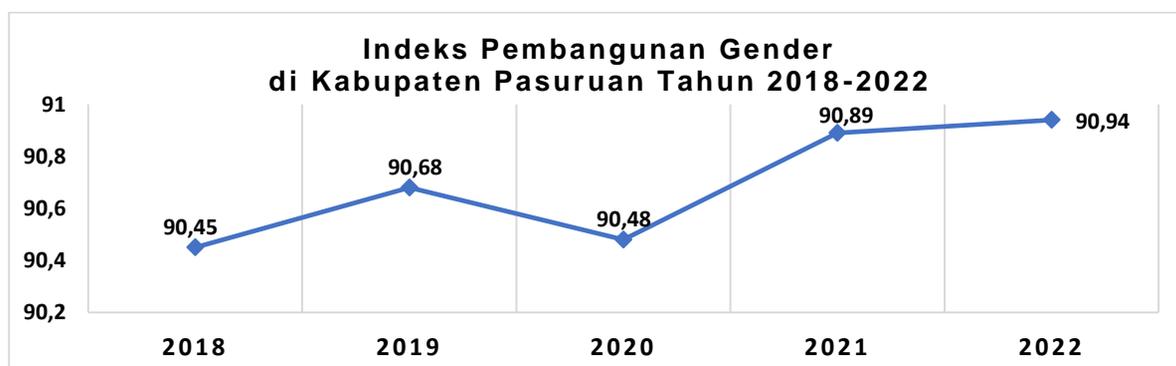
No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*	%	-	83,64	83,33	87,76	100
2.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD*	%	-	3,16	18,31	23,85	23,05
3.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten*	%	-	0,006	0,01	0,01	0,012
4.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)*	%	-	0,003	0,01	4,18	9,76

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, 2022

Keterangan: *Indikator baru digunakan tahun 2019

2.4.2.2.1 Indeks Pembangunan Gender

Tingkat keberhasilan pembangunan yang telah mengakomodasi persoalan gender dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Gender. Indikator tersebut diartikan sebagai ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit khususnya berkaitan dengan gender. Dari hal tersebut dapat menjelaskan berbagai program pembangunan yang mengakomodasi dari kesetaraan dan keadilan gender.



Grafik 2.44 Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian dari Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Pasuruan mengalami tren peningkatan dari tahun 2018 dan 2022. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang tidak melakukan diskriminasi dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan,

2.4.2.2 Pangan

Capaian kinerja urusan pangan tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2018-2022

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)*	%	-	-	363,52	218,12	100,56

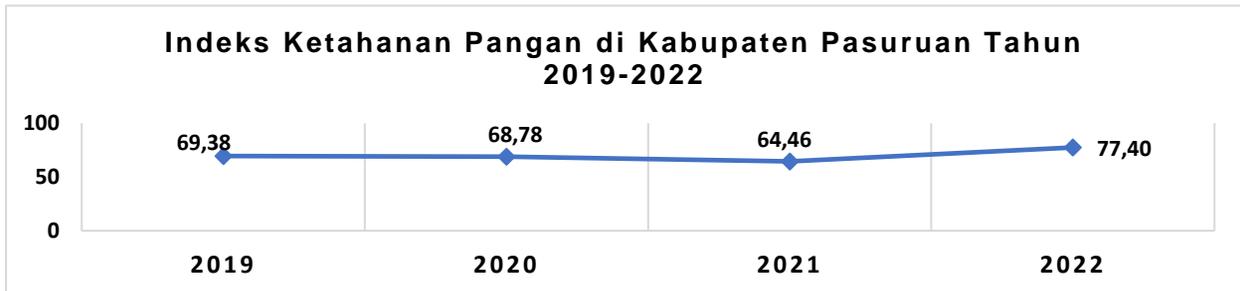
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, 2022

Keterangan: *Indikator baru digunakan tahun 2020

2.4.2.3.1 Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara

berkelanjutan. Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan.



Grafik 2.45 Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2022

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan terus mengalami tren penurunan mulai Tahun 2019 sampai tahun 2021. Akan tetapi pada tahun 2022, Indeks Ketahanan Pangan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Keberhasilan Kabupaten Pasuruan dalam penyediaan pangan (beras, jagung, daging, telur dan ikan) sudah di atas nilai kebutuhan. Produksi bahan pangan lebih besar dari peningkatan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pasuruan, yang menunjukkan bahwa program dan kegiatan sudah terlaksana dengan baik.

2.4.2.3.2 Rasio Ketersediaan Pangan

Ketersediaan bahan pangan adalah tersedianya bahan pangan yang bersumber dari kemampuan suatu daerah memproduksi bahan pangan dan menjaga kestabilan stok pangan baik yang berada di gudang Bulog, lumbung pangan, lembaga pembeli gabah dan Koperasi Unit Desa serta alur distribusi bahan pangan lainnya tanpa mempertimbangkan jumlah dan jenis kebutuhan bahan pangan yang dikonsumsi oleh penduduk.



Grafik 2.46 Rasio Ketersediaan Pangan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, 2022

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2022

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa capaian dari Rasio Ketersediaan Pangan Kabupaten Pasuruan mengalami tren peningkatan dari tahun 2019 sampai 2022. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah memperbaiki dan meningkatkan penyediaan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

2.4.2.4 Pertanian

Pelaksanaan Urusan Pertanian di Kabupaten Pasuruan dinilai menggunakan tolok ukur keberhasilan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018 – 2023 yaitu :

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2018-2022

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2022

Target indikator kinerja penanganan kasus dan sengketa pertanian di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021-2022 sudah mencapai 100%. Hal ini menggambarkan bentuk komitmen pemerintah dalam memfasilitasi penyelesaian kasus dan sengketa tanah yang ada agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat.

2.4.2.5 Lingkungan Hidup

Capaian indikator kinerja urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	78,83	79	82,22	82,96	75,18
2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	50	53,73	52,14	53,57	53,17
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Poin	43,57	43,89	44,04	42,89	42,64
4.	Nilai TPA (Program Adipura)**	Poin	74	78	79	79	-
5.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)*	Poin	-	-	-	-	45,90
6.	Persentase Capaian Target Pengurangan Sampah terhadap JAKSTRADA*	%	-	-	-	-	100

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
7.	Persentase Capaian Target Penanganan Sampah terhadap JAKSTRADA*	%	-	-	-	-	100
8.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota***	%	-	-	44,60	73,06	22,74
9.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota***	%	-	-	55,56	53,33	50

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2022

Keterangan: *Indikator baru berdasarkan P-Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023

**Indikator digunakan sampai dengan tahun 2021

***Indikator baru digunakan tahun 2020

Dari empat indikator yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Nilai TPA rata-rata mengalami kenaikan kecuali Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang mengalami penurunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan semakin membaik.



Grafik 2.47 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2022

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa capaian dari Indeks Kualitas Lingkungan di Hidup Kabupaten Pasuruan mengalami tren peningkatan dari tahun 2018 sampai 2021. Akan tetapi pada tahun 2022, Indeks Kualitas Lingkungan kembali mengalami penurunan yang disebabkan oleh semakin banyaknya kegiatan industri skala kecil hingga besar yang sudah beroperasi sehingga mengakibatkan peningkatan pencemaran lingkungan dari timbulan air limbah. Selain itu juga diakibatkan oleh peningkatan volume kendaraan di jalur-jalur

transportasi dan timbulan emisi cerobong dari pabrik yang menyebabkan peningkatan beban pencemaran udara.

Capaian penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) masih belum diketahui dikarenakan Kabupaten Pasuruan masih fokus pada inventarisasi Gas Rumah Kaca pada pengendalian perubahan iklim.

2.4.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

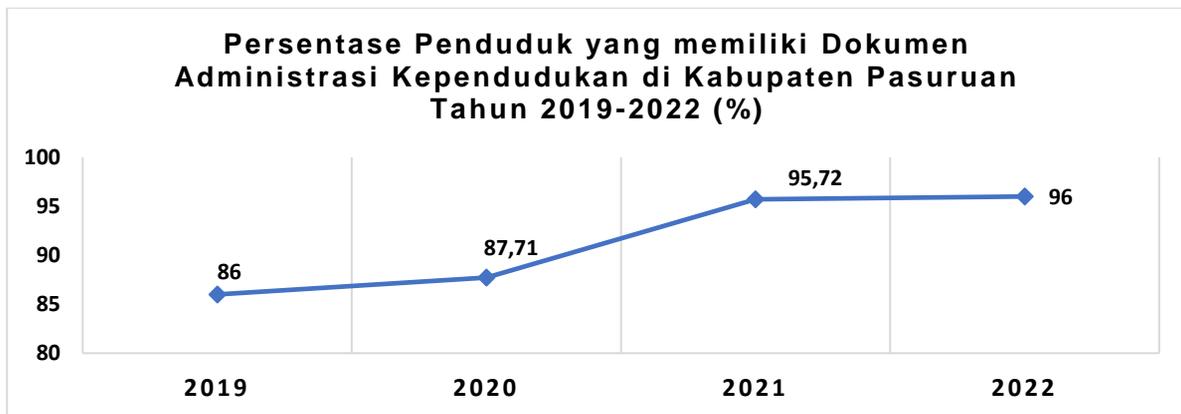
Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan sektor lain. Persentase Penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk yang sudah memiliki dokumen administrasi kependudukan dibandingkan jumlah seluruh penduduk yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan dokumen kependudukan.

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2018-2022

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,78	85,97	86,44	90,25	89,96
2.	Persentase kepemilikan E KTP dari wajib E KTP	%	93,09	98,05	84,94	99,14	98,65
3.	Persentase kepemilikan KK dari wajib KK	%	98,05	98,05	98,05	98,10	98,22
4.	Perekaman KTP elektronik	%	93,09	98,05	84,94	99,14	98,65
5.	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	5,0	5,0	8,53	21,64	24,19
6.	Kepemilikan akta kelahiran	%	69,4	72	87,02	95,48	80,63
7.	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama*	%	-	-	27,27	3,57	7,27

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2022

Keterangan: *Indikator baru digunakan pada tahun 2020



Grafik 2.48 Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa capaian dari persentase Penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan Kabupaten Pasuruan selama kurun waktu 2019-2022 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Pasuruan yang telah mempunyai dokumen administrasi kependudukan yaitu KTP Elektronik, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

2.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan dinilai dari beberapa indikator kinerja pemerintah daerah, antara lain sebagaimana berikut

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2018-2022

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif*	%	-	-	-	97,29	97,65
2.	Prosentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) mandiri**	%	-	-	-	-	16
3.	Persentase Pemerintahan Desa yang berkualitas*	%	-	-	-	100	100
4.	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	158,54	684,21	0	0	0
5.	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0	0,77	1,61	5,16	22,37

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pasuruan, 2022

Keterangan: *Indikator baru digunakan tahun 2021

**Indikator baru digunakan tahun 2022

Klasifikasi Status Desa dalam Permendesa PD TT Nomor 2 Tahun 2016 terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: 1) Desa mandiri atau yang disebut Desa Sembada

adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan; 2) Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan; 3) Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.



Grafik 2.49 Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa capaian dari Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Pasuruan mengalami tren peningkatan dari tahun 2019 sampai 2022. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah desa di Kabupaten Pasuruan yang sudah menjadi desa mandiri yaitu ada 34 desa yang sudah menjadi Desa Mandiri pada tahun 2022.

2.4.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

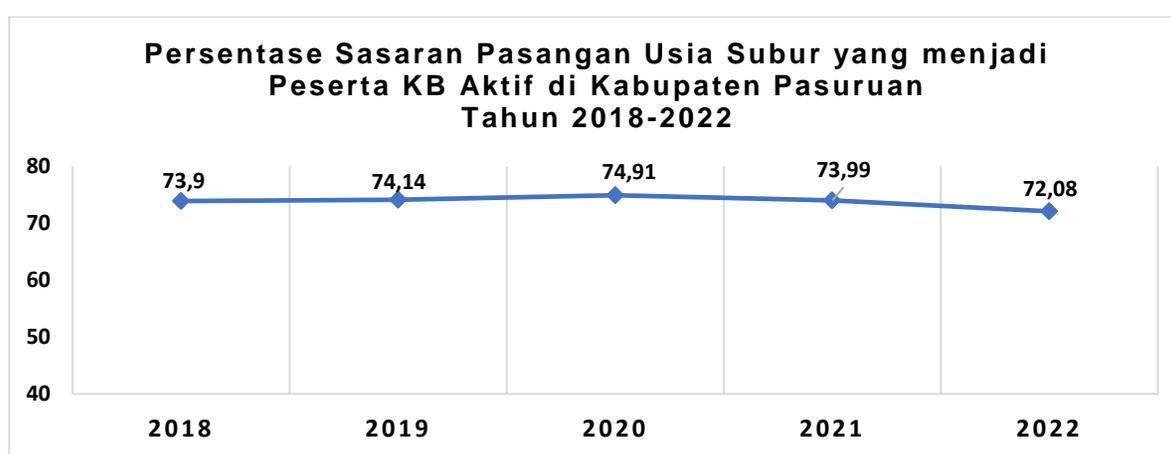
Pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tingkat keberhasilannya dapat dilihat dari indikator cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB Aktif. Indikator Persentase Sarana Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB Aktif digunakan untuk mengetahui persentase jumlah peserta KB Aktif dibandingkan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2018-2022

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	TFR (Angka Kelahiran Total)*	Angka	-	1,84	1,95	1,95	2,04
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)*	%	-	75,14	74,91	75,20	73,24
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)*	%	-	11,16	10,58	11,71	13,25

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, 2022

Keterangan: *Indikator baru digunakan tahun 2019



Grafik 2.50 Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Aktif di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa capaian dari Sasaran Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Aktif di Kabupaten Pasuruan selama tahun 2018 sampai 2022 mengalami tren penurunan. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan MOW (Metoda Operasi Wanita) atau tubektomi dan MOP (Medis Operasi Pria) atau lebih dikenal dengan istilah vasektomi masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.4.2.9 Perhubungan

Ketercapaian pembangunan daerah pada aspek pelayanan umum (fokus layanan urusan wajib) dan aspek daya saing daerah (fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur). Urusan perhubungan merupakan gambaran keberhasilan pemerintah dalam menyediakan prasarana transportasi bagi masyarakat. Tolok ukur keberhasilan kinerja urusan perhubungan dinilai dengan beberapa indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2015 – 2018.

Capaian kinerja masing-masing indikator pada tahun 2015 - 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2018-2022

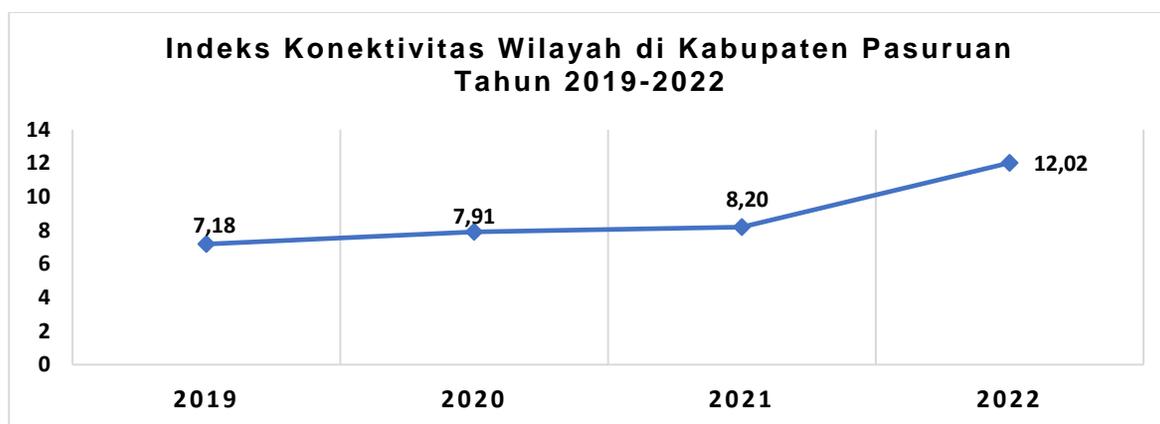
No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Prosentase Wilayah yang Terkoneksi Sarana Angkutan Umum*	%	-	7,18	7,91	8,2	12,02
2.	Prosentase Angkutan Umum yang Laik Jalan**	%	-	-	-	-	100
3.	Rasio konektivitas kabupaten/kota***	%	-	-	46,15	57,58	39
4.	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota***	%	-	-	0,32	0,37	0,36

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, 2022

Keterangan : *Indikator baru digunakan tahun 2019

**Indikator baru digunakan tahun 2022

***Indikator baru digunakan tahun 2020



Grafik 2.51 Indeks Konektivitas Wilayah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa Indeks Konektivitas Wilayah Kabupaten Pasuruan tahun 2022 mengalami tren kenaikan dari tahun 2019 dan 2022 meskipun belum mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut dikarenakan saat ini pelayanan transportasi online memberikan kemudahan dan efisiensi dalam memberikan pelayanan dengan berbagai inovasi yang dilakukan di berbagai sektor.

2.4.2.10 Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2022

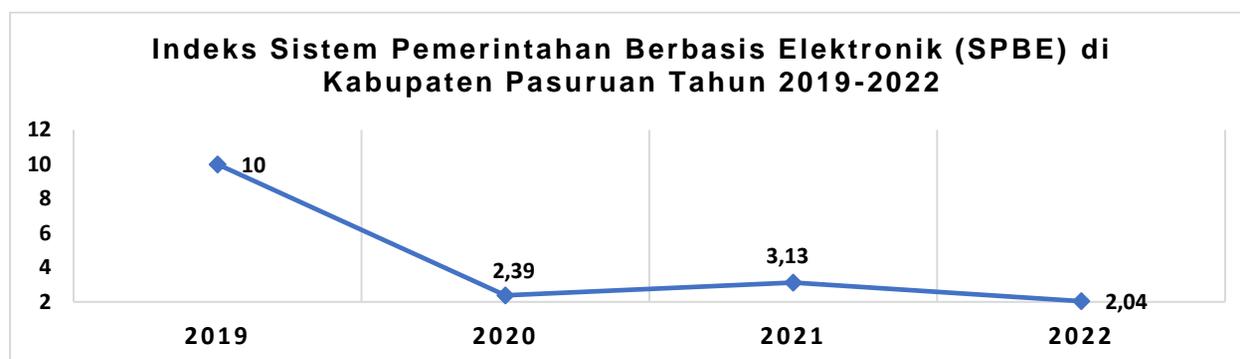
No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio Informasi Publik yang Efektif*	Rasio	-	-	-	-	30
2.	Persentase Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis Data elektronik yang terintegrasi*	%	-	-	-	-	40
3.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**	%	-	-	55,22	56,06	58
4.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**	%	-	-	12,66	32,17	35
5.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota**	%	-	-	5,26	4,63	17,16

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, 2022

Keterangan : *Indikator baru digunakan tahun 2022

**Indikator baru digunakan tahun 2020

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Tujuan penyelenggaraan SPBE adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik.



Grafik 2.52 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Pasuruan tahun 2022 mengalami

penurunan dari tahun 2019. Hal itu dikarenakan belum optimalnya penggunaan teknologi informatika dalam pelayanan pemerintahan, promosi potensi daerah maupun penyebaran informasi kepada masyarakat dan dunia usaha serta masih sedikitnya dokumen perencanaan TIK sesuai pemenuhan dokumen SPBE.

2.4.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

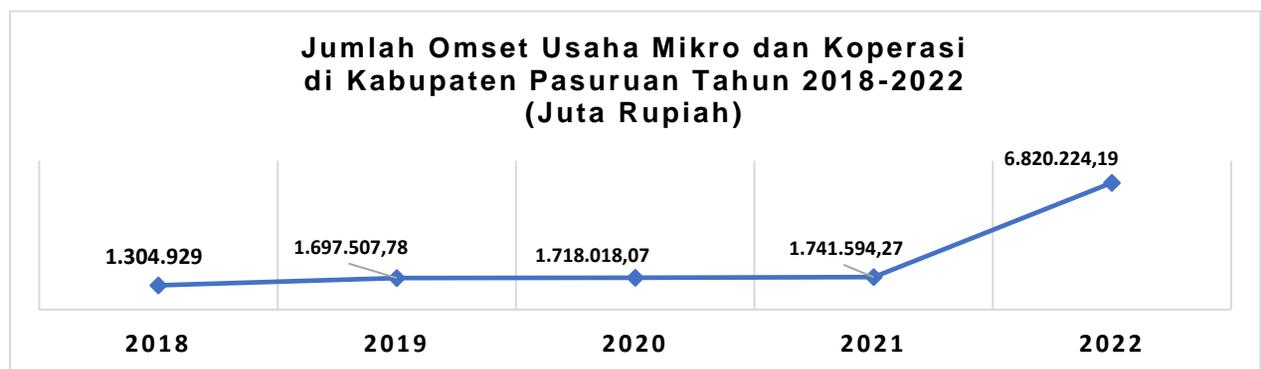
Koperasi mempunyai peran yang sangat penting sebagai pelaku ekonomi sehingga pertumbuhan dan perkembangannya perlu mendapatkan perhatian dan ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang baik bagi para anggotanya dan masyarakat. Keberhasilan yang dicapai koperasi tidak semata-mata diukur dengan tingkat efisiensi koperasi sebagai perusahaan ataupun keuntungan yang didapat melainkan diukur dengan seberapa efisien koperasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta dapat menimbulkan dampak yang baik untuk lingkungan.

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2018-2022

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Koperasi Berkualitas	Unit	50	60	180	260	340
2.	Persentase Masyarakat Yang Berkoperasi	%	9,29	12,87	13,53	8,14	12,52
3.	Jumlah peningkatan omset usaha mikro dan koperasi	Jutaan Rupiah	17.453.000	20.510.289	17.980.000	23.576.198	5.078.629,92
4.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas*	%	-	-	19,30	16,14	21,05
5.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha*	%	-	-	0,10	1,34	0,16

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan, 2022

Keterangan : *Indikator baru digunakan pada tahun 2020



Grafik 2.53 Jumlah Omset Usaha Mikro dan Koperasi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan, 2022

Sedangkan jumlah Koperasi di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 sebanyak 1.040 unit yang terdiri dari koperasi aktif sebanyak 1.027 unit dan koperasi tidak aktif sebanyak 13 unit. Kapasitas permodalan seluruh koperasi di Kabupaten Pasuruan sebesar Rp 5.351.095.532.828,00 yang terdiri dari modal sendiri sebesar Rp 1.403.337.889.114,00 dan modal luar sebesar Rp 3.947.757.643.714,00. Artinya sebagian besar kapasitas permodalan koperasi berasal dari modal luar (73,77%) dan sisanya (26,23%) berasal dari modal sendiri.

2.4.2.12 Penanaman Modal

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa persentase pertumbuhan investasi pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dikarenakan pertumbuhan investasi pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar -20,19% sehingga berdampak pada realisasi pertumbuhan investasi pada tahun 2022.

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2018-2022

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Pertumbuhan Investasi	%	-8,2	97,29	-45,09	-20,19	51,81
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPSTP	Nilai	84,92	84,93	85,23	87,45	93,95
3.	Persentase kenaikan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	%	-	0,012	0,4	2,6	7,4

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan, 2022
Keterangan : *Indikator baru digunakan pada tahun 2019

Nilai investasi yang terealisasi di Kabupaten Pasuruan mulai tahun 2018-2022 cenderung mengalami tren penurunan. Peningkatan nilai investasi dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: 1) Kondisi pandemi covid-19 yang sudah mulai pulih sehingga memudahkan ruang gerak Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk melakukan pembinaan dan pendampingan pelaporan kegiatan penanaman modal, 2) Berdasarkan Perda BKPM No. 5 Tahun 2021 bahwa perhitungan nilai investasi merupakan realisasi investasi yang dilaporkan di LKPM bukan nilai rencana investasi melainkan tambahan realisasi investasi, dan 3) Nilai investasi tahun 2022 didapatkan dari nilai rencana investasi UMK. Nilai investasi tertinggi terjadi di tahun 2019 akibat adanya investasi pembangunan jalan tol di Kabupaten Pasuruan.



Grafik 2.54 Nilai Investasi yang terealisasi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022
 Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan, 2022

Salah satu faktor yang mempengaruhi minat Investor dalam menanamkan modal di suatu daerah adalah besaran nilai minimal kabupaten/kota. UMK Kabupaten Pasuruan dalam wilayah Provinsi Jawa Timur, termasuk dalam kelompok tertinggi. UMK Kabupaten Pasuruan tahun 2023 sebesar Rp.4.515.133, tertinggi ke-4 setelah Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo (berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023).

2.4.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Atlet Berprestasi adalah atlet yang ikut serta dalam pertandingan Nasional pada level tertinggi dan mampu mencapai prestasi tinggi sebagai tim Nasional. Sedangkan Pemuda Berprestasi adalah Pemuda yang mampu menuangkan ide-idenya untuk sebuah perubahan dan kebermanfaatannya. Rasio Pemuda Berprestasi pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021, begitu pula dengan rasio Atlet Berprestasi. Hal tersebut dikarenakan belum tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan kepemudaan.

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2018-2022

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Atlit Berprestasi	Jumlah	38	42	0	140	174
2.	Jumlah Pemuda Berprestasi	Jumlah	13	13	5	4	4
3.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri*	%	-	-	9,05	0,03	0
4.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan*	%	-	-	9,05	8,31	8,83
5.	Peningkatan prestasi olahraga*	%	-	-	0	15	15

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, 2022
 Keterangan: *Indikator baru digunakan pada tahun 2022

2.4.2.14 Statistik

Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018-2022 tidak mengalami penurunan maupun peningkatan. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya ketersediaan data sektoral dan kualitas akurasi data sektoral sebagai bahan acuan perencanaan pembangunan.

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2018-2022

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral*	%	-	80	80	80	80
2.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**	%	-	-	100	60	61,54
3.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah**	%	-	-	100	60	61,54

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, 2022

Keterangan: *Indikator baru digunakan pada tahun 2019

**Indikator baru digunakan tahun 2020

2.4.2.15 Persandian

Capaian kinerja urusan persandian, indikator Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Informasi mengalami penurunan pada tahun 2020. Sedangkan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) sebagai pengganti indikator Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Informasi pada tahun 2021 mengalami peningkatan pada tahun 2022. Akan tetapi meskipun mengalami peningkatan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan masih perlu memperkuat tata kelola keamanan informasi dan penguatan kompetensi SDM dikarenakan pencapaian skor Indeks Keamanan Informasi (KAMI) yang masih dalam zona merah atau berpredikat tidak layak untuk kategori PSE yang tinggi.

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2018-2022

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	-	-	40,08	40,08	48,37
2.	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Informasi	%	-	100	40	-	-

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, 2022

Keterangan: Indikator no. 1 baru digunakan pada tahun 2020 sedangkan indikator no. 2 digunakan sampai dengan tahun 2020

2.4.2.16 Kebudayaan

Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi selama tahun 2018 sampai 2021 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 indikator urusan kebudayaan dirubah menjadi Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya dan Persentase Peningkatan Pengelolaan Museum. Kemudian pada tahun 2022 diganti lagi menjadi Nilai Pembangunan Kebudayaan dengan capaian sudah melebihi target yang telah ditentukan.

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan
Tahun 2018-2022

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nilai Pembangunan Kebudayaan***	Nilai	-	-	-	-	59,19
2.	Persentase peningkatan pengelolaan museum**	%	-	-	-	20	-
3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi*	Jenis	14	15	16	-	-
4.	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100	100	100	100
5.	Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional	Kelompok	420	420	422	422	422

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2022

Keterangan : *Indikator digunakan dari tahun 2018-2020

**Indikator hanya digunakan pada tahun 2021

***Indikator digunakan pada tahun 2022-2023

2.4.2.17 Perpustakaan

Pembangunan literasi masyarakat terdiri dari 7 unsur yaitu: Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga perpustakaan, Tingkat kunjungan masyarakat per hari, Jumlah perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi dan Anggota perpustakaan. Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 meskipun sudah mencapai target yang ditentukan.

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2018-2022

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)*	Nilai	-	-	-	-	8
2.	Persentase Pemerataan Layanan Perpustakaan*	%	-	-	-	-	0,08
3.	Persentase Anggota Perpustakaan di seluruh jenis Perpustakaan*	%	-	-	-	-	1,37
4.	Persentase tenaga perpustakaan yang memiliki kualifikasi bidang ilmu perpustakaan, Informasi dan Dokumentasi*	%	-	-	-	-	0,11

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
5.	Persentase Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari*	%	-	-	-	-	0,0579
6.	Persentase Perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan*	%	-	-	-	-	0,004
7.	Persentase keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan sosialisasi*	Persen	-	-	-	-	0,2226
8.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat*	Nilai	-	-	-	-	57,7

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, 2022
Keterangan : *Indikator baru ditetapkan tahun 2022

2.4.2.18 Kearsipan

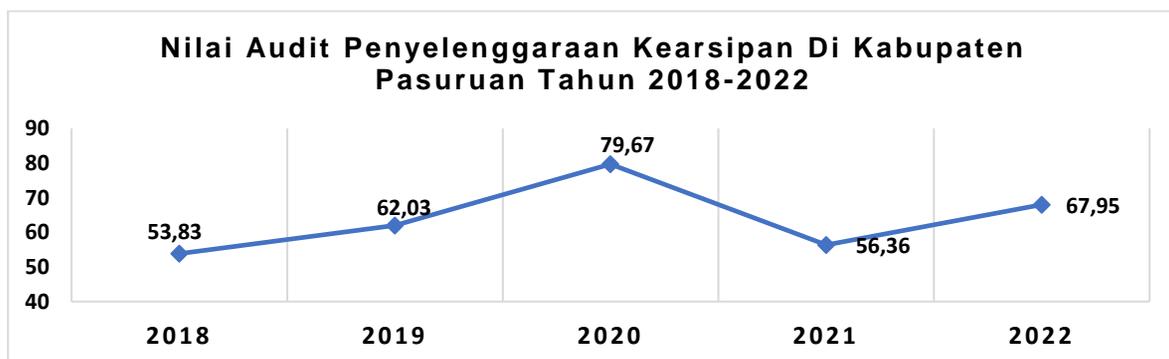
Capaian kinerja urusan kearsipan tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.51
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2018-2022

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*	%	-	-	89,56	75	75
2.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat*	%	-	-	30,92	0	0,17

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, 2022
Keterangan : *Indikator baru digunakan pada tahun 2020

Capaian kinerja Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Pasuruan cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2018 sampai 2022 meskipun belum mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya pengelolaan arsip statis akibat tidak adanya Arsiparis Bukan hasil penyetaraan jabatan struktural ke fungsional.



Grafik 2.55 Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, 2022

2.4.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

2.4.3.1 Kelautan dan Perikanan

Capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagai berikut:

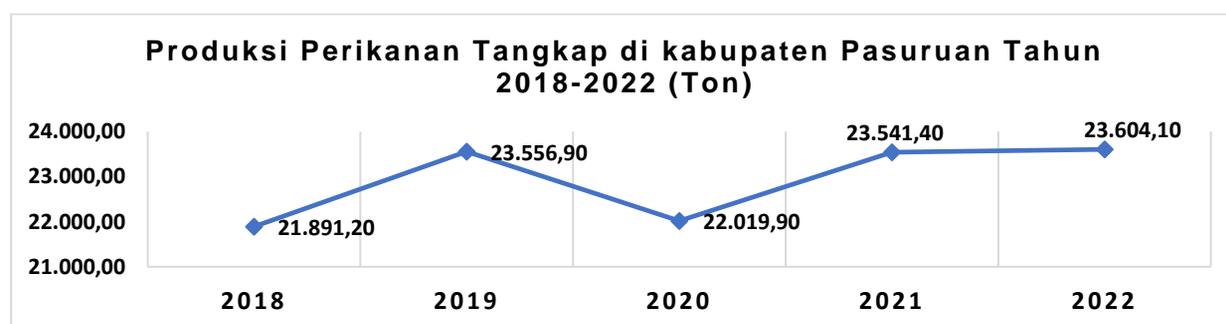
Tabel 2.52
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2018-2022

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	PDRB Sub Sektor Perikanan	Milyar Rupiah	729,38	802,11	825,09	828,44	454,85
2.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan*	%	-	5,59	3,43	7,84	7,94
3.	Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang Mandiri*	%	-	3,35	4,43	4,72	4,93
4.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	40.800,34	43.084,92	42.216,06	44.088,27	44.041,87

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan, 2022
Keterangan : *Indikator baru digunakan pada tahun 2019

2.4.3.1.1 Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap mencakup semua hasil penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap dari sumber perikanan alami di laut atau perairan umum secara bebas dan bukan milik perorangan. Produksi yang dimaksud adalah semua hasil yang diperoleh, baik yang dijual atau yang dibayar sebagai upah. Adapun capaian produksi perikanan tangkap Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:



Grafik 2.56 Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian perkembangan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pasuruan selama tahun 2018 sampai 2022

mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan sebesar 6,52% dari tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan sebesar 6,46% dari tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 26,63%.

2.4.3.1.2 Produksi Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya merupakan sektor produksi pangan yang paling pesat perkembangannya di dunia dengan proyeksi bahwa produksi akan berlipat ganda dalam 15-20 tahun mendatang. Pertumbuhan perikanan budidaya diperlukan dalam rangka memenuhi ketahanan pangan dan gizi dalam masa mendatang namun merupakan suatu tantangan dalam hal pengelolaan dampak terhadap lingkungan hidup. Adapun capaian perkembangan perikanan budidaya di Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:



Grafik 2.57 Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian perkembangan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 produksi perikanan di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan sebesar 3,31% dari tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan sebesar 1,71% dari tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar -0,53%.

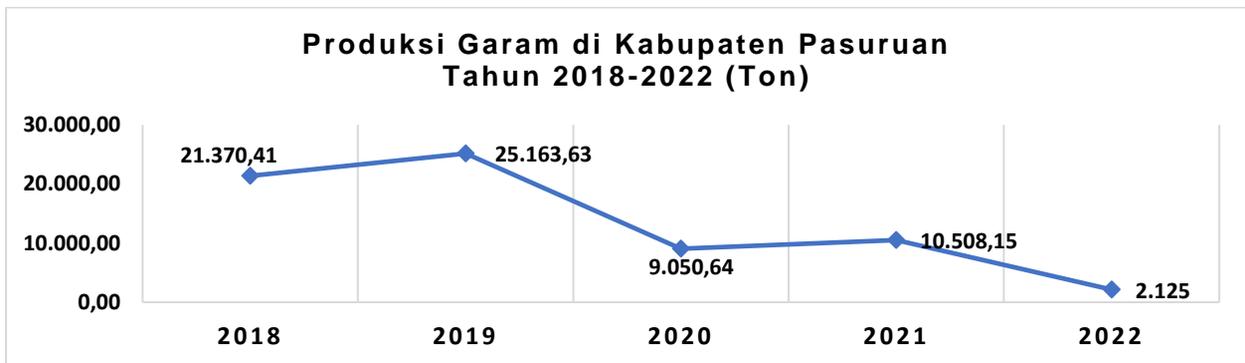
2.4.3.1.3 Produksi dan Produktivitas Garam

Garam merupakan salah satu kebutuhan sebuah pelengkap dalam kebutuhan pangan dan sumber elektrolit bagi tubuh manusia. Karena selama ini garam banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur dalam rumah tangga,

namun standar dalam pengolahan garam masih sederhana dan harga jualnya masih rendah.

2.4.3.1.3.1 Produksi Garam

Capaian produksi garam di Kabupaten Pasuruan mengalami tren penurunan selama tahun 2018 sampai 2022 dikarenakan wilayah pesisir Kabupaten Pasuruan mengalami musim kemarau basah yang cukup panjang sehingga proses pembuatan garam mengalami kegagalan.

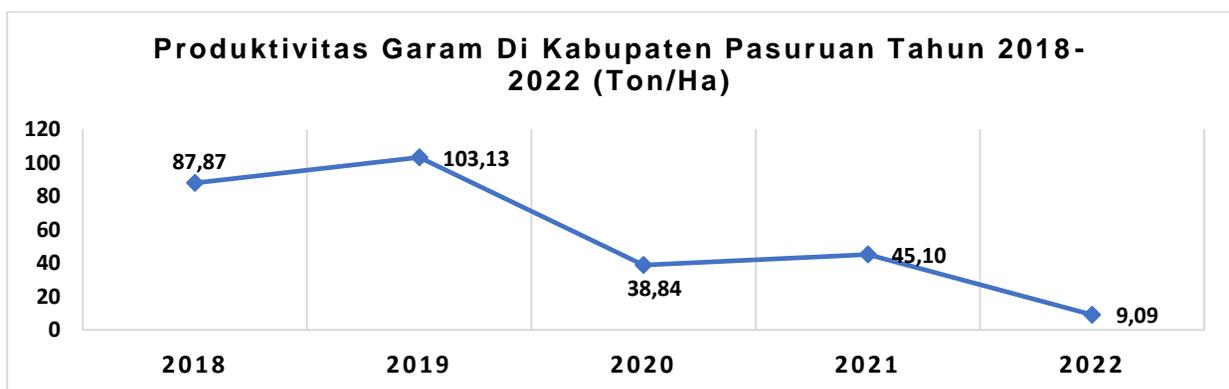


Grafik 2.58 Produksi Garam di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan 2022

2.4.3.1.3.2 Produktivitas Garam

Capaian produksi garam di Kabupaten Pasuruan mengalami tren penurunan selama tahun 2018 sampai 2022 dikarenakan wilayah pesisir Kabupaten Pasuruan mengalami musim kemarau basah yang cukup panjang sehingga proses pembuatan garam mengalami kegagalan.



Grafik 2.59 Produktivitas Garam di Kabupaten Pasuruan 2018-2022

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan 2022

2.4.3.2 Pariwisata

Potensi wisata di Kabupaten Pasuruan meliputi obyek Wisata Alam, Wisata Budaya, Wisata Agro dan Wisata Minat Khusus.

- 1) Wisata Alam antara lain : Gunung Bromo, Taman Candra Wilwatikta di Pandaan, Air Terjun Kakek Bodho dan Air Terjun Putuk Truno di Prigen, Pemandian Alam Banyubiru di Winongan, Danau Ranu di Grati, Sumber Air Umbulan di Winongan, dan Air Terjun Coban Baung di Purwodadi.

- 2) Wisata Budaya dan Religi antara lain : Candi Gununggangsir, Candi Belahan, Candi Jawi, Goa Jepang/Inna Tretes, Makam Ki Ageng Penanggungan, Makam Mbah Ratu Ayu di Bangil, Makam Mbah Semendhi di Winongan, Makam Mbah Segoropuro di Rejoso, Pertapaan Abiyoso, dan Pertapaan Indrokilo, serta kawasan Masjid Cheng Ho.
- 3) Wisata Agro antara lain : Kecamatan Tukur yaitu wisata apel/Agro Krisna, Bunga Krisan dan Paprika, Peternakan Sapi Perah, Jamur, Durian, Wisata Bhakti Alam. Kemudian PG Kedawung di Kecamatan Grati, Mangga klon 21 dan bunga sedap malam di Kecamatan Rembang, serta Kebun Raya LIPI di Kecamatan Purwodadi.
- 4) Wisata Minat Khusus antara lain : Kecamatan Prigen yaitu Taman Safari Indonesia II, Taman Dayu, Kaliandra, dan Finna Golf & Country Club. Kemudian Bukit Flora di Kecamatan Tukur, Baung Camp di Kecamatan Purwodadi, dan sentra bordir di Kecamatan Bangil.

Capaian kinerja urusan pariwisata tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.53
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah kunjungan wisata	Orang	2.533.447	2.687.987	1.246.376	1.358.385	2.600.643
2.	<i>Spending of Money in Tourism*</i>	Rupiah	-	-	-	-	758.385.137.911
3.	Jumlah ODTW yang terstandarisasi**	Unit	-	7	4	8	0,08
4.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan***	%	-	-	-65,93	25,62	17
5.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota***	%	-	-	-53,61	8,98	17
6.	Tingkat hunian akomodasi**	Unit	-	1.004	1.004	1.230	1.227
7.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Rp	5.306.580	5.836.229	5.057.261	5.392.079	6.185.835
8.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD***	Rp	-	-	271.053.500	64.646.559	466.741.000

Sumber: Dinas Pariwisata, 2022

Keterangan: * Indikator baru digunakan tahun 2022 karena ada perubahan cascading di tahun 2022

** Indikator baru digunakan tahun 2019 karena ada perubahan indikator

***Indikator baru digunakan tahun 2020

Spending of Money in Tourism merupakan indikator yang baru dilaksanakan pada tahun 2022 untuk mengetahui mengetahui berapa perputaran uang yang dibelanjakan oleh Wisatawan yang mengunjungi Destinasi Wisata di kabupaten Pasuruan dengan diukur dari berbagai variable

yaitu Penginapan, Objek Wisata, Makan Minum, Oleh-Oleh dan Transportasi yang digunakan oleh Wisatawan selama berwisata di Kabupaten Pasuruan. Capaian *Spending of Money in Tourism* pada tahun 2022 baru mencapai 96,31% dari target yang ditentukan dikarenakan masih belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata.

2.4.3.3 Pertanian

Capaian kinerja urusan pertanian tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2018-2022

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	25,93	4,16	20,96	0,30	0,72
2.	Persentase Peningkatan produktivitas tanaman pangan	%	8,3	17,59	8,09	0,63	0,63
3.	Persentase Peningkatan produktivitas tanaman buah tahunan	%	43,12	0,62	0,48	0,48	0,66
4.	Persentase Peningkatan produktivitas tanaman sayur	%	61,04	1,16	0,56	0,56	0,08
5.	Persentase Peningkatan produktivitas tanaman hias	%	12,18	0,60	0,36	0,36	0,64
6.	Persentase Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	%	5	0,82	0,99	0,54	1,60
7.	Persentase angka kematian (ternak besar)*	%	-	-	-	-	2,5
8.	Persentase angka kematian (ternak kecil)*	%	-	-	-	-	0,21
9.	Persentase angka kematian (ternak unggas)*	%	-	-	-	-	2,25
10.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun						
	Tanaman Pangan :						
	Padi	Ton/Ha	6,33	5,94	5,5	5,5	6,03
	Jagung	Ton/Ha	6,43	6,39	6,39	6,47	6,41
	Kedelai	Ton/Ha	1,18	1,76	1,85	1,89	1,91
	Tanaman Buah Tahunan	Kg/Pohon	278,74	280,11	281,24	282,50	90,17
	Tanaman Sayur	Ton/Ha	69,99	67,32	67,25	67,50	35,67

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Tanaman Hias	Tangkai/m2	72,44	72,57	72,71	72,73	19,9
11.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular*	%	-	-	-	-	49

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2022
Keterangan: *Indikator baru digunakan tahun 2022

2.4.3.3.1 PDRB Sub Sektor Pertanian

PDRB adalah produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu wilayah dengan dukungan faktor-faktor produksi dalam wilayah tersebut. Sektor pertanian mencakup segala perusahaan dan pemanfaatan makhluk biologis untuk memenuhi kebutuhan hidup atau sebagai bahan baku dalam proses produksi. PDRB Sub Sektor Pertanian berasal dari sektor tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Pada tahun 2019, PDRB Sub Sektor Pertanian mengalami kenaikan sebesar 1,09 dari tahun 2018. Pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan sebesar 2,14% dibandingkan pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2021, mengalami penurunan sebesar -15,24% dibandingkan tahun 2020 dan pada tahun 2022 juga mengalami penurunan sebesar -0,72%.



Grafik 2.60 PDRB Sub Sektor Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

2.4.3.3.1.1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

a. Tanaman Pangan

Produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.55
Produktivitas Tanaman Pangan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

No	Tanaman Pangan	Produktivitas (Kw/Ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi	63,33	59,40	55,00	60,06	60,3

No	Tanaman Pangan	Produktivitas (Kw/Ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
2	Jagung	64,29	63,85	63,85	64,77	64,1
3	Kedelai	11,84	17,61	18,54	18,85	19,1

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, 2022

1) Padi

Produktivitas padi selama kurun waktu 2018-2022 cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan setiap tahun sebesar -1,0%. Produktivitas menurun karena kandungan bahan organik tanah semakin menurun. Penggunaan bahan-bahan kimia yang berlebihan pada tanah justru merusak struktur tanah. Sedangkan Produksi meningkat karena luas panen meningkat dengan adanya IP 400, pembangunan sumur bor dan pembangunan jaringan irigasi tersier.

2) Jagung

Produktivitas jagung selama kurun waktu 2018-2022 cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan setiap tahun sebesar -0,07%. Dalam rangka meningkatkan produktivitas jagung, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan berbagai upaya diantaranya mendukung program pengembangan jagung hibrida kepada para petani berupa bantuan benih dan pupuk urea bersubsidi melalui anggaran APBN serta kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman sejak dini melalui SL PHT (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Tanaman) yang didukung oleh anggaran APBD Kabupaten. Selain itu bantuan obat-obatan untuk hama penyakit tanaman juga diberikan melalui anggaran APBD Provinsi. Peningkatan produksi jagung juga dilakukan dengan merubah pola tanam di beberapa sentra kedelai beralih ke komoditas jagung seperti Kecamatan Kraton, Pohjentrek, Sukorejo, Wonorejo, Purwosari dan Gempol.

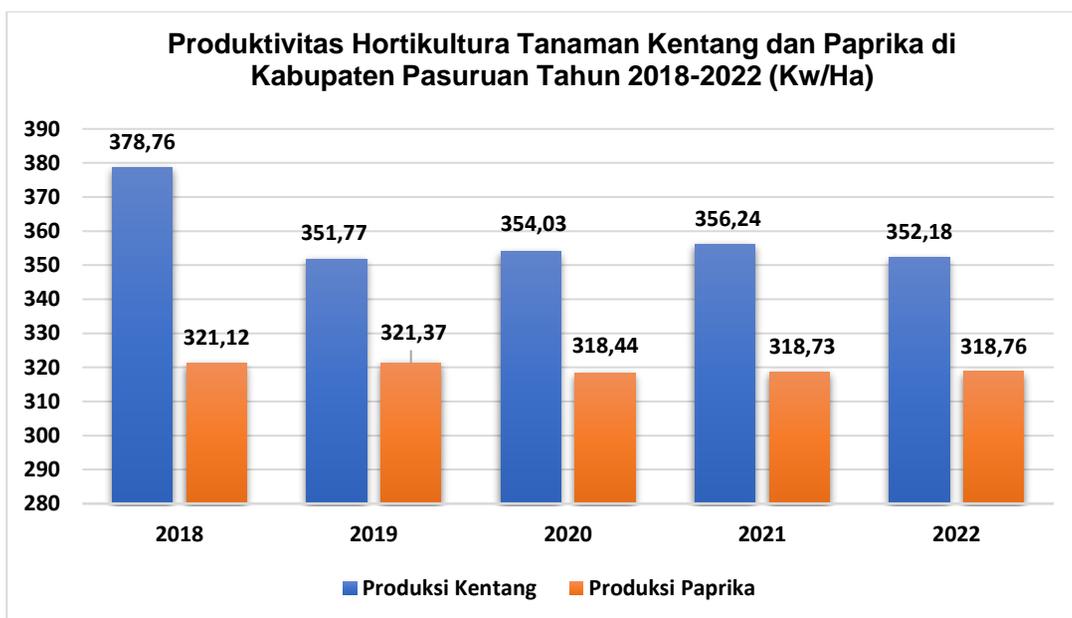
3) Kedelai

Selama tahun 2018-2022, produktivitas kedelai cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan setiap tahun sebesar 14,25%.

b. Tanaman Hortikultura

1) Sayuran Kentang dan Paprika

Produktivitas kentang selama kurun waktu tahun 2018-2022 cenderung mengalami tren penurunan. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan produksi kentang, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan berbagai upaya diantaranya penggunaan benih unggul dan bermutu yang diperoleh dari Pusat Perbenihan Kentang di Kawasan Sentra Kecamatan Tosari serta pemupukan yang berimbang. Selain itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga mendukung harga komoditas kentang dipasaran yang sangat menjajikan atau menguntungkan bagi petani supaya petani lebih antusias berbudidaya kentang dalam skala luasan yang cukup besar.



Grafik 2.61 Produktivitas Hortikultura Tanaman Kentang dan Paprika di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

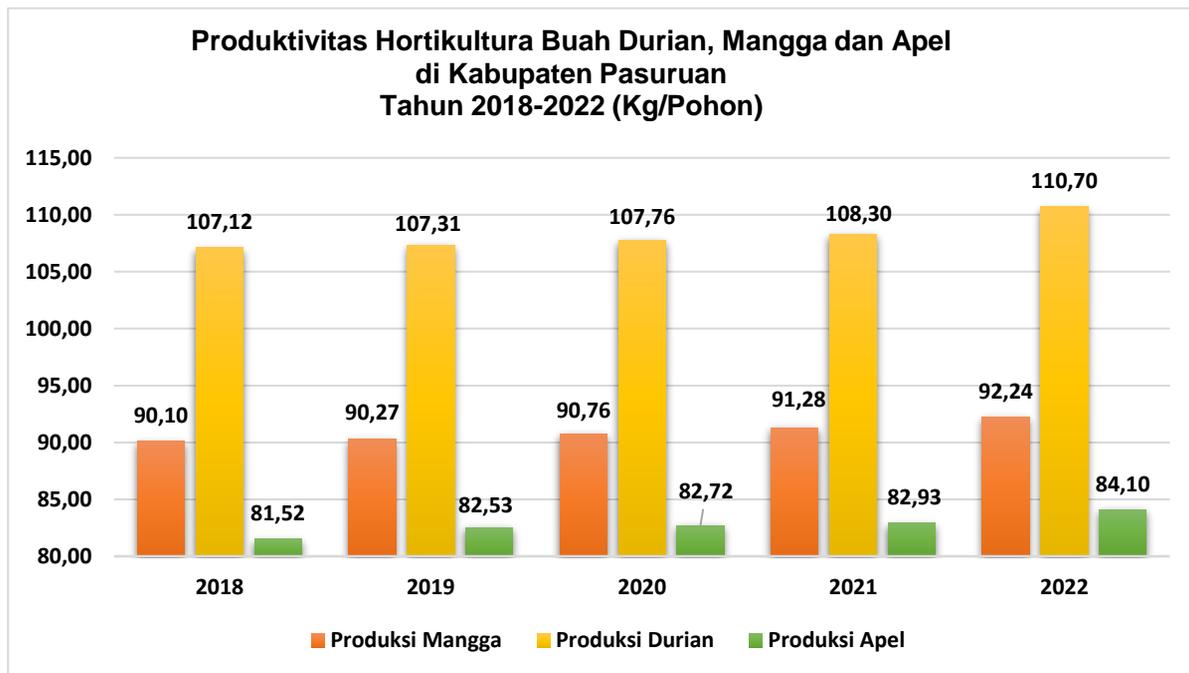
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, 2022

Produktivitas paprika mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* sehingga permintaan pasar berkurang. Akan tetapi pada tahun 2021 dan 2022, produktivitas kentang mengalami peningkatan kembali. Produktivitas komoditas paprika di kawasan sentra pengembangan cukup melimpah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah penggunaan benih varietas unggul, penggunaan pupuk yang disalurkan melalui sistem irigasi tetes dan pengendalian OPT sejak dini.

2) Buah Durian, Mangga dan Apel

Produktivitas buah durian selama kurun waktu tahun 2018-2022 cenderung mengalami tren peningkatan. Beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya produktivitas buah durian antara lain iklim yang mendukung serta pemeliharaan tanaman secara intensif berupa pemangkasan tunas-tunas lateral sehingga memicu tahap pembungaan dan pembuahan. Disamping itu

harga komoditas buah durian mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan komoditas lainnya.



Grafik 2.62 Produktivitas Hortikultura Buah Durian, Mangga dan Apel di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, 2022

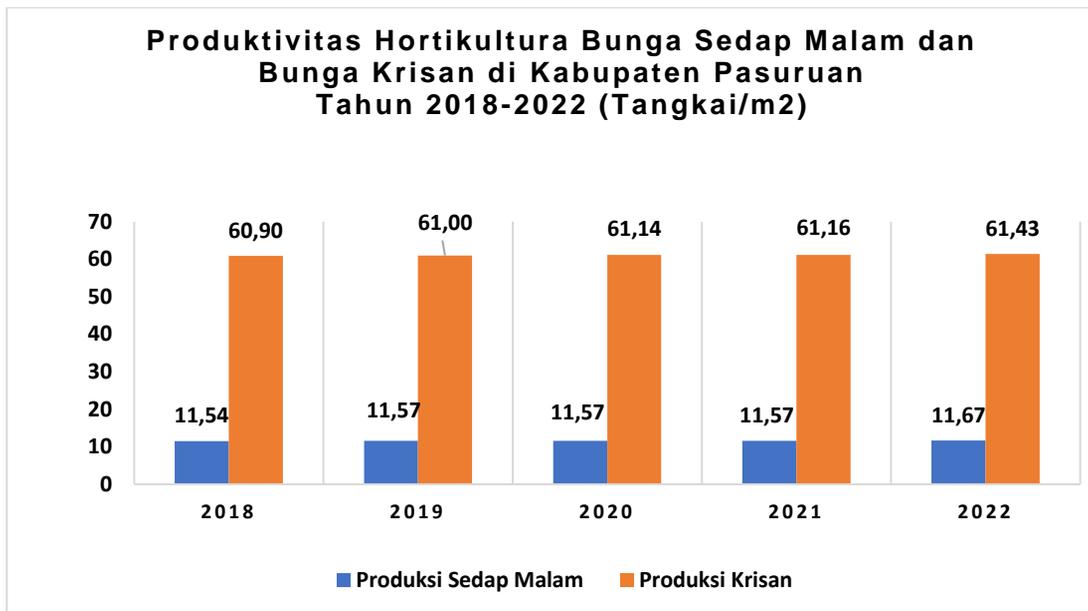
Selama kurun waktu tahun 2018-2022, produktivitas komoditas buah mangga juga mengalami tren peningkatan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu penerapan teknologi pembuahan komoditas mangga diluar musim (*offseason*) menggunakan paklobutrazol, penggunaan pupuk organik, pemangkasan bentuk dan pemangkasan produksi serta pengembangan sentra kawasan mangga gadung klon 21 atau mangga alpukat yang dikembangkan secara kontinyu dan berkelanjutan antara lain berupa bantuan bibit mangga melalui anggaran APBD Kabupaten Pasuruan.

Selain buah durian dan buah manga, produktivitas buah apel juga mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2018-2022. Peningkatan produksi buah apel disebabkan adanya penerapan teknologi budidaya yang baik dan benar, penggunaan pupuk organik, pengendalian OPT melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu(SL-PHT) dan Sekolah Lapang Agens Hayati (SL-AH), pemeliharaan tanaman berupa pemangkasan serta pengembangan kawasan sentra Buah Apel. Selanjutnya jugs akan dilakukan upaya *branding* Apel Nongkojajar.

3) Bunga Sedap Malam dan Bunga Krisan

Produktivitas bunga sedap malam selama periode tahun 2018-2022 cenderung mengalami peningkatan. Begitu pula dengan produktivitas bunga krisan juga mengalami peningkatan setiap tahun dikarenakan pengembangan

sentra budidaya krisan yang cukup luas dan sangat diminati oleh petani dan prospek pasar yang cukup menjanjikan.

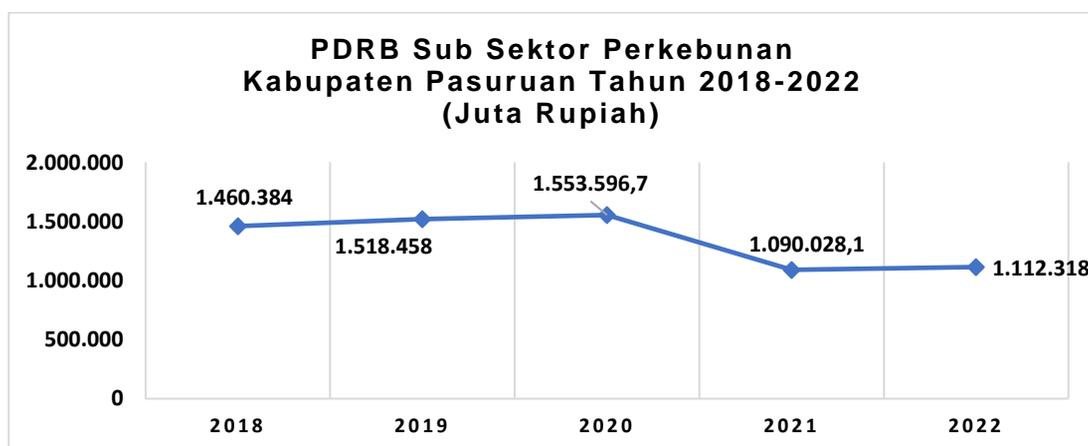


Grafik 2.63 Produktivitas Hortikultura Bunga Sedap Malam dan Bunga Krisan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, 2022

2.4.3.3.2 PDRB Sub Sektor Perkebunan

Pada tahun 2019, PDRB Sub Sektor Perkebunan Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan sebesar 3,98% dibandingkan pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan sebesar 2,31% dibandingkan tahun 2020. Akan tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar -29,84% dan pada tahun 2022 juga mengalami penurunan sebesar -2,04%.



Grafik 2.64 PDRB Sub Sektor Perkebunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, 2022

Tabel 2.56
Produktivitas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2018-2022

No	Tanaman Pangan	Produktivitas (Kg/Ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kopi	713,75	708,98	711,63	713,22	885
2	Kelapa	1.765,37	1.943,92	2.098,21	2.094,93	1.762,83
3	Cengkeh	432,66	436,48	438,73	447,03	402,47
4	Kapuk Randu	262,37	271,73	272,44	282,30	341,01
5	Jambu Mete	726,41	65,82	108,70	113,03	256,11
6	Kenanga	3.438,54	3.328,21	3.275,38	3.224,92	3.090,01
7	Tebu	5.970,87	7.477,03	7.911,54	8.436,12	44.393,48

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, 2022

Selama kurun waktu 2018-2022, tebu menjadi tanaman perkebunan dengan rata-rata pertumbuhan produktivitas tertinggi sebesar 115,97 setiap tahunnya. Selanjutnya tanaman perkebunan yang memiliki rata-rata pertumbuhan produktivitas tertinggi setiap tahun secara berturut-turut adalah Jambu Mete sebesar 26,19%, kapuk randu sebesar 7,06%, kopi sebesar 6% dan kelapa sebesar 0,57%. Sedangkan tanaman perkebunan yang mengalami penurunan adalah cengkeh dengan rata-rata pertumbuhan produktivitas setiap tahun sebesar -1,67%, selanjutnya kenanga sebesar -2,71%.

2.4.3.3.3 Persentase Peningkatan Produksi Peternakan

Peningkatan Produksi Peternakan ditentukan oleh adanya peningkatan populasi ternak baik ternak besar dan kecil. Indikator ini digunakan untuk mengetahui perkembangan tingkat produksi peternakan yang meliputi daging, telur dan susu.



Grafik 2.65 Persentase Peningkatan Produksi Peternakan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan, 2022

1. Daging

Produksi daging selama kurun waktu 2018-2022 cenderung mengalami tren penurunan. Penurunan produksi daging disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat yang berpengaruh pada permintaan konsumen Hotel dan Restoran. Dampak pandemi *covid-19* memukul segala sektor khususnya ekonomi masyarakat, berpengaruh pada pola konsumsi masyarakat yang pada akhirnya mengurangi konsumsi terhadap produk olahan daging.

2. Telur

Selama kurun waktu 2018-2022, produksi telur di Kabupaten Pasuruan cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan produksi telur yang belum optimal dengan adanya peremajaan induk petelur. Namun di tengah pandemi *covid-19* yang melanda, konsumsi telur menjadi andalan masyarakat dalam mencukupi protein hewani.

3. Susu

Produksi susu selama kurun waktu 2018-2021 mengalami peningkatan yang disebabkan oleh meningkatnya hasil produksi sapi karena pertambahan kelahiran alami dan juga dari program inseminasi buatan yang membuat populasi meningkat. Selain itu juga disebabkan oleh pemberian pakan yang baik seperti konsentrat dan kesadaran peternak untuk membuat kandang yang lebih higienis. Akan tetapi pada tahun 2022, produksi susu mengalami penurunan yang sangat signifikan.

2.4.3.3.4 Penanganan Hasil Produksi Pertanian Pasca Panen

Penanganan produksi pertanian pasca panen sudah dilakukan pada beberapa komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Pasuruan, antara lain:

1. Kopi

Kabupaten Pasuruan telah memberikan bantuan alat UPH (Unit Pengolahan Hasil) kepada beberapa kelompok tani, alat packaging atau pengemasan kopi dan melakukan sosialisasi terkait petik merah kopi.

2. Mangga

Kabupaten Pasuruan telah memberikan bantuan berupa alat packaging atau pengemasan mangga, rumah grading mangga, alat pasca panen serta pelatihan pasca panen.

3. Apel

Kabupaten Pasuruan telah memberikan bantuan berupa alat packaging atau pengemasan apel, rumah grading dan alat pasca panen.

2.4.3.4 Perdagangan

Capaian kinerja urusan perdagangan tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagai berikut:

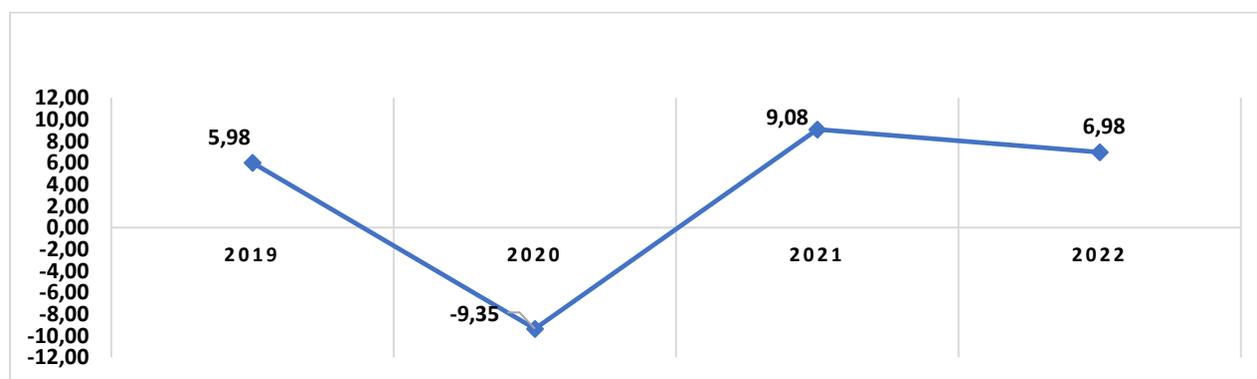
Tabel 2.57
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nilai Perdagangan Besar dan Eceran*	Jutaan Rupiah	-	10.746.257,6	9.734.811,40	10.618.743,0	11.359.788,1
2.	Nilai Transaksi Perdagangan*	Jutaan Rupiah	-	1.964,5	4.192,6	5.302,7	4.516,1
3.	Persentase Alat Ukur Yang Terstandarisasi*	%	-	94,52	75,31	101,01	100
4.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku*	%	-	67,18	107,54	100	100

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pasuruan, 2022

Keterangan : *Indikator baru digunakan tahun 2019

2.4.3.4.1 Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

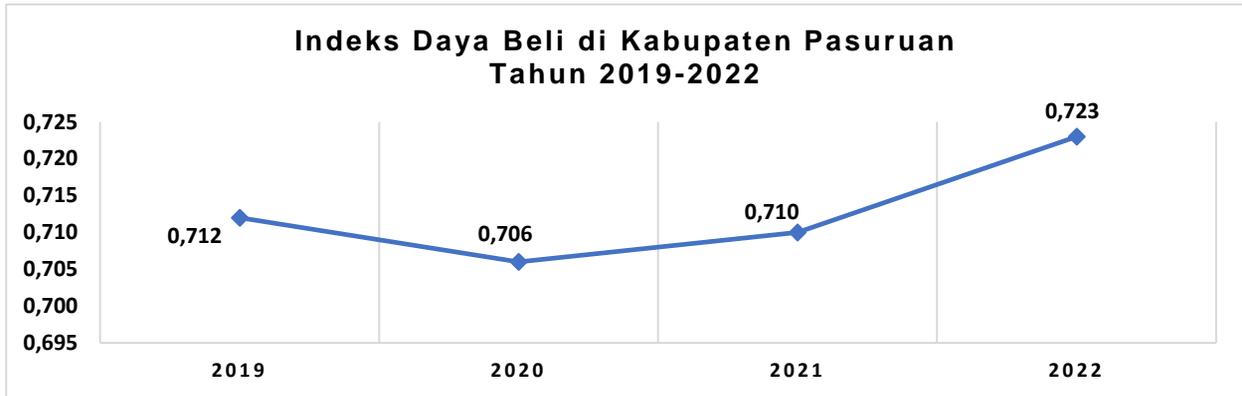


Grafik 2.66 Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran cenderung mengalami peningkatan selama periode tahun 2019 sampai 2022. Akan tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai minus dikarenakan adanya pembatasan sosial akibat pandemi *covid-19* sehingga menyebabkan berkurangnya aktivitas perdagangan.

2.4.3.4.2 Indeks Daya Beli



Grafik 2.67 Indeks Daya Beli di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks daya Beli di Kabupaten Pasuruan selama kurun waktu 2019-2022 cenderung mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2020, indeks daya beli mengalami penurunan dikarenakan dikarenakan berkurangnya daya beli masyarakat akibat adanya pandemi *covid-19* untuk menghemat pengeluaran.

2.4.3.5 Perindustrian

Capaian kinerja urusan perindustrian tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota*	%	-	6,64	10,74	2,06	9,88
2.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP**	%	-	-	-	30	30
3.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini***	%	-	-	100	100	100

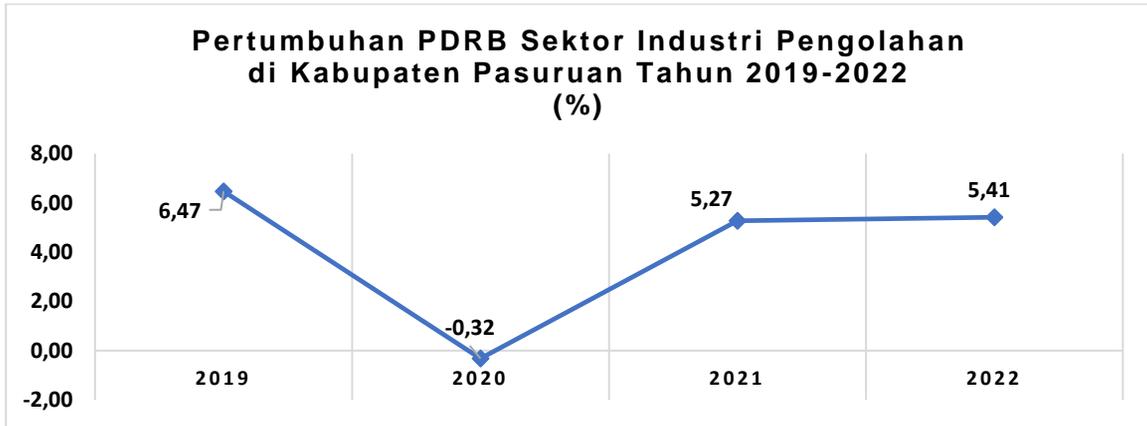
Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pasuruan, 2022

Keterangan: *Indikator baru digunakan tahun 2019

**Indikator baru digunakan tahun 2021

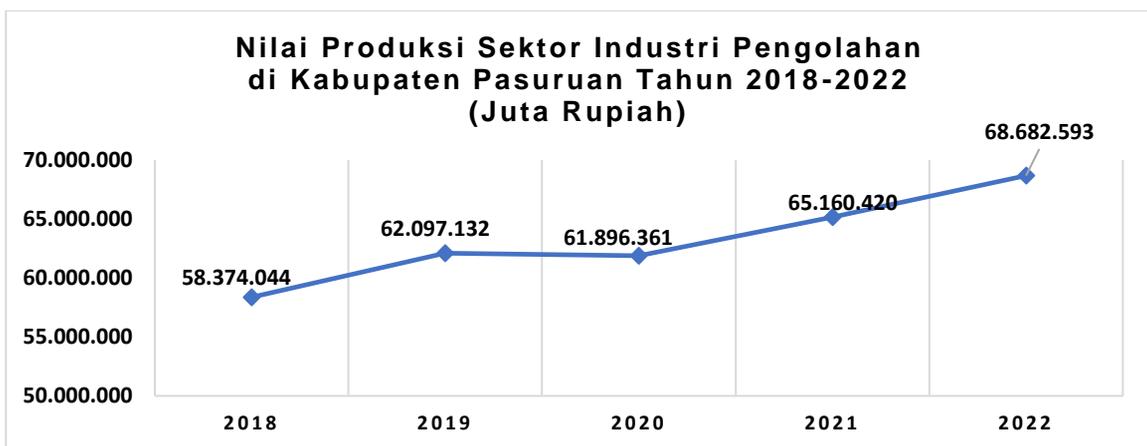
***Indikator baru digunakan tahun 2020

2.4.3.5.1 Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan



Grafik 2.68 Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pasuruan, 2022



Grafik 2.69 Nilai Produksi Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pasuruan, 2022

Nilai Produksi Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Pasuruan selama kurun waktu 2018-2022 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,18% setiap tahunnya. Pada tahun 2020 nilai produksi sektor industri sempat mengalami penurunan sebesar minus 0,004% yang diakibatkan oleh adanya pandemi *covid-19* sehingga banyak Perusahaan Industri Pengolahan yang mengurangi jumlah produksinya karena berkurangnya permintaan barang baik dari dalam maupun luar negeri.

2.4.4 Fokus Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.4.4.5 Perencanaan

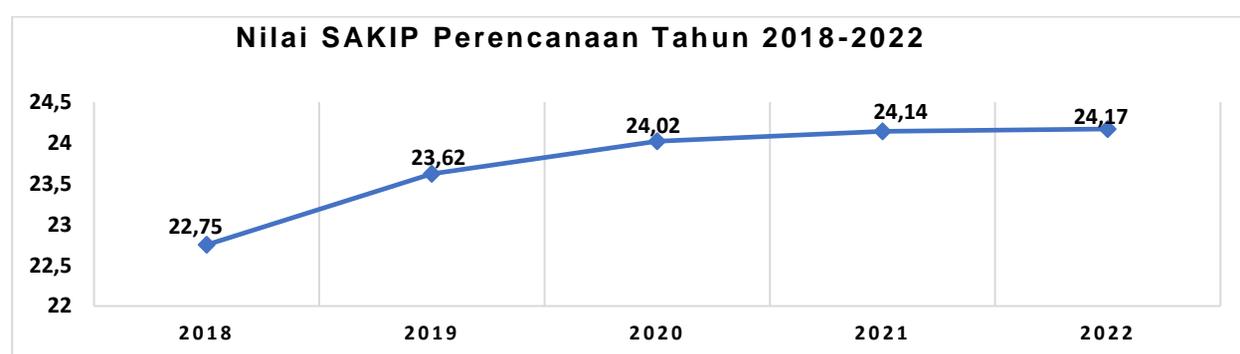
Capaian kinerja unsur perencanaan tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Unsur Perencanaan Tahun 2018-2022

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan	%	-	100	100	100	100
2	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang baik	%	-	84	88	94,64	94,54

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2022
Keterangan: *Indikator baru digunakan tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama tahun 2018 sampai 2022 capaian Nilai SAKIP Perencanaan Kabupaten Pasuruan selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya meskipun pada tahun 2022 belum mencapai target yang ditentukan.



Grafik 2.70 Nilai SAKIP Perencanaan Tahun 2018-2022

Sumber: KemenPAN-RB, 2022

2.4.4.2 Keuangan

Capaian kinerja unsur keuangan tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Unsur Keuangan Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	n/a

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
2.	Jumlah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Juta Rupiah	614.302,52	650.889,11	700.151,91	701.197,69	736.238,74
3.	Persentase laporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintah	%	100	100	100	100	n/a
4.	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan*	%	-	-	7,02	36,94	8,3649
5.	Rasio PAD*	%	-	-	0,48	0,48	22,4192
6.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)*	%	-	-	58,68	81,51	86,8225
7.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD*	%	-	-	84,32	6,26	-5,3516
8.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD*	%	-	-	95,75	5,43	9,7569
9.	Manajemen Aset*	-	-	-	-	-	2.731.023
	Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)*	Ya/Tidak	-	-	Ya	Ya	Ya
	Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)*	Ya/Tidak	-	-	Ya	Ya	Ya
	Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)*	Ya/Tidak	-	-	Ya	Ya	Ya
	Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)*	Ya/Tidak	-	-	Ya	Ya	Tidak
10.	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya*	%	-	-	8,18	8,18	9,87

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2022

Keterangan: *Indikator baru digunakan tahun 2020

n/a = Data belum keluar

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah antara lain Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar dan Pernyataan menolak memberikan opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Laporan Keuangan dengan Opini BPK mulai tahun 2018-2021 Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah disampaikan tepat waktu kepada BPK-RI dan

capaian indikator kinerja sasaran berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tingkat capaiannya 100% dan sesuai juga dengan rencana yang ditetapkan pada dokumen perencanaan strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Keberhasilannya sesuai dengan target karena dalam hal pelaporan selalu diadakan rekonsiliasi dan evaluasi secara berkala dan konsisten, sehingga pelaporan keuangan selalu selesai tepat waktu.

2.4.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Capaian kinerja unsur kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Unsur Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase ASN yang memiliki kualifikasi ijazah setara S1/S2/S3	%	64,70	64,89	67,74	69,73	70,13
2.	Persentase ASN yang lulus ujian tingkat 1, 2 dan penyesuaian ijazah	%	72	72,86	77,08	77,40	77,54
3.	Persentase pelanggaran disiplin	%	0,19	0,18	0,16	0,13	0,13
4.	Persentase peningkatan kinerja ASN dalam Penilaian SKP	%	99	99	99	99	99
5.	Persentase pegawai yang lulus diklat	%	60	61,50	62,72	63,24	64,09
6.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)*	%	-	-	98,46	182,27	
	a. Pendidikan Tinggi*	%	-	-			66,35
	b. Menengah*	%	-	-			29,37
	c. Dasar*	%	-	-			4,28
7.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)*	%	-	-	6,69	6,35	13,11
8.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)*	%	-	-	100	100	43,69

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan, 2022
Keterangan: *Indikator baru digunakan tahun 2020

2.4.4.3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara untuk mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator *output* yang bersifat independen. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

Kabupaten Pasuruan selama tahun 2020-2022 masih berada pada kategori “Sangat Rendah” dikarenakan masih sedikitnya kompetensi melalui diklat, bimtek dan lain-lain yang merupakan poin pendongkrak Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.



Grafik 2.71 Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2022

Sumber: Badan Kepegawaian Negara, 2022

2.4.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Capaian kinerja unsur penelitian dan pengembangan tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Unsur Penelitian dan Pengembangan Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	80	85	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2022

Tolak ukur keberhasilan dari pelaksanaan fungsi penunjang Litbang dinilai dengan indikator kinerja “Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti”. Indikator kinerja tersebut menjadi pertimbangan berupa selektivitas dalam penyusunan rencana kegiatan Litbang yang dibutuhkan oleh Kepala Daerah dalam pengambilan kebijakan. Dalam periode tahun 2018-2022, Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan, bahkan selama tiga tahun berturut-turut (2020-2022) telah mencapai 100%.

2.4.4.5 Pengawasan

Capaian kinerja unsur pengawasan, indikator Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP secara Efektif mengalami peningkatan dari tahun 2021 dikarenakan semakin bertambahnya Perangkat Daerah di

Kabupaten Pasuruan yang telah menerapkan SPIP secara efektif yaitu 20 Perangkat Daerah dari 55 Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.63
Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP secara Efektif	%	n/a	n/a	n/a	19,30	36,36
2.	Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP PD Dengan Nilai Minimal BB	%	33,92	35,71	58,92	87,50	100
3.	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	n/a
4.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*	-	-	-	Level 3	Level 3	Level 3
5.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)*	-	-	-	Level 2	Level 2	Level 2

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, 2022

Keterangan: *Indikator baru digunakan tahun 2020

n/a = Data belum keluar

2.4.4.6 Sekretariat Dewan

Sekretariat DPRD mempunyai posisi penting dalam menunjang dan memfasilitasi kinerja wakil rakyat, mulai dari perencanaan, proses administrasi pengaturan persiapan, sampai pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota DPRD yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah daerah (eksekutif). Sekretariat DPRD menjadi bagian dari sistem pendukung atau subsistem dalam menentukan sistem kinerja Sekretariat Dewan terintegrasi dengan wakil rakyat.

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Unsur Sekretariat Dewan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	IKM/SKM Layanan Sekretariat DPRD	Nilai	88,51	88,75	89,17	89,39	84,89
2.	Persentase Keluhan Masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi	%	100	72	72	73	86

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa IKM/SKM Layanan Sekretariat DPRD cenderung mengalami penurunan selama tahun 2018 sampai 2022. Sedangkan Persentase Keluhan Masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi menunjukkan juga mengalami penurunan dari tahun 2018, akan tetapi pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan.

2.4.4.7 Sekretariat Daerah

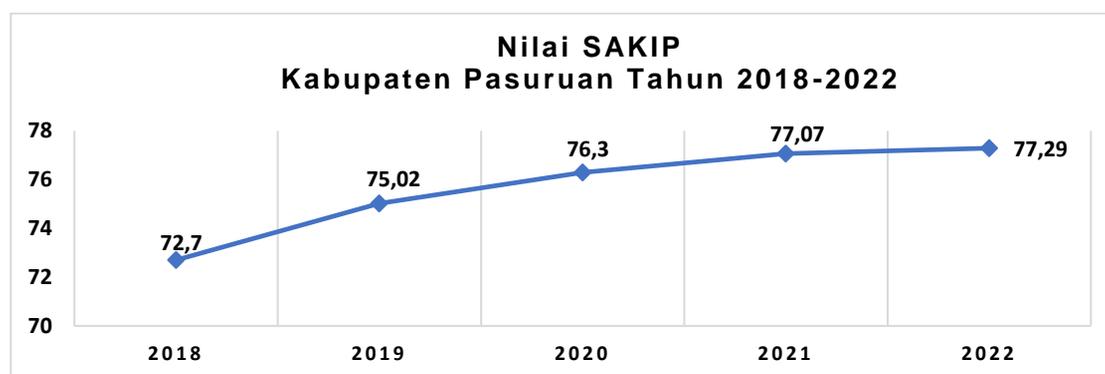
Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan diukur berdasarkan indikator kinerja.

Tabel 2.65
Capaian Kinerja Unsur Sekretariat Daerah
Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif*	%	-	7,65	7,65	6,01	13,44
2.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan*	%	-	72,03	83,72	11,50	43,18
3.	Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa*	%	-	0	0	-12,63	567,38

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan, 2022

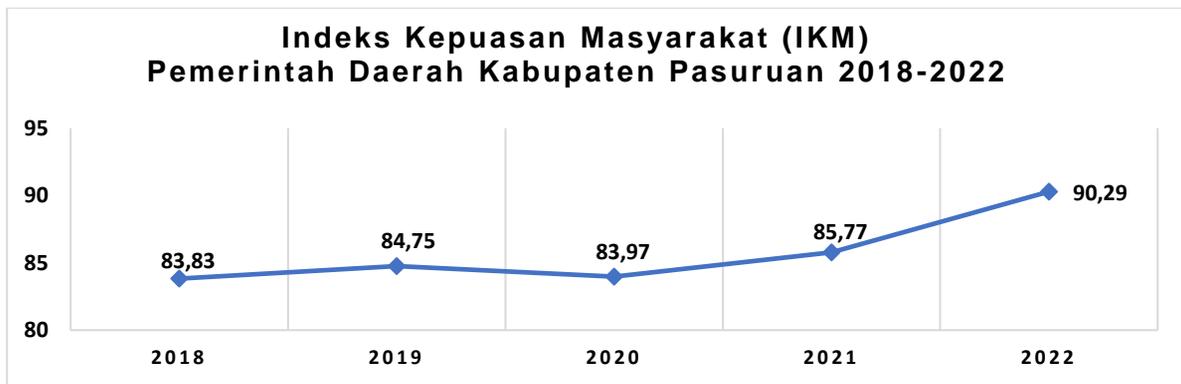
Keterangan: *Indikator baru digunakan tahun 2019



Grafik 2.72 Nilai SAKIP Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: KemenPAN-RB, 2022

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian Nilai SAKIP Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Akan tetapi Nilai SAKIP Kabupaten Pasuruan tahun 2022 masih belum mencapai target yang telah ditentukan.



Grafik 2.73 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022
 Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, 2022

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dengan melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan selama tahun 2018-2022 cenderung mengalami peningkatan meskipun hanya pada tahun 2020 yang mengalami penurunan.

2.5 Kerjasama Daerah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan percepatan pencapaian indikator kinerja Pemerintah Daerah, pada tahun 2021 sampai 2022, Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan beberapa kerjasama baik dengan Pemerintah Daerah lain maupun dengan pihak swasta. Kerjasama dimaksud antara lain :

- 1) PT Gas Telekomunikasi Nusantara, bekerja sama dalam bidang layanan teknologi informasi dan telekomunikasi di Kabupaten Pasuruan;
- 2) Kantor Dirjen Pajak Jawa Timur III dalam bidang sinergi penyelenggaraan pelayanan publik di Graha Pelayanan Publik Kabupaten Pasuruan;
- 3) Polbangtan Malang dalam bidang sinergi pelaksanaan pembangunan pertanian dan perwujudan pengembangan Sumber Daya Manusia dan potensi dalam bidang pertanian di Kabupaten Pasuruan;
- 4) Dirjen PAUDNI, Pendidikan Dasar dan Dikmen Kemdikbud Riset dan Teknologi dalam bidang penyelenggaraan program sekolah penggerak;
- 5) Kementerian Keuangan RI dalam bidang Penempatan Lulusan POLTEKNIK Keuangan Negara STAN di luar Kementerian Keuangan.

2.6 Realisasi Bantuan CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan di dunia usaha atau industri sebagai rasa tanggung jawab. Tanggung jawab itu akan ditujukan untuk sosial maupun lingkungan sekitar. Dana CSR bisa digunakan untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat. Fasilitas tersebut khususnya untuk masyarakat yang berada sekitar dunia usaha atau industri tersebut berada. Realisasi Bantuan CSR di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.66
Realisasi Bantuan CSR di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022

No.	Tahun	Jumlah Perusahaan	Nilai (Rupiah)
1	2019	29 Perusahaan	11.351.090.434
2	2020	31 Perusahaan	5.127.951.160
3	2021	31 Perusahaan	14.476.428.385
4	2022	14 Perusahaan	9.845.123.761

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, 2022

2.7 BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendukung kinerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Giri Nawa Tirta.” PDAM mendukung kinerja pada layanan bidang urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada sub urusan Keciptakarya, yaitu mendukung meningkatnya akses masyarakat dalam pemenuhan air bersih atau air minum. Kinerja Pelayanan PDAM “Giri Nawa Tirta” Kabupaten Pasuruan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.67
Kinerja Pelayanan PDAM “Giri Nawa Tirta” Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2022

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Cakupan Layanan	11,14%	11,40%	13,55%
2.	Produktifitas Pemanfaatan Instalasi Produksi	-	42,75%	47,27%

Sumber: Bagian Perekonomian-Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, 2022

2.8 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melaksanakan jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta SPM Bidang Sosial sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.68
Capaian Indikator Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian					Program Pendukung	Kendala Permasalahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022			
SPM Bidang Pendidikan										
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	-	83,98%	89,14%	89,31%	94,93%	Program Pengelolaan Pendidikan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	-	88,77%	2,30%	1,41%	3,85%	Program Pengelolaan Pendidikan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	-	32,45%	106,85%	52,37%	114,79%	Program Pengelolaan Pendidikan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian					Program Pendukung	Kendala Permasalahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022			
SPM Bidang Kesehatan										
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	95,09%	93,54%	100%	102,63%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	99,51%	98,6%	100%	100,23%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	105,47%	98,25%	100%	103,15%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian					Program Pendukung	Kendala Permasalahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022			
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	90,63%	86,46%	97,81%	100,50%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	75,4%	90,67%	99,54%	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	100,01%	73,69%	87,26%	100,07%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian					Program Pendukung	Kendala Permasalahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022			
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	112,64%	99,9%	100%	94,24%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	100,69%	68,77%	77,79%	90,16%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus usia 15 ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	104,45%	92,81%	107,23%	109,13%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian					Program Pendukung	Kendala Permasalahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022			
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	100,07%	101,17%	98,18%	103,55%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah orang terduga Tuberkolisis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	100%	92,1%	62,05%	102,65%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan	-	106,69%	94,52%	108,77%	100,62%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian					Program Pendukung	Kendala Permasalahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022			
		pelayanan kesehatan								
SPM Bidang Pekerjaan Umum										
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	-	-	-	87,08%	86,74%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	- Jarak sumber yang cukup jauh dari layanan menyebabkan anggaran hanya cukup sampai jaringan perpipaan saja - Kapasitas lahan untuk pembangunan infrastruktur SPALD-	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-	-	-	83,28%	81,81%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	T/SPALD-S kurang mencukupi - Kurang aktifnya peran serta masyarakat	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian					Program Pendukung	Kendala Permasalahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022			
									untuk mengusulkan daerah yang kekurangan air bersih dan sanitasi layak - Pengusulan anggaran di luar APBD terbatas pada tema yang ditentukan pada tahun anggaran berjalan	
SPM Bidang Perumahan Rakyat										
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	100%	100%	100%	100%	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase warga negara yang memperoleh	94,15%	87,30%	88,32%	99,39%	94,34%	Program Peningkatan Ketentraman		Satpol PP

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian					Program Pendukung	Kendala Permasalahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022			
		layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota						dan Ketertiban Umum		
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penanggulangan Bencana		BPBD
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penanggulangan Bencana		BPBD
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penanggulangan Bencana		BPBD

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian					Program Pendukung	Kendala Permasalahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022			
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	96,86%	81%	88,70%	99,24%	100,44%	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Satpol PP
SPM Bidang Sosial										
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial		Dinas Sosial
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	97,50%	Program Rehabilitasi Sosial		Dinas Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian					Program Pendukung	Kendala Permasalahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022			
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial		Dinas Sosial
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial		Dinas Sosial
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban	100%	100%	100%	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial		Dinas Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian					Program Pendukung	Kendala Permasalahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022			
		bencana kabupaten/kota								

Tabel 2.69 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pasuruan (P-RPJMD Tahun 2018-2023)

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)	
			2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	Realisasi 2022 Terhadap Target 2022	Realisasi 2022 Terhadap Target 2023
2.2	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT													
2.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi													
2.2.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,73-6	5,73-6	5,73-6	4,23 - 5,81	4,24 - 5,81	5,73	5,83	-2,03	4,34	5,32	Sesuai	Sesuai
2.2.1.1.1	Laju Inflasi	%	-	-	-	-	-	2,18	1,99	1,88	1,76	5,45	-	-
2.2.1.2	Persentase Penduduk Miskin	%	9,4	9,35	9,30	10,25 - 10,38	10,20 - 10,33	9,45	8,68	9,26	9,7	8,96	Melampaui	Melampaui
2.2.1.3	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	62,30	62,40	62,50	62,6	62,7	n/a	72,2	76,6	78	80,5	Melampaui	Melampaui
2.2.1.4	Indeks Ketimpangan Wilayah (Indeks Williamson)	Indeks	0,260	0,26	0,271	0,265	0,25	0,256	0,458	0,277	0,272	0,264	Melampaui	Belum Tercapai
2.2.1.5	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,00	64,00	66,00	68	70	60,67	62,75	64,16	63,6	66,65	Belum Tercapai	Belum Tercapai
2.2.1.6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,18	68,90	67,51-69,61	68,90 - 70,30	69,61 - 70,98	67,41	68,29	68,60	68,93	69,68	Sesuai	Sesuai
2.2.1.7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,02	5,08	5,07-5,04	6,08 - 5,91	5,79 - 5,41	6,11	5,41	6,24	6,03	5,86	Melampaui	Sesuai
2.2.1.8	Indeks Gini	%	-	-	-	0,3482 - 0,3473	0,3472 - 0,3470	0,324	0,308	0,346	0,344	0,325	Melampaui	Melampaui
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial													
2.2.2.1	Pendidikan													
2.2.2.1.1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,06	8,06	8,06	7,45	7,45	6,83	7,11	7,40	7,41	7,42	Belum Tercapai	Belum Tercapai
2.2.2.1.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,05	12,31	12,47	12,53	12,60	12,30	12,31	12,41	12,58	12,76	Melampaui	Melampaui
2.2.2.2	Kesehatan													
2.2.2.2.1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	69,91	69,91	69,93	70,28	70,30	70,01	70,17	70,23	70,25	70,55	Melampaui	Melampaui

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)	
			2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	Realisasi 2022 Terhadap Target 2022	Realisasi 2022 Terhadap Target 2023
2.2.2.2.2	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,03	0,029	0,028	-	-	0,034	0,033	0,028	0,026	0,025	-	-
2.2.2.3	Tenaga Kerja													
2.2.2.3.1	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	%			40	40	-	70,03	69,59	43,44	41,58	41,58	Melampaui	-
2.2.2.3.2	Rasio Penduduk yang Bekerja	%		-	-	-	-	93,89	94,58	93,76	93,97	94,09	-	-
2.2.2.3.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%			70,09	70,09	76	69,59	68,64	67,67	69,03	70,19	Belum Tercapai	Belum Tercapai
2.2.2.4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
2.2.2.4.1	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	-	-	51,25	51,75	52,25	-	-	-	55,15	55,21	Melampaui	Melampaui
2.2.2.5	Pangan													
2.2.2.5.1	Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	83	84	85	85,50	86	87,2	85,3	83,2	84,9	86,1	Melampaui	Melampaui
2.2.2.5.2	Angka Kecukupan Gizi (AKG)	(Kkal/ Kap/ Hari)	-	-	-	-	-	1.813	2.240	2.207	2.243	2.086	-	-
2.2.2.6	Fokus Seni Budaya dan Olahraga													
2.2.2.6.1	Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya	%	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-
	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi	Karya	-	-	-	-	-	5	15	16	-	-	-	-
2.2.2.6.2	Jumlah Pemuda dan Atlit Berprestasi di Kabupaten Pasuruan													
	Atlit Berprestasi	Orang	30	32	24	30	32	22	42	0	140	174	Melampaui	Melampaui
	Pemuda	Orang	13	15	13	13	15	13	13	5	4	4	Belum Tercapai	Belum Tercapai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)	
			2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	Realisasi 2022 Terhadap Target 2022	Realisasi 2022 Terhadap Target 2023
2.3	ASPEK DAYA SAING													
2.3.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah													
2.3.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	Rp/Bulan	-	-	-	-	-	919.843	964.049	1.014.043	967.469	1.007.239	-	-
2.3.1.1.1	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita	%	-	-	-	-	-	43,56	46,57	47,82	43,29	43,01	-	-
2.3.1.1.2	Produktivitas Total Daerah	Rp. Juta/Angkatan Kerja	-	-	-	-	-	157,16	169,46	167,59	175,89	188,45	-	-
2.3.3	Fokus Iklim Berinvestasi													
2.3.3.1	Angka kriminalitas	Angka	0	0	0	0	0	4,35	3,84	3,13	1,02	1,52	-	-
2.3.4	Fokus Sumber Daya Manusia													
2.3.4.1	Rasio lulusan S1/S2/S3	Rasio	-	-	-	-	-	0,022	0,023	0,024	0,025	0,027	-	-
	Rasio Ketergantungan	Rasio	-	-	-	-	-	38,59	39,33	40,24	41,61	42,98	-	-
2.4	ASPEK PELAYANAN UMUM													
2.4.1	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar													
2.4.1.1	Pendidikan													
2.4.1.1.1	Indeks Pendidikan	Indeks	0,581	0,591	0,601	0,620	0,620	0,569	0,579	0,594	0,619	0,602	Belum Tercapai	Belum Tercapai
2.4.1.1.2	Angka Partisipasi Kasar													
	APK SD/MI	%	118,5	-	-	-	-	111,24	112,78	107,87	108,73	109,07	-	-
	APK SMP/MTs	%	102	-	-	-	-	88,69	102,58	102,35	102,11	106,92	-	-
2.4.1.1.3	Angka Partisipasi Murni													
	APM SD/MI	%	100	-	-	-	-	99,16	99,43	98,77	98,56	97,49	-	-
	APM SMP/MTs	%	95,05	-	-	-	-	77,12	83,29	82,28	82,07	81,96	-	-
2.4.1.2	Kesehatan													
2.4.1.2.1	Indeks Kesehatan	Indeks	0,769	0,769	0,769	0,770	0,772	0,7694	0,7718	0,7728	0,7731	0,777	Melampaui	Melampaui
2.4.1.2.2	Prevalensi Stunting	%	25	24,1	21,1	18,4	16	30,7	22,5	21,4	18,1	10,83	Melampaui	Melampaui

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)	
			2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	Realisasi 2022 Terhadap Target 2022	Realisasi 2022 Terhadap Target 2023
2.4.1.2.3	Angka Kematian Bayi (AKB)	1.000/K H	6,66	6,5	6,4	6,3	6,2	5,37	5,33	4,40	4,60	3,38	Melampaui	Melampaui
2.4.1.2.4	Angka Kematian Ibu (AKI)	100.000/ KH	90	88	86	84	83	111,32	83,61	76,34	109,46	78,91	Melampaui	Melampaui
2.4.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
2.4.1.3.1	Indeks Ketahanan Air	Indeks	77,68	77,68	77,68	77,68	77,68	77,68	77,68	77,65	77,68	77,98	Melampaui	Melampaui
2.4.1.3.2	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Indeks	1,20	1,30	1,35	1,41	1,47	1,19	1,25	1,28	1,35	1,26	Belum Tercapai	Belum Tercapai
2.4.1.3.3	Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	%	79,50	83	86,50	90	93,50	76	79,50	81,23	84,73	79,88	Belum Tercapai	Belum Tercapai
2.4.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman													
2.4.1.4.1	Indeks Permukiman Layak Huni	Indeks	76,05	81,18	85,6	92,50	96,55	-	71,46	78,70	80,11	92,37	Belum Tercapai	Belum Tercapai
2.4.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat													
2.4.1.5.1	Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA	%						-	-	-	27,09	28,08	Melampaui	-
2.4.1.5.2	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,7	0,71	0,72	0,73	0,74	0,32	0,70	0,71	0,72	0,73	Sesuai	Belum Tercapai
2.4.1.5.3	Indeks Risiko Bencana	Indeks	212	210	208	206	204	214	180,34	156,26	139,18	126,32	Melampaui	Melampaui
2.4.1.6	Sosial													
2.4.1.6.1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat (PMKS)	%	6,49	6,40	6	5,95	5,90	5,99	6,18	6	5,92	6,33	Melampaui	Melampaui
2.4.1.6.2	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	99,90	99,91	85,60	85,65	85,70	99,99	99,91	85,60	85,65	86,24	Melampaui	Belum Tercapai
2.4.2	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar													

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)	
			2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	Realisasi 2022 Terhadap Target 2022	Realisasi 2022 Terhadap Target 2023
2.4.2.1	Tenaga Kerja													
2.4.2.1.1	Persentase Pencari Kerja yang Lulus Uji Kompetensi	%	70,05	40	40	40	40,6	-	70,03	75	80	93,36	Melampaui	Melampaui
2.4.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
2.4.2.2.1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,76	90,91	91,07	91,22	91,38	90,45	90,68	90,48	90,89	90,94	Belum Tercapai	Belum Tercapai
2.4.2.3	Pangan													
2.4.2.3.1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	67	67,5	68	68,5	69	n/a	69,38	68,78	64,46	77,40	Melampaui	Melampaui
2.4.2.3.2	Rasio Ketersediaan Pangan	Rasio	-	-	-	2,58	2,60	2,52	2,53	2,58	2,68	2,70	Melampaui	Melampaui
2.4.2.4	Pertanahan													
2.4.2.4.1	Persentase Penetapan Persetujuan Lokasi untuk Pembangunan Kepentingan Umum	%	-	-	-	32,075	32,078	-	-	-	-	32,075	Sesuai	Belum Tercapai
2.4.2.5	Lingkungan Hidup													
2.4.2.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	58,42	59,73	61,81	62,16	62,50	57,10	57,36	62,54	63,13	59,78	Belum Tercapai	Belum Tercapai
2.4.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
2.4.2.6.1	Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	%	84	85	86	87	90	-	86	87,71	95,72	96	Melampaui	Melampaui
2.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
2.4.2.7.1	Persentase Desa Mandiri	%	0,29	0,88	2,05	3,23	4,40	-	0,59	1,17	3,23	9,97	Melampaui	Melampaui
2.4.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
2.4.2.8.1	Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Aktif	%	73	75,20	75	75,20	75,0	73,12	75,14	74,91	73,91	72,08	Belum Tercapai	Belum Tercapai
2.4.2.9	Perhubungan													

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)	
			2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	Realisasi 2022 Terhadap Target 2022	Realisasi 2022 Terhadap Target 2023
2.4.2.9.1	Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks	10,4	11,29	12,17	13,04	13,92	-	7,18	7,91	8,2	12,02	Belum Tercapai	Belum Tercapai
2.4.2.10	Komunikasi dan Informatika													
2.4.2.10.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	-	-	-	2	-	-	2,73	3,13	2,39	2,04	Melampaui	-
2.4.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													
2.4.2.11.1	Jumlah Omset Usaha Mikro dan Koperasi	Juta Rupiah	-	-	1.348.471	1.366.621	-	1.304.929	1.697.507,78	1.718.018,07	1.741.594,27	6.820.224,97	Melampaui	-
2.4.2.12	Penanaman Modal													
2.4.2.12.1	Nilai Investasi yang terealisasi	T	9,6	10	10,25	10,50	10,52	9,60	18,94	10,40	8,30	12,60	Melampaui	Melampaui
2.4.2.13	Kepemudaan dan Olahraga													
2.4.2.13.1	Rasio Pemuda Berprestasi	Poin	-	-	0,30	0,35	0,40	-	-	-	0,40	0,33	Belum Tercapai	Belum Tercapai
2.4.2.13.2	Rasio Atlet Berprestasi	Poin	-	-	0,14	0,06	0,14	-	-	-	0,70	0,41	Melampaui	Melampaui
2.4.2.14	Statistik													
2.4.2.14.1	Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	%	-	-	50	50	100	-	80	80	80	80	Melampaui	Belum Tercapai
2.4.2.15	Persandian													
2.4.2.15.1	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	-	-	80	90	75	-	-	40,08	40,08	48,37	Belum Tercapai	Belum Tercapai
2.4.2.16	Kebudayaan													
2.4.2.16.1	Nilai Pembangunan Kebudayaan	Nilai	-	-	-	20,35	20,35	-	-	-	-	53,19	Melampaui	Melampaui
2.4.2.17	Perpustakaan													
2.4.2.17.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks				7	8	-	-	-	-	8	Melampaui	Sesuai
2.4.2.18	Kearsipan													
2.4.2.18.1	Nilai Audit Kearsipan	Nilai	70	75	77	80	81	53,83	62,03	79,67	56,36	67,95	Belum Tercapai	Belum Tercapai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)	
			2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	Realisasi 2022 Terhadap Target 2022	Realisasi 2022 Terhadap Target 2023
2.4.3	Urusan Pemerintahan Pilihan													
2.4.3.1	Kelautan dan Perikanan													
2.4.3.1.1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	22.547,94	22.985,76	23.204,76	23.423,58	23.642,50	21.891,20	23.556,90	22.019,90	23.541,40	23.604,1	Melampaui	Belum Tercapai
2.4.3.1.2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	19.476,41	19.854,59	20.043,65	20.232,74	20.421,83	18.909,14	19.528,02	20.196,16	20.546,87	20.437,77	Melampaui	Melampaui
2.4.3.1.3	Produksi dan Produktivitas Garam													
2.4.3.1.3.1	Produksi Garam	Ton	15.500	11.850	9.050,64	10.508,15	2.125	21.370,41	25.163,63	9.050,64	10.508,15	2.125	Melampaui	Sesuai
2.4.3.1.3.2	Produktivitas Garam	Ton/Ha	-	-	-	-	-	87,87	103,13	38,84	45,1	9,09	-	-
2.4.3.2	Pariwisata													
2.4.3.2.1	<i>Spending of Money in Tourism</i>	Rupiah	-	-	-	787.417.400.000	866.159.140.000	-	-	-	-	758.385.137.911	Belum Tercapai	Belum Tercapai
2.4.3.3	Pertanian													
2.4.3.3.1	PDRB Sub Sektor Pertanian	Juta Rupiah	419.960	419.970	419.980	419.990	420.000	4.249.258	4.295.382,7	4.387.300	4.100.273		Melampaui	Melampaui
2.4.3.3.2	PDRB Sub Sektor Perkebunan	Juta Rupiah	1.528.700	1.528.800	1.528.900	1.529.000	1.529.100	1.460.384	1.518.458	1.553.596,70	1.659.897,60		Melampaui	Melampaui
2.4.3.3.2	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan													
	Daging	%	2,1	2,15	0,6	0,60	1	2	2,1	0,18	1,22	0,66	Melampaui	Belum Tercapai
	Telur	%	3,15	3,3	0,5	1	1	3	3,15	0,18	1,17	1	Tercapai	Tercapai
	Susu	%	2,1	2,15	0,6	1	1	2	2,1	0,02	26,62	-29,95	Belum Tercapai	Belum Tercapai
2.4.3.4	Perdagangan													
2.4.3.4.1	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	%	-	-	-	0,3	0,4	-	5,98	-9,35	9,08	6,98	Melampaui	Melampaui
2.4.3.4.2	Indeks Daya Beli	Indeks	0,709	0,719	0,729	0,739	0,749	-	0,712	0,706	0,710	0,723	Belum Tercapai	Belum Tercapai
2.4.3.5	Perindustrian													

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)	
			2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	Realisasi 2022 Terhadap Target 2022	Realisasi 2022 Terhadap Target 2023
2.4.3.5.1	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	-	-	-	0,4	0,5	-	6,47	-0,32	5,27	5,41	Melampaui	Melampaui
2.4.4	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan													
2.4.4.1	Perencanaan Pembangunan													
2.4.4.1.1	Nilai SAKIP Perencanaan	Nilai	23	24,50	24,50	24,82	25,42	22,75	23,62	24,02	24,14	24,17	Belum Tercapai	Belum Tercapai
2.4.4.2	Keuangan													
2.4.4.2.1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	n/a	Sesuai	Sesuai
2.4.4.3	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan													
2.4.4.4.3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks	70	71	70,02	70,03	70,04	-	-	49	58,42	54,67	Belum Tercapai	Belum Tercapai
2.4.4.4	Penelitian dan Pengembangan													
2.4.4.4.1	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	80	85	100	100	100	80	85	100	100	100	Sesuai	Sesuai
2.4.4.5	Pengawasan													
2.4.4.5.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif	%	-	-	-	35	48	-	-	-	19,3	36,36	Melampaui	Belum Tercapai
2.4.4.6	Sekretariat Dewan													
2.4.4.6.1	Persentase Keluhan Masyarakat ke DPRD yang berhasil di fasilitasi	%	-	-	-	84	100	100	72	72	73	86	Melampaui	Belum Tercapai
2.4.4.7	Sekretariat Daerah													
2.4.4.7.1	Nilai SAKIP	Nilai	75,00 (BB)	79,00 (BB)	80,00 (BB)	81,00 (A)	85,00 (A)	89,00 (A)	75,02	76,3	77,07	77,29	Belum Tercapai	Belum Tercapai
2.4.4.7.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,50 (Baik)	83,00 (Baik)	83,50 (Baik)	84,00 (Baik)	84,50 (Baik)	83,83	84,75	83,97	85,77	90,32	Melampaui	Melampaui

Keterangan : n/a = Data belum keluar

Tabel 2.70 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Outcome Urusan Perangkat Daerah Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
Urusan Pendidikan							
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	-	32,45	106,85	52,37	114,79
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	-	100	85,52	73,17	97,60
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	-	62,28	65,52	47,50	92,26
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	-	88,77	2,3	1,41	3,85
Urusan Kesehatan							
5	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	-	6,69	6,69	0,07	0,0696
6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	-	100	100	100	88,89
7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	-	95,09	93,54	100	102,63
8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	-	95,51	98,60	100	100,23

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	-	105,47	98,25	100	103,15
10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	-	90,63	86,46	97,81	100,50
11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	-	75,4	99,94	99,54	100
12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	-	100,01	77,72	87,26	100,07
13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	-	112,64	99,90	100	94,24
14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	-	100,69	68,77	77,79	90,16
15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	-	104,45	92,81	107,23	109,13
16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	-	100,07	101,17	98,18	103,55
17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	-	100	92,10	62,05	102,65
18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	-	106,69	94,52	119,75	100,62

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
19	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	-	71,47	72,10	72,85	73,43
20	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	-	-	-	87,08	86,72
21	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	-	-	-	83,28	81,81
22	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	-	-	100	100	30,93
23	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	-	79,50	81,23	84,73	79,88
24	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	-	-	-	-	35
25	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100
Urusan Perumahan Rakyat							
26	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
27	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	-	3,64	7,67	13,70	14,75
29	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	7,38	7,01	6,50	6,08	5,55
30	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	-	100	100	100	100
Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
31	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	-	100	100	100	100
32	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	-	5,39	16,15	16,15	100
33	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	-	100	100	100	100
34	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	-	100	100	100	100
35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	-	100	100	100	100
36	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	-	60	100	100	97,38

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
37	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	%	-	100	95,24	100	100
Urusan Sosial							
38	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pegemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	-	100	100	100	67,8
39	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	%	-	100	100	100	100
Urusan Tenaga Kerja							
40	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	60,50	60,50	41,38	68,75	70,55
41	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	52,6	70,03	75	80	93,36
42	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	120.866.200	120.242.100	126.856.300	126.627.800	128.152.480
43	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	80	80	80	100	100

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
44	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	70,03	70,05	43,44	41,06	40,47
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
45	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	-	3,16	18,31	23,85	23,05
46	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	-	0,006	0,01	0,01	0,012
47	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	%	-	0,003	0,01	4,18	9,76
Urusan Pangan							
48	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	-	-	363,52	218,12	100,56
Urusan Pertanahan							
49	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	-	-	100	100	100
50	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Ha	-	-	0	100	0

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
51	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	m2	-	-	0	0	100
52	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Sengketa	-	-	0	3	0
Urusan Lingkungan Hidup							
53	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	-	-	44,60	73,06	22,74
54	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	-	-	55,56	53,33	50
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
55	Perekaman KTP elektronik	%	93,09	98,05	84,94	99,14	98,65
56	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	5,0	5,0	8,53	21,64	24,19
57	Kepemilikan akta kelahiran	%	69,4	72	87,02	95,48	80,63
58	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	-	-	27,27	3,57	7,27
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
59	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	158,54	684,21	0	0	0

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
60	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0	0,77	1,61	5,16	22,37
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
61	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	-	1,84	1,95	1,95	2,04
62	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	%	-	75,14	74,91	75,20	73,24
63	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	-	11,16	10,58	11,71	13,25
Urusan Perhubungan							
64	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	-	-	46,15	57,58	39
65	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	%	-	-	0,32	0,37	0,36
Urusan Komunikasi dan Informatika							
66	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	-	-	55,22	56,06	58
67	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	-	-	12,66	32,17	35
68	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	-	-	5,26	4,63	17,16

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
69	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	-	-	19,30	16,14	21,05
70	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	-	-	0,10	1,34	0,16
Urusan Penanaman Modal							
71	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	-8,2	97,29	-45,09	-20,19	51,81
Urusan Kepemudaan dan Olahraga							
72	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	-	-	9,05	0,03	0
73	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	-	-	9,05	8,31	8,83
74	Peningkatan prestasi olahraga	%	-	-	0	15	15
Urusan Statistik							
75	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	-	-	100	60	61,54
76	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	-	-	100	60	61,54
Urusan Persandian							
77	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	-	-	40,08	40,08	48,37

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
Urusan Kebudayaan							
78	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100	100	100	100
Urusan Perpustakaan							
79	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	-	-	-	-	57,7
80	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	-	-	-	-	8
Urusan Kearsipan							
81	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	-	-	89,56	75	75
82	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	-	-	30,92	0	0,17
Urusan Kelautan dan Perikanan							
83	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	40.800,34	43.084,92	42.216,06	44.088,27	44.041,87
	Tangkap	Ton	21.891,20	23.556,90	22.019,90	23.541,40	23.604,10
	Budidaya	Ton	18.909,14	19.528,02	20.196,16	20.546,87	20.437,77

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
Urusan Pariwisata							
84	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-	-	-65,93	25,62	17
85	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	-	-	-53,61	8,98	17
86	Tingkat hunian akomodasi	unit	-	1.004	1.004	1.230	1.227
87	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Rp	5.306.580	5.836.229	5.057.261	5.392.079	6.185.835
88	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rp	-	-	271.053.500	64.646.559	466.741.000
Urusan Pertanian							
89	Produktivitas pertanian per hektar per tahun						
	Tanaman Pangan :						
	Padi	Ton/Ha	6,33	5,94	5,5	5,5	6,03
	Jagung	Ton/Ha	6,43	6,39	6,39	6,47	6,41
	Kedelai	Ton/Ha	1,18	1,76	1,85	1,89	1,91
	Tanaman Buah Tahunan	Kg/Pohon	278,74	280,11	281,24	282,50	90,17

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Tanaman Sayur	Ton/Ha	69,99	67,32	67,25	67,50	35,67
	Tanaman Hias	Tangkai/m2	72,44	72,57	72,71	72,73	19,9
90	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-	-	-	-	49
Urusan Perdagangan							
91	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	-	67,18	107,54	20	129,42
Urusan Perindustrian							
92	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	-	6,64	10,74	2,06	9,88
93	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	-	-	-	30	30
94	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	-	-	100	100	100
Sekretariat Daerah							
95	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	-	7,65	7,65	6,01	13,44
96	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	-	72,03	83,72	11,50	43,18

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
97	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	-	0	0	-12,63	567,38
98	Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%	-	-	0	-12,63	567,38
Kepegawaian							
99	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	-	-	98,46	182,27	
	a. Pendidikan Tinggi	%	-	-			66,35
	b. Menengah	%	-	-			29,37
	c. Dasar	%	-	-			4,28
100	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	-	-	6,69	6,35	13,11
101	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	-	-	100	100	43,69
Keuangan							
102	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	-	-	7,02	36,94	8,3649
103	Rasio PAD	%	-	-	0,48	0,48	22,4192
104	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	-	-	58,68	81,51	86,8225

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
105	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-	-	84,32	6,26	-5,3516
106	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	-	-	95,75	5,43	9,7569
107	Manajemen Aset	-	-	-			2.731.023
	Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ya/Tidak	-	-	Ya	Ya	Ya
	Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ya/Tidak	-	-	Ya	Ya	Ya
	Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	Ya/Tidak	-	-	Ya	Ya	Ya
	Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya/Tidak	-	-	Ya	Ya	Tidak
108	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	-	-	8,18	8,18	9,87
	Pengawasan						
109	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	-	-	Level 3	Level 3	Level 3
110	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	-	-	Level 2	Level 2	Level 2

Keterangan: Indikator baru digunakan tahun 2022

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan informasi tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga dapat dijadikan dasar analisis terhadap aspek kebijakan keuangan daerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan tujuan dan sasaran pemerintah daerah, sebagaimana dinyatakan dalam rencana pembangunan daerah (RPD).

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam : (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Untuk memperoleh gambaran proyeksi kemampuan keuangan daerah tahun 2024-2026, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggunakan data kinerja tahun 2018-2022. Capaian kinerja keuangan pada periode tersebut menjadi data dasar atau *baseline* data yang digunakan untuk memprediksi kemampuan keuangan daerah dalam mendanai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan periode Tahun 2024 sampai Tahun 2026. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah ke depannya.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Pasuruan meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2018 s/d Tahun 2022 Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	(%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	3.187.963.233.913,07	3.368.808.544.577,79	3.217.081.717.078,40	3.364.854.668.006,61	3.352.368.857.825,30	1,35
01.01	Pendapatan Asli Daerah	614.302.515.368,07	650.889.114.689,79	700.151.909.602,40	701.197.689.021,47	736.238.743.114,30	4,67
01.01.01	Pajak Daerah	357.264.301.332,79	364.181.321.493,99	360.889.758.442,02	393.592.132.744,11	452.520.753.582,18	6,27
01.01.02	Retribusi Daerah	40.328.017.626,33	51.893.891.085,33	34.236.693.406,00	30.094.738.924,33	33.794.826.500,12	-1,29
01.01.03	Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan	4.437.658.869,00	4.654.760.005,00	4.724.719.096,00	4.777.764.881,00	4.829.702.733,00	2,15
01.01.04	Lain-lain PAD yang sah	212.272.537.539,95	230.159.142.105,47	300.300.738.658,38	272.733.052.472,03	245.093.460.299,00	4,90
01.02	Pendapatan Transfer	2.450.834.158.545,00	2.559.411.338.278,00	2.352.250.387.009,00	2.452.634.490.954,14	2.567.448.223.132,00	1,32
01.02.01	Transfer Pemerintah Pusat	2.185.098.553.219,00	2.307.091.406.493,00	2.137.265.579.626,00	2.175.979.517.096,00	2.316.302.794.650,00	1,62
01.02.02	Transfer antar - daerah	265.735.605.326,00	252.319.931.785,00	214.984.807.383,00	276.654.973.858,14	251.145.428.482,00	-0,10
01.03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	122.826.560.000,00	158.508.091.610,00	164.679.420.467,00	211.022.488.031,00	48.681.891.579,00	-3,96
01.03.01	Hibah	122.826.560.000,00	158.508.091.610,00	164.679.420.467,00	27.286.176.486,00	1.892.000.000,00	-35,89
01.03.02	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
01.03.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0	183.736.311.545,00	46.789.891.579,00	0
2	BELANJA	3.140.572.335.212,71	3.244.331.996.857,72	3.238.383.232.383,24	3.273.759.884.343,00	3.450.040.247.082,16	2,40
02.01	Belanja Operasi	2.122.361.640.176,71	2.135.455.490.400,23	2.070.414.873.308,96	2.228.563.488.253,00	2.343.945.791.110,45	2,60
02.01.01	Belanja Pegawai	1.008.704.137.648,21	1.025.912.267.478,00	1.203.142.213.892,00	1.107.837.622.596,00	1.133.803.924.679,00	3,35
02.01.02	Belanja barang dan jasa	902.421.347.105,50	920.158.827.930,23	706.180.335.963,96	931.053.246.192,00	1.016.509.247.583,00	4,93

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	(%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
02.01.03	Belanja bunga	0	0	0	0	0	0
02.01.04	Belanja subsidi	0	0	0	0	0	0
02.01.05	Belanja Hibah	185.923.583.493,00	158.852.439.992,00	126.307.448.453,00	156.848.191.841,00	165.372.279.498,45	-1,36
02.01.06	Belanja bantuan sosial	25.312.571.930,00	30.531.955.000,00	34.784.875.000,00	32.824.427.624,00	28.260.339.350,00	3,75
	Belanja bantuan keuangan	0	0	0	0	0	0
02.02	Belanja Modal	447.987.653.723,00	447.027.934.716,49	352.127.050.135,28	376.073.722.205,00	476.867.550.144,71	3,04
02.02.01	Belanja Tanah	1.711.996.880,00	2.731.441.464,00	28.408.220,00	70.000.000,00	0	1,75
02.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	68.976.281.207,00	105.226.322.192,00	114.363.487.979,20	132.357.240.550,00	185.360.760.023,40	29,25
02.02.03	Belanja bangunan dan gedung	92.100.504.580,00	141.999.251.910,00	94.332.201.680,00	124.218.986.593,00	164.196.619.083,72	21,12
02.02.04	Belanja Jalan, irigasi dan jalanan	265.003.376.242,00	191.066.074.390,49	135.206.224.587,00	118.793.505.162,00	126.174.394.637,59	-15,77
02.02.05	Belanja aset tetap lainnya	20.195.494.814,00	6.004.844.760,00	8.196.727.669,08	633.989.900,00	1.135.776.400,00	-11,72
02.02.06	Belanja aset lainnya						
02.03	Belanja Tidak Terduga	8.914.516.820,00	11.078.322.907,00	172.098.662.694,00	33.867.748.961,00	11.345.474.996,00	332,73
02.04	Belanja transfer	561.308.524.493,00	650.770.248.834,00	643.742.646.245,00	635.254.924.924,00	617.881.430.831,00	2,70
02.04.01	Belanja Bagi Hasil	40.449.445.359,00	45.764.322.634,00	43.341.894.789,00	40.361.924.322,00	41.704.880.895,00	1,07
02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	520.859.079.134,00	605.005.926.200,00	600.400.751.456,00	594.893.000.602,00	576.176.549.936,00	2,83
3	Pembiayaan	130.578.300.360,84	177.974.199.061,20	302.450.746.781,27	281.149.231.476,43	372.245.667.822,04	32,90
03.01	Penerimaan Pembiayaan	139.907.151.978,84	177.974.199.061,20	302.450.746.781,27	281.149.231.476,43	372.245.667.822,04	30,63
03.01.01	SILPA	139.907.151.978,84	177.969.199.061,20	302.450.746.781,27	281.149.231.476,43	372.245.667.822,04	30,63
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	(%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
03.01.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0	0
03.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
03.01.05	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0	0	0
03.01.06	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	5.000.000,00	0	0	0	0
03.02	Pengeluaran Pembiayaan	9.328.851.618,00	0	0	0	0	0
03.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
03.02.02	Penyertaan modal daerah	9.328.851.618,00	0	0	0	0	0
03.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	0	0	0	0	0	0
03.02.04	Pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0	0	0
03.02.05	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perautran perundang-undangan	0	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, 2022

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

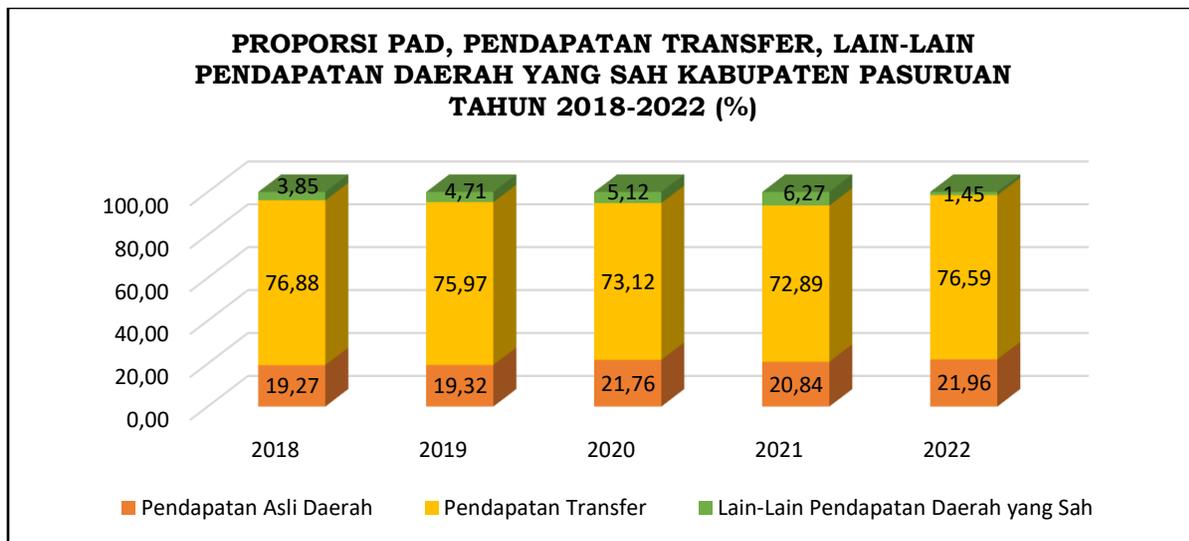
Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk memahami kinerja keuangan daerah sebagai hasil dari pelaksanaan APBD maka diperlukan adanya analisis terhadap kinerja pendapatan daerah. Analisis tersebut meliputi jenis pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kemampuan keuangan daerah sebagai sumber pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Secara garis besar pertumbuhan realisasi pendapatan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam periode 2018-2022 adalah sebagai berikut:



Grafik 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, 2022

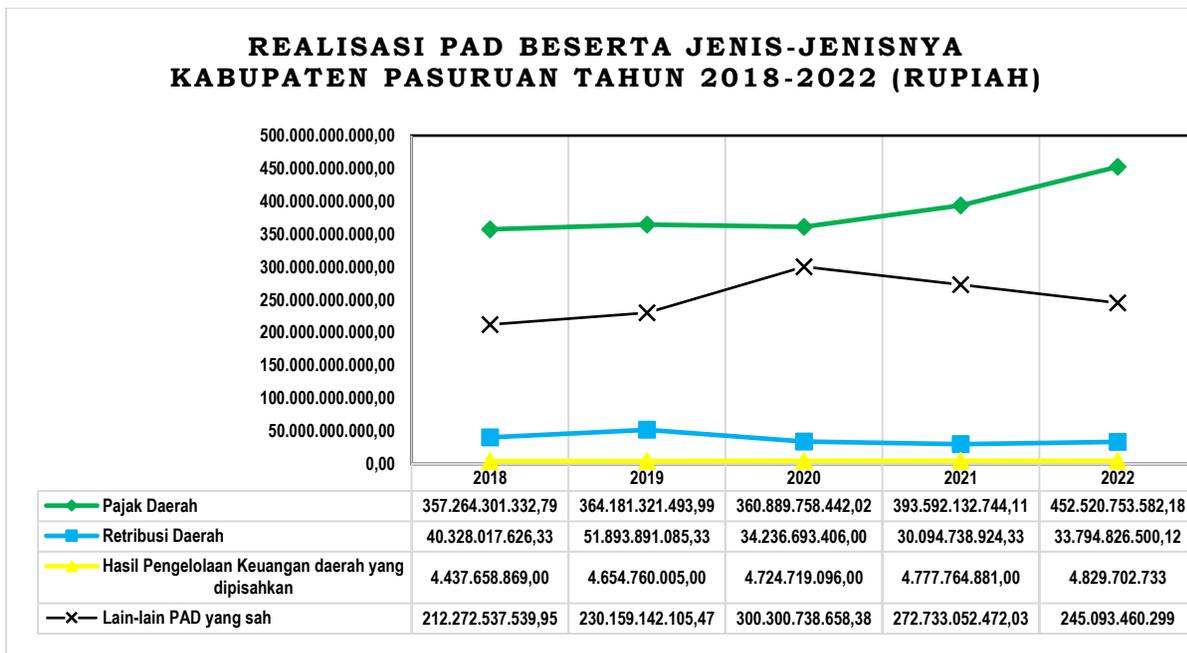
Pada grafik 3.1 dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan selama kurun waktu 2018-2022 mengalami fluktuasi pertumbuhan dan penurunan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan terjadi pada tahun 2019 sebesar 5,67% sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2020 sebesar -4,50% sebagai akibat dari adanya pandemi *covid-19* yang menyebabkan dampak yang signifikan pada sektor ekonomi. Pada tahun 2021, realisasi pendapatan daerah kembali mengalami peningkatan sebesar 4,59% yang menandakan semakin membaiknya kondisi perekonomian setelah pandemi *covid-19*. Akan tetapi pada tahun 2022 realisasi pendapatan daerah mengalami penurunan kembali sebesar -0,37%. Secara terperinci, komposisi pendapatan daerah selama periode Tahun Anggaran 2018-2022 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.



Grafik 3.2 Proporsi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, 2022

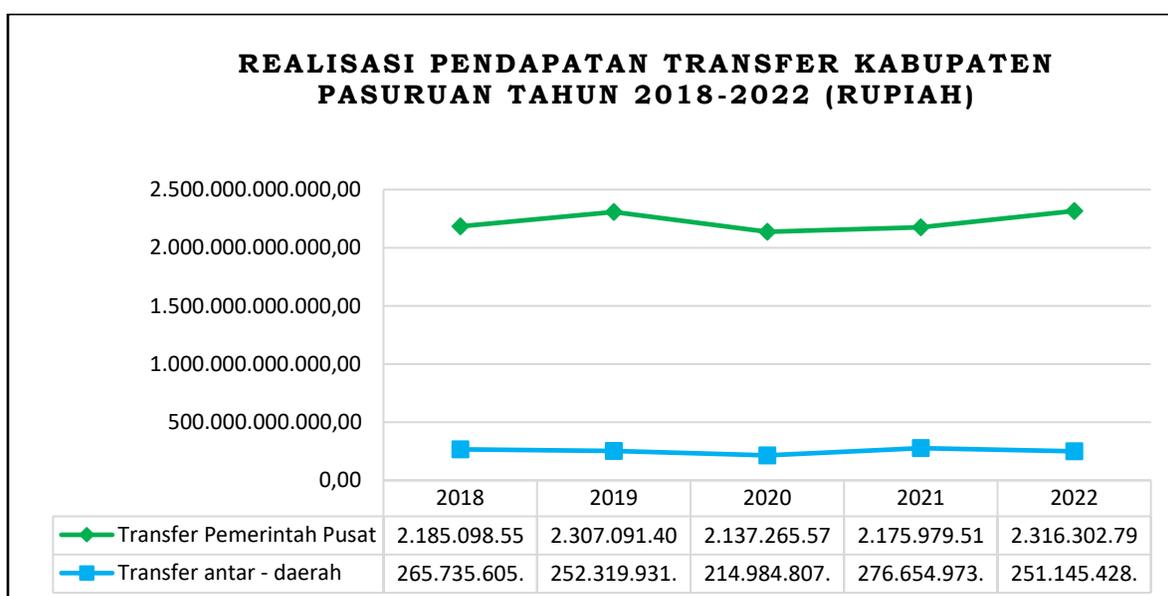
Berdasarkan proporsi sumber pendapatan, dapat diketahui bahwa sumber pendapatan yang paling dominan berasal dari pendapatan transfer. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan di Kabupaten Pasuruan pada periode 2018-2022 masih bergantung pada pendapatan transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan lain-lain. Pada periode yang sama Pendapatan Asli Daerah menyumbang porsi rata-rata 20,63% per tahun dengan pertumbuhan rata-rata 0,67%. Gambaran tentang fluktuasi pertumbuhan dan penurunan PAD beserta jenis-jenisnya yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah dapat dilihat pada grafik 3.3.



Grafik 3.3 Proporsi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, 2022

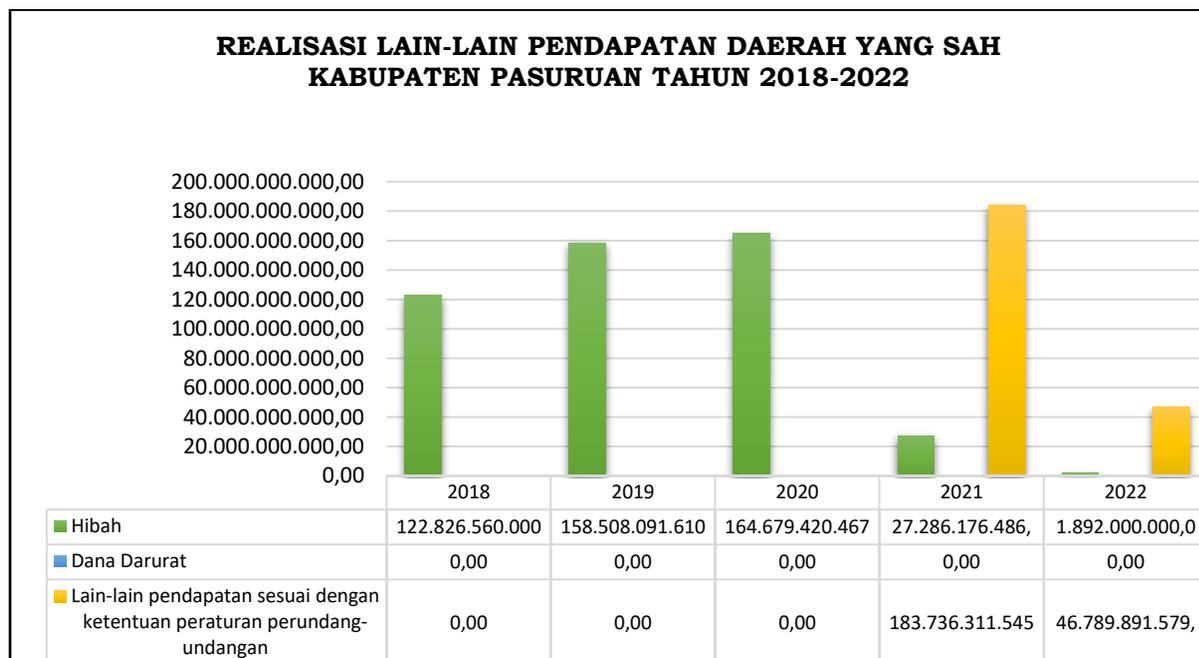
Pendapatan Transfer adalah kelompok pendapatan yang menyumbang porsi terbesar bagi pendapatan daerah. Rata-rata porsi pendapatan transfer terhadap total pendapatan Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2022 sebesar 75,09% dengan rata-rata pertumbuhan 1,32% per tahun. Secara umum realisasi pendapatan transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat atau Dana Perimbangan dan Transfer antar Daerah dapat dilihat pada grafik 3.4 berikut.



Grafik 3.4 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, 2022

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan kelompok pendapatan daerah yang terdiri dari Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rata-rata porsi yang disumbangkan oleh kelompok Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada periode 2018-2022 adalah sebesar 4,28% dengan rata-rata pertumbuhan -3,96% per tahun. Sedangkan realisasi Lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat dilihat pada grafik 3.5 berikut.



Grafik 3.5 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

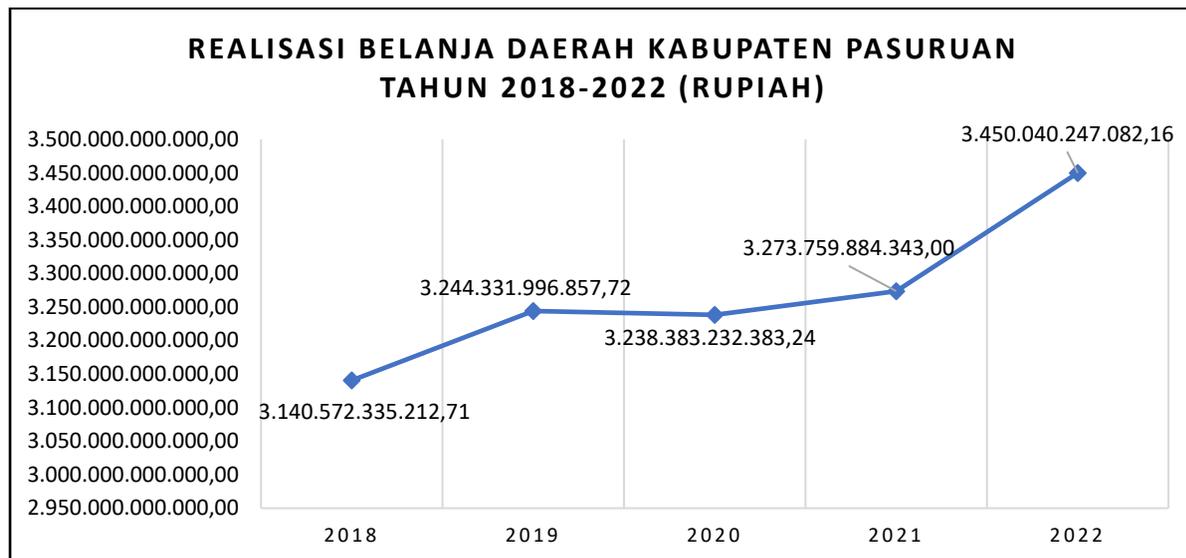
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, 2022

3.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Klasifikasi belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Pengelolaan belanja daerah mengacu kepada prinsip transparansi dan akuntabilitas, partisipatif, disiplin anggaran, berkeadilan, efisien dan efektif. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (Performance Budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada

kepentingan publik. Gambaran tentang realisasi belanja daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik 3.6 berikut:

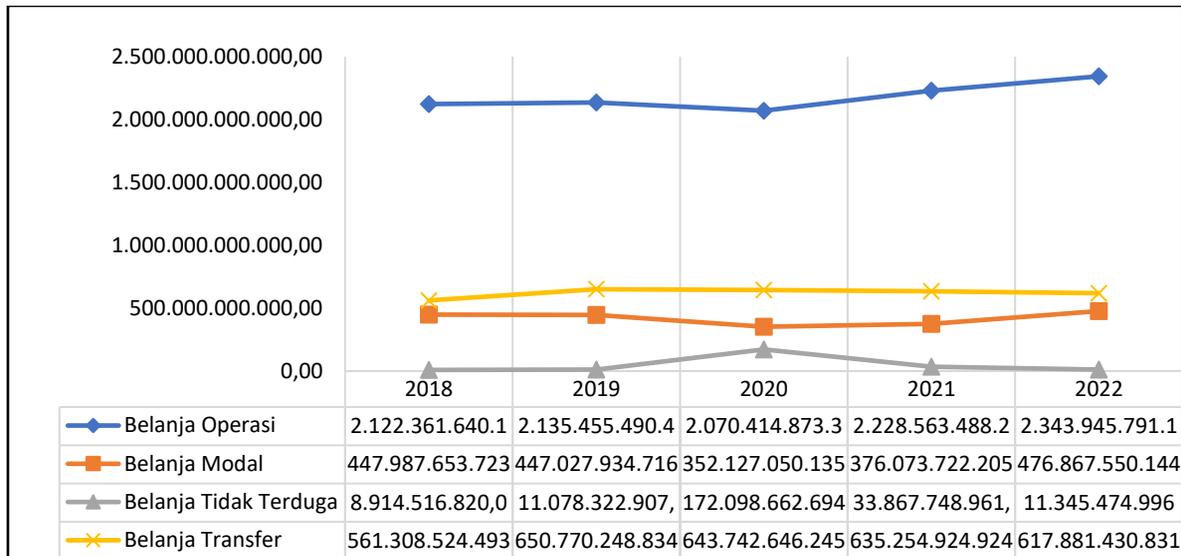


Grafik 3.6 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, 2022

Pada grafik 3.6 dapat dilihat bahwa realisasi belanja daerah Kabupaten Pasuruan selama kurun waktu 2018-2022 mengalami fluktuasi pertumbuhan dan penurunan dari tahun ke tahun dengan ritme yang sama dengan realisasi pendapatan daerah sebagaimana tersaji pada gambar 3.6. Pertumbuhan belanja daerah terjadi pada tahun 2019 sebesar 3,30% sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2020 sebesar -0,18 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,09% sebagai akibat dari adanya penyesuaian terhadap penurunan pendapatan daerah. Pada tahun 2022 belanja daerah mengalami kenaikan lagi sebesar 5,38%. Belanja daerah pada periode 2018-2022 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 2,4% setiap tahunnya.

Pertumbuhan belanja daerah dihasilkan dari kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Realisasi belanja pada masing-masing kelompok belanja sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada grafik 3.7 berikut.



Grafik 3.7 Realisasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Dan Belanja Transfer Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, 2022

Pada periode 2018-2022 masing-masing kelompok belanja daerah mengalami fluktuasi pertumbuhan dan penurunan. Belanja Operasi mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 2,6% per tahun dan rata-rata proporsi 66,67% per tahun. Belanja Modal mengalami rata-rata pertumbuhan 3,04% dan rata-rata proporsi sebesar 12,85% per tahun. Belanja Tidak Terduga mengalami pertumbuhan rata-rata 1,46% per tahun dan rata-rata proporsi 332,73% pertahun. Belanja Transfer mengalami rata-rata pertumbuhan 2,7% per tahun dan rata-rata proporsi 19,02% per tahun. Pertumbuhan paling signifikan terjadi pada Belanja Tidak Terduga pada tahun 2020 dikarenakan terjadi pandemi *covid-19* yang membutuhkan banyak anggaran untuk membantu masyarakat dan menanggulangi pandemic covid serta dampaknya. Gambaran tentang proporsi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dapat dilihat pada grafik 3.8 berikut :

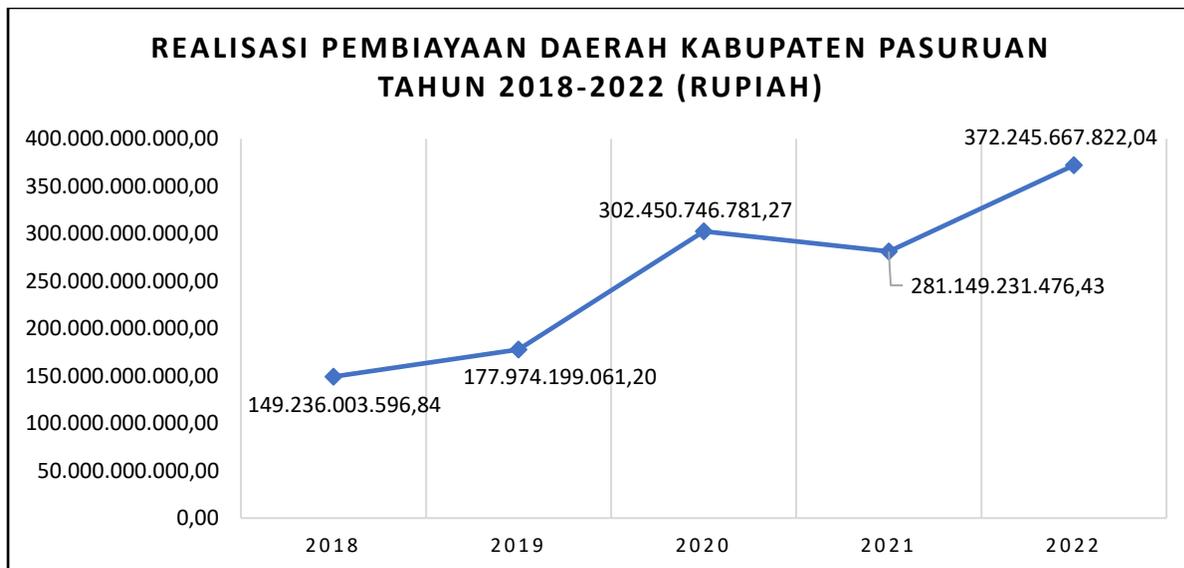


Grafik 3.8 Proporsi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Dan Belanja Transfer Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, 2022

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah pada hakekatnya timbul terkait dengan upaya untuk mengatasi defisit anggaran dan juga mengoptimalkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah, penyertaan modal kepada BUMD dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Grafik 3.9 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2018-2022**

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)
Kabupaten Pasuruan, 2022*

Pada grafik 3.9 dapat dilihat bahwa realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Pasuruan selama kurun waktu 2018-2022 mengalami fluktuasi penurunan dan peningkatan setiap tahun. Peningkatan terjadi pada tahun 2019 sebesar 19,26% dan tahun 2020 sebesar 69,94%. Sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2021 sebesar -7,04%. Nmaun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022 sebesar 32,40%. Rata-rata pertumbuhan pembiayaan daerah selama tahun 2017-2021 sebesar 32,90% setiap tahunnya.



**Grafik 3.10 Realisasi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022**

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)
Kabupaten Pasuruan, 2022*

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Pasuruan selama kurun waktu tahun 2018-2022 mengalami penurunan dan peningkatan dengan rata pertumbuhan sebesar 30,63% setiap tahunnya. Peningkatan penerimaan pembiayaan terjadi pada tahun 2019 sebesar 27,21% dan tahun 2020 sebesar 69,94%. Sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2021 sebesar -7,04%. Namun pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 32,4%. Penerimaan pembiayaan daerah sebagian besar bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu dan sisanya dari penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah hanya ada pada tahun 2018 yang digunakan untuk penyertaan modal daerah.

3.1.2 Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib dibuat oleh Pemerintah Daerah. Neraca daerah merupakan instrumen yang digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Elemen utama neraca daerah terdiri dari asset, kewajiban dan ekuitas dana yang diturunkan lebih rinci ke dalam sub-sub rekening. Neraca Kabupaten Pasuruan tahun 2017-2020 dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	ASET					
1.1	ASET LANCAR	317.748.563.049,91	342.418.580.689,06	506.825.763.310,44	534.899.766.002,76	20,44
1.1.1	Kas	141.727.207.620,84	178.121.228.156,39	302.842.907.853,09	281.153.738.094,43	29,51
1.1.3	Piutang	128.472.682.066,85	106.953.089.471,12	153.987.671.736,91	157.694.124.966,75	9,88
1.1.6	Beban Dibayar Dimuka	330.078.573,92	345.184.647,83	474.457.724,33	604.361.449,44	23,14
1.1.7	Persediaan	47.218.594.788,30	56.999.078.413,72	49.520.725.996,11	95.447.541.492,14	33,45
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	87.309.938.306,05	98.760.604.344,72	99.127.603.810,69	100.355.462.455,37	4,91
1.2.1	Investasi Permanen	87.309.938.306,05	98.760.604.344,72	99.127.603.810,69	100.355.462.455,37	4,91
1.3	ASET TETAP	3.274.598.844.590,89	3.517.787.000.663,00	3.644.596.070.255,20	3.736.715.785.927,29	4,52
1.3.1	Tanah	920.071.876.969,83	1.026.832.975.639,33	1.029.451.916.603,33	1.032.222.721.482,33	4,04
1.3.2	Peralatan dan Mesin	877.107.160.881,00	950.319.724.114,00	1.061.137.230.510,00	1.201.864.635.828,73	11,09
1.3.3	Gedung dan bangunan	1.487.621.579.680,88	1.589.219.780.325,31	1.757.771.052.781,94	1.876.455.512.362,07	8,06
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.612.699.966.909,41	1.876.735.057.542,02	2.038.114.053.287,47	2.174.110.996.475,18	10,55
1.3.5	Aset tetap lainnya	62.524.349.384,10	65.941.302.932,10	67.110.721.582,10	67.585.775.389,18	2,65
1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	9.989.546.362,86	18.837.688.411,87	5.520.517.344,00	6.377.434.985,00	11,13
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-1.695.415.635.597,19	-2.010.099.528.301,63	-2.314.509.421.853,64	-2.621.901.290.595,20	15,66
1.4	ASET LAINNYA	6.872.426.795,92	8.434.663.359,42	6.452.733.932,76	1.840.189.882,30	-24,08

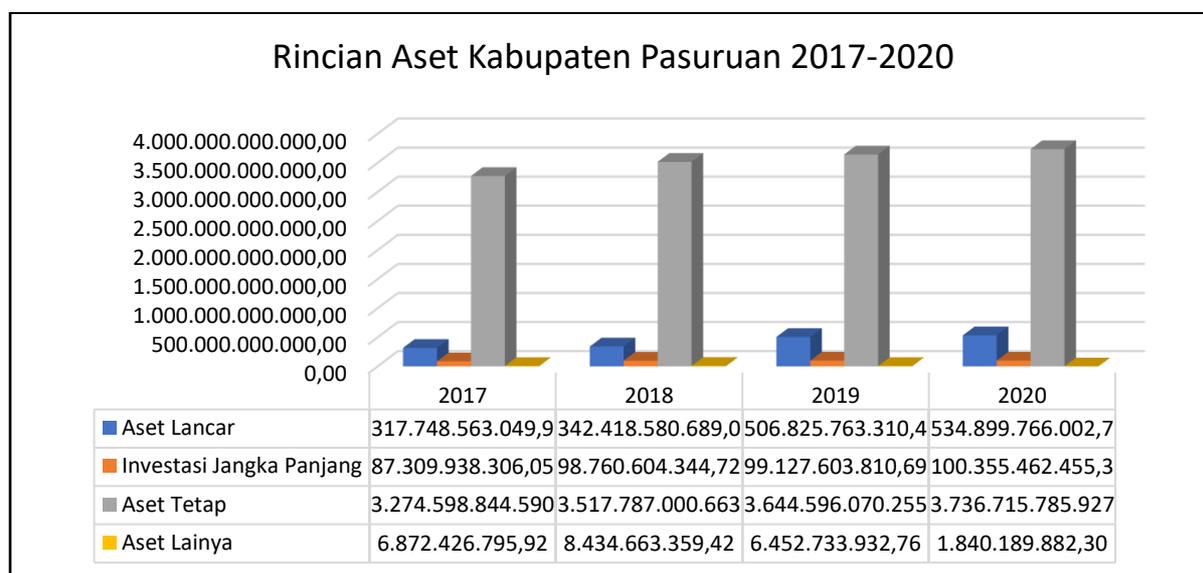
No	Uraian	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.4.1	Tagihan penjualan angsuran	0	0	0	0	0
1.4.2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	0	49.611.666,00	26.356.469,34	4.283.333,67	-43,54
1.4.3	Kemitraan dengan pihak <i>ketiga</i>	0	0	106.462.967,00	0	0
1.4.4	Aset tak berwujud	1.773.490.400,00	1.422.538.700,00	1.439.375.800,00	831.553.500,00	-20,28
1.4.5	Aset lain-lain	5.098.936.395,92	6.962.512.993,42	4.880.538.696,42	1.004.353.048,63	-24,26
	JUMLAH ASET DAERAH	3.686.529.772.742,77	3.967.400.849.056,20	4.257.002.171.309,09	4.373.811.204.267,72	5,89
2.	KEWAJIBAN					
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	21.630.719.153,80	21.618.909.495,97	37.969.850.179,15	38.432.657.608,59	25,60
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga	1.781.570.562,00	152.029.095,19	392.161.071,82	4.506.618,00	-10,79
2.1.2	Uang muka dari kas daerah	0	0	0	0	0
2.1.3	Pendapatan diterima dimuka	2.804.027.922,80	3.357.462.309,18	3.087.002.311,73	2.609.872.810,99	-1,26
2.1.4	Utang belanja	14.364.150.061,00	14.380.439.255,00	28.531.000.842,00	33.983.925.398,00	39,21
2.1.5	Utang jangka pendek lainnya	90.072.300,00	1.542.207.550,60	5.626.737.381,60	1.834.352.781,60	603,21
2.1.6	Utang Pihak ketiga lainnya	2.590.898.308,00	2.186.771.286,00	332.948.572,00	0	-66,79
3.	EKUITAS DANA	3.664.899.053.588,97	3.945.781.939.560,23	4.219.032.321.129,94	4.335.378.546.659,13	5,78
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	-	-	-	-	-

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3.1.1	SILPA	0	0	0	0	0
3.1.2	Cadangan Piutang	0	0	0	0	0
3.1.3	Cadangan Persediaan	0	0	0	0	0
3.1.4	Lain-lainnya	0	0	0	0	0
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI	-	-	-	-	-
3.2.1	Diinvestasikan dalam aset tetap	0	0	0	0	0
3.2.2	Diinvestasikan dalam aset lainnya	0	0	0	0	0
3.2.3	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	0	0	0	0	0
3.2.4	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	0	0	0	0	0
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.686.529.772.742,77	3.967.400.849.056,20	4.257.002.171.309,09	4.373.811.204.267,72	5,89

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, 2022

3.1.2.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang. Aset terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya. Jumlah aset Kabupaten Pasuruan selama periode tahun 2017-2020 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,89%. Selama 4 (empat) tahun, komponen aset dengan jumlah paling dominan yaitu Aset Tetap dengan proporsi rata-rata per tahun sebesar 87,14% dari total rata-rata-rata aset tahun 2017-2020. Proporsi komponen aset lainnya selama periode 2017-2020 yaitu Investasi Jangka Panjang dengan rata-rata sebesar 2,37% per tahun, Aset Lancar (10,35%) dan Aset Lainnya (0,15%). Sedangkan dalam komponen Aset Tetap selama periode 2017-2020 didominasi oleh Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rata-rata sebesar 54,18% per tahun, selanjutnya Gedung dan Bangunan (47,26%), Peralatan dan Mesin (28,77%), Tanah (28,29%) dan Lain-Lain.



Grafik 3.11 Rincian Aset Kabupaten Pasuruan Tahun 2017-2020

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, 2022

3.1.2.2 Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Pada periode tahun 2017-2020, rata-rata

pertumbuhan kewajiban daerah Kabupaten Pasuruan yaitu 25,60% per tahun, dimana seluruh kewajiban berasal dari komponen Kewajiban Jangka Pendek. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar -0,05%, sedangkan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 75,63%. Kewajiban paling tinggi adalah Utang Belanja dengan proporsi rata-rata per tahun sebesar 74,12% dari total rata-rata rata aset tahun 2017-2020, selanjutnya Pendapatan diterima dimuka (10,85%), Utang Jangka Pendek Lainnya (6,79%), Utang Pihak Ketiga Lainnya (5,74%) dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (2,50%).



Grafik 3.12 Kewajiban Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017-2020

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, 2022

3.1.2.3 Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Dalam periode tahun 2017-2020, ekuitas selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,78% per tahun. Pertumbuhan ekuitas tertinggi sebesar 7,66% pada tahun 2018 sedangkan pertumbuhan terendah sebesar 2,76% pada tahun 2020.



Grafik 3.13 Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017-2021

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, 2022

Tabel 3.3 Analisa Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017-2022

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020
Rasio Likuiditas					
1	Rasio Lancar (<i>Current ratio</i>)	14,69	15,84	13,35	13,92
2	Rasio Quick (<i>Quick Ratio</i>)	12,51	13,20	12,04	11,43
Rasio Solvabilitas					
1	Rasio total hutang terhadap total aset	0,0059	0,0054	0,0089	0,0088
2	Rasio hutang terhadap modal	0,0059	0,0055	0,0090	0,0089

Analisis rasio keuangan diantaranya terdiri dari Rasio Lancar (*current ratio*), Rasio Cepat (*quick ratio*), Rasio Total Hutang terhadap Total Aset dan Rasio Hutang terhadap Modal. Dalam hal ini, yang digunakan dalam analisis rasio keuangan Kabupaten Pasuruan Tahun 2017-2020 adalah Rasio Lancar (*current ratio*), Rasio Quick (*Quick Ratio*), Rasio Total Hutang terhadap Total Aset dan Rasio Total Hutang terhadap Total Modal. *Current ratio* merupakan cara menghitung rasio likuiditas untuk mengetahui tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva likuid yang dimiliki pada saat ini atau aktiva lancar (*current asset*). Berdasarkan data pada tabel 3.3 diketahui bahwa *Current Ratio* mengalami peningkatan dan penurunan selama tahun 2017-2020. Pada tahun 2020 nilai *Current Ratio* sebesar 13,92 yang artinya bahwa setiap Rp 1,- hutang Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat jamin

oleh Rp. 13,92 dari harta lancar yang dimiliki atau kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek adalah 13,92 : 1.

Quick Ratio lebih likuit dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *Quick Ratio* telah mengeluarkan persediaan dalam perhitungannya. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun 2020 setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan 11,43 berbanding 1 untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Rasio total hutang terhadap total aset sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur masih cukup kuat dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang yang ada saat ini. Selanjutnya, Rasio Total Hutang terhadap Total Aset menunjukkan perbandingan antara jumlah seluruh kewajiban dan jumlah seluruh aset. Dalam periode tahun 2017-2020, nilai Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kabupaten Pasuruan sangat rendah, yang berarti bagian aset yang digunakan untuk membayar kewajiban juga sangat kecil. Sedangkan Rasio Total Hutang terhadap Total Ekuitas menunjukkan kemampuan modal pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban. Nilai Rasio Total Hutang terhadap Total Ekuitas hampir sama dengan nilai Rasio Total Hutang terhadap Total Aset, yang disebabkan nilai aset dan ekuitas yang hampir sama.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Pasuruan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

3.2.1.1 Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja merupakan gambaran tentang belanja daerah yang disajikan menggunakan perbandingan realisasi dan anggaran belanja di tahun sebelumnya. Gambaran proporsi realisasi belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah

Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 2020-2022 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2022

No.	Uraian	2020			2021			2022		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
A	Belanja Operasi	2.248.192.173.286,73	2.070.414.873.308,96	92%	2.287.630.061.282,00	2.228.563.488.253,00	97,42	2.593.076.170.725	2.343.945.791.110,45	90,39
1	Belanja Pegawai	1.046.738.603.167,65	1.203.142.213.892,00	115%	1.174.408.661.531,00	1.107.837.622.596,00	94,33	1.263.071.210.511	1.133.803.924.679,00	89,77
2	Belanja Barang dan Jasa	1.030.038.813.835,18	706.180.335.963,96	69%	876.740.749.642,00	931.053.246.192,00	106,19	1.131.475.619.903	1.016.509.247.583,00	89,84
3	Belanja Bunga		0			0	0	0	0	0
4	Belanja Subsidi		0			0	0	0	0	0
5	Belanja Hibah	132.392.381.283,90	126.307.448.453,00	95%	195.313.037.177,00	156.848.191.841,00	80,31	168.418.419.416	165.372.279.498,45	98,19
6	Belanja Bantuan Sosial	39.022.375.000,00	34.784.875.000,00	89%	41.167.612.932,00	32.824.427.624,00	79,73	30.110.920.895	28.260.339.350,00	93,85
7	Belanja Bantuan Keuangan	0	0			0	0	0	0	0
B	Belanja Modal	400.536.960.202,53	352.127.050.135,28	88%	500.489.182.930,00	376.073.722.205,00	75,14	529.795.022.027	476.867.550.144,71	90,01
1	Belanja Tanah		28.408.220,00		190.000.000,00	70.000.000,00	36,84	0	0	0
2	Belanja Peralatan dan Mesin		114.363.487.979,20		112.595.044.190,0	132.357.240.550,00	117,55	208.575.770.663	185.360.760.023,40	88,87
3	Belanja Bangunan dan gedung		94.332.201.680,00		154.300.297.759,00	124.218.986.593,00	80,50	174.550.601.719	164.196.619.083,72	94,07
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jalan		135.206.224.587,00		231.881.683.541,0	118.793.505.162,00	51,23	145.498.069.879	126.174.394.637,59	86,72
5	Belanja Aset tetap lainnya		8.196.727.669,08		839.031.200,0	633.989.900,00	75,56	1.170.579.766	1.135.776.400,00	97,03
6	Belanja Aset Lainnya									
C	Belanja Tidak Terduga	191.494.770.000,00	172.098.662.694,00	90%	25.000.000.000,00	33.867.748.961,00	135,47	28.481.811.141	11.345.474.996,00	39,83

No.	Uraian	2020			2021			2022		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
D	Belanja Transfer	654.507.174.395,02	643.742.646.245,00	98%	640.762.926.963,00	635.254.924.924,00	99,14	619.958.855.824	617.881.430.831,00	99,66
1	Belanja Bagi Hasil	43.406.157.391,02	43.341.894.789,00	100%	40.207.474.323,00	40.361.924.322,00	100,38	41.704.880.895	41.704.880.895,00	100,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	611.101.017.004,00	600.400.751.456,00	98%	600.555.452.640,0	594.893.000.602,00	99,06	578.253.974.929	576.176.549.936,00	99,64

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, 2022

3.2.1.2 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Selanjutnya rasio prosentase antara total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan dapat dicermati pada tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Analisa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Tahun	Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Pengeluaran Pembiayaan	Total Belanja Daerah	Total Belanja + Pengeluaran Pembiayaan	Persentase Belanja Pegawai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6) = (2)/(5)*100
2018	1.008.704.137.648,21	9.328.851.618,00	3.140.572.335.212,71	3.149.901.186.830,71	32,02
2019	1.025.912.267.478,00	0	3.244.331.996.857,72	3.244.331.996.857,72	31,62
2020	1.203.142.213.892,00	0	3.238.383.232.383,24	3.238.383.232.383,24	37,15
2021	1.107.837.622.596,00	0	3.273.759.884.343,00	3.273.759.884.343,00	33,84
2022	1.133.803.924.679,00	0	3.450.040.247.082,16	3.450.040.247.082,16	32,86
	5.479.400.166.293,21	9.328.851.618,00	16.347.087.695.878,80	16.356.416.547.496,80	33,50

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, 2022

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Kabupaten Pasuruan selama periode 2018-2022 adalah sebesar 33,50%. Rasio ini mengalami peningkatan dan penurunan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pendanaan pembangunan daerah diluar kapasitas pendapatan daerah serta kewajiban-kewajiban yang menjadi beban Pemerintah Daerah. Analisis pembiayaan daerah tidak dapat terlepas dari kondisi defisit ataupun surplus yang terjadi dalam APBD. Kondisi keuangan daerah Kabupaten Pasuruan selama periode tahun 2018-2022 mengalami surplus dan defisit. Defisit anggaran terjadi pada tahun 2020 dan 2022 dengan penurunan defisit pada tahun 2022 sebesar 358,52% dari tahun 2020. Sedangkan surplus terjadi pada tahun 2018, 2019 dan 2021. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan surplus sebesar 227,04% dari tahun 2018. Namun pada tahun 2021, surplus mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar -26,82%.

**Tabel 3.6 Surplus (Defisit Riil) Anggaran Kabupaten Pasuruan
Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Realisasi Pendapatan Daerah	3.187.963.233.913,07	3.368.808.544.577,79	3.217.081.717.078,40	3.364.854.668.006,61	3.352.368.857.825,30
2	Belanja Daerah	3.140.572.335.212,71	3.244.331.996.857,72	3.238.383.232.383,24	3.273.759.884.343,00	3.450.040.247.082,16
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	9.328.851.618	0	0	0	0
	Defisit riil	38.062.047.082,36	124.476.547.720,07	-21.301.515.304,84	91.094.783.663,61	-97.671.389.256,86

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, 2022

**Tabel 3.7 Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Pasuruan
Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Proporsi dari total defisit Riil				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	139.945.601.978,84	177.969.199.061,20	302.450.746.781,27	281.149.231.476,43	372.245.667.882,04
2	Pencairan dana cadangan	0	0	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6	Penerimaan Piutang Daerah	0	5.000.000,00	0	0	0

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, 2022

Penutup defisit riil anggaran Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 di dominasi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun anggaran sebelumnya. SiLPA pada tahun 2018 yang digunakan sebagai penutup defisit sejumlah Rp. 139.945.601.978,84 dan terus meningkat sampai dengan tahun 2020 yakni berjumlah Rp. 302.450.746.781,27. Namun pada tahun 2021 SiLPA mengalami penurunan sebesar 7,04% dari tahun 2020, tetapi pada tahun 2022 SiLPA mengalami kenaikan kembali sebesar 32,40% dari tahun 2021. Selain bersumber dari SiLPA, penutup defisit riil anggaran Kabupaten Pasuruan pada tahun 2019 juga di dapat dari penerimaan piutang Daerah sebesar Rp. 5.000.000,00. Selain dua sumber pembiayaan di atas, tidak terdapat sumber lain dalam menutup defisit riil atas belanja dan pengeluaran pembiayaan dibanding dengan pendapatan.

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan mencakup Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, proyeksi pendapatan, proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib dan mengikat serta Prioritas Utama, dan Penghitungan Kerangka Pendanaan. Analisis kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan untuk menghitung pendapatan dan penerimaan pembiayaan dan pengalokasian belanja dan pengeluaran pembiayaan dengan memperhitungkan kebutuhan yang bersifat periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis dan proyeksi yang cermat terhadap pendapatan untuk mendanai tindakan yang direncanakan melalui belanja daerah.

Tabel 3.8 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024 s/d Tahun 2026 Kabupaten Pasuruan

KODE	URAIAN	PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026
1	PENDAPATAN	3.417.648.288.847	3.453.073.172.191	3.495.739.398.455
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	718.031.793.016	761.113.700.600	810.586.091.136
1.1.1	Pajak Daerah	463.504.992.586	508.244.194.056	551.511.215.929
1.1.2	Retribusi Daerah	41.087.953.239	41.603.712.304	42.643.805.111
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.654.760.005	4.654.760.005	4.654.760.005
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	208.784.087.186	206.611.034.235	211.776.310.091
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.676.024.383.045	2.697.844.383.045	2.723.164.383.045
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.454.073.338.000	2.471.393.338.000	2.491.213.338.000
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar – Daerah	221.951.045.045	226.451.045.045	231.951.045.045
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	56.724.978.596	56.724.978.596	56.724.978.596
1.3.1	Hibah	0	0	0
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	56.724.978.596	56.724.978.596	56.724.978.596
2	BELANJA	3.489.391.524.764	3.489.391.524.764	3.489.391.524.764
2.1	BELANJA OPERASI	2.514.744.746.961	2.514.744.746.961	2.514.744.746.961
2.1.1	Belanja Pegawai	1.281.890.510.476	1.281.890.510.476	1.281.890.510.476
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.068.927.618.325	1.068.927.618.325	1.068.927.618.325
2.1.3	Belanja Bunga	0	0	0
2.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0
2.1.5	Belanja Hibah	146.976.618.160	146.976.618.160	146.976.618.160

KODE	URAIAN	PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	16.950.000.000	16.950.000.000	16.950.000.000
2.2	BELANJA MODAL	338.941.988.086	338.941.988.086	338.941.988.086
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0	0	0
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	0
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	40.102.305.915	40.102.305.915	40.102.305.915
2.4	BELANJA TRANSFER	595.602.483.802	595.602.483.802	595.602.483.802
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	47.768.432.972	47.768.432.972	47.768.432.972
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	547.834.050.830	547.834.050.830	547.834.050.830
	SURPLUS / (DEFISIT)	(71.743.235.917)	(71.743.235.917)	(71.743.235.917)
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	0	0	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0	0	0
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.256.764.083	3.256.764.083	3.256.764.083

KODE	URAIAN	PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	3.256.764.083	3.256.764.083	3.256.764.083
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang	0	0	0
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah dan / atau Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	71.743.235.917	71.743.235.917	71.743.235.917

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, 2023

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, 2022

3.3.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer terdiri dari Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Dana Transfer Antar Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Efektifitas penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Kebijakan belanja pembangunan daerah akan mempertimbangkan kapasitas fiskal yang dimiliki. Arah kebijakan keuangan daerah dalam kerangka peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2023 antara lain :

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/ retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak;
 - b. Memperbaiki dan memperluas basis data objek dan subjek pajak/retribusi daerah;
 - c. Memberikan reward desa dan dukuh yang wilayahnya telah lunas sebelum jatuh tempo;
 - d. Mengembangkan pelaporan pajak secara online untuk wajib pajak yang melakukan sistem pemungutan secara self assessment.
2. Optimalisasi pendayagunaan aset daerah yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
3. Mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait;
4. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah misal dengan memperbaiki fasilitas obyek retribusi

3.3.1.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut maka belanja daerah harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan daerah oleh Pemerintah Daerah serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja daerah diarahkan untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah satu tahun ke depan oleh karena itu penyusunan anggaran belanja daerah harus menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Hal ini mengandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran daerah. Belanja daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja daerah harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Terkait dengan belanja daerah, Permasalahan utama yang dihadapi adalah: (i) masih terbatasnya ruang gerak fiskal yang disebabkan oleh belanja-belanja yang bersifat wajib; (ii) masih rendahnya efisiensi dan efektivitas belanja daerah; (iii) masih belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan belanja daerah yang tercermin dari masih lebih rendahnya realisasi terhadap target, terutama untuk belanja modal; (iv) belum optimalnya pelaksanaan sistem pengelolaan belanja daerah; dan (v) masih rendahnya efektivitas dan efisiensi belanja daerah.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan diatas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan belanja daerah secara umum disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis *money follow* program dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan. Selanjutnya kebijakan belanja daerah juga diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan;

2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan dana perimbangan (DAU yang telah dikurangi oleh belanja pegawai), sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
4. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial;
5. Belanja daerah berupa belanja Operasional Perangkat Daerah diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat;
6. Belanja daerah berupa Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian target RPD Kabupaten Pasuruan 2024 - 2026;
7. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional;
8. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan;
9. Prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi urusannya;
10. Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

11. Besarnya plafon anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja;
12. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra).
13. Penentuan Alokasi anggaran yang sesuai untuk Pelaksanaan PILKADA.

3.3.1.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran akibat lebih besarnya alokasi belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran 2022, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Disisi lain apabila terdapat surplus maka pembiayaan daerah dapat dialokasikan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Kebijakan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 diarahkan sebagai berikut :

1. Proyeksi pembiayaan daerah Tahun 2022 diasumsikan turun dari Tahun 2021 dikarenakan adanya penurunan SiLPA;
2. Proyeksi alokasi untuk Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.3.256.764.083
3. Kebijakan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan dalam Perda dengan prinsip kehati-hatian;
4. Penguatan pengelolaan dana bergulir; dan

5. Menjaga agar keuangan daerah dan apabila terdapat defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu.

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Data kapasitas riil kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan selama beberapa 3 (tiga) tahun kedepan untuk membiayai pembangunan, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 3.9 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	PROYEKSI			
		2023	2024	2025	2026
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	Pendapatan	3.515.293.142.871	3.417.648.288.847	3.417.648.288.847	3.417.648.288.847
2	Pencairan dana cadangan (Sesuai dengan Perda)	0	0	0	0
3	Sisa lebih riil Perhitungan Anggaran	400.790.157.561	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000
	Total Penerimaan	3.916.083.300.432	3.492.648.288.847	3.492.648.288.847	3.492.648.288.847
	Dikurangi :				
1	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	3.164.097.240.397	2.949.677.376.686	2.949.677.376.686	2.949.677.376.686
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	751.986.060.035	542.970.912.161	542.970.912.161	542.970.912.161

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, 2022

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam BAB IV ini diuraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Pasuruan, khususnya untuk jangka waktu 2024-2026. Komponen pembentuk isu strategis di Kabupaten Pasuruan terdiri dari: analisis terhadap hasil pembangunan periode sebelumnya untuk mengetahui permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan; hasil telaah terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025. RPJMN 2020-2024; dan Hasil aktual kinerja pembangunan daerah.

4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Pasuruan

Permasalahan pembangunan merupakan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan dan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang secara riil dan aktual sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut diklasifikasikan berdasarkan sektor. Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Permasalahan pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis capaian kinerja daerah setiap urusan yang disajikan pada BAB II. Adapun permasalahan-permasalahan pembangunan Kabupaten Pasuruan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 yang dituangkan dan disajikan berdasarkan masing-masing urusan, yakni sebagai berikut.

Tabel 4.1 Permasalahan Pembangunan

No	Urusan	Permasalahan
1	PENDIDIKAN	1) Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah; 2) Belum semua anak usia 7 - 12 tahun berpartisipasi pada jenjang pendidikan tingkat SD/ sederajat; 3) Belum semua anak usia 13-15 tahun berpartisipasi pada jenjang pendidikan tingkat SMP/ sederajat.
2	KESEHATAN	1) Pada tahun 2022 masih terdapat kasus kematian ibu sebanyak 18 orang;

No	Urusan	Permasalahan
		2) Masih terdapat kasus kematian bayi pada tahun sebanyak 77 bayi; 3) Masih terdapat banyak penderita HIV positif yang mencapai 510 orang; 4) Meningkatnya penderita penyakit TBC tahun 2022 yang mencapai 2.720 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 772 kasus; 5) Belum optimalnya Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut; 6) Belum optimalnya Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi; 7) Masih terdapat prevalensi stunting tahun 2022 yang mencapai 10,83.
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1) Capaian penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari tahun 2022 masih 86,74% yang berarti belum seluruh penduduk di Kabupaten Pasuruan yang terpenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-harinya; 2) Capaian layanan pengolahan air limbah domestik tahun 2022 masih 81,81% yang berarti belum seluruh penduduk di Kabupaten Pasuruan yang mendapat pelayanan pengolahan air limbah domestik; 3) Belum semua penduduk di Kabupaten Pasuruan mendapatkan akses air minum layak; 4) Belum semua penduduk di Kabupaten Pasuruan terlayani sanitasi; 5) Indeks Ketahanan Air pada tahun 2022 hanya mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2021 yaitu sebesar 0,30 yang menggambarkan ketersediaan air baku yang ada belum dapat memenuhi secara keseluruhan kebutuhan penduduk Kabupaten Pasuruan; 6) Adanya penurunan capaian pada Indeks Aksesibilitas Wilayah pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 dimana capaian Indeks Aksesibilitas Wilayah tahun 2022 mencapai 1,26 sedangkan pada tahun 2021 mencapai 1,33; 7) Bertambahnya kerusakan jaringan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan berat yang melebihi tonase kelas jalan, cuaca ekstrem dan umur rencana jalan.
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1) Masih adanya kawasan permukiman kumuh; 2) Masih rendahnya penanganan Kawasan Kumuh; 3) Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani pada tahun 2022 belum mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 44,67% dari target sebesar 44,86%; 4) Masih adanya rumah tidak layak huni.
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1) Masih tingginya kejadian kebakaran pada tahun 2022 yaitu sebanyak 120 kejadian; 2) Masih tingginya kejadian bencana pada tahun 2022 yaitu sebanyak 332 bencana dimana

No	Urusan	Permasalahan
		<p>banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi;</p> <p>3) Masih sedikitnya jumlah desa tangguh bencana berkategori utama;</p> <p>4) Masih adanya warga negara yang belum mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.</p>
6	SOSIAL	<p>1) Masih adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);</p> <p>2) Masih adanya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum mendapatkan penanganan;</p> <p>3) Masih adanya anak terlantar yang belum memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.</p>
7	TENAGA KERJA	<p>1) Masih banyaknya penduduk yang menganggur mencapai 54.113 orang;</p> <p>2) Jumlah penempatan tenaga kerja yang ada sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah Pencari Kerja yang terdaftar;</p> <p>3) Masih adanya Peserta Pelatihan yang belum lulus uji kompetensi;</p> <p>4) Masih adanya kasus hubungan industrial yang belum diselesaikan.</p>
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	<p>1) Masih adanya kekerasan pada anak;</p> <p>2) Masih adanya kekerasan pada perempuan.</p>
9	PANGAN	<p>1) Menurunnya Angka Kecukupan Gizi (AKG) dari 2.243 Kkal/Kap/Hari pada tahun 2021 menjadi 2.083 Kkal/Kap/Hari pada tahun 2022;</p> <p>2) Persentase ketersediaan pangan terus mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai 2022.</p>
10	PERTANAHAN	Masih belum optimalnya identifikasi tanah asset.
11	LINGKUNGAN HIDUP	<p>1) Menurunnya capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dimana pada tahun 2022, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 59,78 sedangkan pada tahun 2021 mencapai 63,13;</p> <p>2) Nilai Indeks Ketahanan Air pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,40 poin dari capaian tahun 2021 yang berarti bahwa secara umum terjadi penurunan kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Pasuruan;</p> <p>3) Capaian nilai Indeks Kualitas Udara pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 7,78 poin dibandingkan tahun 2021;</p> <p>4) Capaian nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2022 sebesar 42,64 termasuk dalam kategori “kurang”;</p> <p>5) Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2022 mencapai 42,64 mengalami penurunan sebanyak 0,25 poin atau setara dengan luas 687,5 Ha jika dibandingkan</p>

No	Urusan	Permasalahan
		<p>dengan capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2021 yang mencapai 42,89;</p> <p>6) Menurunnya pengelolaan sampah pada tahun 2022.</p>
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	<p>1) Masih ada penduduk di Kabupaten Pasuruan yang belum mempunyai E-KTP dan Kartu Keluarga;</p> <p>2) Masih adanya penduduk usia 0-18 tahun yang belum mempunyai Akte Kelahiran;</p> <p>3) Masih adanya anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak);</p> <p>4) Belum semua Perangkat Daerah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama.</p>
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	<p>1) Belum semua Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif;</p> <p>2) Masih ada Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) yang belum mandiri;</p> <p>3) Belum semua desa di Kabupaten Pasuruan berstatus "Desa Mandiri."</p>
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	<p>1) Meningkatnya Angka Kelahiran Total atau TFR pada tahun 2022;</p> <p>2) Adanya penurunan pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) pada tahun 2022;</p> <p>3) Meningkatnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) pada tahun 2022;</p> <p>4) Pada tahun 2022, terdapat penurunan pada Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Aktif.</p>
15	PERHUBUNGAN	<p>1) Masih rendahnya capaian Indeks Konektivitas Wilayah;</p> <p>2) Menurunnya rasio konektivitas kabupaten pada tahun 2022;</p> <p>3) Menurunnya kinerja lalu lintas kabupaten pada tahun 2022.</p>
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Menurunnya capaian Indeks SPBE dimana pada tahun 2022 mencapai 2,04 sedangkan pada tahun 2021 mencapai 2,39.
17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Menurunnya jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dimana pada tahun 2022 mencapai 0,16 sedangka pada tahun 2021 mencapai 1,34.
18	PENANAMAN MODAL	<p>1) Belum efektifnya kegiatan promosi dan kerjasama investasi yang dilakukan DPMPSTSP dikarenakan belum memiliki peta potensi investasi;</p> <p>2) Tingginya Upah Minimum Regional (UMR) di Kabupaten Pasuruan.</p>
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	<p>1) Menurunnya Rasio Pemuda Berprestasi dimana pada tahun 2022 mencapai 0,33 sedangkan pada tahun 2021 mencapai 0,40;</p> <p>2) Menurnnya Rasio Atlit Berprestasi dimana pada tahun 2022 mencapai 0,70 sedangkan pada tahun 2021 mencapai 0,41;</p>

No	Urusan	Permasalahan
		3) Pada tahun 2022 tidak ada partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.
20	STATISTIK	<ol style="list-style-type: none"> 1) Capaian Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral tidak mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai 2022 yaitu tetap mencapai 80%; 2) Belum semua Perangkat Daerah menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan melakukan evaluasi pembangunan daerah.
21	PERSANDIAN	Menurunnya Indeks Keamanan Informasi dimana pada tahun 2022, capaian Indeks Keamanan Informasi mencapai 48,37 sedangkan pada tahun 2021 mencapai 98,60.
22	KEBUDAYAAN	Menurunnya cagar budaya yang dilestarikan dimana pada tahun 2022 mencapai 7,53 sedangkan pada tahun 2021 mencapai 100%.
23	PERPUSTAKAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menurunnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dimana pada tahun 2022 mencapai 8,07 sedangkan pada tahun 2021 mencapai 8; 2) Belum tercapainya target ketercukupan koleksi perpustakaan pada tahun 2022 yang mencapai 6,10% padahal targetnya sebesar 6,50%; 3) Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat mengalami penurunan pada tahun 2022 yang mencapai nilai 57,7 sedangkan pada tahun 2021 nilainya 62,18.
24	KEARSIPAN	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pada tahun 2022 Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan yang ditetapkan oleh ANRI mencapai 67,95 dalam skala 100 atau masuk kategori “cukup,” meskipun mengalami kenaikan dari tahun 2021 yang mencapai 56,36 tetapi belum mencapai target yang ditentukan yaitu 80; 2) Tingkat Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional tidak mengalami kenaikan dari tahun 2021.
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Adanya penurunan pada jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) pada tahun 2022 sebesar 44.041,87 ton sedangkan pada tahun 2021 sebesar 44.088,27.
26	PARIWISATA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menurunnya pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan pada tahun 2022 yang mencapai 17% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 25,62; 2) Menurunnya kunjungan pariwisata pada tahun 2022 yang mencapai 15,71% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 19%; 3) Menurunnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dimana pada tahun 2022 mencapai 350.000.000 rupiah sedangkan pada tahun 2021 mencapai 41.223.918.560 rupiah.
27	PERTANIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terjadinya penurunan pada peningkatan produktivitas tanaman sayur pada tahun 2022 sebesar 0,08% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 0,56%; 2) Menurunnya produktivitas tanaman pangan yaitu jagung pada tahun 2022 sebesar 6,41

No	Urusan	Permasalahan
		<p>ton/ha dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 6,47 ton/ha;</p> <p>3) Menurunnya produktivitas tanaman buah tahunan pada tahun 2022 sebesar 90,17 kg/pohon dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 282,50 kg/pohon;</p> <p>4) Menurunnya produktivitas tanaman sayur pada tahun 2022 sebesar 35,67 ton/ha dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 67,50 ton/ha;</p> <p>5) Menurunnya produktivitas tanaman hias pada tahun 2022 sebesar 72,73 tangkai/m² dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 72,73 tangkai/m²;</p> <p>6) Menurunnya produksi peternakan seperti daging, telur dan susu pada tahun 2022.</p>
28	PERDAGANGAN	<p>1) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran pada tahun 2022 mencapai 6,98% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 9,08%;</p> <p>2) Terjadi penurunan pada Nilai Transaksi Perdagangan pada tahun 2022 yang mencapai 4.751,8 jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 5.302,8 juta rupiah;</p> <p>3) Indeks Daya Beli pada tahun 2022 mencapai 72,30 sehingga masih belum mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 73,97.</p>
29	PERINDUSTRIAN	<p>1) Kurangnya standardisasi produk industri untuk layak berdaya saing;</p> <p>2) Pengembangan produk olahan yang terstandarisasi masih relatif sedikit.</p>
30	PERENCANAAN	<p>1) Capaian Nilai Sakip Perencanaan pada tahun 2022 hanya mengalami peningkatan yang sangat sedikit yaitu 0,03 dari tahun 2021;</p> <p>2) Capaian Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang baik belum 100%.</p>
31	KEPEGAWAIAN	Indeks profesionalitas ASN pada tahun 2022 mencapai 54,67 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 58,42.
32	INSPEKTORAT	<p>Inspektorat</p> <p>Belum semua Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara efektif karena baru 20 Perangkat Daerah dari total 55 Perangkat Daerah yang sudah menerapkan pada tahun 2022.</p>
33	SEKRETARIAT DAERAH	<p>Sekretariat Daerah</p> <p>Capaian Nilai Sakip Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 hanya mengalami peningkatan yang sangat sedikit yaitu 0,22 dari tahun 2021.</p>

4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi, atau permasalahan daerah bersifat mendesak yang harus diperhatikan, atau diutamakan dalam merancang pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa

mendatang. Isu strategis ini, disusun melalui identifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Secara konseptual, isu strategis memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat nanti. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

4.2.1 Isu Strategis Internasional

4.2.1.1 *Sustainable Development Goals*

Melanium Development Goals atau biasa kita kenal dengan MDG`s merupakan komitmen dari 189 negara untuk tujuan pembangunan yang lebih baik, yang dicanangkan mulai September 2000 hingga 2015 telah dianggap gagal. Sejak diadopsi di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2015, Indonesia telah mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat dan mengambil tindakan awal, termasuk menghubungkan sebagian besar target dan indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Mendengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Penandatanganan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh Presiden Jokowi pada bulan Juli 2017 merupakan tonggak utama, yang menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola SDGs nasional untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan dan pelaporan. Sustainable Development Goals terdiri dari tiga tujuan yang dibangun melalui 5 pondasi dan 4 pilar. Lima pondasi.

SDGs meliputi manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. Sedangkan 4 Pilar SDGs yakni Sosial, Lingkungan, Ekonomi, dan Hukum & Tata Kelola dengan diturunkannya menjadi 17 tujuan yang dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 4.1 Tujuh Belas *Sustainable Development Goals*

Sumber: Diolah

1. Tanpa Kemiskinan (No Poverty)

Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;

2. Tanpa Kelaparan (Zero Hunger)

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan;

3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*Good Health and Well-being*)

Menjamin kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan hidup bagi semua orang di segala usia;

4. Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*)

Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas, dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif, dan berkeadilan, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;

5. Kesetaraan Gender (*Gender Equality*)

Menjamin kesetaraan gender, serta memberdayakan seluruh perempuan;

6. Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*)

Menjamin ketersediaan, dan pengelolaan air bersih, serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;

7. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*)

Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan, serta modern bagi semua orang;

8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (*Decent Work and Economic Growth*)

Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*)

Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong industrialisasi yang inklusif, dan berkelanjutan serta membina inovasi;

10. Mengurangi Kesenjangan (*Reduced Inequalities*)

Mengurangi kesenjangan di dalam, dan di antar negara;

11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*Sustainable Cities and Communities*)

Menjadikan kota, dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan;

12. Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab (*Responsible Consumption and Production*)

Menjamin pola produksi, dan konsumsi yang berkelanjutan;

13. Aksi Terhadap Iklim (*Climate Action*)

Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim, serta dampaknya;

14. Kehidupan Bawah Laut (*Life Below Water*)

Melestarikan, dan menggunakan samudera, lautan, dan sumberdaya laut secara berkelanjutan;

15. Kehidupan di Darat (*Life on Land*)

Melindungi, memperbaharui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus, dan tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan, dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;

16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (*Peace, Justice and Strongg Institutions*)

Mendorong masyarakat yang damai, dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang termasuk lembaga, dan bertanggungjawab untuk seluruh kalangan,

serta membangun institusi yang efektif akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan; dan

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnership for the Goal's*)

Memperkuat implementasi, dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Berikut merupakan konektivitas antara pilar dan tujuan pembangunan berkelanjutan menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia:



Gambar 4.2 Keterkaitan 4 Pilar dengan 17 Tujuan Sustainable Development Goals

Sumber: Diolah

Hasil Evaluasi dari capaian SDGs Kabupaten Pasuruan sampai dengan tahun 2021 masih terdapat 23,18% dari total indikator yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Pasuruan, namun belum mencapai target nasional, dan terdapat 21,36% yang belum memiliki data capaian. Berbagai indikator yang

masih menjadi isu strategis dalam pencapaian SDGs di Kabupaten Pasuruan diantaranya:

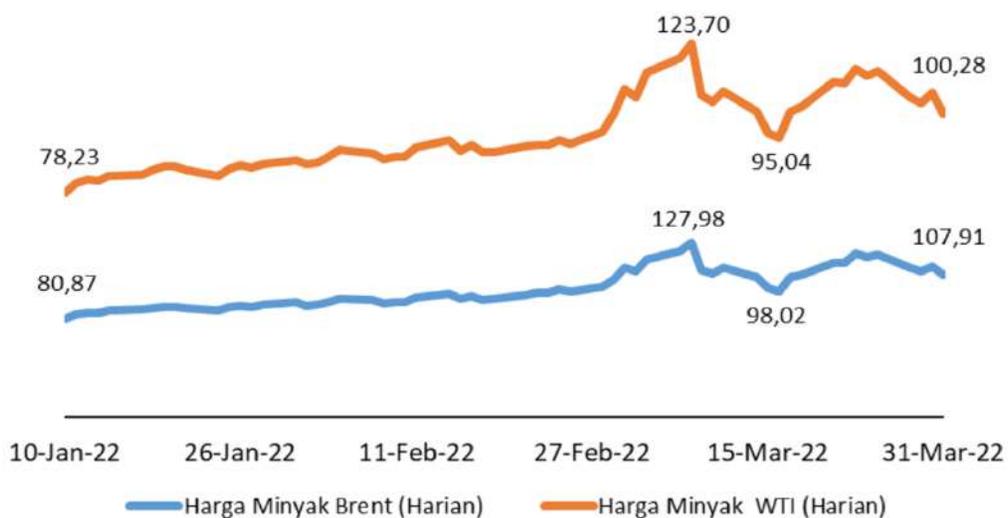
- 1) air minum layak dan berkelanjutan.
- 2) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
- 3) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
- 4) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).
- 5) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.
- 6) Unmet need pelayanan kesehatan.
- 7) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
- 8) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.
- 9) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.
- 10) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- 11) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.
- 12) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
- 13) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.

4.2.1.2 Pandemi Covid-19 dan Ancaman Resesi Ekonomi

Resesi, yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi negatif selama dua kuartal berturut-turut sempat menjadi momok dunia, akibat pandemi *COVID-19*. Resesi membawa berbagai dampak sosial ekonomi krusial. Kemiskinan, pengangguran, kenaikan harga hingga gejolak pasar keuangan. Gejala resesi juga terlihat di Eropa imbas perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, ditandai dengan adanya lonjakan harga batu bara dan gas; gangguan pada aliran pasokan dan agribisnis; harga minyak melonjak; serta Eropa harus mengeksport lebih banyak untuk membayar volume impor tertentu.

Ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina berdampak terhadap perekonomian dunia, tak terkecuali Indonesia. Berbagai komoditas, CPO, batu bara, gas bumi termasuk minyak mencatat kenaikan harga akibat situasi konflik. Harga minyak dunia jenis Brent per 31 Maret 2022 menembus level US\$

107,91 per barel, bahkan pada 8 Maret 2022 sampai menyentuh US\$ 127,98 per barel. Rusia dan Ukraina merupakan salah satu lumbung pangan dan energi dunia yang menjadi salah satu faktor mengapa konflik kedua negara tersebut begitu mempengaruhi harga komoditas dan laju perdagangan global. Dilain sisi, krisis di Ukraina juga memunculkan supply chain disruption. Jika perang berkepanjangan dan banyak jalur-jalur pasokan global dan infrastruktur pelabuhan atau airport rusak maka global supply chain akan terhambat. Jika krisis berlangsung lebih lama, maka pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan lebih lemah, stagnan, dan cenderung menurun, dan inflasi terancam lebih tinggi lagi. Kondisi perkembangan harga minyak dunia disajikan pada gambar berikut:

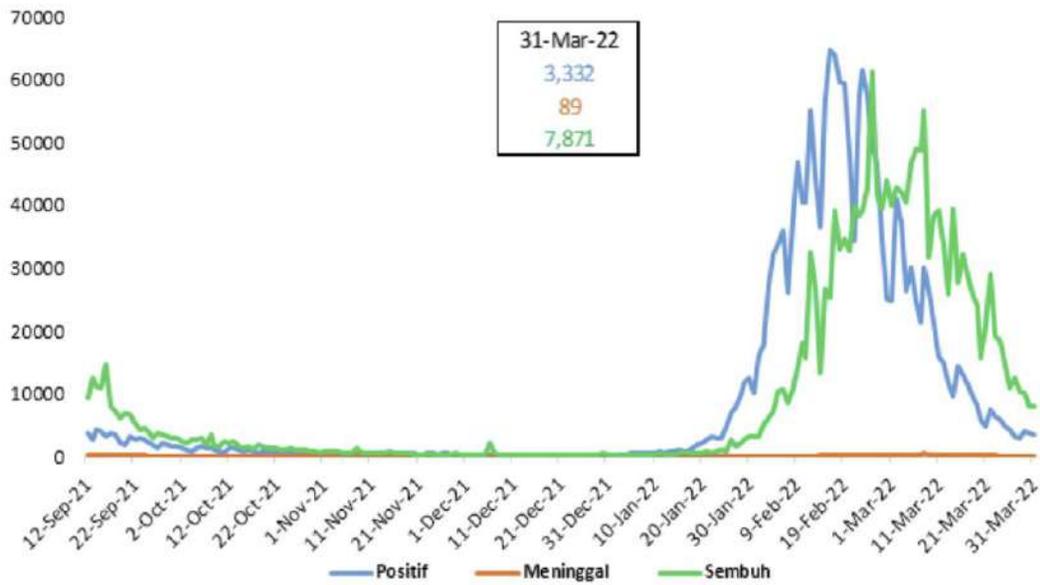


Gambar 4.3 Tren Harga Minyak Mentah

Sumber: CNBC, Investing

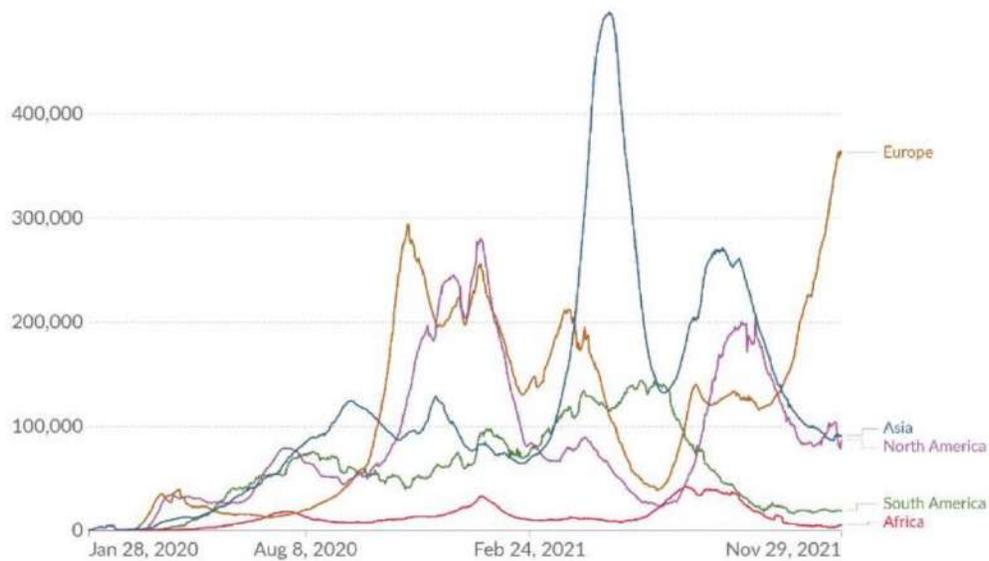
Kasus COVID-19 di Indonesia terus melandai hingga 31 Maret 2022, terkonfirmasi kasus positif sebanyak 3.332 orang dengan tingkat kesembuhan sebanyak 7.871 orang dan yang meninggal sebanyak 89 orang. Apabila pelandaian terus berlanjut dan tidak terjadi peningkatan kasus signifikan terutama setelah libur Lebaran, pemerintah mungkin akan beralih dari pandemi ke endemi. Dimana sebelumnya pemerintah telah melonggarkan aturan-aturan terkait pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) utamanya terkait karantina, dan akan mengubah sejumlah persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN). Adapun perkembangan kasus covid-19 dan vaksinasi di Indonesia hingga maret

2022 serta perkembangan di dunia disajikan pada gambar dibawah ini:



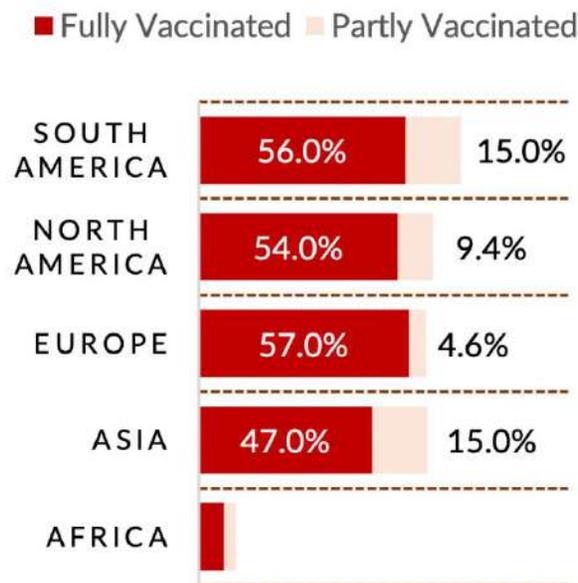
Vaksin Ke-1	Vaksin Ke-2	Vaksin Ke-3
196.534.266	159.325.260	22.215.377

Gambar 4.4 Perkembangan Covid-19 dan Vaksinasi di Indonesia
Sumber: Kemenkes 2022



Gambar 4.5 Jumlah Kasus COVID-19 harian berdasarkan Benua, 29 November 2021

Sumber: Johns Hopkins University CSSE



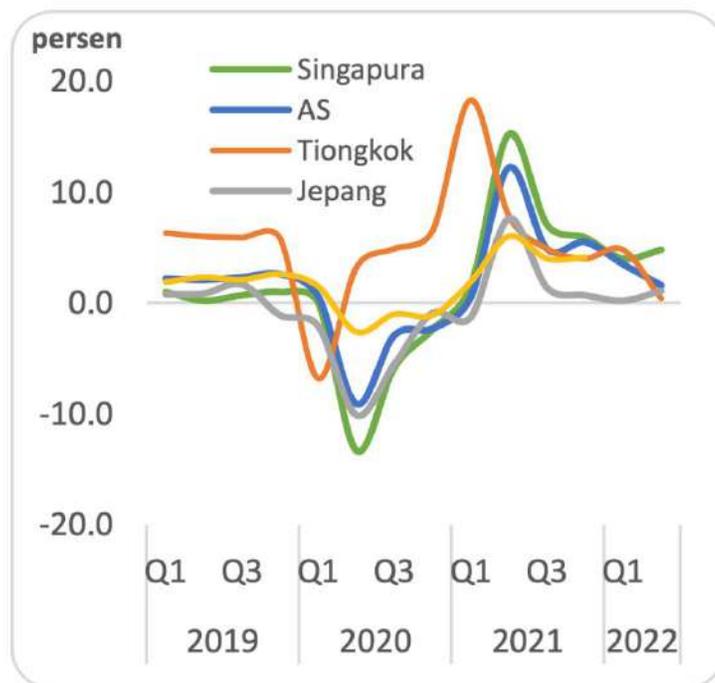
Gambar 4.6 Tingkat vaksinasi COVID-19 per 21 Nov 2021

Sumber: Our World in Data

Pandemi yang berjalan lebih dari dua tahun, ditangani dengan cukup baik oleh berbagai negara. Namun, ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, dihadapkan dengan guncangan akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina tidak hanya memicu bencana kemanusiaan tetapi juga mengakibatkan perlambatan ekonomi regional serta dampak negatif global yang substansial. Sejak awal triwulan II tahun 2022, negara-negara maju telah memberlakukan sanksi keuangan tambahan terhadap Rusia. Ditengah lonjakan harga komoditas dan gangguan rantai pasok, inflasi yang merebak secara global memberikan situasi sulit bagi para pembuat kebijakan antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan tekanan harga yang semakin kuat.

Ekonomi Amerika Serikat melambat pada laju 1,6 persen (YoY) dibandingkan pertumbuhan 3,5 persen (YoY) pada triwulan sebelumnya. Lemahnya pertumbuhan mencerminkan penurunan dalam investasi pergudangan, investasi perumahan, pengeluaran pemerintah pusat dan daerah, dan investasi usaha yang sebagiannya diimbangi oleh peningkatan ekspor dan pengeluaran konsumen. Perekonomian Tiongkok tumbuh 0,4 persen (YoY), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 4,8 persen (YoY) dan merupakan pertumbuhan terendah semenjak merebaknya pandemi pada triwulan I tahun 2020. Pemerintah Tiongkok menghadapi tantangan yang semakin besar untuk menjaga kestabilan pertumbuhan karena menghadapi perlambatan aktivitas yang tajam akibat kebijakan ketat zero-Covid di Beijing, tindakan keras regulasi terhadap sektor swasta, dan krisis real estat yang menyebabkan meningkatnya kredit macet bank dan meningkatnya protes sosial.

Perekonomian Jepang terakselerasi sebesar 1,1 persen (YoY). Berakhirnya pembatasan pandemi pada aktivitas bisnis pada akhir Maret membantu memacu perekonomian. Pertumbuhan ini ditopang oleh belanja konsumen yang menyumbang lebih dari setengah output ekonomi Jepang, serta belanja modal. Pelonggaran aturan Covid mengakibatkan peningkatan pengeluaran di komponen restoran dan hotel, serta pengeluaran untuk pakaian. Ekonomi Korea Selatan tumbuh 2,9 persen (YoY) didukung oleh menguatnya konsumsi seiring dengan pelonggaran pembatasan. Pertumbuhan ini sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,0 persen (YoY). Ekonomi Singapura tumbuh 4,8 persen (YoY), terakselerasi dari triwulan sebelumnya. Namun, laju pertumbuhan tersebut masih berada dibawah prakiraan 5,2 persen. Sektor manufaktur mengalami pertumbuhan 8,0 persen (YoY) meningkat tipis dari pertumbuhan triwulan I tahun 2022. Adapun perbandingan pertumbuhan ekonomi beberapa negara disajikan pada gambar berikut:



Gambar 4.7 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara

Sumber: CEIC

Perekonomian global tahun 2022 diproyeksi melanjutkan perlambatan, yang dilanjutkan perlambatan pada tahun berikutnya. Proyeksi pada bulan Juli 2022 dirilis International Monetary Foundation (IMF). Perekonomian global pada tahun 2022 secara menyeluruh diestimasi tumbuh melambat 3,2 persen, dibandingkan proyeksi sebelumnya yang sebesar 3,6 persen. Perlambatan proyeksi pertumbuhan bersumber dari penurunan proyeksi untuk Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Perlambatan perekonomian negara-negara itu disebabkan karena diterapkannya perpanjangan lockdown di Tiongkok, pengetatan kondisi keuangan global terkait ekspektasi peningkatan tajam suku bunga oleh bank sentral untuk mengurangi inflasi, serta dampak dari perang di Ukraina. Perekonomian Amerika Serikat diproyeksi mengalami penurunan tajam untuk tahun 2022 dari 3,7 persen menjadi 2,3 persen. Selanjutnya pada 2023 menurun kembali menjadi 1,0 persen. Penurunan tajam untuk proyeksi tersebut dipengaruhi oleh konsumsi swasta yang jauh lebih sedikit, sebagian mencerminkan tergerusnya daya beli rumah tangga yang tergerus, serta dampak dari pengetatan tajam kebijakan moneter. Adapun proyeksi

pertumbuhan ekonomi negara-negara maju dan berkembang dari IMF disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Proyeksi Pertumbuhan Beberapa Negara

Kawasan	2022	2023
Negara Maju		
Amerika Serikat	2,3	1,0
Kawasan Eropa	2,6	1,2
Jerman	1,2	0,8
Inggris	3,2	0,5
Jepang	1,7	1,7
Rusia	-6,0	-3,5
Negara Berkembang		
Tiongkok	3,3	4,6
India	7,4	6,1
ASEAN-5	5,3	5,1
Brazil	1,7	1,1
Meksiko	2,4	1,2
Afrika Selatan	2,3	1,4
Global	3,2	2,9

Sumber: IMF, World Economic Outlook, Juli 2022

Proyeksi perekonomian Kawasan Eropa tahun 2022 kembali diturunkan dari 2,8 persen menjadi 2,6 persen. Penurunan signifikan terjadi pada Perancis, Jerman, dan Spanyol, namun diimbangi peningkatan pada Italia yang didorong oleh prospek pariwisata dan aktivitas industri Italia yang baik. Tahun 2023 kembali diproyeksi turun menjadi 1,2 persen. Hal ini mencerminkan dampak dari perang Ukraina serta asumsi ketatnya kondisi keuangan dengan Bank Sentral Eropa mengakhiri pembelian aset bersih dan menaikkan suku bunga pada Juli 2022 untuk pertama kalinya sejak tahun 2011. Pada beberapa perekonomian eropa, dana NextGenerationEU mendukung kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok juga diproyeksi menurun signifikan dari 4,4 persen menjadi 3,3 persen. Penurunan pertumbuhan disebabkan utamanya karena wabah Covid-19 dan akibat lockdown yang diterapkan. Penurunan proyeksi ini merupakan pertumbuhan terendah dalam lebih dari empat dekade, dimana empat dekade tersebut tidak termasuk krisis Covid-19 pada awal tahun 2020. Sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi India tahun 2022 menurun menjadi 7,4 persen. Revisi proyeksi tersebut mencerminkan kondisi eksternal yang mayoritas kurang menguntungkan, dan percepatan kebijakan yang ketat.

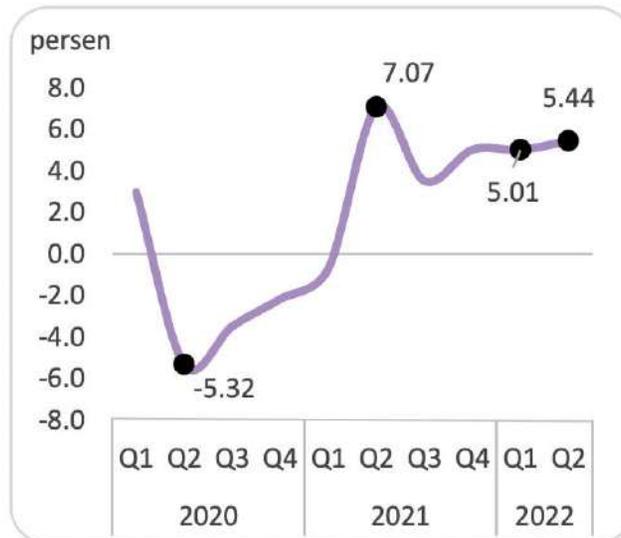
Di sisi lain, revisi pertumbuhan pada baseline, mayoritas berada pada sisi atas. Proyeksi pertumbuhan ekonomi negara berkembang Eropa pada 2022 masih berkontraksi 1,4 persen namun naik sebesar 1,5 persen poin dari proyeksi sebelumnya. Sementara untuk tahun 2023 proyeksi turun 0,4 poin menjadi 0,9 persen, pertumbuhan proyeksi ini didorong oleh pertumbuhan ekspor Rusia yang lebih kuat dan sanksi tambahan yang diumumkan terhadap Rusia baru-baru ini.

Berdasarkan proyeksi Bank Dunia yang dirilis bulan April 2022 sebagian besar harga komoditas diproyeksi akan mengalami peningkatan signifikan, khususnya untuk komoditas dimana Rusia dan Ukraina menjadi eksportir utama. Perang di Ukraina telah menyebabkan gangguan pasokan, sehingga harga sejumlah komoditas lebih tinggi secara historis. Komoditas tersebut meliputi komoditas energi dan non-energi. Sementara tekanan harga diperkirakan akan mereda pada tahun 2023, harga komoditas akan tetap jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya. Perang juga berdampak pada harga komoditas pertanian yang diproyeksi akan melanjutkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, harga komoditas pertanian diprediksi akan meningkat sebesar 18,0 persen. Gangguan ekspor dari Ukraina akan sangat berpengaruh pada produksi pertanian tahun 2022. Sementara di Rusia, kurangnya akses pada input pertanian seperti benih dan mesin pertanian, dapat mengurangi produksi pertanian. Indeks harga pertanian tahun 2022 diproyeksi mengalami peningkatan harga yang signifikan pada komoditas gandum dan jagung.

Dampak perang mempengaruhi ekspor gandum Ukraina ke beberapa negara pengimpor, terutama di Timur Tengah dan Afrika Utara termasuk Mesir dan Lebanon. Akibatnya beberapa negara telah mengumumkan langkah kebijakan perdagangan yang mengurangi bahkan melarang ekspor gandum. Hal ini merupakan pemicu pelonjakan harga gandum, karena ekspor dari Ukraina merupakan penyumbang hampir 10,0 persen dari ekspor global. Proyeksi harga jagung rata-rata mengalami peningkatan 20,0 persen pada tahun 2022. Hal ini disebabkan ketidakpastian di pasar biji-bijian global akibat perang di Ukraina, dimana Ukraina menyumbang sebesar 3,5 persen dari produksi jagung global.

Dinamika yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi dunia juga berdampak pada situasi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi yakni sebesar 5,4 persen (YoY). Kondisi ini menunjukkan berlanjutnya

pemulihan ekonomi Indonesia dan semakin menguat, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat karena pelonggaran syarat perjalanan. Produk Domestik Bruto riil pada triwulan II tahun 2022 mencapai Rp2.923,7 triliun. Trend pertumbuhan ekonomi Indonesia disajikan pada gambar berikut:



Gambar 4.8 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik

Indonesia diperkirakan mampu melanjutkan pemulihan ekonomi, di tengah risiko stagflasi global yang dipicu oleh tekanan inflasi global dan perlambatan ekonomi beberapa negara. Indikator makro ekonomi hingga triwulan II tahun 2022 mampu bertahan dan mengalami perbaikan, di tengah adanya tekanan inflasi global serta perlambatan ekonomi negara mitra dagang Indonesia. Indikator konsumsi seperti penjualan ritel, Indeks Keyakinan Konsumen, dan jumlah penumpang moda transportasi mampu terakselerasi sejalan dengan adanya momentum Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Hampir semua indikator investasi (realisasi investasi PMA dan PMDN, impor barang modal, impor barang baku dan PMI Manufaktur) juga menunjukkan peningkatan, kecuali belanja modal pemerintah yang masih berkontraksi.

Meskipun kondisi perekonomian domestik mengalami penguatan, gejala kondisi perekonomian global tidak dapat dihindari dan Indonesia harus mewaspadaai risiko dan dampak yang ditimbulkan seperti ketegangan geopolitik yang masih meningkat, pengetatan kebijakan moneter global, dan kenaikan harga komoditas. Tekanan inflasi terus mengalami peningkatan terutama terkait dengan harga komoditas dan pangan global. Kenaikan harga komoditas dan ketegangan geopolitik telah memangkas prospek pertumbuhan ekonomi global. Banyak negara telah menunjukkan perkembangan ekonomi yang melambat dan tekanan inflasi yang terus meningkat sehingga mengindikasikan

bahwa semakin kuat dan dekat pada risiko stagflasi. Namun, kondisi ekonomi global yang suram tersebut tidak terlihat pada kondisi perekonomian domestik. Fenomena windfall yang berasal dari lonjakan harga komoditas memungkinkan pemerintah untuk memperluas stimulus fiskal yang bertujuan untuk menunda kenaikan inflasi secara sementara dengan tetap fokus utama pada proses pemulihan. Dengan demikian, kegiatan konsumsi dan produksi akan tetap berjalan dengan baik dan stabil. Sehingga PDB diperkirakan akan tumbuh secara kuat dan on track pada kisaran 5,0 – 5,5 persen pada tahun 2022.

Dari sisi pengeluaran, semakin terkendalinya pandemi Covid-19 serta capaian vaksinasi domestik yang tinggi menjadi kunci dari peningkatan mobilitas masyarakat yang mendorong berjalannya aktivitas perekonomian. Kebijakan pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat ini diperkirakan terus berlanjut dan dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Meskipun demikian, inflasi yang terus meningkat persisten dan telah berada di atas target Bank Indonesia (2,0- 4,0) persen sejak Juni berpotensi menurunkan daya beli masyarakat jika tidak segera dikendalikan. Investasi diperkirakan tumbuh positif didorong oleh realisasi PMA dan PMDN yang tinggi. Ekspor dan impor diperkirakan tetap mampu tumbuh tinggi, didorong oleh kenaikan harga komoditas ekspor utama Indonesia. Adapun konsumsi pemerintah diperkirakan berkontraksi, seiring dengan situasi Covid-19 yang semakin terkendali yang memicu penurunan belanja barang dan belanja bantuan sosial. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh sejumlah sektor yang diperkirakan mampu tumbuh tinggi, seperti industri pengolahan, perdagangan serta transportasi dan pergudangan.

Kabupaten Pasuruan juga terpengaruh situasi perekonomian yang terjadi di nasional akibat pandemic covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2016 hingga 2019 terus mengalami kenaikan dan selalu diatas angka pertumbuhan Nasional dan Provinsi meskipun pada tahun 2020 terjadi kontraksi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan diatas 5. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan sebesar 5,44, naik menjadi 5,72 ditahun 2017, 5,73 di tahun 2018 dan paling tinggi 5,83 ditahun 2019. Tahun 2020 ketika terjadi pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan mengalami kontraksi sampai minus 2,03. Tahun 2021 momen untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan bisa tumbuh positif menjadi 4,34 diatas pertumbuhan Nasional dan Provinsi. Struktur perekonomian Kabupaten Pasuruan sementara berdasarkan

PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2021 menunjukkan adanya kontribusi dari lima lapangan usaha terbesar. Dinamika pertumbuhan ekonomi perlu menjadi perhatian dalam Menyusun rencana pembangunan daerah agar dapat mengantisipasi potensi dampak-dampak yang terjadi dan Menyusun strategy yang efektif di Kabupaten Pasuruan.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

4.2.2.1 Visi Indonesia 2045

Pembangunan Indonesia dilaksanakan secara menyeluruh dan berencana sejak tahun 1967 dengan prioritas pada bidang ekonomi. Pertumbuhan penduduk berhasil dikendalikan serta swasembada beras tercapai pada tahun 1984. Ekonomi Indonesia tumbuh tinggi sekitar 6,8 persen per tahun (periode 1968 – 1997). Indonesia menjadi negara industri meskipun masih pada tahap awal. Jumlah penduduk miskin yang pada awal 1970an mencapai 70 persen berhasil diturunkan menjadi sekitar 11 persen pada tahun 1996. Demokrasi dan desentralisasi menjadi bagian penting pembangunan pada era reformasi pasca krisis ekonomi 1997/98. Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7 persen per tahun (periode 2004-2014), meski krisis keuangan dan resesi global terjadi pada tahun 2008/09. Perekonomian Indonesia yang pada tahun 2003 berada di urutan 23 meningkat menjadi urutan 16 terbesar dunia pada tahun 2011.

Untuk mempercepat perwujudan Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo mengagas “Impian Indonesia 2015-2085”, yaitu: (1) Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsabangsa lain di dunia; (2) Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika; (3) Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia; (4) Masyarakat dan aparatur Pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi; (5) Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia; (6) Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik; dan (7) Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Dalam mewujudkan impian tersebut disusun Visi Indonesia Tahun 2045 dengan 4 (empat) pilar, yaitu: (1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, (3) Pemerataan Pembangunan, serta (4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan. Keempat pilar tersebut dibangun di atas Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar berbangsa bernegara dan konstitusi, dengan tujuan

untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berbagai kondisi yang diprediksi terjadi pada tahun 2045 diantaranya yaitu:

1) Demografi Global

Pada tahun 2045, penduduk dunia diperkirakan 9,45 miliar, bertambah 2,1 miliar dari tahun 2015. Lebih dari separuh pertumbuhan penduduk dunia disumbang oleh kawasan Afrika. Penduduk Asia masih terbesar (55 persen). Tren demografi global mendorong urbanisasi, arus migrasi, dan penduduk usia lanjut.

2) Urbanisasi Dunia

Penduduk dunia di perkotaan diperkirakan meningkat menjadi 65 persen (2045) dengan 95 persen penambahan terjadi di emerging economies. Pembangunan perkotaan berperan meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat.

3) Peranan Emerging Economies

Output negara berkembang tahun 2050 diperkirakan mencapai 71 persen dari total output dunia dengan Asia sebagai pendorong utama—mencapai 54 persen. Investasi SDM dan infrastruktur serta reformasi struktural dan iklim usaha mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berdaya saing, dan berkesinambungan.

4) Perdagangan Internasional

Sampai tahun 2045, perdagangan global diperkirakan tumbuh 3,4 persen per tahun. Negara berkembang menjadi poros perdagangan dan investasi dunia dengan pertumbuhan 6 persen per tahun. Perdagangan intra Asia meningkat dan investasi asing langsung ke dan antar negara berkembang berlanjut.

5) Keuangan Internasional

Dominasi mata uang dunia bergeser dari dolar AS menjadi multi currencies. Aset keuangan emerging economies tahun 2050

diperkirakan melebihi negara maju. Cina berkembang sebagai salah satu sumber keuangan bagi pembangunan mendatang.

6) Perubahan Geopolitik

Perubahan geopolitik terus berlanjut ke depan dengan meningkatnya peranan Cina, kerentanan di Kawasan Timur Tengah, serta meningkatnya kelas baru dan kelompok penentu.

7) Perubahan Iklim

Tantangan pemanasan global semakin besar, baik berupa kejadian ekstrim maupun perubahan iklim jangka panjang. Tanpa usaha menurunkan emisi, rata-rata suhu global akan meningkat 3 – 3,5 derajat celsius pada akhir abad ini.

8) Teknologi

Tren perubahan teknologi ke depan akan didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi, bioteknologi dan rekayasa genetik, kesehatan dan pengobatan, energi terbarukan, wearable devices, otomatisasi dan robotik, serta artificial intelligence.

9) Persaingan Sumber Daya Alam

Meningkatnya peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan sumber daya alam (SDA). Ketersediaan SDA diperkirakan tidak mampu memenuhi kebutuhan permintaan yang meningkat meskipun teknologi akan meningkatkan efisiensi SDA.

10) Kelas Menengah

Pada tahun 2050, jumlah middle dan upper income class diperkirakan lebih dari 84 persen atau sekitar 8,1 miliar orang. Asia dan Amerika Latin akan memiliki jumlah middle dan upper income class terbesar.

Adapun pilar pembangunan Indonesia 2045 yaitu:

1. PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGUASAAN IPTEK

Kualitas manusia Indonesia meningkat dengan pendidikan yang semakin tinggi dan merata; kebudayaan yang kuat; derajat kesehatan, usia harapan hidup, dan kualitas hidup yang semakin baik; produktivitas yang tinggi; serta kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas. Ruanglingkup pembangunan pada pilar pertama meliputi:

- a) Percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata
- b) Peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan

- c) Peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan
- d) Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat
- e) Reformasi ketenagakerjaan

2. PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN

Ruanglingkup pembangunan pada pilar kedua meliputi:

- a) Peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri
- b) Percepatan industri dan pariwisata
- c) Pembangunan ekonomi maritim
- d) Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani
- e) Pemantapan ketahanan energi dan air
- f) Komitmen terhadap lingkungan hidup

3. PEMERATAAN PEMBANGUNAN

Ruanglingkup pembangunan pada pilar ketiga meliputi:

- a) Percepatan pengentasan kemiskinan
- b) Pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan
- c) Pemerataan pembangunan wilayah
- d) Pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi

4. PEMANTAPAN KETAHANAN NASIONAL DAN TATA KELOLA KEPEREMINTAHAN

Ruanglingkup pembangunan pada pilar keempat meliputi:

- a) Demokrasi substantif
- b) Reformasi kelembagaan dan birokrasi
- c) Penguatan sistem hukum nasional dan antikorupsi
- d) Politik luar negeri bebas aktif
- e) Penguatan ketahanan dan keamanan

Dalam periode 2016 – 2045, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,7 persen per tahun dengan terus melakukan reformasi struktural, memanfaatkan bonus demografi dan kemajuan teknologi, serta meningkatkan daya saing ekonomi. Indonesia diperkirakan menjadi negara pendapatan tinggi pada tahun 2036 dan PDB terbesar ke-5 pada tahun 2045. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif akan meningkatkan jumlah kelas pendapatan menengah menjadi sekitar 70 persen penduduk Indonesia pada tahun 2045.

Dalam periode 2010-2045, jumlah penduduk Indonesia usia produktif besar. Rasio ketergantungan (dependency ratio) mencapai tingkat terendah

sekitar tahun 2022. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 mencapai 319 juta. Dalam jangka panjang, *Total Fertility Rate* (TFR) dijaga pada tingkat 2,1 agar penduduk dapat tumbuh seimbang. Pertumbuhan penduduk mendorong urbanisasi dan tumbuhnya kota kecil dan sedang di seluruh Indonesia. Kota-kota besar dan daerah peri urban akan membentuk mega urban. Pada tahun 2045, masyarakat yang tinggal di perkotaan menjadi 72,8 persen. Pada tahun 2035 hampir 90% penduduk Jawa tinggal di perkotaan. Konsentrasi penduduk perkotaan di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten mencapai 76 juta orang. Daya dukung Jawa terutama Jakarta yang semakin turun memerlukan pemindahan pusat pemerintahan ke luar Jawa. Jakarta tetap berkembang sebagai pusat bisnis dan keuangan.

Teknologi berkembang semakin cepat dan membawa perubahan pada semua bidang pembangunan dan kehidupan masyarakat. Tren teknologi ke depan: teknologi digital (internet seluler, otomatisasi, dan cloud technology), teknologi yang mengurangi keterbatasan fisik dan jarak (IoT, transportasi dan distribusi, additive manufacturing/3D printing, dan nano technology), teknologi energi terbarukan (surya, angin, nuklir, biomas, dan geothermal), dan teknologi kesehatan (genetika, pengobatan dan pemulihan, serta pelayanan kesehatan). Disamping meningkatkan efisiensi dan kesempatan baru, kemajuan teknologi berdampak pada kebutuhan tenaga kerja. Pekerjaan yang sifatnya rutin, manual, dan kognitif akan berkurang. Indonesia akan memanfaatkan kemajuan teknologi bagi pembangunan dengan meminimalkan disrupsi. Beberapa perkembangan teknologi ke depan: perdagangan elektronik mengubah perdagangan konvensional menjadi elektronik; industri 4.0 mengintegrasikan proses produksi secara virtual berbasis siber dan artificial intelligence; blockchain, perpaduan AI, big data, dan IoT, mampu melakukan verifikasi transaksi keuangan real-time, sehingga tidak diperlukan lagi pihak ketiga; dan rekayasa genetika meningkatkan kualitas hidup.

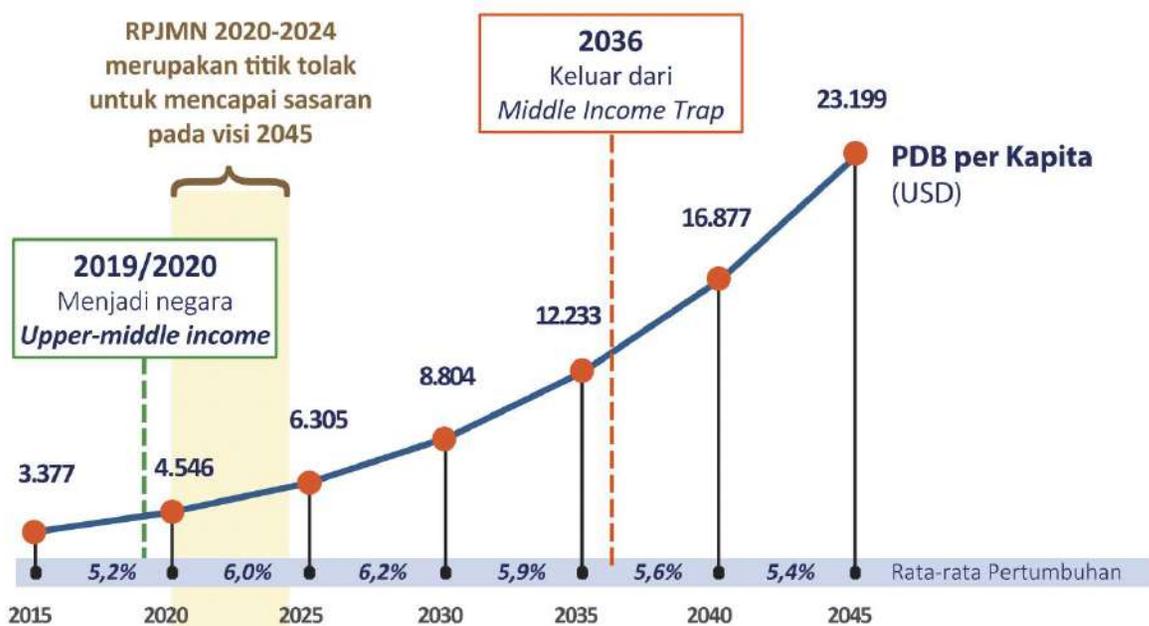
4.2.2.2 RPJMN 2020-2024

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Visi dan Misi RPJMN 2020-2024 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 4.9 Visi dan Misi RPJMN 2020-2024

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Target Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 4.10 Target Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut meliputi:

1) Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2) Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3) Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4) Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

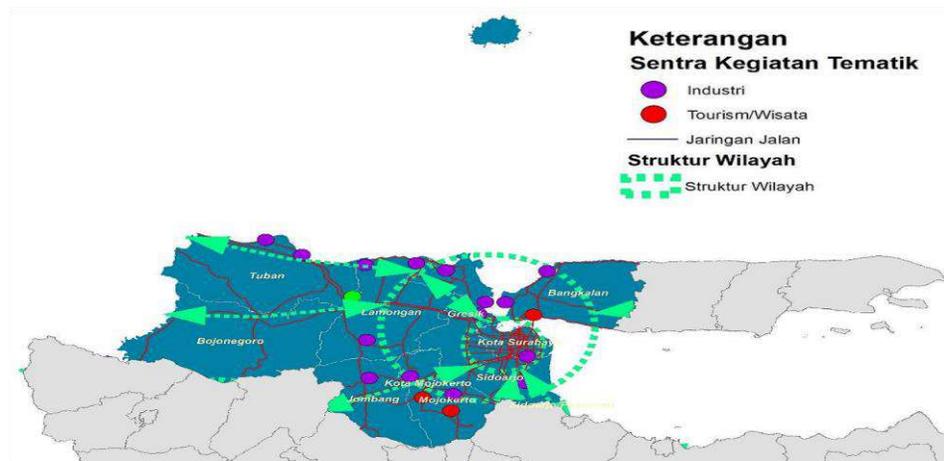
5) Transformasi Ekonomi.

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4.2.2.3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya -Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

Regulasi ini menjadi faktor pendorong strategis bagi percepatan pembangunan Jawa Timur yang meliputi beberapa wilayah pengembangan. Secara umum dua Kawasan penting yang terkait dengan pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur adalah Kawasan prioritas gerbangkertosusila. Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila merupakan bentuk wilayah dari segi nodalitas (titik) dimana wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara kawasan pusat (inti) dan kawasan penyangganya (hinterland). Kawasan

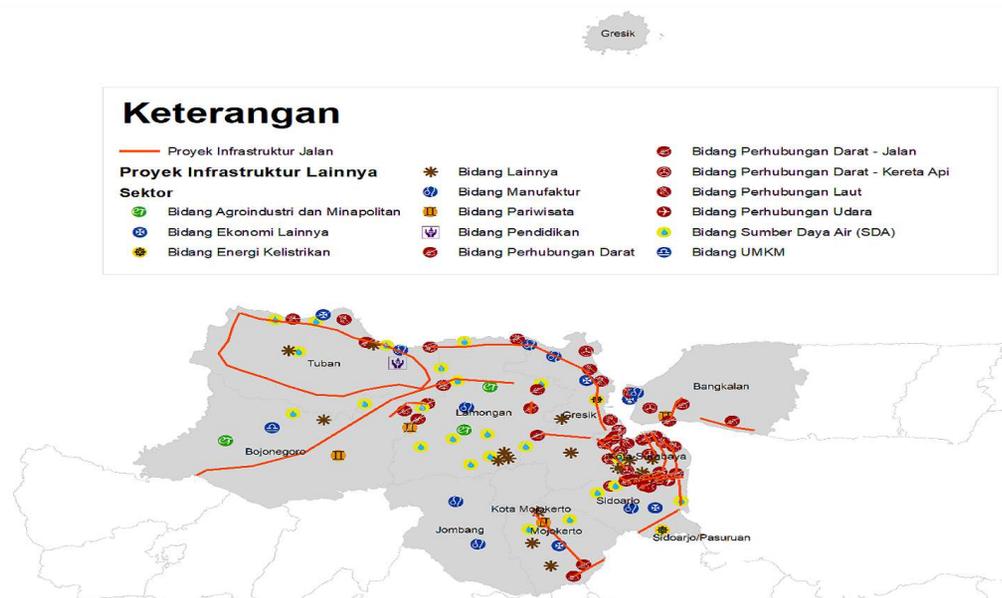
Prioritas Gerbangkertosusila terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto dan Kota Surabaya. Luas Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila yang terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota adalah sekitar 10.841,99 km² dengan luas Kabupaten/Kota yang tertinggi berada di Kabupaten Bojonegoro, dan terendah di Kota Mojokerto.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2019 dan Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2018

Gambar 4.11 Peta Kawasan prioritas Gerbangkertosusila

Guna mendukung konektivitas antar wilayah di lingkup Gerbangkertosusila dan sekitarnya, diperlukan proyek pembangunan transportasi public (Surabaya Regional railways Line) sebesar Rp. 8.304 Miliar yang bersumber dari Kerjasama pemerintah dengan Badan usaha (KBPU). Beberapa daerah yang terkait yaitu kabupaten Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, kota dan Kabupaten Mojokerto. Kebijakan, program / kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka percepatan Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila dalam kegiatan pengembangan infrastruktur yang dapat dilakukan seperti Transportasi Publik di Gerbangkertosusila, Pembangunan Jalan Tol Ngawi – Bojonegoro – Tuban – Lamongan – Manyar – Bunder, Pengembangan jalan tol Bandara Juanda – Tanjung Perak (SERR), Pengendalian Banjir Kali Lamong, Pengembangan Bandara Internasional Juanda (Terminal 3), Pembangunan PLTSa di Kabupaten Sidoarjo.



Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2019

Gambar 4.12 Peta Lokasi Program di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila

Prioritas utama pemicu percepatan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila adalah terbangunnya Klaster Migas dan Kondensat terutama dengan berdirinya Refinery Kilang Minyak dan Petrochemical di Tuban. Sebelumnya telah berdiri Oil Tank Terminal di Kabupaten Lamongan dan TTPI di Kabupaten Tuban. Dengan terbangunnya Industrialisasi Migas dan kondensat serta petrokimia tersebut, akan memicu berdirinya Kawasan-Kawasan Industri baik yang sudah dalam bentuk kawasan (dikelola oleh Pengembang Industrial Estate), maupun rencana-rencana kawasan industri baru yang terdaftar di Kementerian Perindustrian.

Selain pengembangan kawasan Gerbangkertosusila, dalam Perpres tersebut juga memuat tentang rencana pengembangan Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru dan Kawasan Pendukung Selingkar Ijen. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu wilayah prioritas dalam pengembangan kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS), bersama Kabupaten Probolinggi, Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Pembangunan pada kawasan BTS diprioritaskan pada kegiatan pariwisata, yang didukung dengan pengembangan desa wisata, pusat produksi pertanian, pengembangan agropolitan dan minapolitan. Guna pengembangan tersebut akan didukung dengan penyediaan infrastruktur transportasi, sarana prasarana pendukung permukiman, pengembangan sanitasi dan air bersih.

Program pengembangan agropolitan dan minapolitan di kawasan BTS (khususnya wilayah Kabupaten Pasuruan) memiliki beberapa sasaran kegiatan yaitu:

1. Pengembangan Kawasan Wisata Budaya Tengger di Kecamatan Tosari;
2. Pengembangan Agropolitan Tosari- Tukur-Puspo- Purwosari;
3. Pengembangan Agropolitan Wonosari – Andonosari;
4. Penataan dan pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Pasuruan; dan
5. Penataan dan pengembangan Wisata Edukasi Peternakan Purwosari dan Penataan Kawasan Pusat Pelayanan Peternakan (UPA) Kabupaten Pasuruan.

Mengacu pada uraian di atas, keberadaan Perpres 80 tahun 2019 akan menjadi bagian penting dalam percepatan pembangunan daerah maupun regional Jawa Timur.

4.2.3 Isu Regional dan Daerah

4.2.3.1 Isu Regional Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 dan kondisi aktual yang ada, dapat diidentifikasi isu-isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Perlunya peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
2. Percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal;
3. Pemenuhan sarana prasarana pelayanan dasar publik pendukung pertumbuhan wilayah;
4. Pemenuhan kebutuhan sosial dasar khususnya peningkatan lapangan kerja, penanganan stunting dan penanggulangan kemiskinan ekstrem;
5. Penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
6. Peningkatan kapasitas terhadap mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

4.2.3.2 Isu Strategis Kabupaten Pasuruan

Dari hasil analisa isu actual dan isu strategis global, nasional dan regional, serta hasil capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada 5 (lima) tahun ke belakang, permasalahan pembangunan yang dihadapi, serta isu-isu aktual yang ada, dapat ditetapkan isu strategis pembangunan Kabupaten Pasuruan yang harus ditangani pada tahun-tahun mendatang antara lain :

1. *Peningkatan kualitas sumber daya manusia*

Indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Pasuruan masih tergolong rendah karena berada di bawah rata-rata Jawa Timur. Oleh karena itu

dalam rangka meningkatkan daya saing dan IPM Kabupaten Pasuruan, kualitas SDM masyarakat harus ditingkatkan.

2. *Penanganan kemiskinan dan pengangguran*

Dilaksanakan dalam rangka menekan angka kemiskinan (khususnya angka kemiskinan ekstrem) dan angka pengangguran di wilayah Kabupaten Pasuruan.

3. *Peningkatan kualitas lingkungan hidup*

Dilaksanakan guna mencegah terjadinya degradasi lingkungan, meningkatkan kesehatan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

4. *Percepatan pemulihan, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi*

Dampak pandemi Covid-19 maupun kenaikan harga BBM sangat berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan kesenjangan wilayah, guna menanggulangi hal tersebut dibutuhkan percepatan pemulihan dan pertumbuhan, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Pasuruan.

5. *Peningkatan derajat kesehatan masyarakat* dalam upaya penurunan angka prevalensi stunting, penurunan angka penyakit menular dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

6. *Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan*

Hal ini harus dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

7. *Peningkatan keanekaragaman pangan* dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada bahan pangan beras;

8. Penetapan *lahan pangan berkelanjutan* sebagai upaya menjaga stok kebutuhan pangan di wilayah Kabupaten Pasuruan.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Analisis Keselarasan antar Dokumen Perencanaan

5.1.1 Analisis Dokumen RPJPN Tahun 2005 – 2025

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan ‘INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR’. RPJPN Tahun 2005 – 2025 dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan. Sesuai dengan tahapan yang ditetapkan pembangunan dalam RPJMN tahap ke-4 (2020-2025) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

5.1.2 Analisis Dokumen RPJMN Tahun 2020 – 2024

Substansi dari visi, misi, arahan Presiden dan tujuh agenda pembangunan nasional tahun 2020 – 2024, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 adalah :

1. Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
2. Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
3. Matriks Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024;
4. Arah Pembangunan Wilayah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.

Visi, Misi, arahan Presiden dan Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dalam gambar..... di bawah ini. Hal-hal yang tertuang dalam arahan Presiden dan tujuh agenda pembangunan nasional, harus menjadi acuan dalam penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

5.1.3 Analisis Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024

Dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, tertuang tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur. Dimana tujuan dan sasaran ini akan dapat tercapai jika didukung oleh kinerja Kabupaten dan Kota. Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan P-RPJMD Tahun 2019 – 2024 adalah:

Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

No	TUJUAN	SASARAN	
1.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah	1.	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan.
		2.	Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan.
		3.	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Pertambangan dan Penggalian.
		4.	Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Produk Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
		5.	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal.
		6.	Meningkatnya Nilai Tambah KUMKM
		7.	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata
		8.	Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Ketenagalistrikan.
		9.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber daya Air.
		10.	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara.
2.	Menurunnya Angka Kemiskinan	1.	Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan
		2.	Meningkatnya Kemandirian PMKS
3.	Meningkatnya Kesetaraan Gender	1.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
4.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar	1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
5.	Menurunnya Pengangguran	1.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Masyarakat
6.	Terwujudnya Pemerintahan yang Baik	1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel.
		2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah.

No	TUJUAN	SASARAN	
		3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah.
		4.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
7.	Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat	1.	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat.
		2.	Meningkatnya Kepedulian Sosial.
		3.	Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal.
8.	Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan	1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
		2.	Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana.

Sedangkan strategi umum pembangunan yang digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan adalah:

1. Penegasan nilai-nilai luhur budaya dan keagamaan sebagai perspektif dan spirit dalam pembangunan;
2. Pembangunan berkelanjutan yang inklusif bertujuan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, penyiapan Jawa Timur untuk menghadapi disrupsi ekonomi maupun ketidakpastian masa depan;
3. Pemenuhan hak dan ruang kepada perempuan (pengarusutamaan gender), perlindungan anak dan kelompok rentan dalam berpartisipasi pada proses pembangunan;
4. Memperluas akses dan kesempatan kepada warga untuk memperoleh apa yang dianggap bermakna bagi dirinya;
5. Pembangunan berbasis kawasan yang sensitive terhadap potensi serta problem khas wilayah untuk memastikan setiap wilayah dengan konteks persoalan yang berbeda-beda dapat tumbuh kembang bersama; dan
6. Percepatan pembangunan melalui inovasi di segala bidang berbasis *information communication technology*.

5.1.4 Analisis Dokumen RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 – 2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 2 tahun 2008. Adapun visi jangka Panjang Kabupaten Pasuruan tahun 2005-2025 adalah:

“Kabupaten Pasuruan yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri dan Sejahtera”

Kabupaten Pasuruan yang Agamis memiliki arti bahwa terwujudnya karakter warga Kabupaten Pasuruan yang Tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang bercirikan dengan watak dan perilaku masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, jujur, toleran, bergotong royong, dinamis, dan terbuka terhadap segala perubahan. Serta bertujuan memperkokoh budaya masyarakat yang tercermin pada peningkatan martabat, kepribadian dan jati diri masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Kabupaten Pasuruan yang berdaya saing memiliki arti bahwa setiap kegiatan ekonomi dan pemerintahan dapat dilakukan secara efisien. Dengan demikian setiap produk yang dihasilkan di Wilayah Kabupaten Pasuruan dapat bersaing dengan, baik pada level regional, nasional, bahkan internasional. Semua kegiatan yang dilakukan, baik pada tingkat pemerintahan atau swasta, dilakukan atas dasar efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi. Sedangkan setiap produk yang dihasilkan baik berupa barang maupun jasa, mempunyai daya saing yang tinggi sehingga produk dari Kabupaten Pasuruan bisa bersaing ditingkat local, regional, nasional dan internasional.

Kabupaten Pasuruan yang mandiri memiliki arti bahwa kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemandirian tercermin antara lain pada ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan maupun memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan, kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari sumberdaya local yang semakin kuat sehingga mengurangi ketergantungan sumberdaya dari daerah lain, serta kemampuan membangun jaringan Kerjasama untuk mendukung peningkatan kemampuan daerah.

Kabupaten Pasuruan yang sejahtera memiliki arti bahwa prinsip kesejahteraan harus menjadi landasan sekaligus tujuan utama dari pelaksanaan pembangunan diwilayah Kabupaten Pasuruan. Hal ini bermakna, setiap kegiatan dan produk yang dihasilkan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pasuruan harus bisa menciptakan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang sejahtera yaitu suatu masyarakat

yang secara materiil terpenuhi melalui pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat yang diikuti oleh pemerataan pendapatan yang lebih baik. Masyarakat yang sejahtera juga harus didukung oleh pemerintahan yang baik (good) dan bersih (Clean). Dengan kata lain nilai-nilai agama sudah menjiwai dengan seluruh aktivitas pemerintah dan masyarakat.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005-2025 dijabarkan pada rumusan misi RPJPD yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah memantapkan jati diri masyarakat, mengutamakan kejujuran, membangun solidaritas dan kesetiakawanan social, mempromosikan ketaatan terhadap peraturan (hukum), memelihara nilai luhur bangsa, dan memperkuat semangat kegotongroyongan dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan profesionalisme aparatur, serta melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif adalah mengupayakan terbentuknya pemerintahan yang demokratis, terwujudnya desentralisasi ekonomi, menjamin kebebasan media, memperkuat peran masyarakat sipil, dan mengarahkan setiap program pembangunan untuk kepentingan seluruh rakyat.
3. Mewujudkan daya saing dan kemandirian daerah adalah pembangunan berkelanjutan disegala bidang dengan mengoptimalkan pemanfaatan dan potensi daerah, pembangunan sumberdaya manusia, kelestarian dan keseimbangan lingkungan, pemerataan pembangunan dan Kerjasama dengan pihak lain, memperkuat infrastruktur ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan adalah mengembangkan potensi pertanian, memperkuat industry berbasis sector perdagangan, mempromosikan perdagangan dan investasi, mengembangkan pariwisata, kemitraan antar pelaku ekonomi, pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal, melibatkan seluruh masyarakat (partisipasi) dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan penduduk miskin.

5. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat adalah mengembangkan layanan kesehatan, akses pendidikan, pembangunan perumahan, memperkuat sistem jaminan sosial, meningkatkan upah tenaga kerja, dan menjamin keamanan masyarakat.

Berdasarkan rumusan visi dan misi RPJPD selanjutnya disusun arah pokok pembangunan sekaligus pentahapannya dalam mewujudkan visi dan misi jangka Panjang pada RPJPD. Beberapa pokok arah pembangunan jangka panjang pembangunan antara lain 1) Terwujudnya masyarakat yang bermoral, beretika dan berdaya; 2) Terwujudnya pemerintah Kabupaten Pasuruan yang baik dan bersih serta demokratis berlandaskan hukum ; 3) Terwujudnya daya saing masyarakat untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan; 4) Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan; 5) Terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang asri dan lestari. Pentahapan dalam RPJPD diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan jangka Panjang terdapat skala prioritas sehingga antara tahapan satu dengan lainnya saling melengkapi. Adapun pentahapan pembangunan jangka panjang pada RPJPD Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

1. Lima tahun pertama (2005-2010): Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pasuruan yang bermoral, beretika dan berdaya serta pemerintahan yang baik dan bersih serta demokratis;
2. Lima tahun kedua (2010-2015): Terwujudnya daya saing untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan;
3. Lima tahun ketiga (2015-2020): Terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Lima tahun keempat (2020-2025): Terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang asri dan Lestari.

5.1.5 Analisis Dokumen RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029

Sesuai dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pasuruan, maka Visi dari penataan ruang wilayah Kabupaten Pasuruan tahun 2009 – 2029 adalah “Terwujudnya Penataan Ruang yang mampu mendorong investasi produktif, lestari dan optimal secara berkeadilan bagi seluruh masyarakat”. Sedangkan Misi penataan ruang wilayah adalah:

1. Mengoptimalkan instrument-instrumen yang berada dalam sistem penataan ruang guna terwujudnya tujuan penataan ruang;
2. Mewujudkan struktur ruang yang berimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah

guna meningkatkan kemandirian masyarakat yang berdaya saing tinggi;

3. Mewujudkan pola ruang yang produktif guna menunjang produktifitas wilayah secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan program pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten guna mendukung manfaat ruang dan mensejahterakan masyarakat;
5. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi yang lebih produktif.

Dimensi waktu perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan tahun 2009 – 2029 dibagi dalam waktu 5 (lima) tahunan sebagai berikut :

1. Tahun Perencanaan Kesatu : Periode tahun 2010 – 2014
2. Tahun Perencanaan Kedua : Periode tahun 2015 – 2019
3. Tahun Perencanaan Ketiga : Periode tahun 2020 – 2024
4. Tahun Perencanaan Keempat : Periode tahun 2025 – 2026

Berdasarkan periodisasi perencanaan tata ruang, maka periode RPD tahun 2024 – 2026 termasuk dalam priode ketiga dan keempat.

Indikasi program yang tertuang dalam dokumen RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029, pada tahun perencanaan 2020 – 2024 dan 2025 – 2029, adalah :

1. Pengembangan agrowisata pada kawasan potensial (Kecamatan Prigen, Tosari, Tukur, Purwodadi, Puspo, Kejayan, Wonorejo dan Rejoso);
2. Pengembangan kawasan perdesaan berbasis agrowisata dan minapolitan (Kecamatan bangil, Kraton, Rejoso, Lekok dan Nguling).
3. Pengembangan produk unggulan perdesaan pada 18 (delapan belas) PPK;
4. Pengembangan kawasan lahan abadi pertanian tanaman pangan (Kecamatan Prigen, Sukorejo, Rembang, Pohjentrek, Gempol, Kraton, Lekok, Nguling, Winongan, Rejoso, Wonorejo, Kajayan, Purwodadi, Tukur, Puspo, Tosari, Beji, dan Lumbang);
5. Pengembangan kawasan perkotaan utama di Kabupaten Pasuruan (Kecamatan Bangil, Gempol, Pandaan);
6. Pengembangan jalan arteri primer (jalan lingkar perkotaan Bangil);
7. Pengembangan jalan strategis kabupaten (perkotaan Bangil);

8. Optimalisasi pelayanan dan pengembangan PPI (Kecamatan Lekok dan Nguling);
9. Penyediaan sistem regulasi perencanaan dan pengaturan ruang udara terkait prasarana telematika di Kabupaten Pasuruan.

5.2 Perumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

Kebijakan pemerintah terkait dengan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dituangkan dalam Undang Undang nomor 10 tahun 2016 memberikan implikasi pada penyusunan dokumen perencanaan. Pada tahun 2024 akan dilakukan pemelihan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil walikota yang kemudian akan ada beberapa Provinsi, Kabupaten atau Kota mengalami kekosongan jabatan kepala daerah. Menindaklanjuti atas kebijakan tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Kementerian Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022. Kabupaten Pasuruan termasuk salah satu Pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023. Sehingga sebagai dasar penyusunan perencanaan tahunan atau RKPD perlu Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

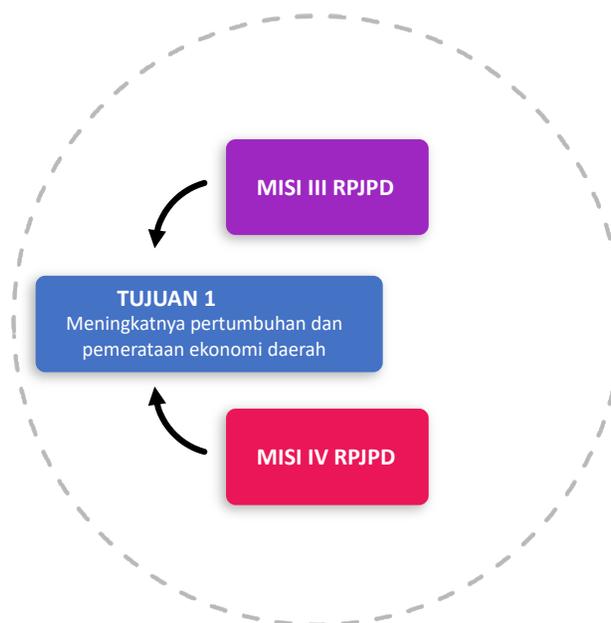
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen perencanaan yang disusun dalam rangka mengisi kekosongan Jabatan Kepala daerah. Pemerintah Daerah yang Kepala Daerahnya telah habis masa jabatannya akan menyusun RPD 2024-2026. Berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RPD tidak memiliki visi dan misi yang merupakan mandat politik dari Kepala Daerah terpilih yang sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Meskipun tidak terdapat visi dan misi sebagaimana yang diinstruksikan didalam Inmendagri 52 tahun 2022 pada BAB V RPD disusun Tujuan dan Sasaran. Rumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan pada a) visi misi RPJPD Kabupaten; b) Analisa sasaran pokok dan atau analisa kebijakan RPJPD Kabupaten tahap keempat; dan atau c) Isu strategis aktual.

Merujuk pada tahapan keempat RPJPD Kabupaten Pasuruan serta analisis permasalahan dan isu strategis daerah yang disajikan pada BAB

IV, maka dirumuskan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah (RPD) 2024-2026 Kabupaten Pasuruan Sebagai berikut:

5.2.1 TUJUAN 1: Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah

Tujuan 1 RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 selaras dengan misi yang ke 3 dan ke 4 RPJPD Kabupaten Pasuruan. Selain terkait dengan mandat pembangunan dalam RPJPD, meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah ditetapkan sebagai tujuan dari RPD juga merupakan jawaban atas dinamika perkembangan ekonomi Kabupaten Pasuruan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2016 hingga 2019 terus mengalami kenaikan dan selalu diatas angka pertumbuhan Nasional dan Provinsi meskipun pada tahun 2020 terjadi kontraksi. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 menduduki peringkat 11 dan hanya terpaut 0,77 dibandingkan dengan Kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Timur. Namun demikian jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten dan Kota di Wilayah Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.



Gambar 5.1 Keselarasan Penetapan Tujuan 1 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024-2026 dengan Misi pada RPJPD Kabupaten Pasuruan 2025-2025

Ukuran keberhasilan dari tujuan 1 diukur melalui 3 indikator kinerja yaitu 1) Pertumbuhan ekonomi; 2) Indeks Gini; dan 3) Indeks Wiliamson. Tujuan 1 kemudian dijabarkan kedalam sasaran RPD yang lebih mikro. Adapun sasaran RPD yang disusun dalam mendukung pencapaian tujuan yaitu:

- 1) Meningkatnya produksi sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah
- 2) Meningkatnya Iklim Investasi
- 3) Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah
- 4) Meningkatnya Kualitas Lingkungan

Adapun keselarasan (cascading) Tujuan 1 RPD Kabupaten Pasuruan 2024-2026 dari penetapan tujuan, indikator hingga jabarannya pada sasaran RPD beserta indikatornya disajikan pada gambar berikut:

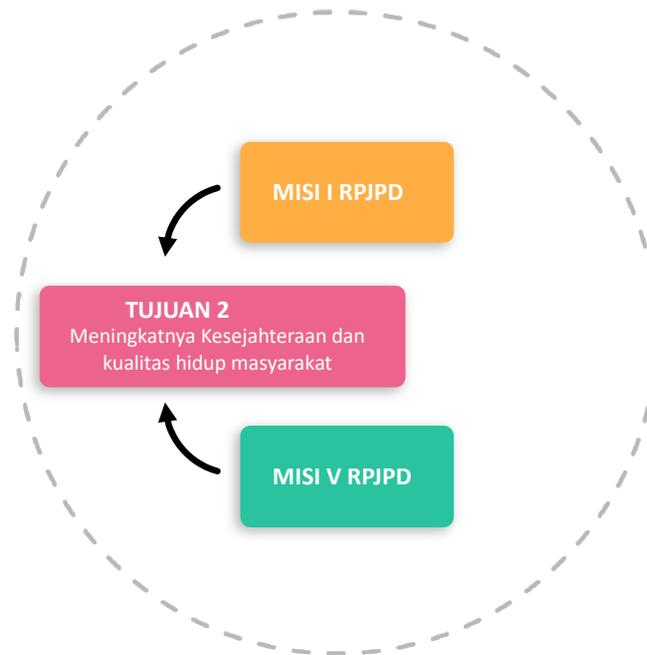


Gambar 5.2 Keselarasan (cascading) Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Pasuruan 2024-2025 beserta indikator kinerja

5.2.2 TUJUAN 2: Meningkatnya Kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat

Seperti halnya pada penetapan Tujuan 1 RPD, penetapan Tujuan 2 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024-2026 juga selaras dengan visi pada RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025. Tujuan 2 yang ditetapkan yaitu Meningkatnya Kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Tujuan ini juga sebagai upaya dalam menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Pasuruan. Tujuan ini melingkupi upaya penurunan kemiskinan, pembangunan manusia, penurunan tingkat pengangguran terbuka, hingga penguatan ketahanan pangan. Penurunan kemiskinan masih perlu terus diakselerasi dalam khususnya dalam mempercepat target dari Presiden dimana pada tahun 2024 agar kemiskinan ekstrim menjadi 0%. Pembangunan Manusia juga menjadi salah satu pencapaian pembangunan yang perlu dilakukan percepatan karena capaian pembangunan manusia Kabupaten Pasuruan masih dibawah nasional dan provinsi. Tujuan 2 RPD juga sejalan dengan amanah pada RPJPD Kabupaten Pasuruan yaitu misi 1 dan 5.

Keselarasan antara misi dan tujuan pada RPD disajikan pada gambar dibawah ini:



Gambar 5.2 Keselarasan Penetapan Tujuan 2 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024-2026 dengan Misi pada RPJPD Kabupaten Pasuruan 2025-2025

Indikator tujuan dari tujuan 2 yaitu persentase penduduk miskin. Rumusan tujuan 2 kemudian dijabarkan kedalam beberapa sasaran yaitu:

- 1) Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia
- 2) Menurunnya pengangguran
- 3) Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga
- 4) Meningkatnya ketahanan pangan daerah

Adapun keselarasan (cascading) Tujuan 2 RPD Kabupaten Pasuruan 2024-2026 dari penetapan tujuan, indikator hingga jabarannya pada sasaran RPD beserta indikatornya disajikan pada gambar berikut:

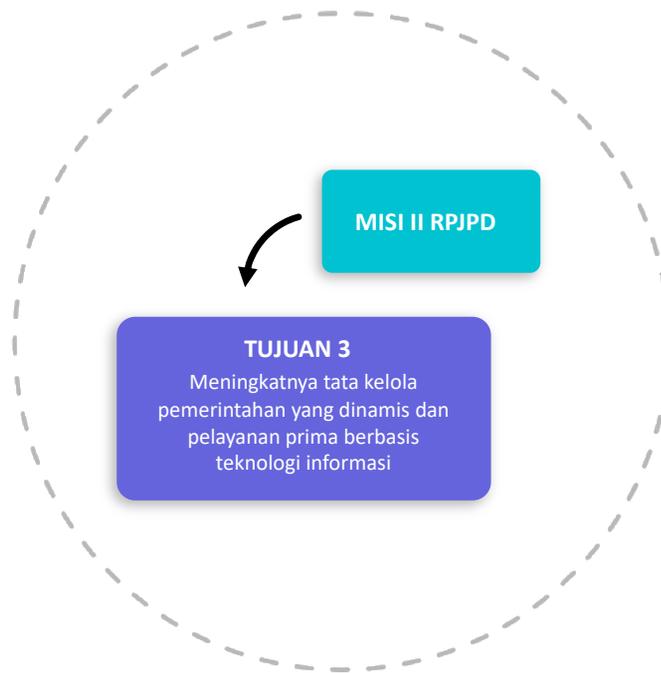


Gambar 5.3 Keselarasan (cascading) Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Pasuruan 2024-2025 beserta indikator kinerja

5.2.3 TUJUAN 3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi

Tujuan 3 Rencana Pembangunan Daerah lebih berfokus pada pembangunan tata Kelola pemerintah sebagai penggerak utama dalam mengakselerasi pencapaian target-target prioritas pembangunan daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan daerah. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Semakin baik tata kelola pemerintahan daerah, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan daerah. Fokus utama pada peningkatan tata kelola pemerintah baik pada tingkat nasional maupun daerah adalah percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan.

Pelaksanaan reformasi birokrasi juga masih menjadi permasalahan yang dihadapi dan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Pasuruan. Beberapa rekomendasi yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dari Kementerian PANRB diantaranya yaitu mengoptimalkan peran agen perubahan dalam proses reformasi birokrasi, mengoptimalkan perbaikan manajemen SDM, mengupayakan peningkatan kapabilitas APIP, dan meningkatkan monev pembangunan ZI. Pembangunan tata kelola pemerintahan juga menjadi mandat pada RPJPD Kabupaten Pasuruan selaras pada misi 2. Keselarasan antara tujuan dan misi RPJPD digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 5.4 Keselarasan Penetapan Tujuan 3 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024-2026 dengan Misi pada RPJPD Kabupaten Pasuruan 2025-2025

Ukuran keberhasilan dari Tujuan 3 diukur melalui indicator Indeks Reformasi Birokrasi. Tujuan 3 kemudian dijabarkan kedalam beberapa sasaran yaitu:

- 1) Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
- 2) Meningkatkan birokrasi yang kapabel
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Adapun keselarasan (cascading) Tujuan 3 RPD Kabupaten Pasuruan 2024-2026 dari penetapan tujuan, indikator hingga jabarannya pada sasaran RPD beserta indikatornya disajikan pada gambar berikut:



Gambar 5.5 Keselarasan (cascading) Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Pasuruan 2024-2025 beserta indikator kinerja

Rumusan tujuan dan sasaran RPD beserta indikatornya kemudian disusun target untuk tahun 2024, 2025 dan 2026 yang disajikan pada table dibawah ini:

Tabel 5.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2022	KONDISI AWAL (PROYEKSI 2023)	Target Capaian			KONDISI AKHIR
							2024	2025	2026	
1	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah		Pertumbuhan ekonomi	%	5,32	5,81	5,86	5,92	5,97	5,97
			Indeks Gini	-	0,325	0,319	0,310	0,301	0,292	0,292
			Indeks Wiliamson	-	0,264	0,258	0,251	0,245	0,238	0,238
		Meningkatnya produksi sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah	Nilai PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK)	Juta Rupiah	5.806.218,76	5.957.711,8	5.971.224,9	5.984.738,1	5.998.251,3	5.998.251,3
			Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan (ADHK)	Juta Rupiah	68.682.592,55	70.031.504,5	72.486.250,1	74.940.995,8	77.395.741,5	77.395.741,5
			Pendapatan perkapita	Ribu Rupiah	10.726	10.938	11.154	11.374	11.598	11.598
		Meningkatnya Iklim Investasi	Nilai Investasi Daerah	Milyar Rupiah	12.600	8.790,47	9.300	9.400	9.500	9.500
		Meningkatnya kualitas dan pemerataan	Indeks Infrastruktur Wilayah	-	11,57	11,69	47,27	48,15	49,30	49,30

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN	KONDISI	Target Capaian			KONDISI
		pembangunan infrastruktur wilayah								
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	59,78	61,142	62,504	62,741	62,825	62,852
			Indeks Risiko Bencana	-	126,32	125,91	125,50	106,27	99,35	99,35
2	Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat		Persentase Penduduk Miskin	%	8,96	8,69	8,42	8,15	7,88	7,88
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	69,68	70,25	70,82	71,39	71,96	71,96
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	90,94	91,11	91,22	91,33	91,44	91,44
		Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,91	5,86	5,81	5,76	5,71	5,71
		Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	-	55,21	56,60	57,10	57,60	58,10	58,10
		Meningkatnya ketahanan	Indeks Ketahanan	-	77,40	78,05	78,39	78,74	79,09	79,09

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN	KONDISI	Target Capaian			KONDISI
		pangan daerah	Pangan							
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi		Indeks Reformasi Birokrasi	-	66,65 (B)	67,56 (B)	68,04 (B)	69,52 (B)	71 (BB)	71 (BB)
		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	-	77,29 (BB)	79,28 (BB)	80,30 (A)	81,40 (A)	82,50 (A)	82,50 (A)
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	n/a	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	-	54,67	54,72	54,77	54,82	54,87	54,87
			Indeks SPBE	-	2,04	2,25	2,50	2,75	3	3
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	90,32	90,35	90,40	90,07	90,97	90,97

Keterangan : n/a = Data Belum Keluar

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai tujuan daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran. pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

6.1 STRATEGI PEMBANGUNAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan pmbangunan daerah.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah. Pernyataan strategi juga dapat mengubah kalimat negatif masalah menjadi kalimat positif untuk dijadikan sebagai strategi.

Tabel 6.1 Strategi Pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi
Tujuan 1: Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah	1. Sasaran 1.1: Meningkatnya produksi sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah	Meningkatkan daya saing produk segar dan hasil olahan pertanian dan perikanan
		Meningkatkan produktifitas, kreativitas dan daya saing usaha mikro, IM dan Lembaga ekonomi desa
		Mengembangkan daya Tarik destinasi wisata dan meningkatkan promosi pariwisata
	2. Sasaran 1.2: Meningkatnya Iklim Investasi	Meningkatkan efesiensi dan efektifitas pelayanan perizinan
		Meningkatkan keamanan, ketertiban, ketentraman sosial dan kepastian hukum
		Meningkatkan promosi dan Kerjasama penanaman modal
	3. Sasaran 1.3: Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi
		Meningkatkan layanan infrastruktur dasar
		Optimalisasi pengelolaan sumber daya air

Tujuan	Sasaran	Strategi
	4. Sasaran 1.4: Meningkatnya Kualitas Lingkungan	<p>Optimalisasi pengelolaan limbah cair, limbah padat dan limbah B3</p> <p>Meningkatkan penanganan dan pengurangan sampah</p> <p>Meningkatkan konservasi lahan</p> <p>Meningkatkan pengendalian pencemaran / kerusakan lingkungan</p> <p>Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan</p> <p>Penguatan kapasitas kawasan</p> <p>Penambahan dan peningkatan kapasitas personel lapangan (TRC) serta relawan penanggulangan bencana</p> <p>Pembangunan Early Warning System</p>
Tujuan 2: Meningkatnya Kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat	1. Sasaran 2.1: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	<p>Meningkatkan budaya literasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan kesetaraan</p> <p>Meningkatkan upaya Kesehatan promotive dan preventif</p> <p>Meningkatkan peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan</p>
	2. Sasaran 2.2: Menurunnya pengangguran	<p>Meningkatnya kualitas dan daya saing Angkatan kerja</p> <p>Meningkatkan wirausaha ekonomi kreatif</p> <p>Meningkatkan perlindungan tenaga kerja</p>
	3. Sasaran 2.3: Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	<p>Meningkatkan pembinaan keluarga</p> <p>Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perempuan</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi
	4. Sasaran 2.4: Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Meningkatkan ketersediaan distribusi dan pengendalian harga pangan Meningkatkan produk pangan yang aman dan halal
Tujuan 3: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi	1. Sasaran 3.1: Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi SAKIP
		Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah
		Meningkatkan penerapan system pengendalian internal pemerintah
	2. Sasaran 3.2: Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Meningkatkan kompetensi ASN
		Mengembangkan pengelolaan system pemerintahan berbasis elektronik
		Penempatan ASN sesuai kompetensinya
	3. Sasaran 3.3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik
		Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik
		Meningkatkan zona integritas

6.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama periode perencanaan pembangunan dilaksanakan guna mencapai tujuan pembangunan secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai

sasaran dan tujuan RPD. Oleh karena itu, dalam menyusun arah kebijakan perlu adanya penyinergian antara berbagai dokumen perencanaan guna menyelaraskan berbagai program pembangunan antar periode maupun antar tingkatan administrasi pemerintahan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada penetapan tujuan dan sasaran RPD dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa pelaksanaan rencana pembangunan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pelaksanaan rencana pembangunan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama periode pelaksanaan RPD atau 3 tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun rumusan arah kebijakan disajikan pada table 6.2 berikut:

Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

ARAH KEBIJAKAN		
Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN DAYA SAING DAERAH	PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN

Arah kebijakan tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan setiap tahapan selama periode pelaksanaan RPD juga diilustrasikan pada gambar berikut:



Gambar 6.1 Arah Kebijakan Tahunan Rencana Pembangunan Daerah

Arah kebijakan tersebut di atas merupakan panduan pelaksanaan tahunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), untuk itu setiap tahun juga disusun proyek strategis sebagai sebuah akselerasi pencapaian nyata dari arah kebijakan tahunan, yaitu:

- 1) Tahun 2024: (a) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan AKI-AKB; (b) Pembentukan 25 PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat); (c) Jaminan Perlindungan Kesehatan Masyarakat (UHC); (d) Penambahan 20 Desa ODF; (e) Pembangunan Kawasan pariwisata AATP; (f) Penataan dan revitalisasi permukiman kumuh seluas 20 Ha; (g) Penyusunan RTBL perkotaan Bangil; (h) Portal satu data; (i) Pusat pengembangan SDM Aparatur; dan (j) Pelaksanaan PILKADA;
- 2) Tahun 2025: (a) Rintisan 1 (Satu) Boarding School Bertaraf Nasional dan Internasional; (b) Rintisan Sister Colleges; (c) Jaminan Perlindungan Kesehatan Masyarakat (UHC); (d) Penambahan 20 Desa ODF; (e) Pengelolaan Kawasan pariwisata AATP; (f) Menciptakan Wirausaha Muda 1.000 Orang; (g) Rintisan 10 StartUp Regional dan Nasional; (h) Revitalisasi Pasar Gempol; (i) Revitalisasi Bang Kodir Untuk Co Working Space Industri Kreatif; (j) Sertifikasi Halal 10.000 Produk Makanan dan Minuman Usaha Mikro dan Kecil; (k) Pembangunan IPLT; (l) Pembangunan infrastruktur Perkotaan Bangil; (m) Penyusunan rencana rekayasa lalu lintas dan jalan lingkar;
- 3) Tahun 2026: (a) Pengembangan Kawasan ekonomi perikanan; (b) Pengembangan Kawasan ekonomi berbasis industry di Wilayah Timur; (c) Jaminan perlindungan Kesehatan masyarakat (UHC); (d) Penambahan 20 Desa ODF; (e) Penataan sumur BOR Artesis di Kawasan DAS Rejoso;

Revitalisasi Kali Wrati (Bangil Tak); (f) Pembangunan RTH seluas 10 Ha; (g) Penataan perkotaan Bangil; dan (h) Pengadaan lahan jalan lingkar.

Gambaran secara menyeluruh yang menggambarkan keselarasan Arah Kebijakan RPD dengan Tujuan RPD serta Arah Kebijakan dan Prioritas Tahap IV RPJPD 2005-2025 disajikan sebagai berikut:

Arah Kebijakan dan Prioritas Tahap IV RPJPD 2005-2025	Tujuan RPD 2024-2026	Arah Kebijakan RPD 2024-2026
Pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.	Meningkatnya Kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.	Peningkatan Kualitas SDM dan Daya Saing Daerah
Terciptanya nilai tambah pada sektor ekonomi dan daya saing industri	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi.	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan

6.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran RPD tahun 2024-2026 diupayakan melalui strategi dan arah kebijakan dan direpresentasikan melalui program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Program prioritas tersebut disajikan pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Anggaran (Rp)		Target	Anggaran (Rp)
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah	Pertumbuhan ekonomi	%	5,32	5,81	5,86		5,92		5,97		5,97				
		Indeks Gini	Indeks	0,325	0,319	0,310		0,301		0,292		0,292				
		Indeks Wiliamson	Indeks	0,264	0,258	0,251		0,245		0,238		0,238				
	Meningkatnya produksi sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah	Nilai PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK)	Juta Rupiah	5.806.218,76	5.957.711,80	5.971.224,9		5.984.738,1		5.998.251,3		5.998.251,3				
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan Sarana Pertanian	%	-	-	3,33	3.582.063.719	3,83	4.298.476.463	4,33	5.373.095.579	4,33	13.253.635.761	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan prasarana penunjang budidaya pertanian	%	-	-	1,20	15.524.573.495	1,21	18.629.488.194	1,22	23.286.860.242	1,22	57.440.921.931	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Bencana Pertanian yang ditanggulangi	%	-	-	75	1.171.090.406	75,50	1.405.308.487	76	1.756.635.609	76	4.333.034.502	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase produk hasil pertanian/ agribisnis yang terstandarisasi	%	-	-	45	160.005.950	50	192.007.140	55	240.008.925	55	592.022.015	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Anggaran (Rp)		Target	Anggaran (Rp)
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan SDM petani	%	-	-	5	3.436.291.395	6	4.123.549.674	7	5.154.437.093	7	12.714.278.162	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		Persentase peningkatan kelembagaan penyuluhan	%	-	-	4		8		12		12				
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Sarana Pernakan	%	-	-	5	1.732.219.495	5	1.732.219.495	5	1.732.219.495	5	5.196.658.485	Dinas Pernakan dan Kesehatan Hewan		
		Persentase Pengembangan Sarana Pernakan	%	-	-	10		10		10		10				
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Prasarana Pernakan	%	-	-	10	4.812.115.881	10	4.812.115.881	10	4.812.115.881	10	14.436.347.643	Dinas Pernakan dan Kesehatan Hewan		
		Persentase Pengembangan Prasarana Pernakan	%	-	-	5		5		5		5				
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase ternak yang dilayani	%	-	-	40	2.495.917.903	45	2.495.917.903	50	2.495.917.903	50	7.487.753.709	Dinas Pernakan dan Kesehatan Hewan		

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Anggaran (Rp)		Target	Anggaran (Rp)
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
		Persentase pengawasan produk asal hewan yang ASUH	%	-	-	60		62		64		64				
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha peternakan yang memiliki izin usaha	%	-	-	80	20.805.550	81	20.805.550	82	20.805.550	82	62.416.650	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluhan pertanian pada kelompok/unit usaha yang memiliki usaha olahan ternak	%	-	-	5,92	3.689.301.570	6	3.689.301.570	6,10	3.689.301.570	6,10	11.067.904.710	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		%	-	-	70	807.528.200	70	807.528.200	70	807.528.200	70	2.422.584.600	Dinas Perikanan		
		Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%	-	-	1	1.756.590.200	1,5	1.756.590.200	2	1.756.590.200	2	5.269.770.600			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	-	-	0,3	1.324.167.100	0,6	1.324.167.100	0,9	1.324.167.100	0,9	3.972.501.300	Dinas Perikanan		
		Persentase Produksi Ikan Bernilai Ekonomis	%	-	-	12	87.120.000	12	87.120.000	12	87.120.000	12	261.360.000			

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Anggaran (Rp)		Target	Anggaran (Rp)
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Meningkatnya produksi sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah	Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan (ADHK)	Milyar Rupiah	68.682.592,55	70.031.504,5	72.486.250,1		74.940.995,8		77.395.741,5		77.395.741,5				
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase nilai transaksi hasil penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	%	25	100	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	1.050.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase nilai transaksi perdagangan	%	109,91	100	100	1.145.000.000	100	1.240.000.000	100	1.335.000.000	100	3.720.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi	%	2	100	100	4.400.000.000	100	4.750.000.000	100	5.100.000.000	100	14.250.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata bersertifikat CHSE	%	20	-	11	14.715.000.000	14	15.790.000.000	17	16.035.000.000	17	46.540.000.000	Dinas Pariwisata		
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang meningkat kunjungan wisatanya	%	14,17	-	30	835.000.000	32	940.000.000	34	835.000.000	34	2.610.000.000	Dinas Pariwisata		

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Anggaran (Rp)		Target	Anggaran (Rp)
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang meningkatkan omsetnya	%	-	-	25	395.000.000	27	395.000.000	30	395.000.000	30	1.185.000.000	Dinas Pariwisata		
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM yang bersertifikat SKKNI	%	12,01	-	14,89	747.943.900	15,85	822.738.290	16,81	905.012.119	16,81	2.475.694.309	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang meningkatkan akses Pembiayaan dan akses pasar	%	26,04	-	28,57	1.564.459.622	29,33	1.720.905.584	32,50	1.892.996.143	32,50	5.178.361.349	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMK yang meningkat kualitas Produknya (Terstandarisasi) dan atau terbentuknya jaringan kemitraan	%	-	-	35	1.254.035.035	40	1.379.438.539	45	1.517.382.392	45	4.150.855.966	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
	Meningkatnya produksi sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah	Pendapatan Perkapita	Ribu Rupiah	106.640	10.938		11.154		11.374		11.598		11.598			

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Anggaran (Rp)		Target	Anggaran (Rp)
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase layanan tera ulang terhadap potensi UTP di kabupaten	%	129,42	92,27	92,73	450.000.000	93,64	550.000.000	94,55	650.000.000	94,55	1.650.000.000	Dinas Perindustria n dan Perdagangan		
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase jumlah komoditi barang kebutuhan pokok dan penting yang harganya stabil	%	62,95	18,52	22,22	240.000.000	18,52	270.000.000	22,22	300.000.000	22,22	810.000.000	Dinas Perindustria n dan Perdagangan		
	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa memiliki sarana prasarana yang memadai	%	21,70	-	22	15.000.000	29	55.000.000	29	88.000.000	29	158.000.000	DPMD		
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa yang melaksanakan tata kelola dengan baik	%	-	-	100	10.204.418.448	100	18.537.069.517	100	26.323.311.227	100	55.064.799.192	DPMD		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	80	-	82	1.800.000.000	84	3.030.000.000	86	4.848.000.000	86	9.678.000.000	DPMD		

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Anggaran (Rp)		Target	Anggaran (Rp)
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
		Persentase Desa yang meningkat volume usahanya (Lembaga Ekonomi Desa/Pasar Desa/KUB/UMKM dan atau memanfaatkan TTG	%	-	-	7,04	70.000.000	14,08	262.000.000	21,11	419.200.000	21,11	751.200.000			
	Meningkatnya iklim Investasi daerah	Nilai Investasi Daerah	Miliar Rupiah	12.600	8.790,47	9.300		9.400		9.500		9.500				
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai kepuasan investor terhadap pengembangan iklim penanaman modal	Nilai	-	76	84	180.000.000	86	380.000.000	88	498.000.000	88	1.058.000.000	DPMPTSP		
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan yang melakukan LKPM	Perusahaan	-	250	220	379.183.200	230	417.101.520	240	458.811.672	240	1.255.096.392	DPMPTSP		
	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum	%	63,43	100	100	22.914.150.300	100	25.205.565.330	100	27.726.121.863	100	75.845.837.493	Satpol PP		
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase laporan penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti	%	-	-	100	5.738.370.200	100	5.861.665.700	100	5.987.882.600	100	17.587.918.500	Bakesbangpol		

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Anggaran (Rp)		Target	Anggaran (Rp)
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah	Indeks Infrastruktur Wilayah	Indeks	11,57	11,69	47,27		48,15		49,30		49,30				
	PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN	Persentase panjang jalan yang dilakukan penanganan	%	3,71	5,81	6,16	111.281.633.110	6,53	117.958.531.096	6,92	125.036.042.962	6,92	354.276.207.168	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	%	60	-	63,09	40.500.000.000	64,69	37.500.000.000	66,29	40.500.000.000	66,29	118.500.000.000	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%	86,72	-	88,41	40.650.000.000	89,25	30.450.000.000	90,09	35.650.000.000	90,09	106.750.000.000	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi/air limbah domestik (layak dan aman)	%	81,81	-	81,83	1.950.000.000	81,84	2.650.000.000	81,85	3.250.000.000	81,85	7.850.000.000	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang laik fungsi	%	51,97	-	60,73	107.175.000.000	65,73	82.175.000.000	70,73	87.175.000.000	70,73	276.525.000.000	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan yang sesuai RTBL	%	-	-	100	2.800.000.000	100	3.500.000.000	100	3.250.000.000	100	9.550.000.000	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang		
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh	%	14,75	17,05	22,82	11.100.000.000	28,34	11.100.000.000	33,86	11.100.000.000	33,86	33.300.000.000	Dinas Perumahan dan		

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Anggaran (Rp)		Target	Anggaran (Rp)
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang direhab	%	-	-	51,71	24.000.000.000	55,23	24.000.000.000	58,74	24.000.000.000	58,74	72.000.000.000	Kawasan Permukiman		
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penyediaan PSU di perumahan dan kawasan permukiman	%	2,38	2,55	3,95	10.400.000.000	7,90	10.400.000.000	11,85	10.400.000.000	11,85	31.200.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase tercapainya pengembangan perumahan	%	66,67	100	100	3.259.000.000	100	3.259.000.000	100	3.107.000.000	100	9.625.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase capaian pengurangan sampah terhadap JAKSTRADA	%	100	-	79,30	6.579.074.188	78	8.259.597.284	82	5.438.910.795	82	20.277.582.267	Dinas Lingkungan Hidup		
		Persentase capaian target penanganan sampah terhadap JAKSTRADA	%	100	-	32,10	11.416.702.017	43,70	11.535.756.542	54,90	16.335.978.413	54,90	39.288.436.972			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang tersedia	%	-	-	72	19.140.000.000	75	21.054.000.000	80	23.159.400.000	80	63.353.400.000	Dinas Perhubungan		
		Persentase kendaraan yang diuji	%	-	-	90	1.935.000.000	92	2.128.500.000	94	2.341.350.000	94	6.404.850.000			
		Persentase prasarana jalan yang tersedia	%	-	-	65	7.250.000.000	65	7.975.000.000	70	8.772.500.000	70	23.997.500.000			

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Anggaran (Rp)		Target	Anggaran (Rp)
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
		Persentase terlaksananya audit inspeksi keselamatan LLAJ	%	-	-	60	4.495.000.000	67	4.944.500.000	70	5.438.950.000	70	14.878.450.000			
		Persentase wilayah yang terlayani angkutan umum	%	-	-	56	1.525.000.000	61	1.677.500.000	65%	1.845.250.000	65	5.047.750.000			
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks	59,78	61,142	62,504		62,741		62,825		62,852				
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	126,32	125,91	125,50		106,27		99,35		99,35				
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	%	-	-	81	951.478.523	82	1.046.626.375	83	1.151.289.013	83	3.149.393.911			
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DA-TAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	%	-	-	55	2.192.511.794	60	2.411.762.973	65	2.652.939.271	65	7.257.214.038			

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026				
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Persentase meningkatnya luasan lahan yang telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis	%	-	-	40		50		60		60		
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase peningkatan luasan RTH publik (minimal 20% wilayah perkotaan di Kab.Pasuruan)	%	-	-	8,80	3.832.094.918	9,35	4.215.304.410	9,90	4.636.834.851	9,90	12.684.234.179	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase capaian pengurangan sampah terhadap JAKSTRADA	%	100	-	79,30	17.995.776.205	78	19.795.353.826	82	21.774.889.208	82	59.566.019.239	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase capaian target penanganan sampah terhadap JAKSTRADA	%	100	-	32,10		43,70		54,90		54,90		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Layanan Penanggulangan Bencana yang Berkualitas	%	100	-	100	5.005.303.274	100	5.655.568.438	100	5.518.346.860	100	16.179.218.572	BPBD

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Anggaran (Rp)		Target	Anggaran (Rp)
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Meningkatnya Kesejahteraan dan kualitas hidup manusia	Persentase penduduk miskin	%	8,96	8,69	8,42		8,15		7,88		7,88				
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,68	70,25	70,82		71,39		71,96		71,96				
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,94	91,11	91,22		91,33		91,44		91,44				
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	97,72	100	100	149.974.895.831	100	152.235.954.695	100	153.335.954.695	100	455.546.805.221	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	94,66	95,87	96	54.598.397.769	96,10	55.098.397.769	96,20	55.598.397.769	96,20	165.295.193.307			
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	-	101,76	101,76	25.037.166.400	101,76	28.951.107.536	101,76	36.326.107.536	101,76	90.314.381.472			
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	-	109,76	109,76	40.000.000.000	109,76	50.000.000.000	109,76	60.000.000.000	109,76	150.000.000.000			

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Anggaran (Rp)		Target	Anggaran (Rp)
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	114,79	92,49	92,60	21.801.766.500	92,70	22.751.766.500	92,80	24.151.766.500	92,80	68.705.299.500			
		Angka kelulusan warga belajar kesetaraan	Orang	3000	3500	3500	77.779.300.000	4000	79.479.300.000	4500	80.804.300.000	4500	238.062.900.000			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan Pendidikan yang mengembangkan dan melaksanakan kurikulum satuan Pendidikan	%	100	100	100	950.000.000	100	1.550.000.000	100	1.850.000.000	100	4.350.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memperoleh peningkatan kompetensi di seluruh tingkatan (PAUD, SD, SMP dan Nonformal/ Kesetaraan) yang terpenuhi	%	95,95	95,95	95,95	2.661.019.900	97,60	9.579.671.640	97,60	11.495.605.968	97,60	23.736.297.508	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan PAUD dan pendidikan nonformal/ kesetaraan yang memiliki izin	%	85	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Anggaran (Rp)		Target	Anggaran (Rp)
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan Ber-NSP	%	1,86	2,29	2,70	842.775.980	3,09	1.264.775.980	3,47	1.566.260.387	3,47	3.673.812.347	Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan		
		Persentase Perpustakaan yang berbasis inklusi sosial	%	3,90	3,90	5	330.927.000	5,50	472.927.000	5,70	572.927.000	16,20	1.376.781.000			
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi daerah yang dilestarikan	%	-	-	20%	290.019.387	20%	390.569.387	20%	359.569.387	60%	1.040.158.161	Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan Standart Pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	92,47	100	100	21.218.432.660	100	21.748.893.477	100	22.279.354.293	100	65.246.680.430	Dinas Kesehatan		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	%	-	100	100	42.014.283.207	100	43.064.640.287	100	44.114.997.367	100	129.193.920.861			
		Persentase UHC	%	-	95	96	158.507.738.794	97	162.470.432.264	98	166.433.125.734	98	487.411.296.792			
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDMK sesuai kompetensi jabatan	%	93,58	80	80	2.786.215.500	80	2.855.870.888	80	2.925.526.275	80	8.567.612.663	Dinas Kesehatan		

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Anggaran (Rp)		Target	Anggaran (Rp)
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Rumah Sakit	%	97,97	97	98	62.400.000.000	99	72.950.000.000	100	75.450.000.000	100	210.800.000.000	RSUD Bangil		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Rumah Sakit	%	95,41	97	98	30.700.000.000	99	32.000.000.000	100	33.400.000.000	100	96.100.000.000	RSUD Grati		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang berdaya saing	%	-	-	8,85	1.389.000.000	8,86	1.389.000.000	8,87	1.389.000.000	8,87	4.167.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka daerah yang aktif	%	-	-	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	1.500.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga		
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG	%	-	-	23,10	500.000.000	23,15	550.000.000	23,20	605.000.000	23,20	1.655.000.000	DP3AP2KB		
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	%	-	-	9,76	160.000.000	9,50	176.000.000	9,20	193.600.000	9,20	529.600.000	DP3AP2KB		
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase terpenuhinya hak anak di Kabupaten	%	-	-	100	420.000.000	100	462.000.000	100	508.200.000	100	1.390.200.000	DP3AP2KB		

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Anggaran (Rp)		Target	Anggaran (Rp)
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	-	-	100	175.000.000	100	192.500.000	100	211.750.000	100	579.250.000	DP3AP2KB		
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PPKS yang memerlukan rehabilitasi	%	-	-	100	1.963.702.160	100	2.061.887.268	100	2.164.981.631	100	6.190.571.059	Dinas Sosial		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tertangani	%	-	-	100	10.596.344.844	100	11.126.162.086	100	11.682.470.191	100	33.404.977.121	Dinas Sosial		
	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Indeks	5,91	5,86	5,81		5,76		5,71		5,71				
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	40,47	40,75	41	1.451.562.258	42	1.451.562.258	43	1.451.562.258	43	4.354.686.774	Dinas Ketenagakerj aan		
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	%	93,06	93,50	94	8.342.129.715	94,50	8.342.129.715	95	8.342.129.715	95	25.026.389.145	Dinas Ketenagakerj aan		
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	55,21	56,60	57,10		57,60		58,10		58,10				
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kecamatan yang melakukan updating SIGA	%	-	-	100	795.500.000	100	875.050.000	100	962.555.000	100	2.633.105.000	DP3AP2KB		

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Anggaran (Rp)		Target	Anggaran (Rp)
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase MCPR	%	-	-	73,50	8.869.190.679	73,70	9.724.109.747	74	10.664.520.722	74	29.257.821.148	DP3AP2KB		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan Pembinaan Keluarga aktif melaporkan	%	-	-	58	9.678.410.000	58,15	10.646.251.000	58,20	11.710.876.100	58,20	32.035.537.100	DP3AP2KB		
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	77,40	78,05	78,39		78,74		79,09		79,09				
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Pemanfaatan Infrastruktur Pangan	%	48	-	80,05	2.164.014.354	80,10	2.596.817.225	80,15	3.246.021.531	80,15	8.006.853.110	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	86,10	-	86,50	1.196.249.349	87	1.435.499.218	87,50	1.794.374.023	87,50	4.426.122.590	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa/kelurahan rawan pangan yang tertangani	%	15,25	-	6	86.799.552	8,10	104.159.462	10,20	130.199.328	10,20	321.158.342	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	66,65 (B)	67,56 (B)	68,04 (B)		69,52 (B)		71 (BB)		71 (BB)		Dinas Komunikasi dan Informatika		

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Anggaran (Rp)		Target	Anggaran (Rp)
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	77,29	79,28 (BB)	80,30 (A)		81,40 (A)		82,50 (A)		82,50 (A)				
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	-	WTP		WTP		WTP		WTP				
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bid PPM dengan dokumen perencanaan pemb daerah	%	100	100	100	2.028.106.489	100	2.332.322.462	100	2.448.938.585	100	6.809.367.536	Bappelitban gda		
		Persentase keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PPM	%	100	100	100		100		100		100			100	
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD bid Perekonomian, SDA dan Infrastruktur Kewilayahan dengan dok perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100		100		100		100			100	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Anggaran (Rp)		Target	Anggaran (Rp)
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
		Persentase keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PERSIK	%	100	100	100		100		100		100				
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase IKU dan IKD yang mencapai target	%	-	-	85	2.254.000.000	90	2.592.100.000	95	2.721.705.000	95	7.567.805.000	Bappelitban gda		
		Tingkat keselarasan antar bagian dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	-	-	100		100		100						
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Hasil Riset yang diterapkan	%	-	-	100	1.958.680.000	100	2.252.482.000	100	2.365.106.100	100	6.576.268.100	Bappelitban gda		
		Tingkat Kematangan inovasi Daerah	%	-	-	75		80		85						
	PROGRAM PENYELANGGARAA N PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	%	85	87	89	5.169.982.980	90	5.169.982.980	92	5.169.982.980	92	15.509.948.940	Inspektorat Daerah		
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase meningkatnya kategori hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A	%	49	50	54	1.102.422.500	63	1.047.422.500	72	1.047.422.500	72	3.197.267.500	Sekretariat Daerah		

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Anggaran (Rp)		Target	Anggaran (Rp)
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Laporan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai regulasi	%	-	-	100	22.332.472.502	100%	23.672.420.856	100	25.092.766.112	100	71.097.659.470	Sekretariat Daerah		
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian, SDA, pembangunan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa yang ditindaklanjuti serta tersedianya data pembangunan yang terlaksana sesuai regulasi	%	-	-	100	4.587.154.160	100	4.862.383.412	100	5.154.126.423	100%	14.603.663.995	Sekretariat Daerah		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Peningkatan Arsip yang dikelola, dirawat dan dilestarikan	%	-	-	30	553.129.000	35	766.129.000	40	807.129.000	40	2.126.387.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyusunan Dokumen Penganggaran yang baik secara tepat waktu dan sesuai regulasi yang berlaku	-	-	-	95	667.386.190.421	97	738.108.926.323	100	738.232.926.323	100	2.143.728.043.067	BPKPD		

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Anggaran (Rp)		Target	Anggaran (Rp)
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
		Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan yang berlaku		-	-	100		100		100		100				
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penggunaan Barang Milik Daerah SKPD yang Berstatus	%	-	-	100	785.192.478	100	1.391.000.000	100	1.046.000.000	100	3.222.192.478	BPKPD		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	%	-	-	1,50	4.705.966.948	2	5.315.000.000	2,20	5.370.000.000	2,20	15.390.966.948	BPKPD		
	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	54,67	54,72	54,77		54,82		54,87		54,87				
		Indeks SPBE	Indeks	2,04	2,25	2,50		2,75		3		3				
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai aspek kinerja dan penempatan ASN sesuai formasi dan jabatan	Poin	-	-	234	6.921.275.188	240,5	7.143.421.000	246	7.143.421.000	246	21.208.117.188	BKPSDM		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai aspek pengembangan karier dan peningkatan kompetensi pegawai	Poin	32,50	52,50	71,50	3.880.167.200	72,50	3.902.235.920	73,50	3.902.235.920	73,50	11.684.639.040	BKPSDM		

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Anggaran (Rp)		Target	Anggaran (Rp)
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Jumlah Masyarakat Penerima Informasi	%	74	10	10	2.493.022.100	10	2.493.022.100	10	2.493.022.100	10	7.479.066.300	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Tata Kelola	Nilai	6,76	0 level terkelola	0 level terkelola	513.884.600	0 level terkelola	513.884.600	0 level terkelola	513.884.600	0 level terkelola	1.541.653.800	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	38,60	12,66	12,66	513.884.600	12,66	513.884.600	12,66	513.884.600	12,66%	1.541.653.800			
		Persentase akses internet yang disediakan dan terintegrasi oleh Dinas Kominfo	%	56,20	56,92	56,92	2.039.238.275	56,92	2.039.238.275	56,92	2.039.238.275	56,92%	6.117.714.825			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90,32	90,35	90,45	90,45	90,07	90,97	90,97	90,97	90,97				
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan KTP	%	-	-	98,82	700.000.000	99	895.000.000	99,10	995.000.000	99,10	2.590.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		Persentase kepemilikan KK	%	-	-	98,50		98,75		99		99				

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Anggaran (Rp)		Target	Anggaran (Rp)
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
		Persentase kepemilikan KIA	%	-	-	35		40		45		45				
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	%	95	-	87,50	499.816.500	90	645.000.000	92,50	710.000.000	92,50	1.854.816.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penyediaan database kependudukan dan pencapil di tingkat Kabupaten	%	100	-	100	650.000.000	100	800.000.000	100	900.000.000	100	2.350.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Data yang terklasifikasi	%	100	-	100	215.000.000	100	275.000.000	100	305.000.000	100	795.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase program kerja DPRD yang terlaksana	%	-	-	100	72.428.565.800	100	72.428.565.800	100	72.428.565.800	100	217.285.697.400	Sekretariat DPRD		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	%	-	-	100	2.872.000.000	100	3.154.450.000	100	3.329.000.000	100	9.355.450.000	Kecamatan Bangil		

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Anggaran (Rp)		Target	Anggaran (Rp)
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	-	-	3,51		3,75		4		4				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	%	95	-	100	451.795.364	100	502.807.150	100	557.853.536	100	1.512.456.050	Kecamatan Beji		
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	-	-	3,51		3,75		4		4				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	%	-	-	100	67.522.000	100	68.575.200	100	69.681.060	100	205.778.260	Kecamatan Gempol		
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	-	-	3,51		3,75		4		4				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	%	-	-	100	232.072.000	100	255.279.200	100	280.807.120	100	768.158.320	Kecamatan Gondangwetan		
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	-	-	3,51		3,75		4		4				

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Anggaran (Rp)		Target	Anggaran (Rp)
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	%	90	95	100	175.500.000	100	193.050.000	100	212.355.000	100	580.905.000	Kecamatan Grati		
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	-	-	3,51		3,75		4		4				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	%	-	-	100	219.015.650	100	240.917.215	100	265.008.937	100	724.941.802	Kecamatan Kejayan		
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	-	-	3,50		3,75		4		4				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	%	100	100	100	63.486.000	100	69.834.600	100	76.818.060	100	210.138.660	Kecamatan Kraton		
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	-	-	3,51		3,75		4		4				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	%	100	100	100	63.486.000	100	69.834.600	100	76.818.060	100	210.138.660	Kecamatan Lekok		

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Anggaran (Rp)		Target	Anggaran (Rp)
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	-	-	3,51		3,75		4		4				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	%	100	100	100	63.486.000	100	69.834.600	100	76.818.060	100	210.138.660	Kecamatan Lumbang		
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	-	-	3,51		3,75		4		4				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	%	-	-	100	159.720.000	100	161.220.000	100	162.720.000	100	483.660.000	Kecamatan Nguling		
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	-	-	3,51		3,75		4		4				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	%	-	-	100	1.023.921.900	100	1.126.314.090	100	1.238.945.499	100	3.389.181.489	Kecamatan Pandaan		
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	-	-	3,50		3,75		4		4				

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Anggaran (Rp)		Target	Anggaran (Rp)
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	%	96,65	100	100	63.486.000	100	69.834.600	100	76.818.060	100	210.138.660	Kecamatan Pasrepan		
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	-	-	3,51		3,75		4		4				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	%	-	-	100	45.000.000	100	49.500.000	100	54.450.000	100	148.950.000	Kecamatan Pohjentrek		
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	3,47	3,49	3,51		3,75		4		4				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	%	-	-	100	377.970.792	100	267.719.331,60	100	281.105.298,18	100	926.795.422	Kecamatan Prigen		
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	-	-	3,51		3,75		4		4				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	%	100	100	100	38.000.000	100	38.190.000	100	38.380.950	100	114.570.950	Kecamatan Purwodadi		

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Anggaran (Rp)		Target	Anggaran (Rp)
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	-	-	3,51		3,75		4		4				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	%	-	-	100	20.570.000	100	22.627.000	100	24.889.700	100	68.086.700	Kecamatan Purwosari		
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	-	-	3,50		3,75		4		4				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	%	92,85	98	100	63.486.000	100	69.834.600	100	76.818.060	100	210.138.660	Kecamatan Puspoko		
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	-	-	3,50		3,75		4,01		4,01				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	%	100	100	100	43.000.000	100	47.300.000	100	52.030.000	100	142.330.000	Kecamatan Rejosari		
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	3,45	3,48	3,52		3,77		4,45		4,45				

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Anggaran (Rp)		Target	Anggaran (Rp)
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	%	100	100	100	80.500.000	100	80.500.000	100	80.500.000	100	241.500.000	Kecamatan Rembang		
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	-	-	3,51		3,75		4		4				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	%	-	-	100	63.486.000	100	69.834.600	100	76.818.060	100	210.138.660	Kecamatan Sukorejo		
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	-	-	3,51		3,75		4		4				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	%	92,85	98	100	119.553.960	100	131.509.356	100	144.660.292	100	131.509.356	Kecamatan Tosari		
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	2,64	3,01	3,50		3,75		4		4,01				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	%	100	100	100	60.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	190.000.000	Kecamatan Tutur		

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Anggaran (Rp)		Target	Anggaran (Rp)
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	3,29	3,49	3,51		3,75		4		4				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	%	100	100	100	7.236.000	100	7.597.800	100	7.977.690	100	22.811.490	Kecamatan Winongan		
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	3,29	3,40	3,51		3,65		3,80		3,80				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	%	-	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000	Kecamatan Wonorejo		
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	-	-	3,51		3,75		4		4				

Keterangan : Data yang tidak tersedia karena indikator program tahun 2022 dan 2023 berbeda dengan indikator program tahun 2024-2026

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, bahwa Pemerintah Daerah harus Menyusun Rencana Pembangunan Daerah dengan berpedoman pada RPJMN, RPJPD, dan Evaluasi RPJMD periode sebelumnya. Sehingga urusan pemerintahan dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta target indikator kinerja. Dalam hal suatu urusan atau program bersifat strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya disbanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Dalam penyusunan program, pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Pasuruan berisi program-program, baik untuk mencapai tujuan pembangunan maupun untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Renstra OPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Setelah program prioritas diketahui

baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang perhitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan ditunjukkan pada table berikut :

TABEL VII.1

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DERAH					1.805.804.084.387		1.852.122.224.285		1.904.232.557.636		5.562.158.866.308	
B	URUSAN PEMERINTAHAN KONKRUEAN					1.526.495.443.825		1.579.454.549.205		1.671.329.410.905		4.777.279.403.935	
(1)	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.239.679.625.993		1.263.996.142.915		1.325.838.723.449		3.829.514.492.357	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DERAH					1.261.736.540.957		1.270.208.827.381		1.281.248.713.951		3.813.194.082.289	
1	UP BIDANG PENDIDIKAN					372.903.546.400		399.886.198.140		423.802.132.468		1.196.591.877.008	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	100%	870.636.965.954	100%	870.636.965.954	100%	870.636.965.954	100%	2.611.910.897.862	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	97,72%	100,00%	100,00 %	149.974.895.831	100,00 %	152.235.954.695	100,00 %	153.335.954.695	100,00 %	455.546.805.221	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	94,66%	95,87%	96,00 %	54.598.397.769	96,10%	55.098.397.769	96,20%	55.598.397.769	96,20%	165.295.193.307	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	-	101,76%	101,76 %	25.037.166.400	101,76 %	28.951.107.536	101,76 %	36.326.107.536	101,76 %	90.314.381.472	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	-	109,76%	109,76 %	40.000.000.000	109,76 %	50.000.000.000	109,76 %	60.000.000.000	109,76 %	150.000.000.000	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	114,79%	92,49%	92,60 %	21.801.766.500	92,70%	22.751.766.500	92,80%	24.151.766.500	92,80%	68.705.299.500	
		Angka kelulusan warga belajar kesetaraan	3000 Orang	3500 Orang	3500 Orang	77.779.300.000	4000 Orang	79.479.300.000	4500 Orang	80.804.300.000	4500 Orang	238.062.900.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan Pendidikan yang mengembangkan dan melaksanakan kurikulum satuan pendidikan	100%	100%	100%	950.000.000	100%	1.550.000.000	100%	1.850.000.000	100%	4.350.000.000	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memperoleh peningkatan kompetensi di seluruh tingkatan (PAUD, SD,SMP dan Nonformal/ Kesetaraan) yang terpenuhi	95,95%	95,95%	95,95 %	2.661.019.900	97,60%	9.579.671.640	97,60%	11.495.605.968	97,60%	23.736.297.508	
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan PAUD dan pendidikan nonformal/ kesetaraan yang memiliki izin	85%	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	300.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase pengembangan guru bahasa dan sastra yang memperoleh peningkatan kompetensi	-	-	100%	1.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	281.000.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	UP BIDANG KESEHATAN					333.300.716.147		341.633.234.052		350.032.774.154		1.024.966.724.353	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	100%	137.002.793.871	100%	140.427.863.718	100%	143.852.933.565	100%	421.283.591.154	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan Standart Pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	92,47%	100%	100%	21.218.432.660	100%	21.748.893.477	100%	22.279.354.293	100%	65.246.680.430	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	-	100%	100%	42.014.283.207	100%	43.064.640.287	100%	44.114.997.367	100%	129.193.920.861	
		Persentase UHC	-	95%	96%	158.507.738.794	97%	162.470.432.264	98%	166.433.125.734	98%	487.411.296.792	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDMK sesuai kompetensi jabatan	93,58%	80%	80%	2.786.215.500	80%	2.855.870.888	80%	2.925.526.275	80%	8.567.612.663	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Farmasi, Alkes dan Makmin yang memenuhi standar	79,76%	80%	80%	578.018.000	80%	592.468.450	80%	606.918.900	80%	1.777.405.350	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah desa siaga aktif	99,43%	25%	25%	960.509.000	25%	984.521.725	25%	1.008.534.450	100%	2.953.565.175	
	UOBF PUSKESMAS												
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan Standart Pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	86,78%	100%	100%	105.926.920.386	100%	108.575.093.396	100%	111.289.470.731	100%	325.791.484.513	
	UPTD LABKESDA												
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan Standart Pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	86,78%	100%	100%	1.308.598.600	100%	1.341.313.565	100%	1.374.846.404	100%	4.024.758.569	
	UOBK RSUD BANGIL					62.400.000.000		72.950.000.000		75.450.000.000		210.800.000.000	RSUD BANGIL

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase Pemanfaatan Rumah Sakit	97,12%	100%	100%	150.000.000.000	100%	155.000.000.000	100%	160.000.000.000	100%	465.000.000.000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Rumah Sakit	97,97%	97%	98%	62.400.000.000	99%	72.950.000.000	100%	75.450.000.000	100%	210.800.000.000	
	UOBK RSUD GRATI					30.700.000.000		32.000.000.000		33.400.000.000		96.100.000.000	RSUD GRATI
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase Pemanfaatan Rumah Sakit	98,69%	100%	100%	35.000.000.000	100%	38.000.000.000	100%	40.000.000.000	100%	113.000.000.000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Rumah Sakit	95,41%	97%	98%	30.700.000.000	99%	32.000.000.000	100%	33.400.000.000	100%	96.100.000.000	
3	UP BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					329.976.886.231		302.541.199.404		324.168.371.369		956.686.457.004	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.1	DINAS SDA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG					204.205.000.000		170.055.000.000		184.005.000.000		558.265.000.000	DINAS SDA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	100%	24.227.000.000	100%	20.900.400.000	100%	19.192.000.000	100%	64.319.400.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	60	-	63,09	40.500.000.000	64,69	37.500.000.000	66,29	40.500.000.000	66,29	118.500.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	86,72%	-	88,41 %	40.650.000.000	89,25%	30.450.000.000	90,09%	35.650.000.000	90,09%	106.750.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan	12,63%	-	12,93 %	4.900.000.000	13,23%	6.400.000.000	13,53%	6.400.000.000	13,53%	17.700.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi/ air limbah	81,81%	-	81,83 %	1.950.000.000	81,84%	2.650.000.000	81,85%	3.250.000.000	81,85%	7.850.000.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD			
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		domestik (layak dan aman)												
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase permukiman yang dilengkapi infrastruktur yang baik	-	-	4 Kawasan	2.800.000.000	4 Kawasan	3.800.000.000	4 Kawasan	4.300.000.000	4 Kawasan	10.900.000.000		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang laik fungsi	51,97%	-	60,73 %	107.175.000.000	65,73%	82.175.000.000	70,73%	87.175.000.000	70,73%	276.525.000.000		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan yang sesuai RTBL	-	-	100%	2.800.000.000	100%	3.500.000.000	100%	3.250.000.000	100%	9.550.000.000		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) untuk perizinan berusaha yang diproses	83%	-	92%	3.430.000.000	94%	3.580.000.000	96%	3.480.000.000	96%	10.490.000.000		
3.2	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI					128.571.886.231		136.286.199.404		144.463.371.369		409.321.457.004	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	100%	100%	100%	12.519.842.193	100%	13.271.032.724	100%	14.067.294.688	100%	39.858.169.605	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang Drainase yang telah dibangun	13,77%	14,55%	15,37 %	16.919.253.111	16,25%	17.934.408.298	18,15%	19.010.472.796	18,15%	53.864.134.205	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	Persentase panjang jalan yang dilakukan penanganan	3,71%	5,81%	6,16%	111.281.633.110	6,53%	117.958.531.096	6,92%	125.036.042.962	6,92%	354.276.207.168	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemenuhan penyedia jasa konstruksi yang berkompetensi	39,18%	100%	100%	371.000.010	100%	393.260.010	100%	416.855.611	100%	1.181.115.631	
4	UP BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					57.767.461.037		57.767.461.037		57.615.461.037		173.150.383.111	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	100%	100%	9.008.461.037	100%	9.008.461.037	100%	9.008.461.037	100%	27.025.383.111	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh	14,75%	17,05%	22,82 %	11.100.000.000	28,34%	11.100.000.000	33,86%	11.100.000.000	33,86%	33.300.000.000	
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang direhab	-	-	51,71 %	24.000.000.000	55,23%	24.000.000.000	58,74%	24.000.000.000	58,74%	72.000.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penyediaan PSU di perumahan dan kawasan permukiman	2,38%	2,55%	3,95%	10.400.000.000	7,90%	10.400.000.000	11,85%	10.400.000.000	11,85%	31.200.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase tercapainya pengembangan perumahan	66,67%	100%	100%	3.259.000.000	100%	3.259.000.000	100%	3.107.000.000	100%	9.625.000.000	
5	UP BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					36.114.969.174		39.876.200.928		43.161.042.599		119.152.212.701	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					31.109.665.900		34.220.632.490		37.642.695.739		102.972.994.129	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	100%	100%	10.168.164.189	100%	11.184.980.608	100%	12.303.478.669	100%	33.656.623.466	
	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum	63,43%	100%	100%	22.914.150.300	100%	25.205.565.330	100%	27.726.121.863	100%	75.845.837.493	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penanggulangan kejadian kebakaran	100,44%	100%	100%	8.195.515.600	100%	9.015.067.160	100%	9.916.573.876	100%	27.127.156.636	
5.2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					5.005.303.274		5.655.568.438		5.518.346.860		16.179.218.572	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	100%	5.873.286.622	100%	4.114.094.894	100%	4.139.300.170	100%	14.126.681.686	
	PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA	Persentase Layanan Penanggulangan Bencana yang Berkualitas	100%	-	100%	5.005.303.274	100%	5.655.568.438	100%	5.518.346.860	100%	16.179.218.572	
6	UP BIDANG SOSIAL					16.516.047.004		17.341.849.354		18.208.941.822		52.066.838.180	DINAS SOSIAL
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	100%	7.300.027.091	100%	7.665.028.446	100%	8.048.279.868	100%	23.013.335.405	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase masyarakat miskin yang diberdayakan	-	-	100 %	2.180.000.000	100 %	2.289.000.000	100 %	2.403.450.000	100 %	6.872.450.000	
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	-	-	100 %	500.000	100 %	525.000	100 %	551.250	100 %	1.576.250	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PPKS yang memerlukan rehabilitasi	-	-	100 %	1.963.702.160	100 %	2.061.887.268	100 %	2.164.981.631	100 %	6.190.571.059	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tertangani	-	-	100 %	10.596.344.844	100 %	11.126.162.086	100 %	11.682.470.191	100 %	33.404.977.121	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapatkan pelayanan	-	-	100 %	1.325.000.000	100 %	1.391.250.000	100 %	1.460.812.500	100 %	4.177.062.500	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase taman makam pahlawan yang dikelola sesuai standart	-	-	100 %	450.500.000	100 %	473.025.000	100 %	496.676.250	100 %	1.420.201.250	
(2)	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PALAYANAN DASAR					161.793.780.528		184.137.581.235		206.397.223.016		552.328.584.779	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					127.399.010.012		137.872.838.792		149.891.893.663		415.163.742.470	
1	UP BIDANG TENAGA KERJA					11.016.162.291		11.016.162.291		11.016.162.291		33.048.486.873	DINAS KETENAGAKER JAAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	100%	100%	100%	9.644.362.460	100%	9.644.362.460	100%	9.644.362.460	100%	28.933.087.380	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	40,47%	40,75%	41%	1.451.562.258	42%	1.451.562.258	43%	1.451.562.258	43%	4.354.686.774	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	93,06%	93,50%	94%	8.342.129.715	94,50%	8.342.129.715	95%	8.342.129.715	95%	25.026.389.145	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	9%	9,49%	9,58%	1.222.470.318	9,68%	1.222.470.318	9,79%	1.222.470.318	9,79%	3.667.410.954	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen RTK yang disusun	100%	100%	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	750.000.000	
2	UP BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK					1.255.000.000		1.380.500.000		1.518.550.000		4.154.050.000	DP3AP2KB
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	100%	6.840.187.366	100%	7.210.206.102	100%	7.931.226.712	100%	21.981.620.180	
	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG	-	-	23,10 %	500.000.000	23,15%	550.000.000	23,20%	605.000.000	23,20%	1.655.000.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	-	-	9,76	160.000.000	9,50	176.000.000	9,20	193.600.000	9,20	529.600.000	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase terpenuhinya hak anak di Kabupaten	-	-	100%	420.000.000	100%	462.000.000	100%	508.200.000	100%	1.390.200.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	-	-	100%	175.000.000	100%	192.500.000	100%	211.750.000	100%	579.250.000	
3	UP BIDANG PANGAN					3.514.653.351		4.217.584.020		5.271.980.026		13.004.217.397	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Pemanfaatan Infrastruktur Pangan	48%	-	80,05 %	2.164.014.354	80,10%	2.596.817.225	80,15%	3.246.021.531	80,15%	8.006.853.110	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,10	-	86,50 Skor	1.196.249.349	87 Skor	1.435.499.218	87,50 Skor	1.794.374.023	87,50 Skor	4.426.122.590	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa/kelurahan rawan pangan yang tertangani	15,25%	-	6%	86.799.552	8,10%	104.159.462	10,20 %	130.199.328	10,20 %	321.158.342	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	100%	-	100%	67.590.096	100%	81.108.115	100%	101.385.144	100%	250.083.355	
4	UP BIDANG PERTANAHAN					12.856.461.037		12.856.461.037		12.856.461.037		38.569.383.111	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum	-	-	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	9.000.000.000	
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	-	-	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	150.000.000	
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase masyarakat yang menerima ganti kerugian	-	-	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	6.000.000	
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	-	-	100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	12.000.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tanah kosong yang termanfaatkan	96,45%	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	300.000.000	
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah aset Pemda yang teridentifikasi perencanaan penggunaannya	12,12%	29,68%	43,51 %	400.000.000	57,35%	400.000.000	71,19%	400.000.000	71,19%	1.200.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Pemanfaatan Aset Pemda yang termanfaatkan	99,50%	99,72%	99,83 %	242.000.000	99,93%	242.000.000	100%	242.000.000	100%	726.000.000	
	PROGRAM PENGURUSAN HAK ATAS TANAH	Persentase Pengurusan Hak Atas Tanah	-	-	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	150.000.000	
5	UP BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					27.156.087.061		29.871.695.767		32.858.865.345		89.886.648.173	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	100%	13.701.559.149	100%	15.071.715.064	100%	16.578.886.571	100%	45.352.160.784	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas	-	-	44,44 %	951.478.523	66,67 %	1.046.626.375	66,67 %	1.151.289.013	66,67 %	3.149.393.911	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase meningkatnya luasan lahan yang telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis	-	-	40%	409.017.315	50%	435.455.437	60%	466.910.150	60%	1.311.382.901,38	
		Persentase meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air dan udara	-	-	55 %	1.783.494.479	60 %	1.976.307.536	65 %	2.186.029.121	65%	5.945.831.136,62	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Persentase peningkatan luasan RTH publik (minimal 20% wilayah perkotaan di Kab.Pasuruan)	-	-	8,80 %	3.832.094.918	9,35 %	4.215.304.410	9,90 %	4.636.834.851	9,90 %	12.684.234.179	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pendampingan/Pembinaan/So sialisasi pengelolaan B3 dan LB3 di Wilayah Kabupaten Pasuruan	-	-	33 %	513.797.185	67 %	565.176.904	100 %	621.694.594	100 %	1.700.668.683	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase menurunnya pelanggaran Penanggungjawa b Usaha dan /atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	-	-	53%	955.273.000	47%	1.050.800.300	40%	1.155.880.330	40%	3.161.953.630	
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang diakui sesuai dengan usulan MHA	-	-	25%	69.613.390	33%	76.574.729	42%	84.232.202	42%	230.420.321	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga Sekolah, Perusahaan, Ponpes, Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	-	-	5,16%	387.318.250	7,54%	426.050.075	9,94%	468.655.083	9,94%	1.282.023.408	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat/Lem baga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik	-	-	2,80%	125.729.126	3,17%	138.302.038	3,40%	152.132.242	3,40%	416.163.406	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Meningkatnya ketaatan pelaku kegiatan dan/atau usaha melalui penyelesaian penanganan pengaduan di bidang PPLH Kabupaten	100%	-	100%	132.494.670	100%	145.744.137	100%	160.318.551	100%	438.557.358	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase capaian pengurangan sampah terhadap JAKSTRADA	100%	-	79,30 %	6.579.074.188	78%	8.259.597.284	82%	5.438.910.795	82%	20.277.582.267	
		Persentase capaian target penanganan sampah terhadap JAKSTRADA	100%	-	32,10 %	11.416.702.017	43,70%	11.535.756.542	54,90%	16.335.978.413	54,90%	39.288.436.972	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6	UP BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL					2.064.816.500		2.615.000.000		2.910.000.000		7.589.816.500	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	100%	14.135.311.940	100%	14.649.794.940	100%	15.214.794.940	100%	43.999.901.820	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan KTP	-	-	98,82 %	700.000.000	99%	895.000.000	99,10%	995.000.000	99,10%	2.590.000.000	
		Persentase kepemilikan KK	-	-	98,50 %		98,75%		99%		99%		
		Persentase kepemilikan KIA	-	-	35%		40%		45%		45%		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	95%	-	87,50 %	499.816.500	90%	645.000.000	92,50%	710.000.000	92,50%	1.854.816.500	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penyediaan database kependudukan dan pencapil di tingkat Kabupaten	100%	-	100%	650.000.000	100%	800.000.000	100%	900.000.000	100%	2.350.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Data yang terkalifikasi	100%	-	100%	215.000.000	100%	275.000.000	100%	305.000.000	100%	795.000.000	
7	UP BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					12.114.418.448		21.954.069.517		31.772.511.227		65.840.999.192	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	85%	5.950.588.036	87%	7.549.053.010	90%	8.999.973.183	90%	22.499.614.229	
	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa memiliki sarana prasarana yang memadai	21,70%	-	22%	15.000.000	29%	55.000.000	29%	88.000.000	29%	158.000.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang membentuk kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga	-	-	78,89 %	25.000.000	79,47%	70.000.000	80,06%	94.000.000	80,06%	189.000.000	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa yang melaksanakan tata kelola dengan baik	-	-	100%	10.204.418.448	100%	18.537.069.517	100%	26.323.311.227	100%	55.064.799.192	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	80%	-	82%	1.800.000.000	84%	3.030.000.000	86%	4.848.000.000	86%	9.678.000.000	
		Persentase Desa yang meningkatkan volume usahanya (Lembaga Ekonomi Desa/Pasar Desa/KUB/UMKM dan atau memanfaatkan TTG	-	-	7,04%	70.000.000	14,08%	262.000.000	21,11%	419.200.000	21,11%	751.200.000	
8	UP BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA					19.343.100.679		21.245.410.747		23.337.951.822		63.926.463.248	DP3AP2KB

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kecamatan yang melakukan updating SIGA	-	-	100%	795.500.000	100%	875.050.000	100%	962.555.000	100%	2.633.105.000	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase MCPR	-	-	73,50 %	8.869.190.679	73,70%	9.724.109.747	74%	10.664.520.722	74%	29.257.821.148	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan Pembinaan Keluarga aktif melaporkan	-	-	58%	9.678.410.000	58,15%	10.646.251.000	58,20%	11.710.876.100	58,20%	32.035.537.100	
9	UP BIDANG PERHUBUNGAN					34.345.000.000		37.779.500.000		41.557.450.000		113.681.950.000	DINAS PERHUBUNGAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	100%	45.063.000.000	100%	49.569.300.000	100%	54.405.230.000	100%	149.037.530.000	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang tersedia	-	-	72%	19.140.000.000	75%	21.054.000.000	80%	23.159.400.000	80%	63.353.400.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Persentase kendaraan yang diuji	-	-	90%	1.935.000.000	92%	2.128.500.000	94%	2.341.350.000	94%	6.404.850.000	
		Persentase prasarana jalan yang tersedia	-	-	65%	7.250.000.000	65%	7.975.000.000	70%	8.772.500.000	70%	23.997.500.000	
		Persentase terlaksananya audit inspeksi keselamatan LLAJ	-	-	60%	4.495.000.000	67%	4.944.500.000	70%	5.438.950.000	70%	14.878.450.000	
		Persentase wilayah yang terlayani angkutan umum	-	-	56%	1.525.000.000	61%	1.677.500.000	65%	1.845.250.000	65%	5.047.750.000	
10	UP BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					5.560.029.575		5.560.029.575		5.560.029.575		16.680.088.725	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	83,50 %	5.261.447.301	85%	5.261.447.302	85,50 %	5.261.447.303	85,50 %	15.784.341.906	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Jumlah Masyarakat Penerima Informasi	17,13%	10%	10%	2.493.022.100	10%	2.493.022.100	10%	2.493.022.100	10%	7.479.066.300	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Tata Kelola	6,76%	0 level terkelola	0 level terkelola	513.884.600	0 level terkelola	513.884.600	0 level terkelola	513.884.600	0 level terkelola	1.541.653.800	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	38,60%	12,66%	12,66 %	513.884.600	12,66%	513.884.600	12,66%	513.884.600	12,66%	1.541.653.800	
		Persentase akses internet yang disediakan dan terintegrasi oleh Dinas Kominfo	56,20%	56,92%	56,92 %	2.039.238.275	56,92%	2.039.238.275	56,92%	2.039.238.275	56,92%	6.117.714.825	
11	UP BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					4.562.739.962		4.977.303.653		5.520.914.354		15.060.957.969	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	100%	7.946.064.887	100%	8.740.671.375	100%	9.614.738.513	100%	26.301.474.775	
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/USP yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP), dan atau izin operasional	58,82%	-	65%	249.888.100	69,57%	274.876.910	73,08 %	302.363.601	73,08 %	827.128.611	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang tertib Kelembagaannya (Unit usaha)	25,94%	-	28,24 %	329.310.245	30,16%	362.241.270	33,24 %	398.465.396	33,24 %	1.090.016.911	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/ USP Koperasi dengan Kategori Sehat	23,51%	-	24,72 %	417.103.060	26,74 %	417.103.060	28,76 %	504.694.703	28,76 %	1.338.900.823	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM yang bersertifikat SKKNI	12,01%	-	14,89 %	747.943.900	15,85 %	822.738.290	16,81 %	905.012.119	16,81 %	2.475.694.309	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang meningkat akses Pembiayaan dan akses pasar	26,04%	-	28,57 %	1.564.459.622	29,33 %	1.720.905.584	32,50 %	1.892.996.143	32,50 %	5.178.361.349	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMK yang meningkat kualitas Produknya (Terstandarisasi) dan atau terbentuknya jaringan kemitraan	-	-	35 %	1.254.035.035	40 %	1.379.438.539	45 %	1.517.382.392	45 %	4.150.855.966	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
12	UP BIDANG PENANAMAN MODAL					4.047.530.040		4.634.283.044		5.177.711.348		13.859.524.432	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TEADU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	100%	100%	80%	6.904.451.564	80%	7.594.896.720	80%	8.354.386.392	80%	22.853.734.676	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai kepuasan investor terhadap pengembangan iklim penanaman modal	-	76	84	180.000.000	86	380.000.000	88	498.000.000	88	1.058.000.000	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Baru	-	50 Investor	60 Investor	1.453.680.800	70 Investor	1.599.048.880	80 Investor	1.758.953.768	80 Investor	4.811.683.448	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan yang melakukan LKPM	-	250 Perusahaan	220 Perusahaan	379.183.200	230 Perusahaan	417.101.520	240 Perusahaan	458.811.672	240 Perusahaan	1.255.096.392	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase tersedianya data dan informasi penanaman modal	100%	100%	100%	22.000.000	100%	24.200.000	100%	26.620.000	100%	72.820.000	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah layanan terpadu yang diberikan secara digital	0	0	64 Layan an	2.012.666.040	65 Layana n	2.213.932.644	66 Layana n	2.435.325.908	66 Layana n	6.661.924.592	
13	UP BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					9.925.763.636		9.925.763.636		9.925.763.636		29.777.290.908	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	100%	4.806.644.282	100%	4.806.644.282	100%	4.806.644.282	100%	14.419.932.846	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang berdaya saing	-	-	8,85%	1.389.000.000	8,86%	1.389.000.000	8,87%	1.389.000.000	8,87%	4.167.000.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka daerah yang aktif	-	-	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	1.500.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase insan olahraga yang berprestasi	-	-	20%	8.036.763.636	22%	8.036.763.636	24%	8.036.763.636	24%	24.110.290.908	
14	UP BIDANG STATISTIK					41.826.400		41.826.400		41.826.400		125.479.200	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data yang berbagi pakai	59,70%	50%	50%	41.826.400	80%	41.826.400	80%	41.826.400	80%	125.479.200	
15	UP BIDANG PERSANDIAN					714.432.218		714.432.218		714.432.218		2.143.296.654	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SMKI	2,04	Cukup Baik Level	Cukup Baik Level	714.432.218	Cukup Baik Level	714.432.218	Cukup Baik Level	714.432.218	Cukup Baik Level	2.143.296.654	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD			
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
16	UP BIDANG KEBUDAYAAN					6.033.650.000		7.017.900.000		7.895.470.000		20.947.020.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase obyek kebudayaan yang dikembangkan	25%	25%	100%	3.604.750.000	100%	4.323.500.000	100%	5.042.250.000	100%	12.970.500.000		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pelaku seni yang meningkat kapasitasnya	20%	20%	100%	850.000.000	100%	1.010.000.000	100%	1.170.000.000	100%	3.030.000.000		
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal yang dipublikasikan	20%	20%	100%	102.500.000	100%	166.000.000	100%	175.920.000	100%	444.420.000		
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilidungi	25%	25%	100%	916.400.000	100%	938.400.000	100%	947.300.000	100%	2.802.100.000		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase obyek budaya yang dimanfaatkan dalam museum	20%	20%	100%	560.000.000	100%	580.000.000	100%	560.000.000	100%	1.700.000.000		
17	UP BIDANG PERPUSTAKAAN					1.463.722.367		2.128.272.367		2.498.756.774		6.090.751.508	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	100%	7.145.393.027	100%	7.774.747.537	100%	9.080.203.315	100%	24.000.343.879	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan Ber-NSP	1,86%	2,29%	2,70%	842.775.980	3,09%	1.264.775.980	3,47%	1.566.260.387	3,47%	3.673.812.347	
		Persentase Perpustakaan yang berbasis inklusi social	3,90%	3,90%	5 %	330.927.000	5,50%	472.927.000	5,70%	572.927.000	16,20%	1.376.781.000	
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi daerah yang dilestarikan	-	-	20%	290.019.387	20%	390.569.387	20%	359.569.387	60%	1.040.158.161	
18	UP BIDANG KEARSIPAN					1.170.248.000		1.343.248.000		1.354.248.000		3.867.744.000	DINAS PEUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Peningkatan Arsip yang dikelola, dirawat dan dilestarikan	-	-	30%	553.129.000	35%	766.129.000	40%	807.129.000	40%	2.126.387.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perlindungan dan penyelamatan Arsip Daerah	-	-	5%	557.119.000	5,5%	517.119.000	5,5%	487.119.000	16%	1.561.357.000	
	PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP	Persentase Perizinan Penggunaan Arsip	-	-	2%	60.000.000	2%	60.000.000	2%	60.000.000	6%	180.000.000	
(3)	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					131.884.843.185		138.694.648.178		146.851.855.668		417.431.347.031	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					74.204.108.242		80.930.806.823		90.396.817.379		245.531.732.444	
1	UP BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					5.207.012.780		5.207.012.780		5.207.012.780		15.621.038.340	DINAS PERIKANAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	100%	6.367.525.550	100%	6.367.525.550	100%	6.367.525.550	100%	19.102.576.650	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Pengendalian Lahan Perikanan Budidaya	-	-	70%	807.528.200	70%	807.528.200	70%	807.528.200	70%	2.422.584.600	
		Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya		-	1%	1.756.590.200	1,5%	1.756.590.200	2%	1.756.590.200	2%	5.269.770.600	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	-	-	0,3%	1.324.167.100	0,6%	1.324.167.100	0,9%	1.324.167.100	0,9%	3.972.501.300	
		Persentase Produksi Ikan Bernilai Ekonomis	-	-	12%	87.120.000	12%	87.120.000	12%	87.120.000	12%	261.360.000	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kelompok Nelayan yang tertib aturan	-	-	80%	200.000.000	82%	200.000.000	85%	200.000.000	85%	600.000.000	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produk olahan perikanan	-	-	5%	970.738.230	7%	970.738.230	9%	970.738.230	9%	2.912.214.690	
		Persentase usaha yang tersertifikasi dan terstandarisasi	-	-	10%	60.869.050	13,5%	60.869.050	15%	60.869.050	15%	182.607.150	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	UP BIDANG PARIWISATA					18.354.627.650		19.534.627.650		19.674.627.650		57.563.882.950	DINAS PARIWISATA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	100%	7.981.196.520	100%	7.981.196.520	100%	7.981.196.520	100%	23.943.589.560	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata bersertifikat CHSE	20%	-	11%	14.715.000.000	14%	15.790.000.000	17%	16.035.000.000	17%	46.540.000.000	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang meningkat kunjungan wisatanya	14,17%	-	30%	835.000.000	32%	940.000.000	34%	835.000.000	34%	2.610.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang meningkat omsetnya	-	-	25%	395.000.000	27%	395.000.000	30%	395.000.000	30%	1.185.000.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif bersertifikat	25%	-	30%	2.409.627.650	32%	2.409.627.650	34%	2.409.627.650	34%	7.228.882.950	
3	UP BIDANG PERTANIAN					36.624.385.364		41.399.190.357		48.561.397.847		126.584.973.568	
3.1	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN					23.874.024.965		28.648.829.958		35.811.037.448		88.333.892.371	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	100%	26.362.826.457	100%	31.625.391.748	100%	39.519.239.685	100%	97.507.457.890	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan Sarana Pertanian	-	-	3,33%	3.582.063.719	3,83%	4.298.476.463	4,33%	5.373.095.579	4,33%	13.253.635.761	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan prasarana penunjang budidaya pertanian	-	-	1,20%	15.524.573.495	1,21%	18.629.488.194	1,22%	23.286.860.242	1,22%	57.440.921.931	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG AN BENCANA PERTANIAN	Persentase Bencana Pertanian yang ditanggulangi	-	-	75%	1.171.090.406	75,50%	1.405.308.487	76%	1.756.635.609	76%	4.333.034.502	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase produk hasil pertanian/ agribisnis yang terstandarisasi	-	-	45%	160.005.950	50%	192.007.140	55%	240.008.925	55%	592.022.015	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan SDM petani	-	-	5%	3.436.291.395	6%	4.123.549.674	7%	5.154.437.093	7%	12.714.278.162	
		Persentase peningkatan kelembagaan penyuluhan	-	-	4%		8%		12%		12%		
	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN					12.750.360.399		12.750.360.399		12.750.360.399		38.251.081.197	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	100%	12.865.066.815	100%	12.865.066.815	100%	12.865.066.815	100%	38.595.200.445	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Sarana Peternakan	-	-	5%	1.732.219.495	5%	1.732.219.495	5%	1.732.219.495	5%	5.196.658.485	
		Persentase Pengembangan Sarana Peternakan	-	-	10%		10%		10%		10%		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Prasarana Peternakan	-	-	10%	4.812.115.881	10%	4.812.115.881	10%	4.812.115.881	10%	14.436.347.643	
		Persentase Pengembangan Prasarana Peternakan	-	-	5%		5%		5%		5%		
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase ternak yang dilayani	-	-	40%	2.495.917.903	45%	2.495.917.903	50%	2.495.917.903	50%	7.487.753.709	
		Persentase pengawasan produk asal hewan yang ASUH	-	-	60%		62%		64%		64%		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha peternakan yang memiliki izin usaha	-	-	80%	20.805.550	81%	20.805.550	82%	20.805.550	82%	62.416.650	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluhan pertanian pada kelompok/unit usaha yang memiliki usaha olahan ternak	-	-	5,92%	3.689.301.570	6%	3.689.301.570	6,10%	3.689.301.570	6,10%	11.067.904.710	
4	UP BIDANG PERDAGANGAN					6.695.000.000		7.350.000.000		8.005.000.000		22.050.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase jumlah komoditi barang kebutuhan pokok dan penting yang harganya stabil	62,95%	18,52%	22,22%	240.000.000	18,52%	270.000.000	22,22%	300.000.000	22,22%	810.000.000	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase nilai transaksi hasil penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	25%	100%	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	1.050.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase nilai transaksi perdagangan	109,91%	100%	100%	1.145.000.000	100%	1.240.000.000	100%	1.335.000.000	100%	3.720.000.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi	2%	100%	100%	4.400.000.000	100%	4.750.000.000	100%	5.100.000.000	100%	14.250.000.000	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase layanan tera tera ulang terhadap potensi UTTP di kabupaten	129,42%	92,27%	92,73 %	450.000.000	93,64%	550.000.000	94,55%	650.000.000	94,55%	1.650.000.000	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peningkatan hak sewa tempat pasar dan pusat berbelanjaan yang menjadi kewenangan	4,83%	4,57%	5,02%	150.000.000	5,48%	175.000.000	5,93%	200.000.000	5,93%	525.000.000	
		Persentase perusahaan eksportir yang terfasilitasi	19,31%	21,74%	24,15 %	10.000.000	26,57%	15.000.000	28,98%	20.000.000	28,98%	45.000.000	
5	UP BIDANG PERINDUSTRIAN					64.993.817.741		65.193.817.741		65.393.817.741		195.581.453.223	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	106,03%	100%	100%	20.627.492.900	100%	22.091.626.190	100%	23.663.788.809	100%	66.382.907.899	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM unggulan yang dilatih	-	-	100%	62.953.817.741	100%	63.053.817.741	100%	63.153.817.741	100%	189.161.453.223	
		Persentase IKM kreatif yang dilatih	-	-	100%	1.600.000.000	100%	1.700.000.000	100%	1.800.000.000	100%	5.100.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOT A	Persentase IKM wajib IUI yang mempunyai izin usaha industri	-	-	33,33 %	40.000.000	66,67%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	120.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdata di SIINas	-	-	51,50 %	400.000.000	75,75%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	1.200.000.000	
6	UP BIDANG TRANSMIGRASI					9.999.650		9.999.650		9.999.650		29.998.950	DINAS KETENAGAKER JAAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang termonitor	50%	50%	50%	9.999.650	50%	9.999.650	50%	9.999.650	50%	29.998.950	
C	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					99.348.192.462		100.963.370.068		102.675.458.335		302.987.020.865	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					97.839.669.449		98.520.839.919		101.598.972.438		297.959.481.806	
1	SEKRETARIAT DAERAH					41.484.975.544		44.031.843.464		46.738.456.433		132.255.275.441	SEKRETARIAT DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	100%	40.906.957.544	100 %	43.439.375.014	100 %	46.131.537.533	100 %	130.477.870.091	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Laporan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai regulasi	-	-	100%	22.332.472.502	100%	23.672.420.856	100%	25.092.766.112	100%	71.097.659.470	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian, SDA, pembangunan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa yang ditindaklanjuti serta tersedianya data pembangunan yang terlaksana sesuai regulasi	-	-	100%	4.587.154.160	100%	4.862.383.412	100%	5.154.126.423	100%	14.603.663.995	
2	SEKRETARIAT DPRD					72.428.565.800		72.428.565.800		72.428.565.800		217.285.697.400	SEKRETARIAT DPRD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	100%	56.932.711.905	100%	55.081.464.905	100%	55.467.434.905	100%	167.481.611.715	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase program kerja DPRD yang terlaksana	-	-	100%	72.428.565.800	100%	72.428.565.800	100%	72.428.565.800	100%	217.285.697.400	
D	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					689.919.578.724		763.037.487.705		763.230.332.928		2.216.187.399.357	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					126.908.765.283		142.397.411.521		152.132.066.933		421.438.243.737	
1	UNSUR PERENCANAAN					4.282.106.489		4.924.422.462		5.170.643.585		14.377.172.536	BAPPELITBANG DA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	100%	9.456.489.783	100%	10.868.663.251	100%	11.426.318.663	100%	31.751.471.697	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bid PPM dengan dokumen	100%	100%	100%	2.028.106.489	100%	2.332.322.462	100%	2.448.938.585	100%	6.809.367.536	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD			
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		perencanaan pemb daerah												
		Persentase keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PPM	100%	100%	100%		100%		100%		100%			
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD bid Perekonomian, SDA dan Infrastruktur Kewilayahan dengan dok perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%			
		Persentase keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PERSIK	100%	100%	100%		100%		100%		100%			
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase IKU dan IKD yang mencapai target	-	-	85%	2.254.000.000	90%	2.592.100.000	95%	2.721.705.000	95%	7.567.805.000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD			
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Tingkat keselarasan antar bagian dokumen perencanaan pembangunan daerah	-	-	100%		100%		100%		100%			
2	UNSUR KEUANGAN			100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	2.162.341.202.493	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	100%	106.108.407.170	100%	119.710.000.000	100%	127.710.000.000	100%	353.528.407.170		
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyusunan Dokumen Penganggaran yang baik secara tepat waktu dan sesuai regulasi yang berlaku	-	-	95%	667.386.190.421	97%	738.108.926.323	100%	738.232.926.323	100%	2.143.728.043.067		
		Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan yang berlaku	-	-	100%		100%		100%		100%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penggunaan Barang Milik Daerah SKPD yang Berstatus	-	-	100%	785.192.478	100%	1.391.000.000	100%	1.046.000.000	100%	3.222.192.478	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	1,50%	4.705.966.948	2%	5.315.000.000	2,20%	5.370.000.000	2,2%	15.390.966.948	
3	UNSUR KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					10.801.442.388		11.045.656.920		11.045.656.920		32.892.756.228	BKPSDM
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	82%	83%	84%	11.343.868.330	84%	11.818.748.270	86%	12.995.748.270	86%	36.158.364.870	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai aspek kinerja dan penempatan ASN sesuai formasi dan jabatan	-	-	234 Poin	6.921.275.188	240,5 Poin	7.143.421.000	246 Poin	7.143.421.000	246 Poin	21.208.117.188	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai aspek pengembangan karier dan peningkatan kompetensi pegawai	32,50 Poin	52,50 Poin	71,50 Poin	3.880.167.200	72,50 Poin	3.902.235.920	73,50 Poin	3.902.235.920	73,50 Poin	11.684.639.040	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.958.680.000		2.252.482.000		2.365.106.100		6.576.268.100	BAPPELITBANG DA
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Hasil Riset yang diterapkan	-	-	100%	1.958.680.000	100%	2.252.482.000	100%	2.365.106.100	100%	6.576.268.100	
		Tingkat Kematangan inovasi Daerah	-	-	75%		80%		85%		85%		
E	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					6.272.405.480		6.217.405.480		6.217.405.480		18.707.216.440	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					11.404.815.533		11.022.541.547		11.173.276.453		33.600.633.533	
1	INSPEKTORAT					6.272.405.480		6.217.405.480		6.217.405.480		18.707.216.440	INSPEKTORAT
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	100%	100%	100%	11.404.815.533	100%	11.022.541.547	100%	11.173.276.453	100%	33.600.633.533	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENYELANGGARA AN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	85%	87%	89%	5.169.982.980	90%	5.169.982.980	92%	5.169.982.980	92%	15.509.948.940	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase meningkatnya kategori hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A	49%	50%	54%	1.102.422.500	63%	1.047.422.500	72%	1.047.422.500	72%	3.197.267.500	
F	UNSUR KEWILAYAHAN					25.593.329.990		27.649.134.056		29.817.550.702		83.060.014.748	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					101.095.382.225		106.436.958.015		113.058.816.525		320.591.156.765	
1	KECAMATAN BANGIL					9.339.000.000		10.217.150.000		10.937.850.000		30.494.000.000	KECAMATAN BANGIL

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	100%	11.511.700.000	100%	11.265.000.000	100%	11.463.500.000	100%	34.240.200.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	-	-	100%	2.872.000.000	100%	3.154.450.000	100%	3.329.000.000	100%	9.355.450.000	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	-	-	3,51		3,75		4		4		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	-	-	80%	6.162.000.000	90%	6.782.200.000	100%	7.297.350.000	100%	20.241.550.000	
		Persentase kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	-	-	100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	-	-	100%	190.000.000	100%	209.000.000	100%	234.000.000	100%	633.000.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	-	-	100%	40.000.000	100%	44.000.000	100%	48.000.000	100%	132.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	-	-	70%	75.000.000	80%	27.500.000	90%	29.500.000	90%	132.000.000	
2	KECAMATAN BEJI					1.619.295.364		1.717.207.150		1.896.433.536		5.232.936.050	KECAMATAN BEJI
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	90%	-	100%	3.632.507.989	100%	3.910.418.968	100%	4.326.303.150	100%	11.869.230.107	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	95%	-	100%	451.795.364	100%	502.807.150	100%	557.853.536	100%	1.512.456.050	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	-	-	3,51		3,75		4		4		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	62%	-	100%	1.125.000.000	100%	1.166.000.000	100%	1.289.000.000	100%	3.580.000.000	
		Persentase kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	50%	-	100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	41%	-	100%	6.000.000	100%	5.400.000	100%	8.580.000	100%	19.980.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	-	-	100%	23.000.000	100%	35.000.000	100%	22.500.000	100%	80.500.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	-	-	100%	13.500.000	100%	8.000.000	100%	18.500.000	100%	40.000.000	
3	KECAMATAN GEMPOL					305.390.000		325.217.500		310.684.975		941.292.475	KECAMATAN GEMPOL

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	100%	3.095.758.079	100%	3.237.566.983	100%	3.407.466.332	100%	9.740.791.394	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	-	-	100%	67.522.000	100%	68.575.200	100%	69.681.060	100%	205.778.260	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	-	-	3,51		3,75		4		4		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	-	-	100%	83.008.000	100%	83.008.000	100%	83.008.000	100%	249.024.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	-	-	100%	30.972.000	100%	30.972.000	100%	30.972.000	100%	92.916.000	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	-	-	100%	46.458.000	100%	47.232.300	100%	48.045.315	100%	141.735.615	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	-	-	100%	77.430.000	100%	95.430.000	100%	78.978.600	100%	251.838.600	
4	KECAMATAN GONDANG WETAN					1.006.802.000		1.107.482.200		1.218.230.420		3.332.514.620	KECAMATAN GONDANG WETAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	100%	3.875.051.200	100%	4.259.806.320	100%	4.685.786.952	100%	12.820.644.472	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	-	-	100%	232.072.000	100%	255.279.200	100%	280.807.120	100%	768.158.320	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	-	-	3,51		3,75		4		4		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	-	-	100%	719.230.000	100%	791.153.000	100%	870.268.300	100%	2.380.651.300	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Persentase kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	-	-	100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	-	-	85%	26.500.000	90%	29.150.000	95%	32.065.000	95%	87.715.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	-	-	100%	29.000.000	100%	31.900.000	100%	35.090.000	100%	95.990.000	
5	KECAMATAN GRATI					1.290.500.000		1.432.000.000		1.566.125.000		4.288.625.000	KECAMATAN GRATI
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	80%	100%	12.319.077.962	100%	13.149.391.739	100%	14.274.775.913	100%	39.743.245.614	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	90%	95%	100%	175.500.000	100%	193.050.000	100%	212.355.000	100%	580.905.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	-	-	3,51		3,75		4		4		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	-	80%	70%	1.033.000.000	75%	1.136.300.000	80%	1.249.930.000	80%	3.419.230.000	
		Persentase kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	-	80%	100%		75%		80%		80%		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantubum	-	100%	100%	32.500.000	100%	35.200.000	100%	38.720.000	100%	106.420.000	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	-	-	100%	12.500.000	100%	13.750.000	100%	15.125.000	100%	41.375.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	-	80%	70%	37.000.000	75%	53.700.000	80%	49.995.000	80%	140.695.000	
6	KECAMATAN KEJAYAN					331.877.564		365.065.320		401.571.852		1.098.514.736	KECAMATAN KEJAYAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	100%	2.729.103.135	100%	3.002.013.449	100%	3.302.214.793	100%	9.033.331.377	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	-	-	100%	219.015.650	100%	240.917.215	100%	265.008.937	100%	724.941.802	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	-	-	3,50		3,75		4		4		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	-	-	35%	49.230.000	40%	54.153.000	45%	59.568.300	45%	162.951.300	
		Persentase kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	-	-	45%		55%		65%		65%		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	-	-	83%	23.500.000	83%	25.850.000	83%	28.435.000	83%	77.785.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	-	-	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	33.100.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	-	-	100%	30.131.914	100%	33.145.105	100%	36.459.615	100%	99.736.634	
7	KECAMATAN KRATON					176.347.914		193.982.705		213.380.975		583.711.594	KECAMATAN KRATON
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	100%	100%	100%	3.341.060.900	100%	3.675.166.990	100%	4.042.683.689	100%	11.058.911.579	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100%	100%	100%	63.486.000	100%	69.834.600	100%	76.818.060	100%	210.138.660	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	-	-	3,51		3,75		4		4		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	100%	100%	100%	49.230.000	100%	54.153.000	100%	59.568.300	100%	162.951.300	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	100%	100%	100%	23.500.000	100%	25.850.000	100%	28.435.000	100%	77.785.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	-	-	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	33.100.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	-	-	100%	30.131.914	100%	33.145.105	100%	36.459.615	100%	99.736.634	
8	KECAMATAN LEKOK					186.138.414		204.752.255		225.227.480		616.118.149	KECAMATAN LEKOK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	100%	100%	100%	2.504.771.500	100%	2.755.248.650	100%	3.030.773.515	100%	8.290.793.665	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100%	100%	100%	63.486.000	100%	69.834.600	100%	76.818.060	100%	210.138.660	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	-	-	3,51		3,75		4		4		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	100%	100%	100%	49.230.000	100%	54.153.000	100%	59.568.300	100%	162.951.300	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	100%	100%	100%	33.290.500	100%	36.619.550	100%	40.281.505	100%	110.191.555	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100%	100%	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	33.100.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100%	100%	100%	30.131.914	100%	33.145.105	100%	36.459.615	100%	99.736.634	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9	KECAMATAN LUMBANG					176.347.914		193.982.705		213.380.975		583.711.594	KECAMATAN LUMBANG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	100%	2.892.622.900	100%	3.181.885.190	100%	3.500.073.709	100%	9.574.581.799	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100%	100%	100%	63.486.000	100%	69.834.600	100%	76.818.060	100%	210.138.660	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	-	-	3,51		3,75		4		4		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	100%	100%	100%	49.230.000	100%	54.153.000	100%	59.568.300	100%	162.951.300	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	100%	100%	100%	23.500.000	100%	25.850.000	100%	28.435.000	100%	77.785.000	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	-	-	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	33.100.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pemerintahan DESA	Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	-	90%	100%	30.131.914	100%	33.145.105	100%	36.459.615	100%	99.736.634	
10	KECAMATAN NGULING					620.675.000		626.675.000		632.675.000		1.880.025.000	KECAMATAN NGULING
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	100%	9.159.682.180	100%	9.260.682.180	100%	9.420.682.180		27.841.046.540	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN Pemerintahan DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	-	-	100%	159.720.000	100%	161.220.000	100%	162.720.000	100%	483.660.000	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	-	-	3,51		3,75		4		4		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN Masyarakat DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	-	-	100%	265.955.000	100%	267.455.000	100%	268.955.000		802.365.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	-	-	100%	135.000.000	100%	136.500.000	100%	138.000.000		409.500.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	-	-	100%	60.000.000	100%	61.500.000	100%	63.000.000		184.500.000	
11	KECAMATAN PANDAAN					5.172.164.900		5.689.381.390		6.258.319.529		17.119.865.819	KECAMATAN PANDAAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	99%	100%	100%	5.916.131.400	100%	5.916.131.400	100%	5.916.131.400	100%	17.748.394.200	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	-	-	100%	1.023.921.900	100%	1.126.314.090	100%	1.238.945.499	100%	3.389.181.489	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	-	-	3,51		3,75		4		4		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif		-	70%	3.865.000.000	75%	4.251.500.000	80%	4.676.650.000	80%	12.793.150.000 0	
		Persentase kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	-	-	20%		20%		20%		20%		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	-	-	100%	12.243.000	100%	13.467.300	100%	14.814.030	100%	40.524.330	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	-	-	100%	206.000.000	100%	226.600.000	100%	249.260.000	100%	681.860.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	-	-	80%	65.000.000	85%	71.500.000	90%	78.650.000	90%	215.150.000	
12	KECAMATAN PASREPAN					176.347.914		193.982.705		213.380.975		583.711.594	KECAMATAN PASREPAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	92,57%	100%	100%	2.884.628.426	100%	3.173.091.269	100%	3.490.400.395	100%	9.548.120.090	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	96,65%	100%	100%	63.486.000	100%	69.834.600	100%	76.818.060	100%	210.138.660	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	-	-	3,51		3,75		4		4		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	99,96%	100%	100%	49.230.000	100%	54.153.000	100%	59.568.300	100%	162.951.300	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	98,97%	100%	100%	23.500.000	100%	25.850.000	100%	28.435.000	100%	77.785.000	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	-	-	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	33.100.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	-	-	100%	30.131.914	100%	33.145.105	100%	36.459.615	100%	99.736.634	
13	KECAMATAN POHJENTREK					187.000.000		205.700.000		226.270.000		618.970.000	KECAMATAN POHJENTREK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	100%	3.146.112.361	100%	3.460.723.597	100%	3.806.795.957	100%	10.413.631.915	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	-	-	100%	45.000.000	100%	49.500.000	100%	54.450.000	100%	148.950.000	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3,47	3,49	3,51		3,75		4		4		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	-	-	35%	45.000.000	45%	49.500.000	55%	54.450.000	55%	148.950.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	-	-	100%	30.000.000	100%	33.000.000	100%	36.300.000	100%	99.300.000	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	-	-	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	33.100.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	-	-	77%	57.000.000	88%	62.700.000	100%	68.970.000	100%	188.670.000	
14	KECAMATAN PRIGEN					2.041.691.223		2.014.625.785		2.115.357.073		6.171.674.081	KECAMATAN PRIGEN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	92,34%	-	100%	4.535.313.075	100%	4.762.078.729	100%	5.000.182.665	100%	14.297.574.469	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	-	-	100%	377.970.792	100%	267.719.332	100%	281.105.298	100%	926.795.422	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	-	-	3,51		3,75		4		4		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	99,40%	-	100%	1.600.520.431	100%	1.680.546.453	100%	1.764.573.775	100%	5.045.640.659	
		Persentase kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	-	-	100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan ggguan Trantibum	99,78%	-	100%	27.000.000	100%	28.350.000	100%	29.767.500	100%	85.117.500	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	-	-	100%	18.200.000	100%	19.110.000	100%	20.065.500	100%	57.375.500	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	-	-	100%	18.000.000	100%	18.900.000	100%	19.845.000	100%	56.745.000	
15	KECAMATAN PURWODADI					140.500.000		141.202.500		141.908.513		423.611.013	KECAMATAN PURWODADI

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	100%	100%	100%	3.105.960.000	100%	3.121.489.800	100%	3.137.097.249	100%	9.364.547.049	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100%	100%	100%	38.000.000	100%	38.190.000	100%	38.380.950	100%	114.570.950	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	-	-	3,51		3,75		4		4		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	100%	100%	100%	40.000.000	100%	40.200.000	100%	40.401.000	100%	120.601.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	100%	100%	100%	27.500.000	100%	27.637.500	100%	27.775.688	100%	82.913.188	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	-	-	100%	10.000.000	100%	10.050.000	100%	10.100.250	100%	30.150.250	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	-	-	100%	25.000.000	100%	25.125.000	100%	25.250.625	100%	75.375.625	
16	KECAMATAN PURWOSARI					1.191.331.451		1.310.464.596		1.441.511.056		3.943.307.103	KECAMATAN PURWOSARI
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	100%	4.299.953.226	100%	4.729.948.549	100%	5.202.943.403	100%	14.232.845.178	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	-	-	100%	20.570.000	100%	22.627.000	100%	24.889.700	100%	68.086.700	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	-	-	3,51		3,75		4		4		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	-	-	35%	1.100.451.451	40%	1.210.496.596	45%	1.331.546.256	45%	3.642.494.303	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Persentase kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	-	-	45%		55%		65%		65%		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	-	-	100%	30.250.000	100%	33.275.000	100%	36.602.500	83%	100.127.500	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	-	-	100%	25.045.000	100%	27.549.500	100%	30.304.450	100%	82.898.950	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	-	-	100%	15.015.000	100%	16.516.500	100%	18.168.150	100%	49.699.650	
17	KECAMATAN PUSPO					176.347.914		193.982.705		213.380.975		583.711.594	KECAMATAN PUSPO
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	95,77%	95%	100%	2.726.103.135	100%	2.998.713.449	100%	3.298.584.793	100%	9.023.401.377	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	92,85%	98%	100%	63.486.000	100%	69.834.600	100%	76.818.060	100%	210.138.660	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	-	-	3,51		3,75		4		4		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	100%	100%	100%	49.230.000	100%	54.153.000	100%	59.568.300	100%	162.951.300	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Transtibum	100%	100%	100%	23.500.000	100%	25.850.000	100%	28.435.000	100%	77.785.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	-	-	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	33.100.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	-	-	100%	30.131.914	100%	33.145.105	100%	36.459.615	100%	99.736.634	
18	KECAMATAN REJOSO					137.000.000		150.700.000		165.770.000		453.470.000	KECAMATAN REJOSO

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	100%	100%	100%	3.048.189.542	100%	3.353.008.496	100%	3.688.309.346	100%	10.089.507.384	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100%	100%	100%	43.000.000	100%	47.300.000	100%	52.030.000	100%	142.330.000	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3,45	3,48	3,52		3,77		4,45		4,45		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	100%	100%	100%	58.000.000	100%	63.800.000	100%	70.180.000	100%	191.980.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	100%	100%	100%	21.000.000	100%	23.100.000	100%	25.410.000	100%	69.510.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100%	100%	100%	15.000.000	100%	16.500.000	100%	18.150.000	100%	49.650.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
19	KECAMATAN REMBANG					360.500.000		360.500.000		360.500.000		1.081.500.000	KECAMATAN REMBANG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	72,82	100%	100%	3.147.006.588	100%	3.147.006.588	100%	3.147.006.588	100%	3.147.006.588	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100%	100%	100%	80.500.000	100%	80.500.000	100%	80.500.000	100%	241.500.000	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	-	-	3,51		3,75		4		4		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	100%	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	150.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	100%	100%	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	240.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100%	100%	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000		120.000.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100%	100%	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000		330.000.000	
20	KECAMATAN SUKOREJO					176.347.914		193.982.705		213.380.975		583.711.594	KECAMATAN SUKOREJO
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	100%	2.729.103.135	100%	3.002.013.449	100%	3.302.214.793	100%	9.033.331.377	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	-	-	100%	63.486.000	100%	69.834.600	100%	76.818.060	100%	210.138.660	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	-	-	3,51		3,75		4		4		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/keurahan yang aktif	-	-	35%	49.230.000	35%	54.153.000	35%	59.568.300	35%	162.951.300	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	-	-	83%	23.500.000	83%	25.850.000	83%	28.435.000	83%	77.785.000	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	-	-	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	33.100.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	-	-	100%	30.131.914	100%	33.145.105	100%	36.459.615	100%	99.736.634	
21	KECAMATAN TOSARI					234.722.124		258.194.336		284.013.770		776.930.230	KECAMATAN TOSARI
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	95,77%	95%	100%	2.507.883.855	100%	2.758.672.241	100%	3.034.539.465	100%	8.301.095.561	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	92,85%	98%	100%	119.553.960	100%	131.509.356	100%	144.660.292	100%	395.723.608	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	2,64	3,01	3,51		3,75		4		4		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	100%	100%	100%	49.230.000	100%	54.153.000	100%	59.568.300	100%	162.951.300	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	100%	100%	100%	25.806.250	100%	28.386.875	100%	31.225.563	100%	85.418.688	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	-	-	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	33.100.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	-	-	100%	30.131.914	100%	33.145.105	100%	36.459.615	100%	99.736.634	
22	KECAMATAN TUTUR					164.000.000		182.000.000		189.000.000		535.000.000	KECAMATAN TUTUR

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	100%	100%	100%	1.797.894.797	100%	1.832.894.797	100%	1.844.894.797	100%	5.475.684.391	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	100%	100%	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	190.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	100%	100%	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	175.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	100%	100%	100%	9.000.000	100%	12.000.000	100%	14.000.000	100%	35.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	-	-	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	45.000.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	-	-	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	90.000.000	
23	KECAMATAN WINONGAN					158.002.380		165.902.499		174.197.624		498.102.503	KECAMATAN WINONGAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	100%	100%	100%	2.884.766.840	100%	3.054.005.182	100%	3.205.455.441	100%	9.144.227.463	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100%	100%	100%	7.236.000	100%	7.597.800	100%	7.977.690	100%	22.811.490	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	-	-	3,51		3,75		4		4		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	100%	100%	100%	27.197.140	100%	28.556.997	100%	29.984.847	100%	85.738.984	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	100%	100%	100%	50.317.200	100%	52.833.060	100%	55.474.713	100%	158.624.973	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100%	100%	100%	13.533.740	100%	14.210.427	100%	14.920.948	100%	42.665.115	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100%	100%	100%	59.718.300	100%	62.704.215	100%	65.839.426	100%	188.261.941	
24	KECAMATAN WONOREJO					225.000.000		205.000.000		205.000.000		635.000.000	KECAMATAN WONOREJO
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	100%	100%	3.305.000.000	100%	3.430.000.000	100%	3.530.000.000	100%	10.265.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	-	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	150.000.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	-	-	3,51		3,75		4		4		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	-	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	150.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	-	100%	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	120.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	-	100%	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	120.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	-	100%	100%	45.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	95.000.000	
G	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					85.147.833.422		20.949.527.186		21.377.501.316		127.474.861.924	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					5.215.792.686		4.732.000.288		4.732.000.288		14.679.793.262	
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					85.147.833.422		20.949.527.186		21.377.501.316		127.474.861.924	BAKESBANGPO L
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	-	-	100%	5.215.792.686	100%	4.732.000.288	100%	4.732.000.288	100%	14.679.793.262	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase laporan penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti	-	-	100%	5.738.370.200	100%	5.861.665.700	100%	5.987.882.600	100%	17.587.918.500	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang paham akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	82%	85%	90%	1.247.915.400	91%	1.272.873.708	92%	1.298.331.182	92%	3.819.120.290	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGR AM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	Target	Anggaran Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang terfasilitasi dalam Penguatan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	90,48%	92%	100%	510.000.000	100%	520.200.000	100%	530.604.000	100%	1.560.804.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang paham akan Etika dan Budaya Politik	-	-	82%	73.541.550.000	84%	9.100.070.000	85%	9.282.071.400	85%	91.923.691.400	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N	Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif	-	-	22%	4.109.997.822	25%	4.194.717.778	25%	4.278.612.134	25%	12.583.327.734	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1 Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode perencanaan. Adapun target Indikator Kinerja Utama dan target selama tiga tahun ke depan disajikan dalam Tabel 8.1

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Proyeksi 2023	Target		
					2024	2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,32	5,81	5,86	5,92	5,97
2	Persentase Penduduk Miskin	%	8,96	8,69	8,42	8,15	7,88
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	69,68	70,25	70,82	71,39	71,96
4	Indeks Gini	-	0,325	0,319	0,310	0,301	0,292
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,91	5,86	5,81	5,76	5,71
6	Pendapatan Perkapita	Ribu Rupiah	106.640	10.938	11.154	11.374	11.598
7	Indeks Reformasi Birokrasi	-	66,65 (B)	67,56 (B)	68,04 (B)	69,52 (B)	71 (BB)
8	Indeks Wiliamson	-	0,264	0,258	0,251	0,245	0,238
9	Nilai PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK)	Juta Rupiah	5.806.218,76	5.957.711,8	5.971.224,9	5.984.738,1	5.998.251,3
10	Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan (ADHK)	Juta Rupiah	68.682.592,55	70.031.504,5	72.486.250,1	74.940.995,8	77.395.741,5
11	Nilai Investasi Daerah	Miliar Rupiah	12.600	8.790,47	9.300	9.400	9.500
12	Indeks Infrastruktur Wilayah	-	11,57	11,69	47,27	48,15	49,30
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	59,78	61,142	62,504	62,741	62,852
14	Indeks Risiko Bencana	-	126,32	125,91	125,5	106,27	99,35
15	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	90,94	91,11	91,22	91,33	91,44
16	Indeks Pembangunan Keluarga	-	55,21	56,60	57,10	57,60	58,10
17	Indeks Ketahanan Pangan	-	77,40	78,05	78,39	78,74	79,09
18	Nilai SAKIP	-	77,29	79,28 (BB)	80,30 (A)	81,4 (A)	82,5 (A)
19	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	n/a	WTP	WTP	WTP	WTP
20	Indeks Profesionalitas ASN	-	54,67	54,72	54,77	54,82	54,87
21	Indeks SPBE	-	2,04	2,25	2,50	2,75	3
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	90,32	90,35	90,40	90,70	90,97

Catatan: Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator tujuan dan sasaran RPD

8.2 Indikator Kinerja Daerah

IKD adalah indikator kinerja daerah yang terdiri dari indikator kinerja kunci pada Permendagri No. 18 Tahun 2020. Adapun pembagian dan target indikator kinerja daerah dapat dilihat pada tabel 8.2 sebagai berikut.

Tabel 8.2 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	RPD Tahun 2024-2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
					Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026		
Urusan Pendidikan									
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	89,20	89,30	89,40	89,50	89,60	89,60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	93,82	94	94,10	94,20	94,30	94,30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	83,97	84,10	84,20	84,30	84,40	84,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	12,32	12,50	12,60	12,70	12,80	12,80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	RPD Tahun 2024-2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
					Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026		
Urusan Kesehatan									
5	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	0,0696	0,0696	0,0713	0,0731	0,0748	0,0748	Dinas Kesehatan
6	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	%	0,0696	0,0696	0,0713	0,0731	0,0748	0,0748	Dinas Kesehatan
7	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	88,89	88,89	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
8	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	102,63	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
9	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100,23	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
10	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	103,15	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
11	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100,50	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	RPD Tahun 2024-2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
					Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026		
12	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
13	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100,07	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
14	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	94,24	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
15	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	90,16	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
16	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	109,13	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	RPD Tahun 2024-2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
					Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026		
17	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	103,55	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
18	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	102,65	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
19	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100,62	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
20	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	73,43	74,21	74,9	75,59	76,28	76,28	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	RPD Tahun 2024-2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
					Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026		
21	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	86,72	87,56	88,41	89,25	90,09	90,09	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
22	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	81,81	81,82	81,83	81,84	81,85	81,85	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
23	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	30,93	31,19	31,76	32,06	32,24	32,24	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
24	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	79,88	79,89	79,90	79,91	79,92	79,92	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	RPD Tahun 2024-2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
					Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026		
25	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	35	33	35	37	39	39	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
26	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Urusan Perumahan Rakyat									
27	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
28	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	14,75	17,51	21,19	24,87	28,54	28,54	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	RPD Tahun 2024-2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
					Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026		
29	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	6	5,21	4,87	4,53	4,19	4,19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
30	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
31	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
32	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
33	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	BPBD

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	RPD Tahun 2024-2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
					Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026		
34	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	BPBD
35	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	BPBD
36	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	97,38	100	100	100	100	100	Satpol PP
37	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
Urusan Sosial									

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	RPD Tahun 2024-2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
					Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026		
38	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pegemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	67,8	73	78	84	90	90	Dinas Sosial
39	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
Urusan Tenaga Kerja									
40	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	70,55	70,55	70,55	70,55	70,55	70,55	Dinas Ketenagakerjaan
41	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	93	93,5	94	94,5	95	95	Dinas Ketenagakerjaan

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	RPD Tahun 2024-2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
					Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026		
42	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	128.152.480	128.319.078	128.487.176	128.656.779	128.827.893	128.827.893	Dinas Ketenagakerjaan
43	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	9	9,49	9,58	9,68	9,79	9,79	Dinas Ketenagakerjaan
44	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	40,48	40,5	41	41,5	42	42	Dinas Ketenagakerjaan
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
45	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	23,05	23,1	23,1	23,15	23,2	23,2	DP3AP2KB

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	RPD Tahun 2024-2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
					Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026		
46	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,012	0,01	0,008	0,006	0,004	0,004	DP3AP2KB
47	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	9,76	9,5	9,2	9	8,8	8,8	DP3AP2KB
Urusan Pangan									
48	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	100,56	100,56	101,56	102,56	103,56	103,56	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Urusan Pertanahan									
49	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
50	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Ha	0	2,113	4,8	4,8	4,8	4,8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	RPD Tahun 2024-2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
					Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026		
51	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	m2	100	671,802	1.000,21	1.000,21	1.000,21	1.000,21	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
52	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Sengketa	0	3	3	3	3	3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Urusan Lingkungan Hidup									
53	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	22,74	35	45	54	63	100	Dinas Lingkungan Hidup
54	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	50	51	52	53,33	60	60	Dinas Lingkungan Hidup
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	RPD Tahun 2024-2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
					Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026		
55	Perekaman KTP elektronik	%	98,65	98,73	98,82	98,97	99,10	99,1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
56	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	24,19	30	35	40	45	45	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
57	Kepemilikan akta kelahiran	%	80,63	85	87,5	90	92,50	92,5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
58	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	7,27	9,09	10,1	12,73	14,54	14,54	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
59	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	0	142	132	122	112	112	DPMD
60	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	22,37	25,35	28,79	32,79	37,50	37,50	DPMD
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	RPD Tahun 2024-2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
					Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026		
61	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,04	2	1,98	1,96	1,94	1,94	DP3AP2KB
62	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	73,24	73,5	73,7	74	74,2	74,2	DP3AP2KB
63	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	13,25	13	12,8	12,6	12,4	12,4	DP3AP2KB
Urusan Perhubungan									
64	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	39	39	42	42	45	45	Dinas Perhubungan
65	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	%	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	Dinas Perhubungan
Urusan Komunikasi dan Informatika									
66	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	58	64	70	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	RPD Tahun 2024-2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
					Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026		
67	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	35	36	38	40	42	42	Dinas Komunikasi dan Informatika
68	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	17,16	20,4	21,7	21,7	24,3	24,3	Dinas Komunikasi dan Informatika
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
69	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	21,05	21,93	22,81	23,68	24,56	24,56	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
70	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	0,16	0,17	0,18	0,19	0,2	0,2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Urusan Penanaman Modal									

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	RPD Tahun 2024-2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
					Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026		
71	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	51,8	1	1,01	1,02	1,03	1,03	DPMPT-SP
Urusan Pemuda dan Olahraga									
72	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0	0,04	0,013	0,015	0,016	0,016	Dinas Pemuda dan Olahraga
73	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	8,83	8,9	9	9,1	9,2	9,2	Dinas Pemuda dan Olahraga
74	Peningkatan prestasi olahraga	%	15	20	20	22	25	25	Dinas Pemuda dan Olahraga
Urusan Statistik									

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	RPD Tahun 2024-2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
					Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026		
75	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	61,54	61,54	62	64	64	64	Dinas Komunikasi dan Informatika
76	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	61,54	61,54	62	64	64	64	Dinas Komunikasi dan Informatika
Urusan Persandian									
77	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	48,37	56,26	62,02	69,77	77,52	77,52	Dinas Komunikasi dan Informatika
Urusan Kebudayaan									
78	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	7,5269	7,60	7,70	7,80	7,90	7,90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Urusan Perpustakaan									

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	RPD Tahun 2024-2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
					Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026		
79	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	57,7	84,50	85	85,50	860	86	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
80	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	8	8,50	8,60	8,70	8,80	8,80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Kearsipan									
81	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	-	75	75	78	80	82	82	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	RPD Tahun 2024-2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
					Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026		
82	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	-	0,17	0,19	0,2	0,3	0,4	0,4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Kelautan dan Perikanan									
83	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	44.041,87	44.064,37	44.339,52	44.512,56	44.715,59	44.715,59	Dinas Perikanan
	Tangkap	Ton	23.604,10	23.642,50	23.713,43	23.784,36	23.885,28	23.885,28	Dinas Perikanan
	Budidaya	Ton	20.437,77	20.421,87	20.626,09	20.728,20	20.830,31	20.830,31	Dinas Perikanan
Urusan Pariwisata									

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	RPD Tahun 2024-2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
					Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026		
84	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	17	19	20	21	22	22	Dinas Pariwisata
85	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	17	19	20	21	22	22	Dinas Pariwisata
86	Tingkat hunian akomodasi	Rp	200.000	210.000	220.500	231.525	243.101	243.101	Dinas Pariwisata
87	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Rp	n/a	3.384.025	3.722.427	4.094.670	4.504.137	4.504.137	Dinas Pariwisata
88	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rp	350.000.000	375.000.000	425.000.000	475.000.000	525.000.000	525.000.000	Dinas Pariwisata
Urusan Pertanian									
89	Produktivitas pertanian per hektar per tahun								Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Tanaman Pangan :								Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	RPD Tahun 2024-2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
					Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026		
	Padi	Ton/Ha	6,03	6,03	6,0722	6,1144	6,1566	6,1566	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Jagung	Ton/Ha	6,41	6,41	6,46	6,51	6,56	6,56	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Kedelai	Ton/Ha	1,91	1,91	1,92	1,93	1,94	1,94	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Tanaman Buah Tahunan	Kg/Pohon	90,17	90,17	90,8	91,43	92,06	92,06	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Tanaman Sayur	Ton/Ha	35,67	35,9	36,13	36,36	36,59	36,59	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Tanaman Hias	Tangkai/m2	19,9	20,04	20,18	20,32	20,46	20,46	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
90	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	2	2	2	2	2	2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Urusan Perdagangan									

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	RPD Tahun 2024-2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
					Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026		
91	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	129,42	92,27	92,73	93,18	93,64	93,64	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Urusan Perindustrian									
92	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	9,88	9,89	9,9	9,91	9,92	9,92	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
93	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)	%	30	30	30	30	50	50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
94	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sekretariat Daerah									

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	RPD Tahun 2024-2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
					Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026		
95	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
96	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	13,44	15	17	20	25	25	Sekretariat Daerah
97	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	43,18	50	55	60	65	65	Sekretariat Daerah
98	Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%	567,38	5	10	12	15	15	Sekretariat Daerah
Kepegawaian									

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	RPD Tahun 2024-2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
					Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026		
99	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%							BKPSDM
	a. Pendidikan Tinggi	%	66,35	66,5	66,65	66,8	66,95	66,95	BKPSDM
	b. Menengah	%	29,37	29,38	29,39	29,4	29,41	29,41	BKPSDM
	c. Dasar	%	4,28	4,27	4,26	4,25	4,24	4,24	BKPSDM
100	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	13,11	13,12	13,13	13,14	13,15	13,15	BKPSDM
101	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	43,69	43,74	43,79	43,84	43,89	43,89	BKPSDM
Keuangan									
102	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	8,3649	8,3649	9,17	9,26	9,38	9,38	BPKPD

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	RPD Tahun 2024-2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
					Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026		
103	Rasio PAD	%	22,4192	22,4192	20,04	20,23	20,48	20,48	BPKPD
104	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	86,8225	86,8225	77,08	77,34	78,99	78,99	BPKPD
105	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-5,3516	-5,3516	-7,85	-7,5	-8,06	-8,06	BPKPD
106	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	9,7569	9,7569	1,5	1,85	2,25	2,25	BPKPD
107	Manajemen Aset	-	2.731.023	2.731.023	2.790.105	2.851.487	2.914.219	2.914.219	BPKPD
	Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	BPKPD
	Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	BPKPD
	Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	BPKPD

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	RPD Tahun 2024-2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
					Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026		
	Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	BPKPD
108	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	9,87	9,87	1,98	2,14	2,12	2,12	BPKPD
Pengawasan									
109	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat
110	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat

Tabel 8.3
Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

No.	Indikator Kinerja	Pernjelasan atau Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Pertumbuhan Ekonomi	$\left(\frac{PDRB\ ADHK\ th\ N}{PDRB\ ADHK\ th\ N - 1} - 1 \right) \times 100\%$	BPS
2	Persentase Penduduk Miskin	$\frac{\sum \text{penduduk di bawah garis kemiskinan}}{\sum \text{penduduk}} \times 100\%$	BPS
3	Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$ <p>Capaian IPM dikelompokkan ke dalam 4 kelompok yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok “Sangat Tinggi” : $IPM \geq 80$ 2. Kelompok “Tinggi” : $70 \leq IPM < 80$ 3. Kelompok “Sedang” : $60 \leq IPM < 70$ 4. Kelompok “Rendah” : $IPM < 60$ 	
4	Indeks Gini	$R = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (F_{ci} + F_{ci-1})$ <p>GR : Koefisien Gini F_{pi} : frekuensi penduduk kelas pengeluaran ke-1 F_{ci} : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dlm kelas pengeluaran ke (i-1) F_{ci-1} : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)</p> <p>Indeks Gini berkisar 0 – 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Kategori Indeks Gini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendah apabila nilainya kurang dari 0,3 2. Moderat apabila nilainya antara 0,3 hingga 0,5 3. Tinggi apabila nilainya lebih besar dari 0,5 	BPS
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	$TPT : \frac{PP}{P\ AK} \times 100\%$ <p>TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka (%) PP : Jumlah pengangguran (orang) P AK : Jumlah angkatan kerja (orang)</p>	BPS
6	Pendapatan Perkapita	$\frac{PDRB\ Atas\ Dasar\ Harga\ Berlaku}{Jumlah\ Penduduk\ Pertengahan\ Tahun}$	BPS

No.	Indikator Kinerja	Pernjelasan atau Formulasi Perhitungan	Sumber Data
7	Indeks Reformasi Birokrasi	<p>Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah oleh KemenPAN-RB tahun n-1</p> <p>Nilai berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istimewa (AA) apabila nilainya antara 91 – 100 2. Memuaskan (A) apabila nilainya antara 81 – 90 3. Sangat Baik (BB) apabila nilainya antara 70 – 80 4. Baik (B) apabila nilainya antara 60 – 70 5. Cukup (CC) apabila nilainya antara 50 – 60 6. Kurang (C) apabila nilainya antara 30 – 50 7. Sangat Kurang (D) apabila nilainya antara 0 – 30 	LHE Kemen PAN-RB
8	Indeks Wiliamson	$IW = \frac{\sqrt{(Y_i - Y)^2 \cdot i \cdot n}}{Y}$ <p>Y_i: PDRB Perkapita Kec i Y : PDRD Perkabita Kab F_i : Penduduk Kec i N : Penduduk Kab</p>	Bappelitbangda
9	Nilai PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK)	<p>Jumlah PDRB ADHK Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun (n) — PDRB ADHK Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun (n-1)</p> <hr/> <p>PDRB ADHK Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun (n-1) X 100 %</p>	BPS
10	Nilai PDRB Kategori Industri Pengolahan (ADHK)	<p>Jumlah PDRB ADHK Industri Pengolahan tahun (n) — PDRB ADHK Industri Pengolahan tahun (n-1)</p> <hr/> <p>PDRB ADHK Industri Pengolahan Tahun (n-1) X 100 %</p>	BPS
11	Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi yang tercatat dalam LKPM Online	LKPM Online
12	Indeks Infrastruktur Wilayah	<p>Rata-Rata (Indeks Aksesibilitas + Indeks Infrastruktur SDA Cipta Karya + Indeks Infrastruktur Perhubungan + Indeks Kinerja Pengolahan Sampah)</p> <p><u>Formulasi</u></p> <p>Indeks Aksesibilitas = $\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten}} \times 100 \%$</p> <p>Indeks = Rata-Rata (Persentase Indeks SDA</p>	Bappelitbangda

No.	Indikator Kinerja	Pernjelasan atau Formulasi Perhitungan	Sumber Data
		<p>Infrastruktur + Persentase Indeks Infrastruktur SDA Cipta Karya Keciptakaryaan</p> <p>Indeks Infrastruktur = $\frac{\text{Persentase Jaringan Trayek Perhubungan Angkutan Umum yang Tersedia} + \text{Persentase Prasarana Perhubungan yang Tersedia} + \text{Capaian Penurunan Angka}}{3}$</p> <p>Indeks Kinerja Pengolahan Sampah adalah Pembobotan dari Indeks Pengelolaan Pemerintahan dan Indeks Efektivitas dan Efisiensi</p>	
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<p>Nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan, dengan pembobotan 37,6% IKA + 40,5% IKU + 21,9% IKL</p> <p>Capaian IKLH dikelompokkan ke dalam 4 kelompok yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok “Sangat Baik” : $90 \leq \text{IKLH} < 100$ 2. Kelompok “Baik” : $70 \leq \text{IKLH} < 90$ 3. Kelompok “Sedang” : $50 \leq \text{IKLH} < 70$ 4. Kelompok “Kurang” : $25 \leq \text{IKLH} < 50$ 5. Kelompok “Sangat Kurang” : $0 \leq \text{IKLH} < 25$ 	Dinas Lingkungan Hidup
14	Indeks Risiko Bencana	<p>$\text{Risiko Bencana} = \frac{\text{Ancaman} \times \text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$</p> <p>IRB diklasifikasikan menjadi 3 Kategori, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kategori Rendah jika nilai IRB kurang dari 13 2. Kategori Sedang jika nilai IRB antara 13 sampai 144 3. Kategori Tinggi jika nilai IRB lebih besar dari 144 	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
15	Indeks Pembangunan Gender	<p>Menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM laki-laki.</p> <p>$\text{IPG} = \frac{\text{IPM perempuan}}{\text{IPM laki-laki}}$</p> <p>IPG diklasifikasikan menjadi 2 Kategori, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kategori Rendah jika nilai IPG kurang dari 90 5. Kategori Tinggi jika nilai IPG lebih besar sama dengan 90 	BPS

No.	Indikator Kinerja	Pernjelasan atau Formulasi Perhitungan	Sumber Data														
16	Indeks Pembangunan Keluarga	Rata-Rata (Dimensi Ketenteraman + Dimensi Kemandirian + Dimensi Kebahagiaan) Nilai berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: 1. Kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40 2. Cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 – 70 3. Baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70	BKKBN														
17	Indeks Ketahanan Pangan	$Y(j) = \sum_{i=1}^9 \alpha_i X_{ij}$ <p> <i>i</i> : Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9 <i>j</i> : Kabupaten ke-1, 2, 3, ... 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, ... 96, 97, dan 98 <i>Y_j</i> : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-<i>j</i> <i>α_i</i> : Bobot masing-masing indikator ke-<i>i</i> <i>X_{ij}</i> : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-<i>i</i> pada kabupaten/kota ke-<i>j</i> </p> <table border="1" data-bbox="568 1447 1062 1854"> <thead> <tr> <th>Kelompok Indeks Ketahanan Pangan</th> <th>Kabupaten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>< = 41,52</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>> 41,42 – 51,42</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>> 51,42 – 59,58</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>> 59,58 – 67,75</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>> 67,75 – 75,68</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>> 75,68</td> </tr> </tbody> </table> <p> Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten yang memiliki ketahanan pangan paling baik. </p>	Kelompok Indeks Ketahanan Pangan	Kabupaten	1	< = 41,52	2	> 41,42 – 51,42	3	> 51,42 – 59,58	4	> 59,58 – 67,75	5	> 67,75 – 75,68	6	> 75,68	Badan Pangan Nasional
Kelompok Indeks Ketahanan Pangan	Kabupaten																
1	< = 41,52																
2	> 41,42 – 51,42																
3	> 51,42 – 59,58																
4	> 59,58 – 67,75																
5	> 67,75 – 75,68																
6	> 75,68																
18	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi KemenPAN-RB terdiri dari 4 komponen : 1. Perencanaan kinerja	Hasil Evaluasi KemenPAN-RB														

No.	Indikator Kinerja	Pernjelasan atau Formulasi Perhitungan	Sumber Data
		2. Pengukuran kinerja 3. Pelaporan kinerja 4. Evaluasi kinerja internal Nilai berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: 1. Sangat Memuaskan (AA) apabila nilainya antara 91 – 100 2. Memuaskan (A) apabila nilainya antara 81 – 90 3. Sangat Baik (BB) apabila nilainya antara 70 – 80 4. Baik (B) apabila nilainya antara 60 – 70 5. Cukup (CC) apabila nilainya antara 50 – 60 6. Kurang (C) apabila nilainya antara 30 – 50 7. Sangat Kurang (D) apabila nilainya antara 0 – 30	
19	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa Auditor BPK telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia	Hasil Evaluasi BPK
20	Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator $IP = IP1 + IP2 + IP3 + IP4$ IP1 : IP dimensi kualifikasi (25%) IP2 : IP dimensi kompetensi (40%) IP3 : IP dimensi kinerja (30%) IP4 : IP dimensi disiplin (5%) Nilai berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: 1. Sangat Tinggi apabila nilainya antara 91 – 100 2. Tinggi apabila nilainya antara 81 – 90 3. Sedang apabila nilainya antara 71 – 80 4. Rendah apabila nilainya antara 61 – 70 5. Sangat Rendah apabila nilainya di bawah 60	BKN (Aplikasi IP ASN)
21	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Penilaian KemenPANRB, dengan menggunakan 3 domain, yaitu : (1) Kebijakan (Tata Kelola dan Layanan); (2) Tata Kelola (Kelembagaan, strategi dan	Hasil Evaluasi KemenPAN-RB

No.	Indikator Kinerja	Pernjelasan atau Formulasi Perhitungan	Sumber Data
		<p>perencanaan, serta TIK); (3) Layanan (administrasi pemerintahan dan pelayanan publik)</p> <p>Nilai berkisar antara 0-5 dengan kategori sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memuaskan apabila nilainya antara 4,2 – 5,0 2. Sangat Baik apabila nilainya antara 3,5 – < 4,2 3. Baik apabila nilainya antara 2,6 – < 3,5 4. Cukup apabila nilainya antara 1,8 – < 2,6 5. Kurang apabila nilainya kurang dari 1,8 	
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Diukur berdasarkan hasil survei kepada masyarakat atas pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan. Diukur berdasar 9 unsur pelayanan, antara lain persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarpras, serta penanganan pengaduan, saran dan masukan</p> <p>Nilai berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat Baik (B) apabila nilainya antara 88,31 – 100 2. Baik apabila nilainya antara 76,61 – 88,30 3. Kurang Baik apabila nilainya antara 65 – 76 4. Tidak Baik apabila nilainya antara 25 – 64,99 	Sekretariat Daerah (Aplikasi e-bukutamu)

Tabel 8.4
Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

Urusan	Indikator Kinerja	Pernjelasan atau Formulasi Perhitungan
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar		
Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD x 100% Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Dasar x 100% Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-13 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah Pertama x 100% Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraanx 100% Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan
Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukanX100% Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukanX100% Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota
	Persentase RS Rujukan Tingkat	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasiX100%

Urusan	Indikator Kinerja	Pernjelasan atau Formulasi Perhitungan
	Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Jumlah RS di Kabupaten/Kota
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatanX100% Jumlah Ibu hamil di Kabupaten
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinanX100% Jumlah ibu bersalin di Kabupaten/Kota
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar X 100% Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten Pasuruan
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar X 100% Jumlah balita di Kabupaten/kota
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar X 100% Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten/kota
	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar X 100% Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten/Kota
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota

Urusan	Indikator Kinerja	Pernjelasan atau Formulasi Perhitungan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita DM di kabupaten/kota
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting ----- x 100 % luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. ----- x 100 % Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.
	Persentase jumlah rumah tangga yang	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa

Urusan	Indikator Kinerja	Pernjelasan atau Formulasi Perhitungan
	memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{cubluk} + \text{jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT} + \text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten A}} \times 100 \%$
	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100 \%$
	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\text{Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota}} \times 100 \%$
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di kabu/kota yang dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100 \%$
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100 \%$
Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100 \%$
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100 \%$
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten/kota}} \times 100 \%$

Urusan	Indikator Kinerja	Pernjelasan atau Formulasi Perhitungan
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- x 100 % Jumlah unit rumah kab/kota
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani ----- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ----- x 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan

Urusan	Indikator Kinerja	Pernjelasan atau Formulasi Perhitungan
		Penyelamatan/Perangkat Daerah $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota}} \times 100 \%$
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran
Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti $\frac{\text{-----}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100 \%$
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran $\frac{\text{-----}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota}} \times 100 \%$
Urusan Wajib non Dasar		
Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota}} \times 100\%$
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan

Urusan	Indikator Kinerja	Pernjelasan atau Formulasi Perhitungan
		----- x 100% Jumlah tenaga kerja
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ----- x 100% Jumlah Perusahaan
	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ----- x 100% Jumlah pencaker yang terdaftar
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD ----- x 100% Jumlah seluruh belanja langsung APBD
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi ----- x 100% Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ----- x 100.000 Jumlah penduduk perempuan
Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan ----- x 100% Jumlah kebutuhan pangan
Pertanahan	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ----- x 100% Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin

Urusan	Indikator Kinerja	Pernjelasan atau Formulasi Perhitungan
	Rangka Penanaman Modal	lokasi ----- x 100% Luas izin lokasi yang diterbitkan
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; ----- x 100% Jumlah penerima tanah obyek landreform
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- x 100% jumlah pengaduan sengketa tanah garapan
Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	Total Vol sampah yang dapat ditangani ----- x 100% Total vol timbunan sampah kabupaten/kota
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota ----- x 100% usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP ----- x 100% Jumlah penduduk 17 tahun ke atas
	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA ----- x 100% Jumlah anak usia 0-17 tahun
	Persentase Penduduk usia 0-18 tahun yang Mempunyai Akte Kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir ----- x 100% Jumlah anak usia 0-18 tahun
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama

Urusan	Indikator Kinerja	Pernjelasan atau Formulasi Perhitungan
		----- x 100% Jumlah OPD
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa berkembang (per- awal tahun n)
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur
	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur
Perhubungan	Rasio Konektivitas	Rasio konektivitas Kabupaten atau Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) <ul style="list-style-type: none"> • IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) Sungai, dan jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot • IK2 (Angkutan danau penyeberangan)= lintas) dibagi kebutuhan penyeberangan

Urusan	Indikator Kinerja	Pernjelasan atau Formulasi Perhitungan
		<p data-bbox="970 251 1393 326">kabupaten/kota tersebut) Keterangan:</p> <p data-bbox="922 393 1262 431">IK1 (Angkutan Jalan)</p> <ul data-bbox="922 436 1393 867" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="922 436 1393 593">- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP <li data-bbox="922 598 1393 867">- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu <p data-bbox="922 899 1393 974">IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul data-bbox="922 979 1393 1535" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="922 979 1393 1173">- Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil <li data-bbox="922 1178 1393 1535">- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu <p data-bbox="922 1564 1393 1672">Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:</p> <ol data-bbox="922 1677 1393 2312" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="922 1677 1393 1996">1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) <li data-bbox="922 2001 1393 2312">2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)

Urusan	Indikator Kinerja	Pernjelasan atau Formulasi Perhitungan
		<p>3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)</p> <p>4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas:</p> <p>a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1</p> <p>b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8</p> <p>c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5</p>
	Kinerja Lalu lintas Kabupaten/kota	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota
komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah OPD
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ----- x 100% Jumlah Layanan Publik
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota ----- x 100% Jumlah penduduk

Urusan	Indikator Kinerja	Pernjelasan atau Formulasi Perhitungan
Kopertasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ----- x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan
Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Pasuruan	Realisasi (tahun N – tahun N-1) ----- x 100% Realisasi Tahun N-1
Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota ----- x 100% jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota
	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional
Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- x 100% jumlah OPD
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- x 100% jumlah OPD
Persandian	Tingkat keamanan informasi Pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100% Jumlah area penilaian

Urusan	Indikator Kinerja	Pernjelasan atau Formulasi Perhitungan
Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ----- x 100% Jumlah cagar budaya yang terdata
Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	
	indeks pembangunan literasi masyarakat	
Kearsipan	Tingkat Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	$T = (a + i + s + j) / 4$ T = tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah kabupaten/kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK

Urusan	Indikator Kinerja	Pernjelasan atau Formulasi Perhitungan
		$I = \text{tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK}$
Urusan Pilihan		
Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah total produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)
Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$
	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{luas panen}} \times 100\%$
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$
Perdagangan	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{\text{jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{jumlah potensi UTTP yang}}$

Urusan	Indikator Kinerja	Pernjelasan atau Formulasi Perhitungan
		wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota
Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n- Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) ----- x 100% Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan - Informasi produksi dan kapasitas produksi - Informasi bahan baku dan bahan penolong - Informasi bahan bakar/energy - Informasi tenaga kerja Informasi investasi
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan		
Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan

Urusan	Indikator Kinerja	Pernjelasan atau Formulasi Perhitungan
		----- x 100 % Jumlah APBD
	Rasio PAD	Jumlah PAD ----- X 100% Jumlah APBD non migas
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP
	Rasio Belanja Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures ----- X 100% jumlah belanja APBD
Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ----- X 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ----- X 100% total belanja langsung
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	
Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas ----- X 100% Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ----- X 100%

Urusan	Indikator Kinerja	Pernjelasan atau Formulasi Perhitungan
		seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ----- X 100% seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi ----- X 100% total belanja APBD dikurangi satu
	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi ----- X 100% dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu
	Manajemen Aset	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)
	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA ----- X 100% total belanja anggaran tahun sebelumnya

BAB IX

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran visi misi pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024-2026. Dalam menyusun RPD ini sudah melalui pendekatan perencanaan teknokratik, partisipatif, politis, serta top-down dan bottom-up. Untuk keberhasilan pencapaian visi, misi, dan program yang sudah disusun, pelaksanaan RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 menjadi tanggung jawab bersama baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dunia usaha/swasta, maupun masyarakat.

Dengan adanya Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, maka ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Bupati/Wakil Bupati Pasuruan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama periode kepemimpinan Lima tahun berkewajiban untuk mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 dengan menggerakkan secara Optimal semua potensi Daerah yang dibantu oleh Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan ;
2. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 serta Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPD dengan Renstra PD ;
3. Dalam hal pelaksanaan program prioritas yang dapat didanai selain dana yang bersumber dari APBD maupun APBN dimungkinkan untuk didanai melalui skema kerjasama dengan Badan Usaha, *Public Private Partnership* atau melalui CSR (*Coorporate Social Responsibility*);
4. Penjabaran lebih lanjut RPD Tahun 2024 - 2026 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan (Renja-PD);
5. RKPD Kabupaten Pasuruan harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat ;

6. Dalam Rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPD tahun 2024 – 2026 maka perlu dilakukan Pengendalian dan Evaluasi sebagai berikut; evaluasi kinerja dilakukan oleh masing-masing-Pimpinan Perangkat Daerah;
 1. Kepala Bappeda Kabupaten Pasuruan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana ;
 2. Kepala Bappeda Kabupaten Pasuruan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana ;
7. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPD, maka RPD dapat direvisi sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI PASURUAN

ttd.

M. IRSYAD YUSUF



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN